



RPJMD BONDOWOSO 2018-2023

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 1 TAHUN 2019

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018-2023





**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso terpilih perlu dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bondowoso dan diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c, Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

11. Undang-Undang...

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

18. Peraturan...

18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
23. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 157);

27. Peraturan...

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 39);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 7 Seri E);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 9 Seri E);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
10. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, yang selanjutnya disebut Forkopimda, adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

11. Kecamatan...

11. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso.
13. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga/PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
14. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
15. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
16. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

17. Evaluasi...

17. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
20. Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati.
21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJPN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
26. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat dengan RKP, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

27. Prioritas...

27. Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan mempertimbangkan hal penting lainnya.
28. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
30. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
31. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS, adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
32. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
33. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
34. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
35. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

36. Rencana...

36. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
37. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati serta target pembangunan nasional.
38. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
39. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
40. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
41. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
42. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
43. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.
44. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
45. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

46. Prioritas...

46. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
47. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
48. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
49. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
50. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
51. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran, hasil, dampak.
52. Keluaran adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil dapat terwujud.
53. Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
54. Dampak adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil beberapa program.
55. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
56. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

57. Rencana...

57. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
58. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPPLH, adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
59. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat dengan KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
60. Sistem Informasi Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SIPD, adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
61. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
62. Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya adalah Daerah otonom yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
63. Hari adalah hari kerja.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan daerah sebagai landasan atau pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 3...

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN;
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH;
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;
BAB IX PENUTUP.

- (2) Isi beserta uraian RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
- kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
- kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - hasil rencana pembangunan daerah.
- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Bappeda.

Pasal 5...

Pasal 5

Bappeda dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - b. terjadi perubahan kebijakan yang mendasar;
 - c. sisa masa berlaku RPJMD tidak kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat RPJMD 2023-2028 belum tersusun, penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bondowoso dan RPJMD Provinsi Jawa Timur serta mengacu pada RPJMN.

BAB VI...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018-2023

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setelah Kepala Daerah dilantik, diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dinyatakan bahwa: “Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik”.

RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 disusun selain berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Bondowoso, juga memperhatikan keselarasannya dengan dokumen RTRW, mengintegrasikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD dalam RPJMD, Keselarasan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur serta RPJMN.

Ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD yaitu pendekatan proses dan pendekatan substantif. Pendekatan proses meliputi pendekatan politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (*top-down*); dan bawah-atas (*bottom-up*). Sedangkan pendekatan substantif adalah holistik-tematik; integratif; dan spasial. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

Pendekatan...

Pendekatan partisipatif adalah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah provinsi, hingga nasional.

Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Penyusunan RPJMD dilakukan melalui berbagai tahapan yaitu : persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan Musrenbang; perumusan rancangan akhir; dan penetapan, dimana setiap tahapannya dengan melibatkan *stakeholders* dan pemangku kepentingan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5...

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR



LAMPIRAN

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 1 TAHUN 2019
TANGGAL 25 MARET 2019**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN 2018 – 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
2019**



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas kehendaknya semata maka dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 dapat tersusun tepat waktu. Penyusunan RPJMD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dokumen RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 disusun sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan yang mencakup penyempurnaan Rancangan Teknokratik RPJMD, penjabaran visi dan misi Kepala Daerah, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan program prioritas pembangunan daerah, perumusan program perangkat daerah dan kajian terhadap lingkungan hidup strategis yang selanjutnya dituangkan dalam gambaran kondisi umum, gambaran keuangan daerah, permasalahan serta isu strategis daerah, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah, serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 telah memperhatikan keselarasan dengan arah dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur, serta sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, beserta program strategis nasional yang tertuang dalam RPJMN, yang selanjutnya menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), APBD, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah dan merupakan tolok ukur kinerja Kepala Daerah.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bondowoso sehingga arah pembangunan dan target-target kinerja yang telah ditetapkan harus dipahami dan menjadi ukuran bagi setiap pembangunan yang akan dilakukan.

Bondowoso, Maret 2019

BUPATI BONDOWOSO



SALWA ARIFIN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-6
1.4 Maksud dan Tujuan	I-11
1.5 Sistematika Penulisan	I-11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi	II-1
2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis	II-2
2.1.1.3 Topografi.....	II-2
2.1.1.4 Geologi	II-3
2.1.1.5 Hidrologi	II-4
2.1.1.6 Klimatologi	II-4
2.1.1.7 Penggunaan Lahan	II-5
2.1.1.8 Demografi	II-7
2.1.1.9 Potensi Pengembangan Wilayah	II-11
2.1.1.10 Wilayah Rawan Bencana	II-24
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-27
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II-43
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II-43
2.3.1.1 Pendidikan	II-43
2.3.1.2 Kesehatan	II-50
2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-54
2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-60
2.3.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-61
2.3.1.6 Sosial	II-63
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II-66
2.3.2.1 Tenaga Kerja	II-66
2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-70
2.3.2.3 Pangan	II-71
2.3.2.4 Pertanahan	II-72
2.3.2.5 Lingkungan Hidup	II-72



2.3.2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-74
2.3.2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-75
2.3.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-77
2.3.2.9	Perhubungan	II-79
2.3.2.10	Komunikasi dan Informatika	II-79
2.3.2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-80
2.3.2.12	Penanaman Modal	II-81
2.3.2.13	Kepemudaan dan Olahraga	II-81
2.3.2.14	Statistik	II-83
2.3.2.15	Persandian	II-84
2.3.2.16	Kebudayaan	II-84
2.3.2.17	Perpustakaan	II-84
2.3.2.18	Kearsipan	II-86
2.3.3	Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-87
2.3.3.1	Pertanian	II-87
2.3.3.2	Pariwisata	II-93
2.3.3.3	Perdagangan	II-95
2.3.3.4	Perindustrian	II-96
2.3.3.5	Transmigrasi	II-97
2.3.3.6	Kelautan dan Perikanan	II-97
2.3.4	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II-98
2.4	Aspek Daya Saing Daerah	II-106
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD	III-2
3.1.2	Neraca Daerah	III-4
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-11
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran	III-12
3.2.2	Analisis Pembiayaan	III-13
3.3	Kerangka Pendanaan	III-13
3.3.1	Proyeksi Pendapatan dan Belanja	III-19
3.3.2	Penghitungan Kerangka Pendanaan	III-20
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	IV-1
4.1	Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.2	Isu Strategis	IV-5
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1	Visi	V-1
5.2	Misi	V-2
5.2.1	Misi 1 : Membangun kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor unggulan serta menggerakkan ekonomi kerakyatan	V-3
5.2.2	Misi 2 : Melestarikan lingkungan sebagai keunggulan kompetitif	V-3



5.2.3 Misi 3 : Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	V-4
5.2.4 Misi 4 : Mewujudkan pemerintahan yang jujur, adil, amanah, partisipatif dan inovatif	V-4
5.2.5 Misi 5 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul	V-4
5.3 Tujuan dan Sasaran	V-5
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1
6.1 Strategi	VI-1
6.2 Arah Kebijakan	VI-5
6.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah	VI-9
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VIII-1
8.1 Indikator Kinerja Utama	VIII-1
8.2 Indikator Kinerja Kunci	VIII-1
8.3 Indikator Kinerja Daerah	VIII-1
BAB IX PENUTUP	IX-1
9.1 Pedoman Transisi	IX-1
9.2 Kaidah Pelaksanaan	IX-2



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bondowoso Keadaan Tahun 2017	II-2
Tabel 2.2	Klasifikasi Ketinggian Tempat Menurut Kecamatan Keadaan Tahun 2017	II-3
Tabel 2.3	Luas Wilayah Menurut Karakteristik Tanah	II-4
Tabel 2.4	Luas Wilayah Menurut Peruntukannya (Ha) Tahun 2013 – 2017	II-5
Tabel 2.5	Kawasan Lindung di Kabupaten Bondowoso	II-6
Tabel 2.6	Arahan Rencana Pemanfaatan Lahan Kabupaten Bondowoso Sampai Dengan 2031	II-7
Tabel 2.7	Jumlah Penduduk, Kepadatan dan Sex Rasio Kabupaten Bondowoso Tahun 2013-2017 (dalam jiwa)	II-7
Tabel 2.8	Penduduk Kabupaten Bondowoso Menurut Kecamatan Tahun 2017	II-8
Tabel 2.9	Komposisi Jumlah Penduduk Kabupaten Bondowoso Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2017 (dalam jiwa)	II-9
Tabel 2.10	Komposisi Penduduk Bondowoso Menurut Kecamatan Tahun 2017	II-10
Tabel 2.11	Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Dianut di Kabupaten Bondowoso Tahun 2017	II-11
Tabel 2.12	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Kabupaten Bondowoso Tahun 2013-2017	II-11
Tabel 2.13	Kawasan Strategis Kabupaten Bondowoso	II-19
Tabel 2.14	Kejadian Bencana di Kabupaten Bondowoso Tahun 2013-2017	II-26
Tabel 2.15	Nilai dan Kontribusi Lapangan Usaha dalam PDRB Tahun 2013-2017 ADHK Tahun 2010 Kabupaten Bondowoso	II-30
Tabel 2.16	Nilai dan Kontribusi Lapangan Usaha dalam PDRB Tahun 2013-2017 ADHB Kabupaten Bondowoso	II-31
Tabel 2.17	Perkembangan Kontribusi Lapangan Usaha dalam PDRB Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)	II-32
Tabel 2.18	Perkembangan PDRB Kabupaten Bondowoso Tahun 2013-2017 ADHB dan ADHK (Dalam Juta)	II-33
Tabel 2.19	Pertumbuhan Kontribusi Lapangan Usaha dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2013-2017	II-33
Tabel 2.20	Rata-Rata Laju Indeks Implisit Tahun 2013-2017 Kabupaten Bondowoso	II-35
Tabel 2.21	PDRB Perkapita Tahun 2013-2017 Kabupaten Bondowoso	II-35



Tabel 2.22	Gini Rasio Kabupaten Bondowoso Tahun 2013-2017	II-36
Tabel 2.23	Jumlah dan Persentase, P1, P2 dan Garis Kemiskinan Kabupaten Bondowoso Tahun 2013-2017	II-36
Tabel 2.24	Angka Harapan Hidup Tahun 2013-2017 Kabupaten Bondowoso	II-38
Tabel 2.25	Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2013-2017 Kabupaten Bondowoso	II-39
Tabel 2.26	Tingkat Kesempatan Kerja di Kabupaten Bondowoso Tahun 2013-2017	II-39
Tabel 2.27	Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 - 2017	II-40
Tabel 2.28	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Tahun 2013 - 2017	II-42
Tabel 2.29	Skor PPH Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 - 2017	II-42
Tabel 2.30	Perkembangan PAUD, TK dan RA Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 – 2017	II-43
Tabel 2.31	Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Tahun 2013-2017 (%)	II-43
Tabel 2.32	Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (%) Tahun 2015 - 2017	II-44
Tabel 2.33	Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2013-2017 Kabupaten Bondowoso	II-45
Tabel 2.34	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Tahun 2013-2017 Kabupaten Bondowoso	II-45
Tabel 2.35	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Tahun 2017 Menurut Kecamatan Kabupaten Bondowoso	II-46
Tabel 2.36	Angka Putus Sekolah Tahun 2013-2017 Kabupaten Bondowoso	II-46
Tabel 2.37	Angka Kelulusan Tahun 2013 - 2017 Kabupaten Bondowoso	II-46
Tabel 2.38	Angka Transisi Tahun 2013 - 2017 Kabupaten Bondowoso	II-47
Tabel 2.39	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 – 2017	II-47
Tabel 2.40	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Bondowoso Tahun 2017	II-48
Tabel 2.41	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 - 2017	II-48
Tabel 2.42	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan Tahun 2017	II-49
Tabel 2.43	Perkembangan Lembaga Kursus dan Bimbingan Tahun 2013 - 2017 Kabupaten Bondowoso	II-50
Tabel 2.44	Kualifikasi Guru jenjang SD dan SMP Berpendidikan S.1 dan D.IV Tahun 2013-2017	II-50
Tabel 2.45	Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2013-2017 Kabupaten Bondowoso	II-51



Tabel 2.46	Rasio Posyandu (%) Tahun 2013 – 2017	II-51
Tabel 2.47	Rasio Sarana Prasarana Kesehatan (%) Tahun 2013- 2017	II-51
Tabel 2.48	Rasio Tenaga Kesehatan Tahun 2013 – 2017	II-51
Tabel 2.49	Sarana Kesehatan Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 - 2017	II-52
Tabel 2.50	Tenaga Kesehatan Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 – 2017	II-52
Tabel 2.51	Tenaga Kesehatan RSUD Dr. H. Koesnadi Bondowoso Tahun 2013 – 2017	II-52
Tabel 2.52	Capaian Kinerja Kesehatan Tahun 2013 – 2017	II-53
Tabel 2.53	Kondisi Jalan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 – 2017	II-55
Tabel 2.54	Kondisi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 – 2017	II-55
Tabel 2.55	Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 – 2017	II-56
Tabel 2.56	Jumlah Jaringan Irigasi Kondisi Baik di Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 - 2017	II-56
Tabel 2.57	Luasan Baku Sawah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 – 2017	II-57
Tabel 2.58	Kinerja Air Bersih dan Sanitasi Tahun 2013-2017	II-57
Tabel 2.59	Pelayanan Air Bersih Perkotaan oleh PDAM Tahun 2013 – 2017	II-58
Tabel 2.60	Capaian Kinerja Penataan Ruang Tahun 2013-2017	II-58
Tabel 2.61	RTH Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Bondowoso Tahun 2017	II-59
Tabel 2.62	Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2013 - 2017 Kabupaten Bondowoso	II-60
Tabel 2.63	Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Tahun 2013 - 2017 Kabupaten Bondowoso	II-60
Tabel 2.64	Perkembangan Jumlah Pelanggan Listrik Tahun 2013 - 2017	II-61
Tabel 2.65	Capaian Kinerja Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2013 – 2017	II-62
Tabel 2.66	Jumlah Pol PP, Linmas, Pos Kamling dan Ketaatan Masyarakat Terhadap Perda Tahun 2013 – 2017 Kabupaten Bondowoso	II-63
Tabel 2.67	Pembinaan LSM, Orpol, Pemuda dan LSM Tahun 2013 – 2017 Kabupaten Bondowoso	II-63
Tabel 2.68	Perkembangan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2013 - 2017 Kabupaten Bondowoso	II-63
Tabel 2.69	Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2013 - 2017 Kabupaten Bondowoso	II-64
Tabel 2.70	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2017	II-65
Tabel 2.71	Rasio Sengketa Ketenagakerjaan Tahun 2013 - 2017	II-67
Tabel 2.72	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2013 – 2017 Kabupaten Bondowoso	II-67



Tabel 2.73	Capaian Kinerja Ketenagakerjaan Tahun 2013-2017	II-67
Tabel 2.74	Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2013-2017	II-71
Tabel 2.75	Perkembangan Kinerja Pangan Tahun 2013 - 2017	II-71
Tabel 2.76	Ketersediaan Bahan Pangan (dalam Ton) Tahun 2013 - 2017	II-72
Tabel 2.77	Kondisi Lingkungan Hidup Tahun 2013 - 2017 Kabupaten Bondowoso	II-73
Tabel 2.78	Jumlah Lahan Kritis dan Penyediaan Bibit Tanaman Kehutanan Tahun 2013 – 2016	II-73
Tabel 2.79	Pelayanan Administrasi Kependudukan (Lembar) Tahun 2013 – 2017 Kabupaten Bondowoso	II-74
Tabel 2.80	Persentase Penduduk ber-KTP dan ber-Akta Tahun 2013 - 2017 Kabupaten Bondowoso	II-74
Tabel 2.81	Realisasi Perekaman e-KTP Tahun 2017 Kabupaten Bondowoso	II-74
Tabel 2.82	Pencapaian Kinerja Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Tahun 2013 - 2017	II-75
Tabel 2.83	Perkembangan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 - 2017	II-76
Tabel 2.84	Capaian Kinerja Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Tahun 2013 - 2017	II-76
Tabel 2.85	Capaian Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2013-2017	II-77
Tabel 2.86	Peserta KB Aktif dan Jenis Alat Kontrasepsi Tahun 2013 - 2017 Kabupaten Bondowoso	II-79
Tabel 2.87	Banyaknya PUS dan Pencapaian Peserta KB Aktif Tahun 2013 - 2017	II-79
Tabel 2.88	Jumlah Rasio Ijin Trayek Tahun 2013 - 2017	II-79
Tabel 2.89	Perkembangan Komunikasi dan Informatika Tahun 2013 - 2017	II-80
Tabel 2.90	Perkembangan Koperasi, LKM dan UKM Tahun 2013 – 2017	II-80
Tabel 2.91	Nilai Investasi di Kabupaten Bondowoso 2014-2017	II-81
Tabel 2.92	Capaian Kinerja Kepemudaan Tahun 2013-2017	II-82
Tabel 2.93	Capaian Kinerja Olah Raga Tahun 2013-2017	II-83
Tabel 2.94	Capaian Kinerja Kebudayaan Tahun 2013-2017	II-85
Tabel 2.95	Perkembangan Perpustakaan Tahun 2013 - 2017	II-86
Tabel 2.96	Perkembangan Sistem Administrasi Kearsipan Tahun 2013 - 2017	II-86
Tabel 2.97	Perkembangan Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen dan Arsip Daerah Tahun 2013 - 2017	II-87
Tabel 2.98	Struktur Ekonomi Kabupaten Bondowoso dan Kontribusinya terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (%) Tahun 2013 – 2017	II-87
Tabel 2.99	Peranan Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kategori Pertanian, Peternakan dan Kehutanan (%) Tahun 2013 – 2017	II-88



Tabel 2.100	Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Pertanian Tahun 2013 - 2017	II-88
Tabel 2.101	Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Perkebunan Tahun 2013 – 2016	II-91
Tabel 2.102	Populasi, Produksi Ternak dan Tingkat Konsumsi Masyarakat Tahun 2013 - 2017	II-92
Tabel 2.103	Luas Areal dan Produksi Tanaman Tebu Di Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 – 2016	II-92
Tabel 2.104	Luas Areal dan Produksi Tanaman Tembakau Di Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 – 2017	II-93
Tabel 2.105	Perkembangan Luas HMT dan Kelahiran Hasil IB Tahun 2013 - 2017	II-93
Tabel 2.106	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Nusantara) Tahun 2013 – 2017 di Kabupaten Bondowoso	II-94
Tabel 2.107	Kondisi Pasar Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 - 2017	II-95
Tabel 2.108	Perkembangan Ekspor (Milyar) Tahun 2013 - 2017	II-95
Tabel 2.109	Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Serta Wirausaha Tahun 2013 - 2017	II-95
Tabel 2.110	Perkembangan Industri di Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 - 2017	II-96
Tabel 2.111	Perkembangan Transmigrasi Tahun 2013 - 2017	II-97
Tabel 2.112	Luas Areal, Produksi Perikanan Budidaya, Perairan Umum dan Benih Ikan Tahun 2013 – 2017	II-97
Tabel 2.113	Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2016-2017	II-99
Tabel 2.114	Realisasi Pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2017	II-101
Tabel 2.115	Realisasi Pencapaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2017	II-103
Tabel 2.116	Realisasi Pencapaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2017	II-104
Tabel 2.117	Realisasi Pencapaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2017	II-104
Tabel 2.118	Realisasi Pencapaian SPM Sosial Tahun 2014-2017	II-105
Tabel 2.119	Perkembangan Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Tindak Pidana Tahun 2013-2017 (kejadian)	II-107
Tabel 2.120	Komposisi Jumlah Penduduk Kabupaten Bondowoso Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2013-2017 (dalam jiwa)	II-108
Tabel 3.1	Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2013 – 2017 Kabupaten Bondowoso	III-5
Tabel 3.2	Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2013-2017	III-7
Tabel 3.3	Analisis Rasio Keuangan Tahun 2013 – 2017	III-11
Tabel 3.4	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Tahun 2013-2017	III-14
Tabel 3.5	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2013 – 2017	III-14
Tabel 3.6	Defisit Riil Anggaran Tahun 2013-2017	III-15

x



Tabel 3.7	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2013-2017	III-15
Tabel 3.8	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2013-2017	III-16
Tabel 3.9	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019-2023	III-21
Tabel 3.10	Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama	III-25
Tabel 3.11	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 – 2023	III-26
Tabel 3.12	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 – 2023	III-26
Tabel 5.1	Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Bondowoso	V-7
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Bondowoso	VI-2
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bondowoso	VI-8
Tabel 6.3	Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Bondowoso	VI-10
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 – 2023	VII-2
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan	VII-3
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bondowoso	VIII-2
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Bondowoso	VIII-4
Tabel 8.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Bondowoso	VIII-5



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan RPJPD dengan RPJMD Kabupaten Bondowoso	I-6
Gambar 1.2	Hubungan RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD	I-8
Gambar 2.1	Peta Batas Administrasi Kabupaten Bondowoso	II-1
Gambar 2.2	Komposisi Jumlah Penduduk Kabupaten Bondowoso Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2013-2017 (dalam persen)	II-9
Gambar 2.3	Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Bondowoso	II-12
Gambar 2.4	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bondowoso	II-12
Gambar 2.5	Peta Kawasan Pertanian Kabupaten Bondowoso	II-13
Gambar 2.6	Peta Kawasan Pariwisata Kabupaten Bondowoso	II-14
Gambar 2.7	Peta Kawasan Industrial Estate Kabupaten Bondowoso	II-15
Gambar 2.8	Peta Kawasan Hutan Produksi Kabupaten Bondowoso	II-16
Gambar 2.9	Peta Potensi Pertambangan dan Sumber daya Bumi Kabupaten Bondowoso	II-17
Gambar 2.10	Peta Kawasan Permukiman Kabupaten Bondowoso	II-20
Gambar 2.11	Peta Rencana Jaringan Jalan Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031	II-22
Gambar 2.12	Peta Rawan Bencana Kabupaten Bondowoso	II-26
Gambar 2.13	Perkembangan Kontribusi Lapangan Usaha dalam PDRB Tahun 2013-2017 ADHK Tahun 2010 Kabupaten Bondowoso (Persen)	II-28
Gambar 2.14	Perkembangan Nilai Lapangan Usaha dalam PDRB Tahun 2013-2017 ADHK Tahun 2010 Kabupaten Bondowoso (Juta)	II-28
Gambar 2.15	Laju Pertumbuhan Riil PDRB (Persen) Tahun 2013-2017	II-34
Gambar 2.16	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bondowoso Tahun 2013-2017	II-37
Gambar 2.17	Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Tahun 2013-2017 Kabupaten Bondowoso	II-38
Gambar 5.1	Keterkaitan Visi dan Misi Pembangunan Tahun 2018-2023	V-6

BUPATI & WAKIL BUPATI BONDOWOSO



DRS. KH. SALWA ARIFIN
&
H. IRWAN BACHTIAR RACHMAT, SE, M.SI

KAWALI HINDUNG

BONDOWOSO

KABUPATEN JEN





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengangkatan Bupati Bondowoso Drs. KH. Salwa Arifin untuk masa bakti tahun 2018-2023 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-5845 tanggal 5 September 2018 dan Pengangkatan Wakil Bupati Bondowoso H. Irwan Bachtiar Rachmat, SE, M.Si berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-5846 tanggal 5 September 2018. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso dilaksanakan pada tanggal 24 September 2018.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan

pembangunan nasional. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergi dengan perencanaan pemerintah yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.

Penyusunan RPJMD juga berpedoman pada RPJP Nasional, RPJM Nasional, hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD tahun sebelumnya, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), berbagai kebijakan pembangunan nasional seperti SDGs, pengentasan kemiskinan, dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dokumen hasil studi, dan hasil kajian lainnya. RPJMD memuat gambaran umum wilayah, kemampuan pengelolaan keuangan daerah, masalah dan isu strategis, visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan, strategi, arah kebijakan, dan program serta pendanaan pembangunan daerah serta dibagian akhir menyajikan indikator kinerja daerah. Penyusunan rencana pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional disamping harus memperhatikan adanya regulasi. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan.



Tahapan proses penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 diawali dengan Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2018-2023 sebelum penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Penyusunan rancangan awal RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 dimulai sejak Bupati dan Wakil Bupati dilantik. Penyusunan Rancangan awal RPJMD dilakukan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan yang mencakup penyempurnaan Rancangan Teknokratik RPJMD, penjabaran visi dan misi Kepala Daerah, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan program pembangunan daerah, perumusan program perangkat daerah dan kajian terhadap lingkungan hidup strategis sebagaimana amanat pada pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya rancangan awal RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 dibahas untuk memperoleh kesepakatan, bersama perangkat daerah dan para pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik dan disempurnakan. Tahapan berikutnya rancangan awal RPJMD diajukan kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD. Selanjutnya melakukan konsultasi kepada Gubernur Jawa Timur untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJMD. Kemudian rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan saran penyempurnaan dari Gubernur Jawa Timur. Pada tahapan selanjutnya, rancangan awal

RPJMD yang telah disempurnakan menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal Renstra perangkat daerah tahun 2018-2023.

Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah terhadap rancangan RPJMD dilakukan dalam Forum Musrenbang yang menghasilkan kesepakatan sebagai bahan perumusan menjadi rancangan akhir RPJMD. Selanjutnya dilakukan penyampaian raperda tentang RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 kepada DPRD Kabupaten Bondowoso disertai lampiran rancangan akhir RPJMD, untuk dibahas dalam rangka memperoleh kesepakatan bersama DPRD dan ditetapkan menjadi Perda tentang RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023, merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sekaligus merupakan dokumen perencanaan yang mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat serta merupakan perwujudan dari kehendak masyarakat Kabupaten Bondowoso yang berkaitan erat dengan pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya yaitu tahun 2014-2018. Dokumen RPJMD Kabupaten Bondowoso tahun 2018-2023 selaras dengan RPJPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025 sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 tahun 2010 pada tahapan ketiga (2015-2019) dan keempat (2020-2024) serta Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031, dengan memperhatikan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Dokumen RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 selanjutnya dijabarkan dalam perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Bondowoso.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dokumen RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 disusun atas dasar landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional, yaitu :

1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor



- 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan



- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
25. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
 26. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015– 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan;
 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 39);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 7 Seri E);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 9 Seri E);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah



Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 8);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 12);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017 Nomor 5).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dengan periode perencanaan sebelumnya, dokumen RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 disusun dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka



Gambar 1.1 Hubungan RPJPD dengan RPJMD Kabupaten Bondowoso



Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025, pada tahapan ketiga (2015-2019) dan keempat (2020-2024), serta Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031, pada tahap II (Tahun 2017-2021) dan tahap III (Tahun 2022-2026). Hubungan RPJPD dan RPJMD disajikan sebagaimana gambar 1.1.

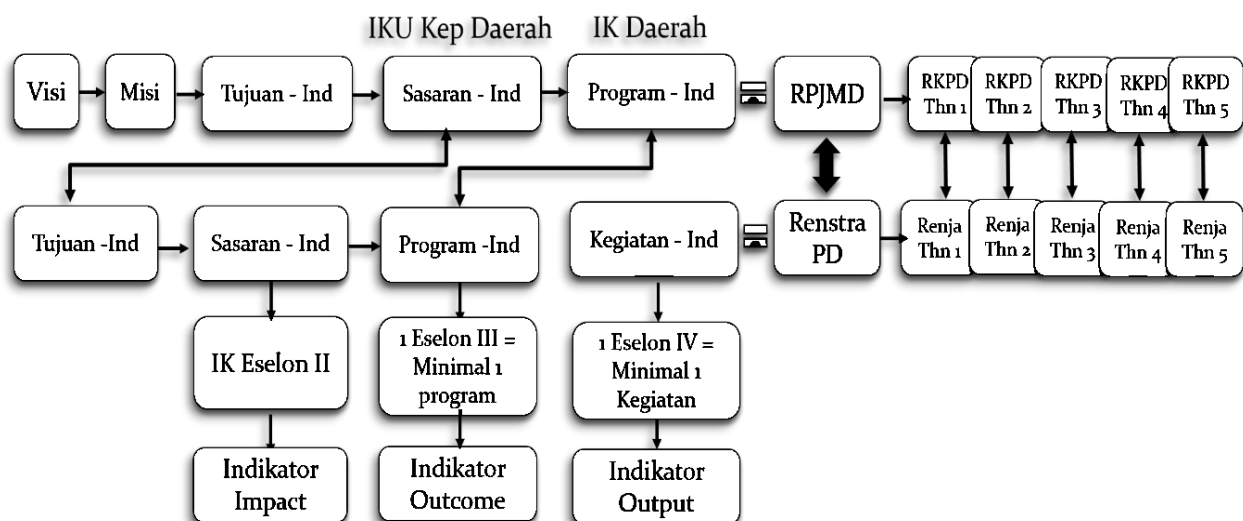
Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 telah memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, serta Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Dokumen RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 adalah sebagai dokumen kerangka dasar perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya secara integratif dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Bondowoso. Hubungan RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD disajikan sebagaimana gambar 1.2.

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 pada tanggal 8 Januari 2015, terdapat 3 (tiga) dokumen sebagai lampirannya, yaitu: (i) Buku I dengan judul: "Agenda Pembangunan Nasional", (ii) Buku II dengan judul: "Agenda Pembangunan Bidang", dan (iii) Buku III dengan judul: "Agenda Pembangunan Wilayah". Visi yang ditetapkan adalah Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong dengan 7 Misi yang diemban yaitu :



Gambar 1.2 Hubungan RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD



1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan dirumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut NAWA CITA yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas

korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sector strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dokumen rancangan awal RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 telah memperhatikan penyesuaian terhadap RPJM Nasional melalui sasaran utama atau sasaran pokok pembangunan nasional 2015-2019 yaitu :

1. Sasaran makro
2. Sasaran pembangunan manusia dan masyarakat
3. Sasaran pembangunan sektor unggulan
4. Sasaran dimensi pemerataan
5. Sasaran pembangunan wilayah dan antar wilayah
6. Sasaran politik, hukum, pertahanan dan keamanan

B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3



Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 memiliki visi : **“Terwujudnya Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak”**, dengan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi.
3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang.
4. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
5. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.

C. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bondowoso 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bondowoso memiliki visi **“Mewujudkan Kabupaten Bondowoso sebagai kawasan agribisnis yang maju, religius, adil dan makmur”**, dengan misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Tata Kelola Lingkungan Hidup Secara Seimbang dan Berkelanjutan.
- b. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi berbasis agribisnis yang berdaya saing dan mandiri secara berkelanjutan.
- c. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi secara lebih merata dan berkeadilan.
- d. Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan berakhlak mulia.

- e. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup.
- f. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang handal, mandiri, inovatif, berdaya saing dan berwawasan lingkungan.
- g. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang berbudaya kerja transparan, partisipatif, bersih, akuntabel, profesional, dan unggul.

Kebijakan dan agenda jangka panjang diatas dengan memperhatikan kebijakan pendanaan direncanakan dilakukan melalui beberapa tahapan jangka menengah, meliputi:

1. RPJMD I (2005-2009) Fokus Penguatan Kelembagaan dan Sarana Agribisnis
2. RPJMD II (2010 -2014) Fokus Peningkatan Produksi dan Nilai tambah
3. RPJMD III (2015 -2019) Fokus Optimalisasi Keterkaitan Industri Pengolahan dan pertanian
4. RPJMD IV (2020 -2024) Fokus Penguatan Pasar dan Peningkatan Kualitas Produk
5. RPJMD V (2025) Fokus Lepas Landas sebagai Kawasan Agribisnis Maju

Untuk RPJMD Kabupaten Bondowoso periode Tahun 2018-2023 secara substantif yang dapat dijadikan acuan adalah pada tahapan ketiga (2015-2019) yaitu optimalisasi keterkaitan industri pengolahan dan pertanian, dan tahapan keempat (2020-2024) yaitu penguatan pasar dan peningkatan kualitas produk.

D. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2031.

Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur yang dapat



dijadikan rujukan adalah Kabupaten Bondowoso masuk kedalam wilayah pengembangan (WP) Jember dan sekitarnya dengan fungsi sebagai kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pendidikan, kesehatan dan pariwisata.

Perkembangan Perkotaan Bondowoso beserta pelayanan dan infrastrukturnya diharapkan dapat mendukung kegiatan perekonomian wilayah sekitarnya. Keberadaan jalan rencana bebas hambatan di utara dan Jalur Lintas Selatan (JLS) diharapkan dapat mendorong pengembangan kegiatan WP Jember dan PKL perkotaan Bondowoso, yang diarahkan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan dan pariwisata.

Arahan pengembangan untuk Kabupaten Bondowoso antara lain :

- a. Pengembangan rencana Jalan Strategis Nasional Rencana pada ruas Garduatak-Silapak, dan Silapak-Paltuding.
- b. Pengembangan Jalan Provinsi (Kolektor Primer) pada ruas Bondowoso-Jember, Bondowoso-Situbondo, dan Bondowoso-Buduan.
- c. Pengembangan Terminal tipe B di Terminal Bondowoso.
- d. Konservasi Jalur Kereta Api dan reaktivasi moda transportasi pada jalur Panarukan-Situbondo-Bondowoso-Kalisat-Jember.
- e. Prasarana Energi yaitu Pengembangan gardu induk 150/20 kV.
- f. Rencana pengembangan energi alternatif dari Energi Air, Energi Angin, dan Energi Panas Bumi (Belawan-Ijen).
- g. Pengembangan Agropolitan Regional Ijen (Bondowoso-Banyuwangi-Situbondo-Jember).

- h. Rencana Pengembangan Jaringan Irigasi meliputi Waduk Taman, Embung Pace, Embung Gubri, Embung Klabang, Waduk Tegalampel, Waduk Karanganyar, Waduk Sukokerto, Waduk Botolinggo, Embung Blimbing dan Embung Krasak.

E. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso 2011-2031

Penataan ruang wilayah dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu: Tahap I (Tahun 2011 - 2016), Tahap II (Tahun 2017 - 2021), Tahap III (Tahun 2022 - 2026), dan Tahap IV (Tahun 2027 - 2031), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031 yang dapat dijadikan pedoman adalah Tahap II (Tahun 2017 - 2021) dan Tahap III (Tahun 2022 - 2026), pada pengembangan kawasan strategis dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan kawasan strategis dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat meliputi :

- a. Pengembangan wilayah berbasis konsep agropolitan.
- b. Pengendalian kawasan pertanian secara ketat.
- c. Pengembangan kawasan pariwisata terpadu berbasis potensi alam.
- d. Penataan pusat pertumbuhan ekonomi yang menunjang sistem pemasaran hasil pertanian, pelayanan pariwisata dan pelayanan dasar masyarakat.
- e. Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang mendukung sistem agropolitan dan sistem pariwisata.
- f. Pengelolaan wilayah yang memperhatikan daya dukung lahan,



- daya tampung kawasan & aspek konservasi sumber daya alam.
- g. Pengembangan kawasan budidaya dengan menumbuhkan kearifan lokal dan memperhatikan aspek ekologis.
 - h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

F. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sekitar.

RPJMD dan RTRW kabupaten sekitar yang menjadi rujukan keselarasan dalam RPJMD Kabupaten Bondowoso adalah pembangunan kawasan perbatasan, seperti pengembangan kawasan Ijen yang merupakan satu kesatuan dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), agropolitan Ijen, pengembangan kawasan industri pada perbatasan Bondowoso-Jember dan Bondowoso-Situbondo, utamanya pada peningkatan infrastruktur, perekonomian, dan sumber daya manusia.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 adalah:

1. Memberikan rancangan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, menjamin keberlanjutan pembangunan (*sustainability development*) dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, sesuai kaidah penyusunan kebijakan perencanaan melalui integrasi rancangan teknokratik serta penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, strategi, serta arah kebijakan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

2. Memberikan acuan terhadap tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dalam penyusunan Renstra perangkat daerah dalam perspektif meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah.
3. Menciptakan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan secara komprehensif serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, pada pelaksanaan pembangunan antar daerah, antar wilayah, maupun antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan di Kabupaten Bondowoso secara berkelanjutan.

Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 2018-2023, dalam rangka kelanjutan tahapan pembangunan dalam kerangka pembangunan jangka panjang daerah, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Bondowoso.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika rancangan awal RPJMD Tahun 2018-2023 Kabupaten Bondowoso disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN,

berisi latar belakang penyusunan rancangan awal RPJMD 2018-2023, landasan hukum, hubungan



antar dokumen, sistematika penulisan, serta penjelasan maksud dan tujuan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH,

memuat gambaran umum kondisi daerah ditinjau dari: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH,

yang memuat gambaran kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH,

berisi gambaran permasalahan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Bondowoso yang menjadi dasar penentuan isu-isu strategis jangka menengah 2018-2023.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,

berisi penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH,

berisi strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, arah kebijakan dari setiap strategi terpilih serta program prioritas dalam pencapaian visi dan misi.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH,

memuat seluruh program yang dirumuskan dalam renstra

perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif, Perangkat Daerah penanggungjawab berdasarkan urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH,

berisi indikator kinerja daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi.

BAB IX PENUTUP

SERAH TERIMA RANCANGAN TEKNOKRATIK



**RPJMD KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN 2018-2023**

RAN TEK





BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

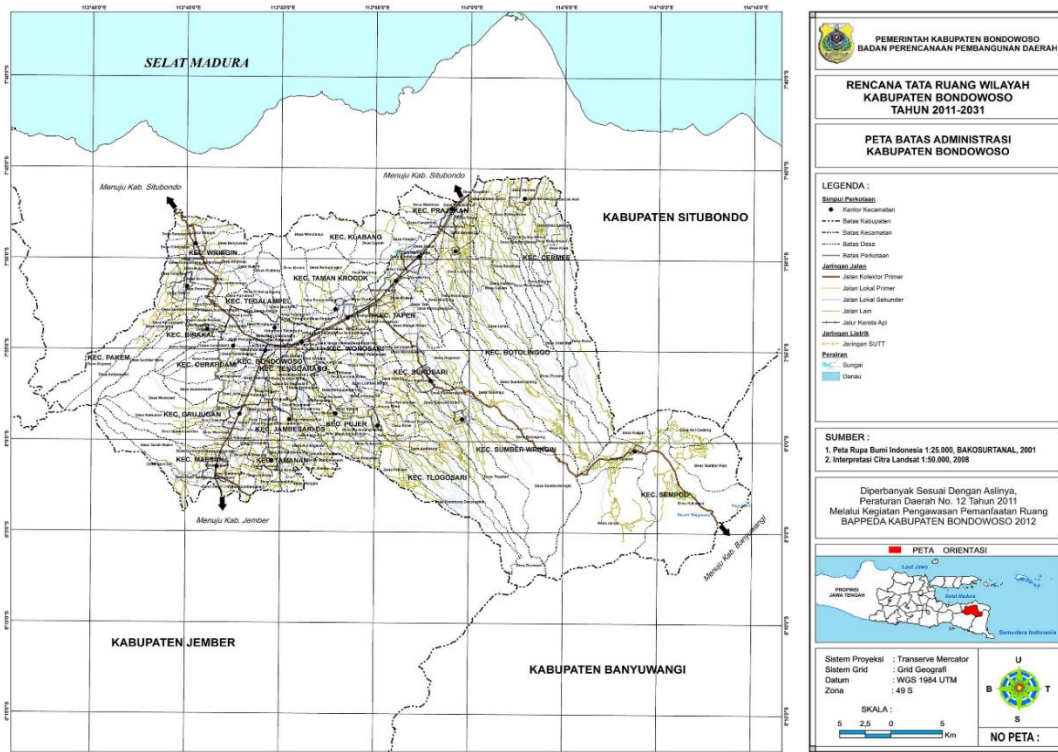
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Bondowoso memiliki batas-batas wilayah dengan kabupaten sekitarnya sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Situbondo
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Jember
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo.

Wilayah Kabupaten Bondowoso tidak dilalui jalur utama Pantura yang menghubungkan Banyuwangi – Situbondo – Probolinggo – Pasuruan – Surabaya, juga tidak dilalui jalur selatan yang menghubungkan Banyuwangi – Jember – Lumajang – Probolinggo – Pasuruan – Surabaya. Kabupaten Bondowoso hanya dilalui jalur provinsi antara Situbondo – Bondowoso – Jember atau sebaliknya. Kabupaten Bondowoso juga merupakan satu-satunya kabupaten di daerah tapal kuda yang tidak memiliki garis pantai.

Batas administrasi wilayah Kabupaten Bondowoso disajikan sebagaimana Gambar 2.1. Luas wilayah Kabupaten Bondowoso mencapai 1.560,10 Km² atau sekitar 3,26% dari luas total Provinsi Jawa Timur, yang terbagi menjadi 23 kecamatan, 10 kelurahan, 209 desa dan 1.412 dusun (Tabel 2.1).



Gambar 2.1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Bondowoso



Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bondowoso Keadaan Tahun 2017

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Jarak Dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten	Luas Wilayah (Ha)
1	Maesan	Maesan	-	12	62	13	5.608,30
2	Grujugan	Taman	-	11	49	7	7.444,70
3	Tamanan	Tamanan	-	9	52	15	2.815,10
4	Jambesari DS	Jambesari	-	9	41	10	3.010,50
5	Pujer	Kejayan	-	11	80	12	3.988,90
6	Tlogosari	Pakisan	-	10	98	17	11.091,70
7	Sukosari	Sukosari Lor	-	4	31	22	2.317,27
8	Sbr. Wringin	Sbr. Wringin	-	6	71	27	13.794,73
9	Tapen	Tapen	-	9	52	16	5.704,20
10	Wonosari	Wonosari	-	12	72	10	4.227,20
11	Tenggarang	Tenggarang	1	11	69	2	2.579,50
12	Bondowoso	Dabasah	7	4	19	2	2.315,80
13	Curahdami	Curahdami	1	11	111	3	5.028,59
14	Binakal	Binakal	-	8	51	7	3.903,91
15	Pakem	Patemon	-	8	47	18	6.208,20
16	Wringin	Wringin	-	13	92	16	5.801,00
17	Tegalampel	Sekarputih	1	7	54	2	3.702,75
18	Taman Krocok	Taman	-	7	47	12	5.300,35
19	Klabang	Klabang	-	11	49	19	9.120,40
20	Botolinggo	Lumutan	-	8	100	25	12.741,45
21	Ijen	Sempol	-	6	38	74	20.720,00
22	Prajejan	Prajejan lor	-	7	34	24	5.664,55
23	Cermee	Cermee	-	15	93	32	12.920,40
Jumlah			10	209	1.412		156.010,00

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso dalam Kabupaten Bondowoso Dalam Angka (BPS), 2018

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu kabupaten yang berada di bagian timur Provinsi Jawa Timur berjarak sekitar 200 km dari ibukota Provinsi (Surabaya). Secara geografis wilayah Kabupaten Bondowoso terletak pada koordinat antara 113°48'10" - 113°48'26" BT dan 7°50'10" - 7°56'41" LS.

Seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso merupakan daratan, dimana 44,4% wilayahnya merupakan pegunungan dan perbukitan, 30,7% merupakan dataran rendah, dan 24,9% merupakan dataran tinggi. Kabupaten Bondowoso memiliki tingkat kemiringan lereng yang bervariasi. Kondisi

datar dengan kemiringan 0°-2° seluas 190,83 km² (12,23%), landai 2°-15° seluas 568,17 km² (36,42%), agak curam 15°-40° seluas 304,70 km²(19,53%) dan sangat curam diatas 40° seluas 496,40 km² (31,82%).

2.1.1.3 Topografi

Ditinjau dari ketinggiannya, hamparan wilayah Kabupaten Bondowoso berada pada ketinggian rata-rata sekitar 253 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan puncak tertinggi 3.287 meter dpl dan terendah 54 meter dpl. Hamparan tersebut dikelilingi oleh gugusan Pegunungan Kendeng Utara dengan puncak Gunung Raung, Gunung Ijen dan Gunung



Widodaren disebelah Timur, Pegunungan Hyang dengan puncak Gunung Argopuro, Gunung Kilap dan Gunung Krincing di sebelah Barat, sedangkan di sebelah Utara terdapat Gunung Alas Sereh, Gunung Biser dan Gunung Bendusa. Secara rinci ketinggian wilayah dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Klasifikasi Ketinggian Tempat Menurut Kecamatan Keadaan Tahun 2017

No.	Kecamatan	Tinggi Di Atas Permukaan Laut (M dpl)*
1	Maesan	386,00
2	Grujugan	357,00
3	Tamanan	345,00
4	Jambesari DS	345,00
5	Pujer	371,00
6	Tlogosari	475,00
7	Sukosari	529,00
8	Sbr. Wringin	700,00
9	Tapen	184,00
10	Wonosari	253,00
11	Tenggarang	240,00
12	Bondowoso	253,00
13	Curahdami	247,00
14	Binakal	238,00
15	Pakem	500,00
16	Wringin	502,00
17	Tegalampel	240,00
18	Taman Krocok	225,00
19	Klabang	162,00
20	Botolinggo	128,00
21	Ijen	1.130,00
22	Prajeakan	54,00
23	Cermee	116,00

Sumber : BPS Kabupaten Bondowoso (Podes 2014), 2018

Daerah terluas berada pada ketinggian 100-500 m dpl atau 49,11% dari keseluruhan luas, ketinggian >1.000 m dpl seluas 27,87%, ketinggian 500-1.000 m dpl seluas 19,75% dan daerah tersempit berada pada ketinggian 0 – 100 m dpl atau 3,27%.

2.1.1.4 Geologi

Menurut tinjauan geologis, stratigrafi wilayah Kabupaten Bondowoso disusun oleh batuan endapan vulkanik hasil gunung api kwarter 21,6% dan hasil gunung api kwarter muda 62,8%, yang banyak mengandung leusit, tufa dan batupasir (5,6%), endapan alluvium 8,5% dan fasies sedimen miosen 1,5% dengan komposisi ukuran dominan lempung, lanau, lanau berpasir dan pasir halus ($\pm 96,9\%$) dan ukuran pasir kasar, kerikil, kerakal dan bongkah ($\pm 3,1\%$).

Kabupaten Bondowoso merupakan rangkaian zona fisiografis gunung api kwarter yang dikelompokkan dalam satu grup tersendiri sebagai Komplek Pegunungan Ringgit – Buser (Van Bemmelen, 1949), dengan dominasi endapan hasil aktifitas gunung api kwarter muda dan sedimentasi dataran *intermountain* (*Recent Volcanic Formation*).

Sebagian besar wilayah Kabupaten Bondowoso memiliki jenis tanah Regosol yaitu seluas 78.286 Ha yang tersebar di 23 Kecamatan. Jenis tanah ini luasan terbesar terdapat di Kecamatan Tlogosari mencapai seluas 11.092 Ha. Tanah regosol merupakan tanah berbutir kasar berasal dari material vulkanik gunung berapi yang mengendap berupa abu dan pasir vulkanik yang merupakan areal pertanaman padi, tebu, palawija, tembakau, dan sayuran.

Sedangkan jenis tanah Andosol 32.859 Ha tersebar di 10 Kecamatan dengan luasan terbesar terdapat di Kecamatan Ijen seluas 16.811 Ha, vegetasi yang tumbuh berupa tanaman bambu, dan rumput liar.

Untuk jenis tanah Mediteran terdapat seluas 11.230 Ha tersebar di Kecamatan Tapen, Wringin, Tegalampel, Taman Krocok, Klabang, Botolinggo, Prajeakan dan Cermee. Tanah mediteran berwarna antara merah sampai kecoklatan yang merupakan hasil pelapukan batuan kapur keras dan batuan sedimen. Jenis tanah mediteran merupakan bagian lahan subur di daerah kapur daripada jenis tanah kapur yang lainnya. Tanaman yang



tumbuh berupa palawija, tembakau, jati, dan jambu mente.

Jenis tanah Gromosol terdapat seluas 510 Ha hanya di wilayah Kecamatan Cermee. Gromosol adalah jenis tanah berwarna kelabu hitam berbentuk material halus berlempung. Jenis tanah ini bersifat subur dan merupakan areal pertanaman padi, jagung, kedelai, tebu, tembakau, dan jati.

Jenis tanah Litosol terdapat di Kecamatan Curahdami (1.800 Ha), Pakem (1.950 Ha) dan Klabang (1.150 Ha), Jenis tanah ini berbatu-batu dan berupa areal pertanaman rumput ternak, palawija, dan tanaman keras.

Sedangkan untuk jenis tanah Latosol tersebar di 12 Kecamatan, total seluas 28.224 Ha yang sebagian besar terdapat di Kecamatan Grujungan, Klabang, Cermee dan Sumber Wringin. Jenis tanah ini berwarna merah hingga kuning, sehingga sering disebut tanah merah, banyak mengandung zat besi dan aluminium dengan kandungan bahan organik yang rendah sampai sedang dan pH berkisar antara 4,5-5,5. Areal pertanaman yang tersebar berupa padi, palawija, sayuran, buah-buahan, dan kopi. Luas wilayah menurut karakteristik tanah disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Luas Wilayah Menurut Karakteristik Tanah

No	Jenis Tanah	Luas	
		Km ²	%
1	Litosol	49,00	3,14
2	Regosol	782,87	50,18
3	Andosol	328,59	21,06
4	Gromosol	5,10	0,33
5	Mediteran	112,30	7,20
6	Latosol	282,24	18,09
Jmlah		1.560,10	100,00

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso dalam Kabupaten Bondowoso Dalam Angka (BPS), 2015

2.1.1.5 Hidrologi

Wilayah Kabupaten Bondowoso yang berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Sampean seluas 1.347 km² mencakup hampir seluruh Wilayah Kabupaten Bondowoso dan sebagian kecil Wilayah Kabupaten Situbondo, sebagian besar wilayah tersebut berbukit dan bergunung-gunung.

Pola aliran sungai dendritik terbentuk akibat geomorfologi perbukitan yang sangat dominan mempengaruhi kondisi wilayah Kabupaten Bondowoso. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada yaitu DAS Sampean, DAS Deluwang dan DAS Banyuputih (Kalipahit) dengan aliran sungai meliputi Sungai Sampean yang membelah wilayah Kabupaten Bondowoso, Sungai Deluwang di sisi barat, dan Sungai Telaga di sisi timur.

Dalam wilayah DAS Sampean tersebut terdapat dua bendung, yaitu Bendung Sampean Baru (SB) di bagian hulu (Kabupaten Bondowoso) dan Bendung Sampean Lama (SL) di bagian hilir (Kabupaten Situbondo). Selain itu terdapat 342 bendung kecil dan 14 embung lapangan, baik di hulu maupun di hilir Bendung SB.

2.1.1.6 Klimatologi

Wilayah kabupaten Bondowoso memiliki suhu yang relatif sejuk berkisar antara 27°C hingga 30°C dengan suhu rata-rata 28°C. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 62% hingga 86%. Selama periode tahun 2013-2017, perubahan iklim global yang terjadi mengakibatkan perbedaan tingkat curah hujan yang signifikan, rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2013 dengan rata-rata 8.424 mm/tahun dan curah hujan terendah terjadi pada tahun 2015 dengan curah hujan 1.240,41 mm/tahun. Sedangkan rata-rata hari hujan tertinggi terjadi pada tahun 2013 dengan rata-rata hari hujan 249 hari/tahun dan hari hujan terendah terjadi pada tahun 2015 dengan rata-rata hari hujan 65 hari/tahun.



2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan di Kabupaten Bondowoso untuk sawah beririgasi seluas 32.351 Ha atau 20,74% luas wilayah, luas lahan kering sebesar 43.159 Ha (27,66%), sehingga luas areal potensial yang sudah dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dalam pengembangan pertanian seluas 75.510 Ha atau 48,40% dari luas wilayah Kabupaten Bondowoso, sementara seluas 55.811 Ha atau 35,77% merupakan kawasan hutan (hutan sejenis, semak belukar dan rimba). Kondisi eksisting pemanfaatan penggunaan lahan di Kabupaten Bondowoso tersaji dalam Tabel 2.4.

Perda Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031 mengamanatkan pengelolaan kawasan lindung untuk memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya dan memberikan jaminan terhadap kelestarian lingkungan hidup didalamnya. Perlindungan terhadap kawasan lindung di Kabupaten Bondowoso menjadi prioritas, mengingat lokasi lahan kritis yang masih relatif cukup luas, termasuk pada beberapa lereng pegunungan yang merupakan perlindungan bagi kawasan di bawahnya dari ancaman longsor dan banjir.

Rencana Tata Ruang tersebut juga mengamanatkan untuk memberikan

Tabel 2.4 Luas Wilayah Menurut Peruntukannya (Ha) Tahun 2013 – 2017

No.	Jenis Penggunaan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Permukiman	7.330,91	7.330,91	7.330,91	7.330,91	7.330,91
2	Industri	28,08	28,08	28,08	28,08	28,08
3	Persawahan Irigasi	32.351,79	32.351,79	32.351,79	32.351,79	32.351,79
4	Tanah Kering	43.158,61	43.158,61	43.158,61	43.158,61	43.158,61
5	Kebun Campur	296,42	296,42	296,42	296,42	296,42
6	Perkebunan	8.856,69	8.856,69	8.856,69	8.856,69	8.856,69
7	Hutan	55.811,02	55.811,02	55.811,02	55.811,02	55.811,02
8	Rawa/danau/waduk	51,48	51,48	51,48	51,48	51,48
9	Padang rumput/tanah kosong	3.185,72	3.185,72	3.185,72	3.185,72	3.185,72
10	Sungai/saluran irigasi	767,57	767,57	767,57	767,57	767,57
11	Jalan darat	773,81	773,81	773,81	773,81	773,81
12	Tanah tandus/rusak	3.399,46	3.399,46	3.399,46	3.399,46	3.399,46
13	Lain-lain	-	-	-	-	-
Jumlah		156.010,00	156.010,00	156.010,00	156.010,00	156.010,00

Sumber: Kabupaten Bondowoso Dalam Angka (BPS), 2014-2018

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Kawasan lindung di Kabupaten Bondowoso berdasarkan jenis kawasan disajikan dalam Tabel 2.5.

perlindungan terhadap keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya agar tidak punah sehingga memberi manfaat bagi keberlanjutan kehidupan. Kawasan Suaka Alam dan Suaka Marga Satwa merupakan kawasan yang memiliki ciri khas tertentu, mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa (memelihara spesies) serta ekosistemnya, berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan.



Tabel 2.5 Kawasan Lindung di Kabupaten Bondowoso

No.	Jenis Kawasan	Luas (Ha)	Letak
1	Taman Wisata Alam Kawah Ijen		- Kec. Ijen Desa Kalianyar
2	Cagar Alam Gending		- Kec. Ijen I Desa Kalianyar
3	Cagar Alam Kawah Ijen Merapi – Ungup-ungup		- Kec. Ijen Desa Kalianyar
4	Cagar alam Pancur Ijen I dan II		- Kec. Botolinggo Desa Sumber Canting
5	Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Hyang		- Kec.Pakem Desa Andungsari
6	Hutan Lindung KPH Bondowoso:	39.891,60	
	- Bagian Hutan Lereng Hyang	9.291,40	Kec. Maesan, Grujugan, Pakem, Curahdami
	- Bagian Hutan Gunung Ringgit	6.933,80	Kec. Klabang
	- Bagian Hutan Wonosari	16.950,90	Kec. Klabang, Sukosari, Tlogosari
	- Bagian Hutan Prajekan	6.715,50	Kec. Klabang, Prajekan, Cermee

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bondowoso dalam Kabupaten Bondowoso Dalam Angka (BPS), 2015

II
-
6

Kebijakan pembangunan di Kabupaten Bondowoso pada dasarnya secara konsisten sesuai arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso yang menekankan pada pengembangan sektor pertanian. Arahan penggunaan lahan hingga tahun 2031 telah direncanakan dengan mempertimbangkan kecenderungan kebutuhan pembangunan yang seimbang secara ekologis, dengan konsep:

1. Meningkatkan (mengembalikan) luasan kawasan lindung dan konservasi lahan melalui penanganan lahan-lahan kritis.

2. Mempertegas keberadaan kawasan-kawasan penyangga pada kawasan budidaya.
3. Meningkatkan luas persawahan irigasi melalui konversi lahan kering, tadah hujan dan setengah teknis.
4. Optimalisasi dan penataan kawasan permukiman (terbangun) yang telah ada.

Adapun rencana penggunaan lahan wilayah Kabupaten Bondowoso hingga tahun 2031 disajikan dalam Tabel 2.6.



Tabel 2.6 Arahan Rencana Pemanfaatan Lahan Kabupaten Bondowoso Sampai Dengan 2031

No	Guna Lahan	Rencana 2031	
		Luas (Ha)	Persen (%)
1	Hutan Lindung	30.674,60	19,66
2	Suaka Alam, Cagar Alam dan Suaka Margasatwa	3.772,80	2,42
3	Konservasi Mata air	340,69	0,22
4	Waduk, Sungai & Sempadan	1.356,50	0,87
5	Hutan Produksi (Perhutani)	29.160,95	18,69
6	Hutan Rakyat	15.421,20	9,88
7	Perkebunan	14.101,49	9,04
8	Pertanian Lahan Kering	17.355,50	11,12
9	Pertanian Lahan Basah (sawah)	34.118,00	21,87
10	Peternakan	158,00	0,10
11	Perikanan	48,00	0,03
12	Pertambangan	58,50	0,04
13	Industri dan Pergudangan	712,76	0,46
14	Pariwisata	43,00	0,03
15	Permukiman dan Prasarana	8.088,01	5,18
17	Lain-lain	-	-
18	Perdagangan dan Jasa	600,00	0,38
JUMLAH		156.010,00	100,00

Sumber : Perda No. 12 Tahun 2011 tentang RTRW Kab. Bondowoso 2011- 2031

2.1.1.8 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Bondowoso sampai dengan tahun 2017 mencapai 768.912 jiwa yang terdiri dari 374.476 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 394.436 jiwa berjenis kelamin

perempuan, meningkat sebesar 16.112 jiwa (2,14%) dibandingkan jumlah penduduk pada tahun 2013 yang mencapai 752.800 jiwa, laju pertumbuhan penduduk mencapai sebesar 0,68% per tahun. Adapun komposisi penduduk selama Tahun 2013 - 2017 dapat dilihat dalam Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk, Kepadatan dan Sex Rasio Kabupaten Bondowoso Tahun 2013-2017 (dalam jiwa)

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Sex	Kepadatan (jiwa/km ²)
2013	366.600	386.200	752.800	94,92	483,00
2014	368.505	388.484	756.989	94,86	485,00
2015	370.588	390.617	761.205	95,00	488,00
2016	372.603	392.491	765.094	95,00	490,41
2017	374.476	394.436	768.912	94,94	493,00

Sumber: BPS Kabupaten Bondowoso, 2014-2018



Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki, dengan rasio jenis kelamin (sex rasio) 94,94% yang berarti bahwa dalam setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 94-95 jiwa penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk Kabupaten Bondowoso terus bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dari 483 jiwa/km² di tahun 2013 menjadi 493 jiwa/km² di tahun 2017.

Jumlah populasi penduduk terbanyak mencapai 72.891 jiwa (9,48%) berada di Kecamatan Bondowoso dan jumlah populasi penduduk terkecil sebanyak 12.187 jiwa (1,58%) berada di Kecamatan Ijen. Kepadatan penduduk Kabupaten Bondowoso pada tahun 2017, berkisar 493 jiwa/km², dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Bondowoso mencapai 3.403 jiwa/km² sedangkan terendah berada di Kecamatan Ijen sebesar 56 jiwa/km².

Tabel 2.8 Penduduk Kabupaten Bondowoso Menurut Kecamatan Tahun 2017

No.	Kecamatan	Komposisi				Kepadatan (Jiwa/Km ²)
		Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Rasio Sex	
1	Maesan	23.929	24.881	48.810	96,17	760
2	Grujugan	17.974	18.628	36.602	96,49	1.013
3	Tamanan	18.543	19.226	37.769	96,45	1.276
4	Jambesari DS	17.363	18.149	35.512	95,67	1.293
5	Pujer	19.055	20.168	39.223	94,48	1.092
6	Tlogosari	22.264	23.158	45.422	96,14	497
7	Sukosari	7.321	7.876	15.197	92,95	401
8	Sumber Wringin	16.869	17.591	34.460	95,90	249
9	Tapen	16.116	17.425	33.541	92,49	690
10	Wonosari	19.397	20.479	39.876	94,72	1.139
11	Tenggarang	20.913	21.469	42.382	97,41	1.825
12	Bondowoso	35.476	37.415	72.891	94,82	3.403
13	Curahdami	16.325	16.503	32.828	98,92	764
14	Binakal	7.358	8.049	15.407	91,42	563
15	Pakem	10.479	11.234	21.713	93,28	299
16	Wringin	20.315	21.704	42.019	93,60	724
17	Tegalampel	13.162	14.120	27.282	93,22	812
18	Taman Krocok	7.927	8.548	16.475	92,74	307
19	Klabang	9.031	9.698	18.729	93,12	182
20	Botolinggo	14.200	15.041	29.241	94,41	264
21	Ijen	6.070	6.117	12.187	99,23	56
22	Prajejan	12.291	13.233	25.524	92,88	334
23	Cermee	22.098	23.724	45.822	93,15	261
JUMLAH		374.476	394.436	768.912	94,94	493

Sumber: BPS Kabupaten Bondowoso, 2018



Tabel 2.9 Komposisi Jumlah Penduduk Kabupaten Bondowoso Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2017 (dalam jiwa)

No	Struktur Umur	KOMPOSISI PENDUDUK			
		Perempuan (jiwa)	Laki-Laki (jiwa)	Jumlah (jiwa)	% Jumlah Penduduk
1	0-4	26.930	27.822	54.752	7,12
2	5-9	29.313	30.141	59.454	7,73
3	10-14	28.337	30.057	58.394	7,59
4	15-19	25.949	27.251	53.200	6,92
5	20-24	27.640	25.876	53.516	6,96
6	25-29	28.858	26.778	55.636	7,24
7	30-34	30.515	28.025	58.540	7,61
8	35-39	30.725	29.645	60.370	7,85
9	40-44	30.361	29.437	59.798	7,78
10	45-49	29.152	28.307	57.459	7,47
11	50-54	26.874	25.685	52.559	6,84
12	55-59	21.559	21.439	42.998	5,59
13	60-64	19.422	17.851	37.273	4,85
14	65+	38.801	26.162	64.963	8,45
	Jumlah	394.436	374.476	768.912	100

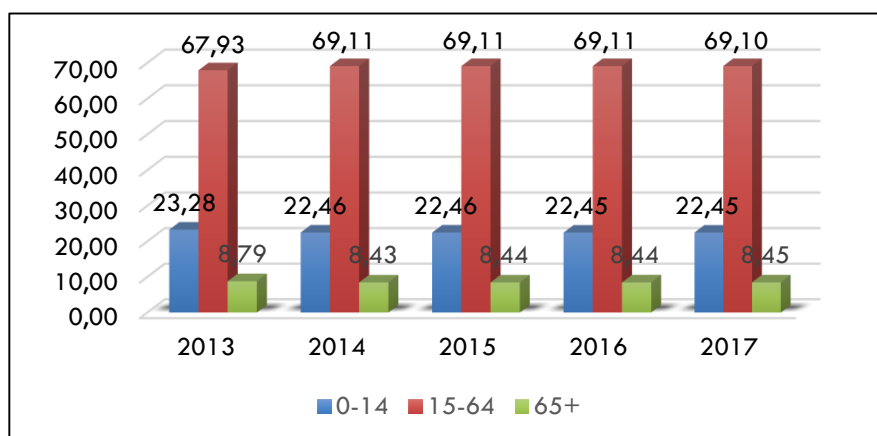
Sumber : BPS Kabupaten Bondowoso, 2018

Penduduk Kabupaten Bondowoso bila diklasifikasikan berdasar kelompok umur, sebagian besar didominasi oleh kelompok umur 15-64 tahun (usia produktif) dengan rata-rata mencapai 69,02% selanjutnya diikuti penduduk usia muda dibawah 15 tahun sebesar 19,55% dan sisanya adalah penduduk usia tua diatas 65 tahun sebesar 11,44%.

Kelompok umur 15-64 tahun (usia produktif) mencapai 69,10% mendominasi karakteristik penduduk Bondowoso. Dilihat dari jumlahnya, penduduk usia produktif mencapai sekitar 531.349 jiwa, sementara non produktif hanya 237.563 jiwa. Komposisi penduduk yang besar pada usia produktif menyebabkan angka ketergantungan penduduk diperkirakan mencapai 45 per 100 penduduk produktif, yaitu tingkat penduduk produktif yang menanggung penduduk

non produktif (usia tua dan anak-anak) akan sangat rendah.

Persentase usia produktif yang dominan merupakan potensi bagi perkembangan ekonomi ke depan yaitu tersedianya jumlah tenaga kerja yang memadai untuk berbagai sektor usaha namun apabila jumlah tenaga kerja yang besar tidak mampu terserap oleh sektor usaha maka berbagai permasalahan akan timbul yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi.



Gambar 2.2 Komposisi Jumlah Penduduk Kabupaten Bondowoso Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2013-2017 (dalam persen)

Sumber : BPS Kabupaten Bondowoso, 2014-2018



Sedangkan Penduduk Kabupaten Bondowoso menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso pada tahun 2017 mencapai 771.691 jiwa dengan jumlah Kepala keluarga mencapai 293.627 KK yang terdiri dari 389.752 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 381.939 jiwa berjenis kelamin perempuan. Rasio jenis kelamin (rasio sex) penduduk mencapai 1,02. Komposisi Penduduk Kabupaten Bondowoso tahun 2017 disajikan dalam Tabel 2.10.

Jumlah populasi penduduk terbanyak mencapai 73.821 jiwa (9,57%) berada di Kecamatan Bondowoso dan jumlah populasi penduduk terkecil sebanyak 12.490 jiwa (1,62%) berada di Kecamatan Ijen. Kepadatan penduduk Kabupaten Bondowoso pada tahun 2017, berkisar 494,6 jiwa/km², dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Bondowoso mencapai 3.446,4 jiwa/km² sedangkan terendah berada di Kecamatan Ijen sebesar 57,7 jiwa/km².

Tabel 2.10 Komposisi Penduduk Kabupaten Bondowoso Menurut Kecamatan Tahun 2017

No.	Kecamatan	Komposisi				Kepadatan (Jiwa/Km ²)
		Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Rasio Sex	
1	Maesan	23.797	22.722	46.519	1,05	724,0
2	Grujugan	18.364	17.701	36.065	1,04	997,9
3	Tamanan	18.586	18.316	36.902	1,01	1.246,7
4	Jambesari DS	18.044	17.495	35.539	1,03	1.293,7
5	Pujer	21.769	21.651	43.420	1,00	1.209,1
6	Tlogosari	25.117	24.218	49.335	1,04	540,3
7	Sukosari	7.428	7.332	14.760	1,01	389,7
8	Sumber Wringin	15.900	15.432	31.332	1,03	226,0
9	Tapen	16.475	17.003	33.478	0,97	688,8
10	Wonosari	19.842	19.584	39.426	1,01	1.126,1
11	Tenggarang	20.282	19.666	39.948	1,03	1.720,4
12	Bondowoso	36.917	36.904	73.821	1,00	3.446,4
13	Curahdami	16.766	15.768	32.534	1,06	757,0
14	Binakal	8.207	8.165	16.372	1,00	598,2
15	Pakem	13.086	12.838	25.924	1,02	356,8
16	Wringin	19.281	18.906	38.187	1,02	658,3
17	Tegalampel	13.123	12.508	25.631	1,05	763,3
18	Taman Krocok	8.223	8.034	16.257	1,02	303,2
19	Klabang	9.635	9.760	19.395	0,98	188,6
20	Botolinggo	16.263	15.662	31.925	1,04	288,4
21	Ijen	6.441	6.049	12.490	1,06	57,5
22	Prajekan	13.039	13.001	26.040	1,00	340,9
23	Cermee	23.167	23.224	46.391	0,99	264,5
JUMLAH		389.752	381.939	771.691	1,02	494,6

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017



Adapun jumlah penduduk menurut agama yang dianut berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2017 disajikan dalam Tabel 2.11.

Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Dianut di Kabupaten Bondowoso Tahun 2017

No.	Jenis Agama	Jumlah Penganut
1	Islam	766.362
2	Protestan	3.293
3	Katolik	1.340
4	Hindu	297
5	Budha	391
6	Konghucu	5
7	Kepercayaan	3
JUMLAH		771.691

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017

Berdasarkan distribusi penduduk bekerja, sektor pertanian masih menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja (56,26%). Sektor pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, pertanian hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan. Sektor perdagangan, restoran

dan hotel mampu menyerap penduduk bekerja sebesar 14,68%, Sektor industri pengolahan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 13,30%. Sektor jasa kemasyarakatan menyerap penduduk bekerja sebesar 7,66%. Jumlah penduduk bekerja menurut jenis pekerjaan disajikan pada Tabel 2.12.

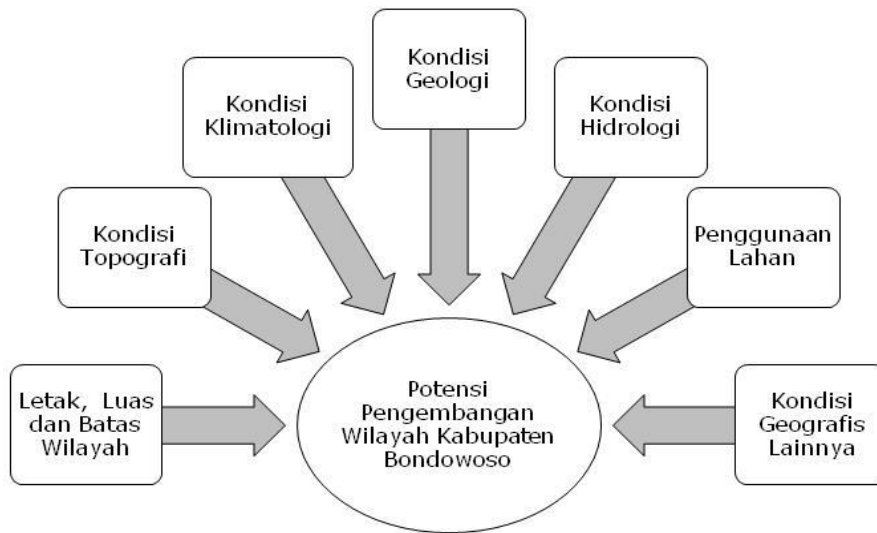
2.1.1.9 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi sumberdaya alam yang besar merupakan modal potensial untuk pembangunan di Kabupaten Bondowoso. Setiap wilayah kecamatan di Kabupaten Bondowoso memiliki potensi wilayah yang berbeda, permasalahannya adalah bagaimana potensi wilayah tersebut dapat dikelola dan dikembangkan secara optimal untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan daerah sesuai karakteristik masing-masing wilayah. Kerangka pemikiran potensi pengembangan wilayah Kabupaten Bondowoso disajikan pada Gambar 2.3.

Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Kabupaten Bondowoso Tahun 2013-2017

No	JENIS PEKERJAAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	229.171	229.760	253.217	239.739	294.673
2	Pertambangan dan Penggalian	1.549	1.553	1.712	127	156
3	Industri Pengolahan	32.679	32.763	36.108	56.408	69.333
4	Listrik, Gas dan Air	265	266	293	1.361	1.673
5	Bangunan / Konstruksi	11.069	7.272	8.014	19.648	24.150
6	Perdagangan Besar, Ecer, Rumah Makan dan Hotel	54.704	54.845	60.444	63.405	77.934
7	Angkutan, Penggudangan dan Komunikasi	18.776	18.824	20.746	10.613	13.045
8	Keuangan, Asuransi, Usaha Sewa Bangunan, Tanah dan Usaha Perusahaan	1.022	1.025	1.130	1.973	2.425
9	Jasa Kemasyarakatan	28.561	28.634	31.557	33.164	40.763
10	Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-	-	-	-
Jumlah		377.796	378.767	417.437	426.438	524.152

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso, 2017

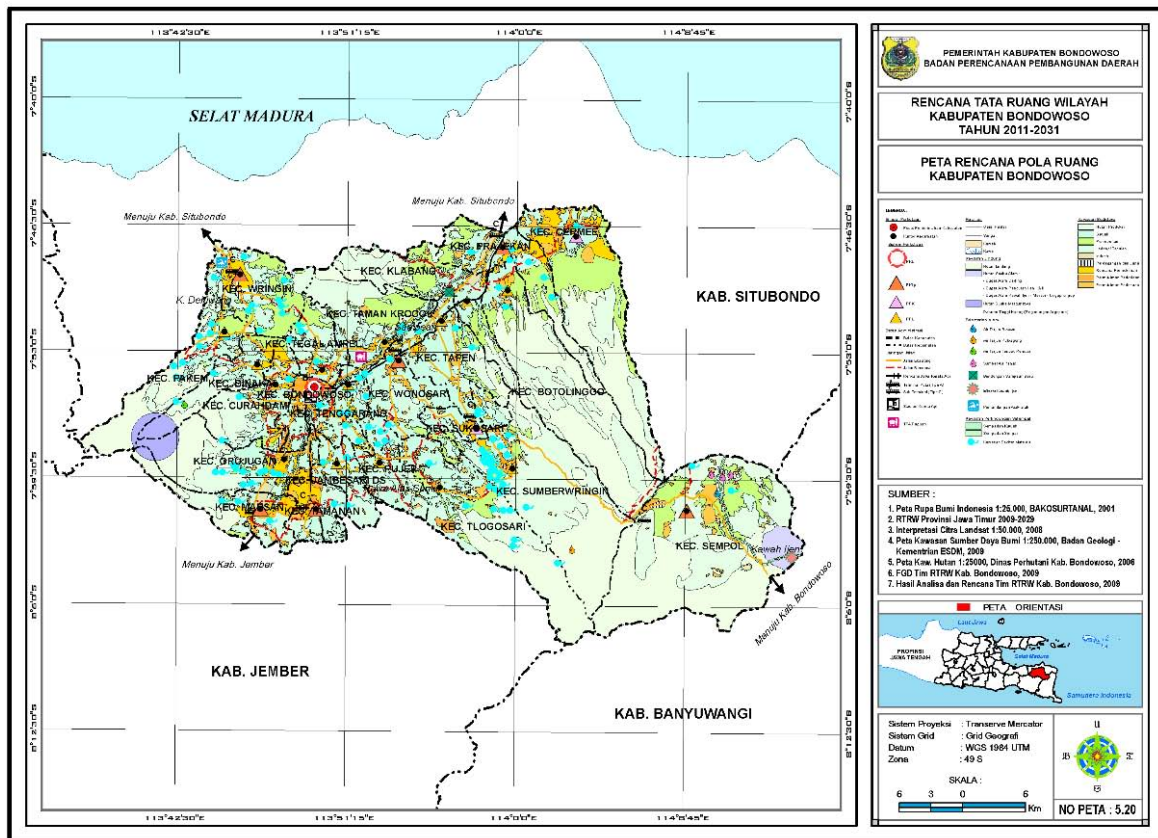


Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Bondowoso

Dengan pengelolaan potensi wilayah secara optimal maka (a) tingkat investasi meningkat, (b) tingkat produktivitas meningkat, (c) sumberdaya alam dapat dieksploitasi secara optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan, (d) kualitas sumberdaya manusia meningkat, (e) peran institusi meningkat, dan (f) ketersediaan sarana dan prasarana dasar meningkat.

Dalam rangka pengembangan potensi sumberdaya alam Kabupaten Bondowoso sesuai dengan karakteristik wilayah kecamatan, arahan peruntukan lahan menurut pola ruang dalam RTRW Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 – 2031 tergambar dalam Gambar 2.4.

II
-
12



Gambar 2.4 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bondowoso



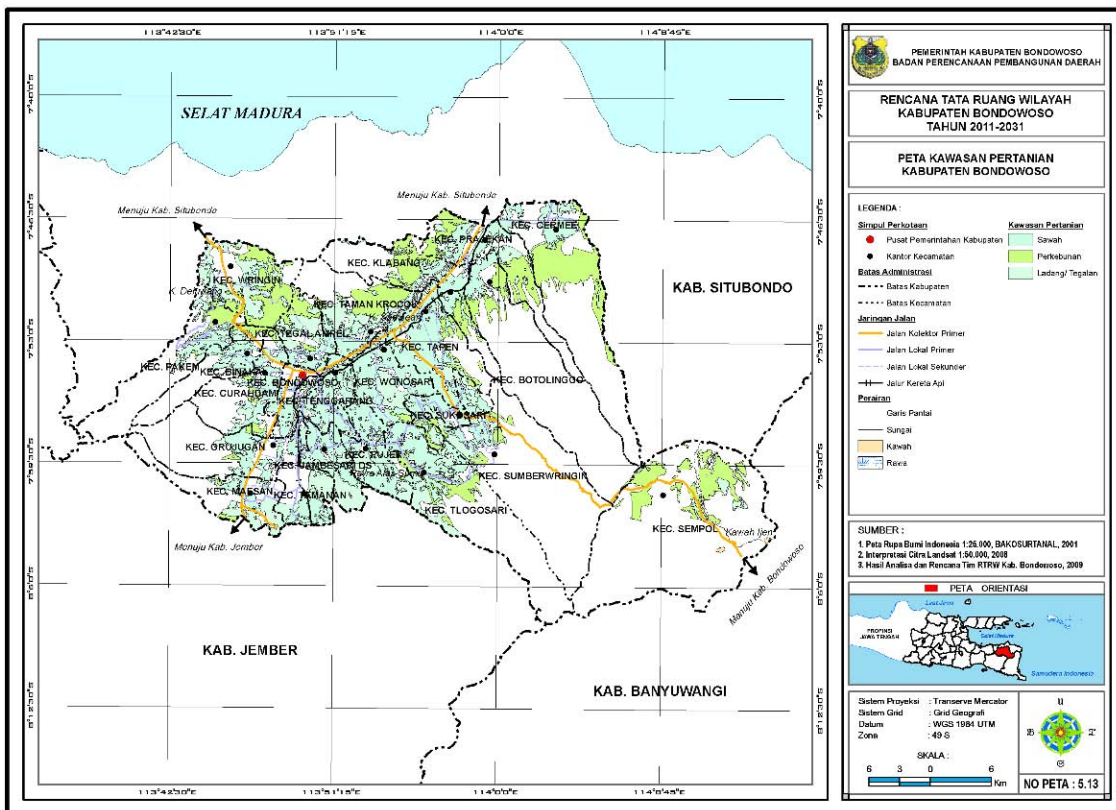
Peruntukan ruang di Bondowoso terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahan, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung geologi. Sedangkan kawasan budidaya antara lain terdiri dari:

1. Kawasan pertanian meliputi:
 - a. Kawasan agropolitan meliputi Kecamatan Ijen, Sukosari, Sumber Wringin, dan Kecamatan Tlogosari.
 - b. Kawasan pertanian lahan basah meliputi Kecamatan Binakal, Bondowoso, Botolinggo, Cerme, Curahdami, Grujugan, Jambesari Darus Sholah, Klabang, Maesan, Pakem, Pujer, Prajekan, Sukosari, Sumber Wringin, Taman Krocok, Tamanan, Tapen, Tenggarang, Tegalampel, Tlogosari, Wonosari, dan Kecamatan Wringin.

- c. Kawasan pertanian lahan kering meliputi Kecamatan Binakal, Bondowoso, Botolinggo, Cerme, Curahdami, Grujugan, Jambesari Darus Sholah, Klabang, Maesan, Pakem, Prajekan, Pujer, Sukosari, Sumber Wringin, Taman Krocok, Tamanan, Tapen, Tenggarang, Tegalampel, Tlogosari, Wonosari, dan Kecamatan Wringin.
- d. Kawasan peternakan kecil di 23 kecamatan dan kawasan peternakan besar meliputi Kecamatan Binakal, Botolinggo, Cerme, Curahdami, Grujugan, Jambesari Darus Sholah, Klabang, Maesan, Pakem, Prajekan, Pujer, Ijen, Sukosari, Sumber Wringin, Taman Krocok, Tamanan, Tapen, Tenggarang, Tegalampel, Tlogosari, Wonosari, dan Kecamatan Wringin.

Kawasan pertanian dalam RTRW Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 – 2031 tergambar dalam Gambar 2.5.

2. Kawasan perkebunan khususnya komoditas kopi, kakao, tebu, tembakau,



Gambar 2.5 Peta Kawasan Pertanian Kabupaten Bondowoso

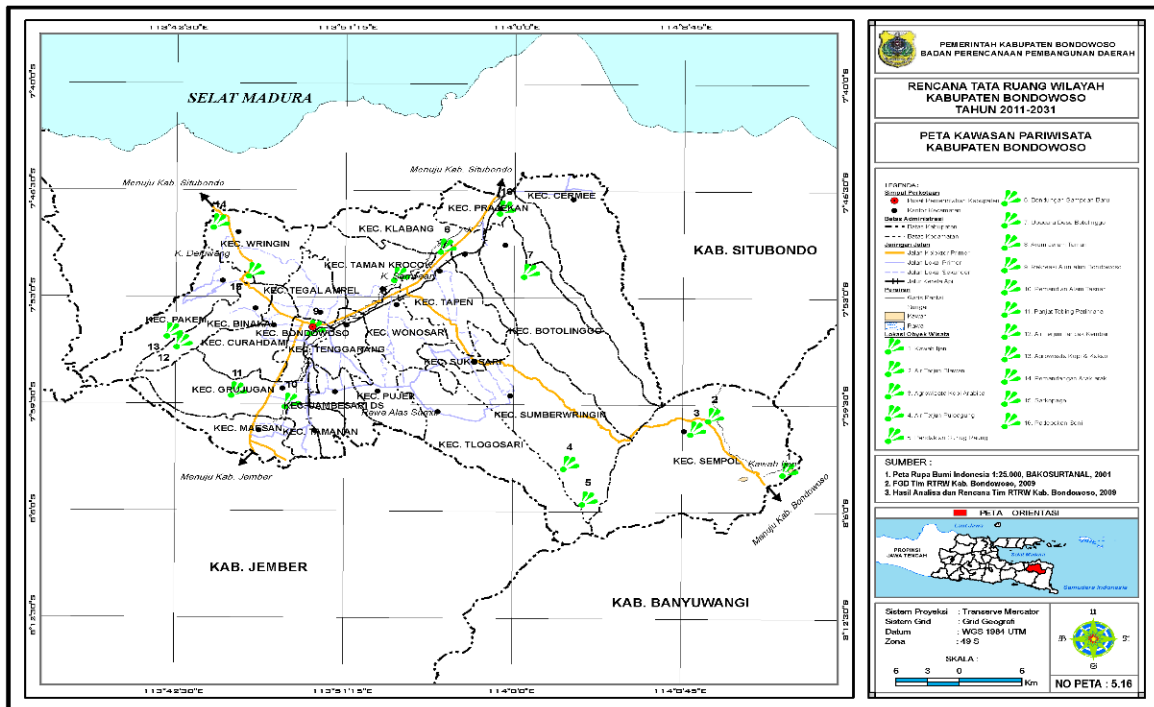


cengek, kelapa meliputi Kecamatan Bondowoso, Binakal, Curahdami, Cerme, Grujugan, Jambesari Darus Sholah, Klabang, Pakem, Pujer, Prajekan, Sukosari, Sumber Wringin, Tamanan, Tenggarang, Tegalampel, Tapen, Tlogosari, Taman Krocok, Ijen, Wringin, Maesan, dan Wonosari.

- 3. Kawasan perikanan meliputi Kecamatan Binakal, Cerme, Curahdami, Grujugan, Jambesari Darus Sholah, Klabang, Maesan, Pujer, Prajekan, Sukosari, Sumber Wringin, Tamanan, Tapen, Tenggarang, Tlogosari, dan Wonosari.

Kecamatan Prajekan, (5) Wisata kerajinan kuningan Cindogo di Kecamatan Tapen, (6) Desa wisata Blimbing di Kecamatan Klabang, (7) Desa wisata Tamanan, Kalianyar, dan Sumberkemuning di Kecamatan Tamanan, dan (8) Desa wisata Gunungsari di Kecamatan Maesan.

- b. Kawasan wisata rekreasi dengan obyek wisata alun-alun Bondowoso di Kecamatan Bondowoso.
- c. Kawasan pariwisata alam meliputi: (1) kawasan wisata terpadu Kawah Ijen - Raung dengan obyek : wisata Kawah



Gambar 2.6 Peta Kawasan Pariwisata Kabupaten Bondowoso

- 4. Kawasan pariwisata meliputi:
 - a. Kawasan pariwisata sejarah dan budaya meliputi: (1) Situs megalitikum (Kecamatan Bondowoso, Grujugan, Jambesari Darus Sholah, Maesan, Prajekan, Pujer, Tamanan, Tegalampel, Tlogosari, Wonosari, dan Kecamatan Wringin), (2) Situs Gua Buto di Kecamatan Cerme, (3) Wisata ziarah makam Ki Ronggo di Kecamatan Tegalampel, (4) Wisata budaya Padepokan Gema Buana di

Ijen, Kawah Telaga Weru dan Kawah Wurung, wisata air terjun Blawan dan gua stalagtit, wisata pemandian air panas Blawan dan pemandian Damarwulan, wisata agro di Kecamatan Ijen, Sumber Wringin, Sukosari dan Tlogosari, dan wisata Air Terjun Puloagung di Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin.

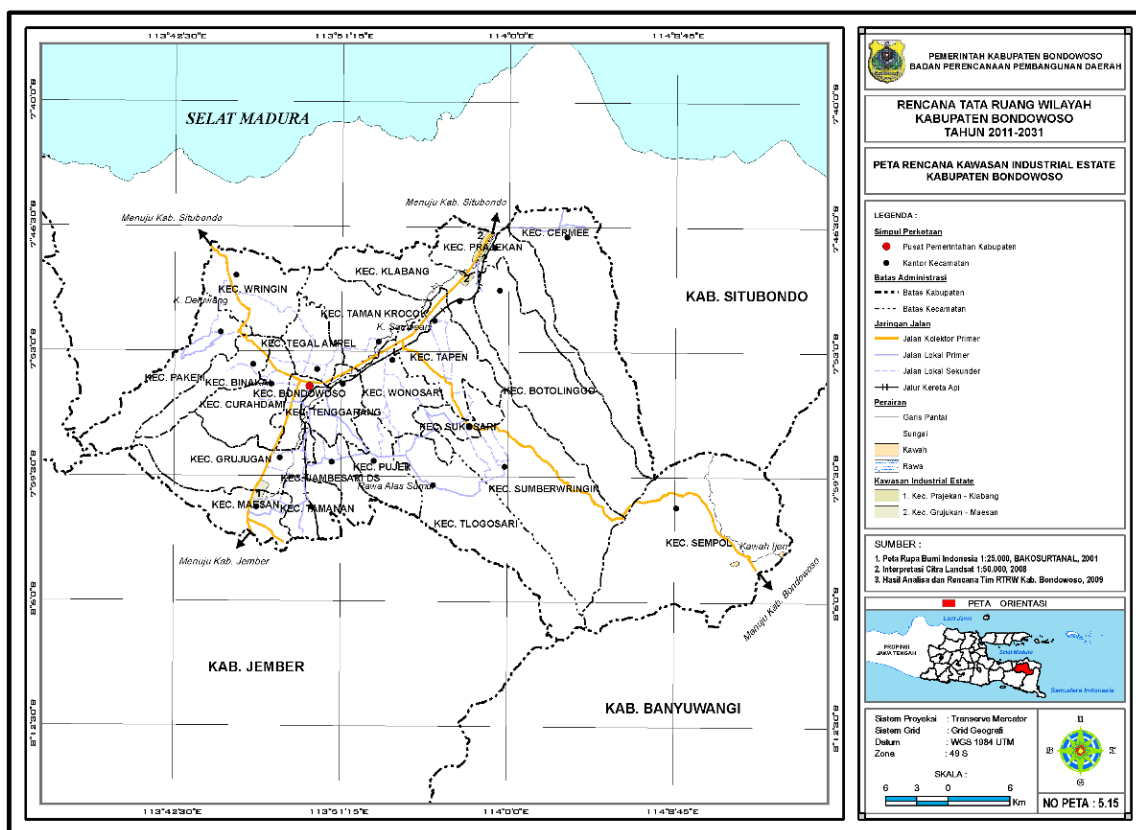
- d. Kawasan wisata terpadu Lereng Argopuro dengan obyek wisata pendakian Pegunungan Hyang atau



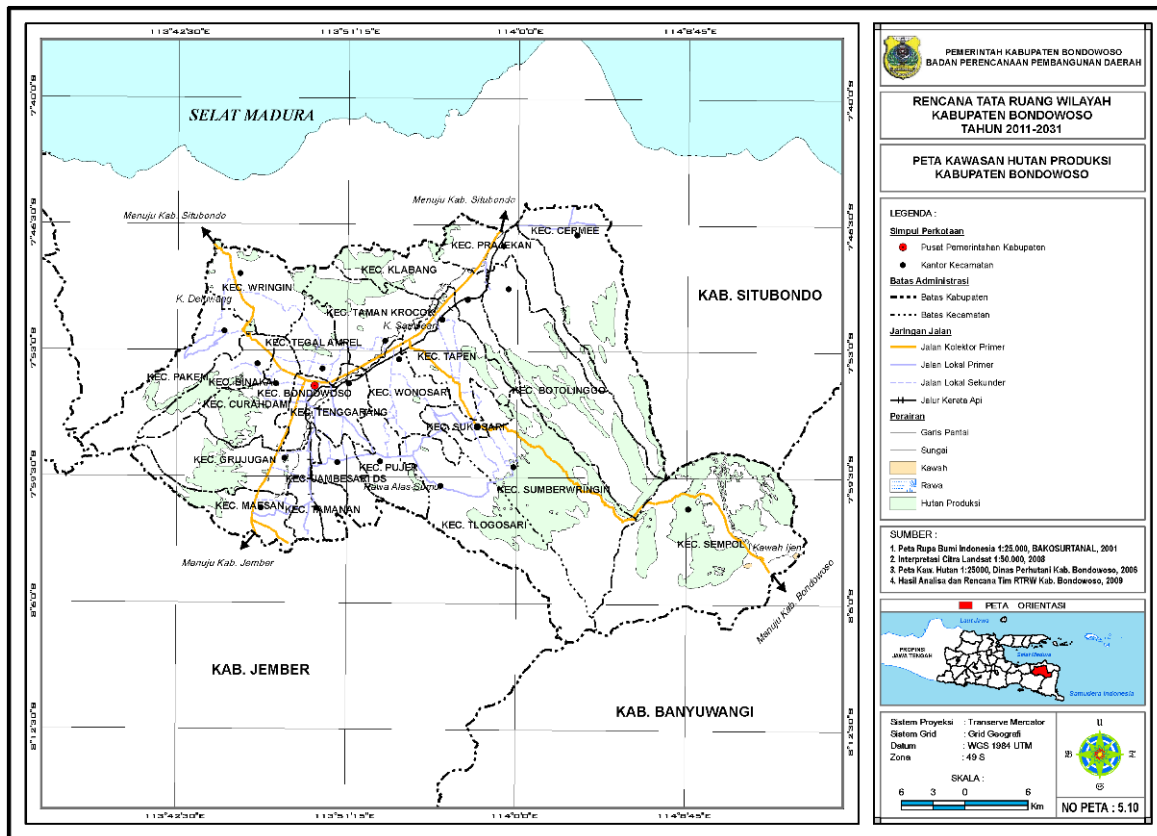
- Gunung Argopuro di Kecamatan Pakem, wisata agro Pusat Penelitian Kopi dan Kakao di Kecamatan Pakem, wisata air terjun Tancak Kembar di Kecamatan Pakem, wisata Pemandangan Arak-Arak di Kecamatan Wringin, dan wisata megalitikum Situs Batu Labeng di Kecamatan Wringin.
- e. Kawasan wisata rekreasi dengan obyek wisata Pemandian Tasnan di Kecamatan Grujungan dan wisata Bendung Sampean Baru di Kecamatan Tapen.
 - f. Kawasan wisata minat khusus dengan obyek wisata arung jeram Bosamba di Kecamatan Taman Krocok dan Tapen, kawasan wisata pendakian Gunung Raung di Kecamatan Sumber Wringin, wisata panjat tebing alam Patirana di Kecamatan Grujungan, dan wisata petualangan di Desa Solor Kecamatan Cerme.

5. Kawasan Industri meliputi:

- a. Kawasan industri terpadu industri pengolahan hasil pertanian, industri lain yang memiliki resiko pencemaran rendah dan pergudangan di Kecamatan Grujungan, Maesan dan Tamanan.
- b. Kawasan industri kimia, logam, industri lainnya dan pergudangan di Kecamatan Bondowoso, Botolinggo, Cerme, Grujungan, Klabang, Tapen, Maesan, dan Prajekan.
- c. Sentra industri sedang dan industri rumah tangga meliputi:
 - 1) Sentra industri kimia di Kecamatan Cerme, Prajekan, Botolinggo, Klabang, Tapen, Grujungan, Tamanan, Tenggarang, dan Ijen.



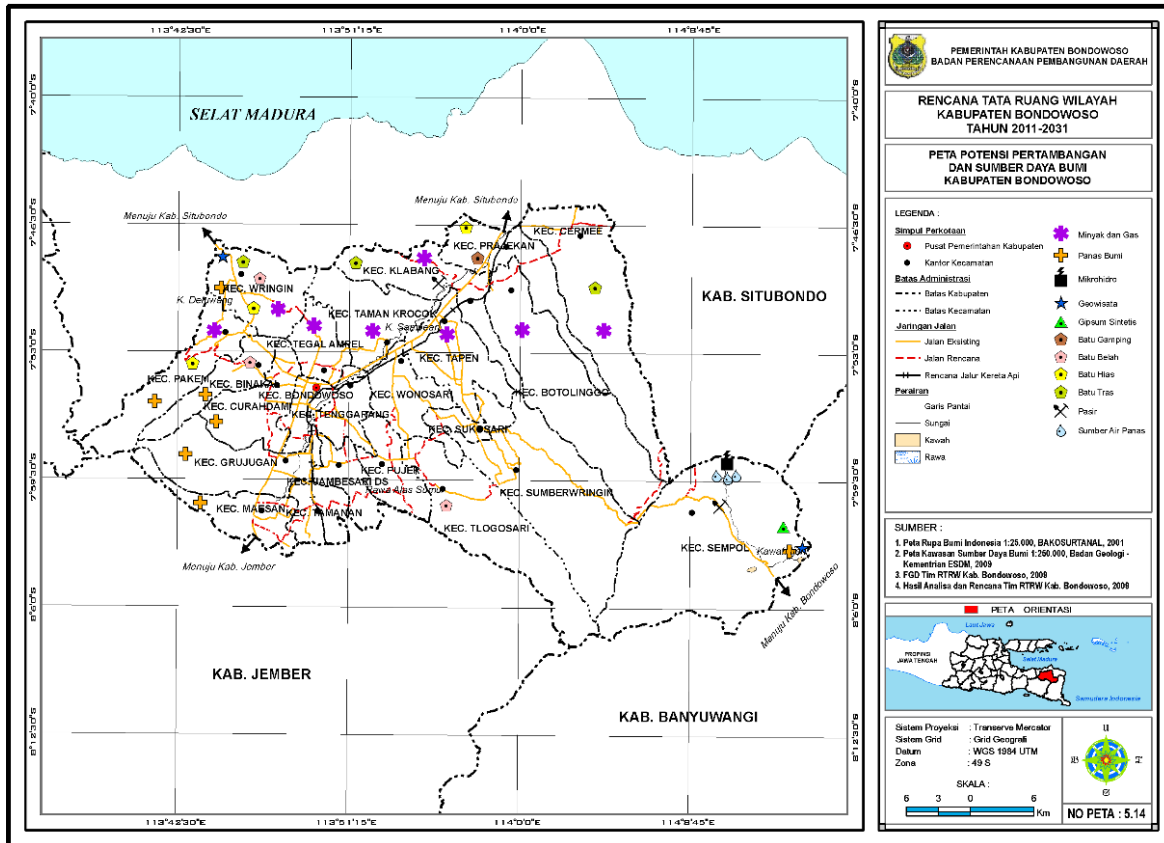
Gambar 2.7 Peta Kawasan Industrial Estate Kabupaten Bondowoso



Gambar 2.8 Peta Kawasan Hutan Produksi Kabupaten Bondowoso

II
-
16

- 2) Sentra industri pande besi meliputi Kecamatan Binakal, Jambesari Darus Sholah, dan Tlogosari.
- 3) Sentra industri makanan di Kecamatan Binakal, Bondowoso, Klabang, Maesan, Prajekan, Pujer, Ijen, Sukosari, Sumber Wringin, Tamanan, Taman Krocok, Tenggarang, Tlogosari, Wonosari, dan Wringin.
- 4) Sentra industri logam dasar dan kuningan di Kecamatan Tapen.
- 5) Sentra industri meubel di Kecamatan Bondowoso, Binakal, Curahdami, Grujugan, Jambesari Darus Sholah, Maesan, Pakem, Tegalampel, dan Tamanan.
- 6) Sentra industri *handy craft* dan anyaman bambu di Kecamatan Bondowoso, Binakal, Cerme, Pakem, Pujer, Tlogosari, Tapen, Tamanan, dan Wringin.
- 7) Sentra industri rokok dan pengolahan tembakau di Kecamatan Grujugan, Jambesari Darus Sholah, Maesan, Pujer, Pakem, Tamanan, dan Wringin.
- 8) Sentra industri konveksi di Kecamatan Bondowoso, Binakal, Curahdami, dan Pujer.
- 9) Sentra industri batu hias di Kecamatan Bondowoso, Grujugan, Pakem, dan Wringin.
- 10) Sentra industri batik di Kecamatan Maesan dan Tamanan.
6. Hutan Produksi meliputi Kecamatan Binakal, Bondowoso, Botolinggo, Cerme, Curahdami, Grujugan, Klabang, Maesan, Pakem, Prajekan, Pujer, Taman Krocok, Tapen, Tegalampel, Tlogosari, Ijen, Sukosari, Sumber Wringin, dan Wringin.
7. Hutan rakyat meliputi Kecamatan Bondowoso, Binakal, Botolinggo, Cerme, Curahdami, Grujugan, Klabang, Maesan, Pakem, Prajekan, Taman Krocok, Tapen,



Gambar 2.9 Peta Potensi Pertambangan dan Sumber daya Bumi Kabupaten Bondowoso

Tegalampel, Tlogosari, Tamanan, Tenggarang, Jambeari Darussolah, Sukosari, Ijen, Sumber Wringin, Wonosari dan Wringin.

8. Pertambangan

a. Kawasan peruntukan pertambangan Mineral, meliputi tambang Pasir di Kecamatan Klabang dan Ijen, tambang Batu Kali di Kecamatan Binakal, tambang Batu Belah di Kecamatan Tlogosari, Binakal dan Wringin, tambang Batu Hias atau Poles di Kecamatan Grujugan, Prajekan, Maesan, Pakem, dan Wringin, tambang Batu Tras di Kecamatan Wringin, Klabang dan Cerme, tambang Batu Gamping di Kecamatan Prajekan, tambang Kalsit di Kecamatan Klabang, dan tambang Belerang dan Gypsum di Kecamatan Ijen.

b. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi meliputi: Kecamatan Klabang, Pakem, Taman Krocok, Tapen, Tegalampel, dan Wringin.

c. Kawasan peruntukan pemanfaatan panas bumi meliputi: Pegunungan Hyang di Kecamatan Binakal, Curahdami, Grujugan, Maesan, Pakem, Blawan – Ijen di Kecamatan Ijen, dan Ijen – Raung Kecamatan Sumber Wringin.

9. Kawasan perdagangan dan jasa meliputi:

a. Kawasan perdagangan dan jasa skala kabupaten ditetapkan di kawasan perkotaan Bondowoso meliputi Kecamatan Bondowoso, Curahdami, Tegalampel, dan Tenggarang.

b. Kawasan perdagangan dan jasa skala sub wilayah kabupaten meliputi Kecamatan Cerme, Maesan, Prajekan,



Sukosari, Tamanan, Wonosari, dan Wringin.

- c. Kawasan perdagangan dan jasa skala kecamatan meliputi Kecamatan Binakal, Botolinggo, Sumber Wringin, Grujugan, Jambesari Darus Sholah, Klabang, Pakem, Pujer, Ijen, Taman Krocok Tapen, dan Tlogosari.
- d. Kawasan perdagangan skala kawasan dan lingkungan, tersebar diseluruh kawasan permukiman.

10. Kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan meliputi 23 kecamatan.

Dalam rangka pengembangan dan pertumbuhan wilayah, khususnya mengakomodir kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau kelestarian lingkungan, dikembangkan kawasan strategis, meliputi kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis sosial budaya, kawasan strategis lingkungan hidup, kawasan strategis penggunaan teknologi tinggi, dan kawasan strategis pertahanan dan keamanan.

Kawasan strategis ekonomi terdiri dari Kawasan Agropolitan, Kawasan Segitiga Emas Ijen, Kawasan Strategis Perkotaan Bondowoso, Kawasan Strategis Tamanan, Kawasan Industri, dan Kawasan Daerah Tertinggal dengan lokasi sebagaimana tabel berikut.

Arahan struktur ruang dalam pengembangan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat meliputi:

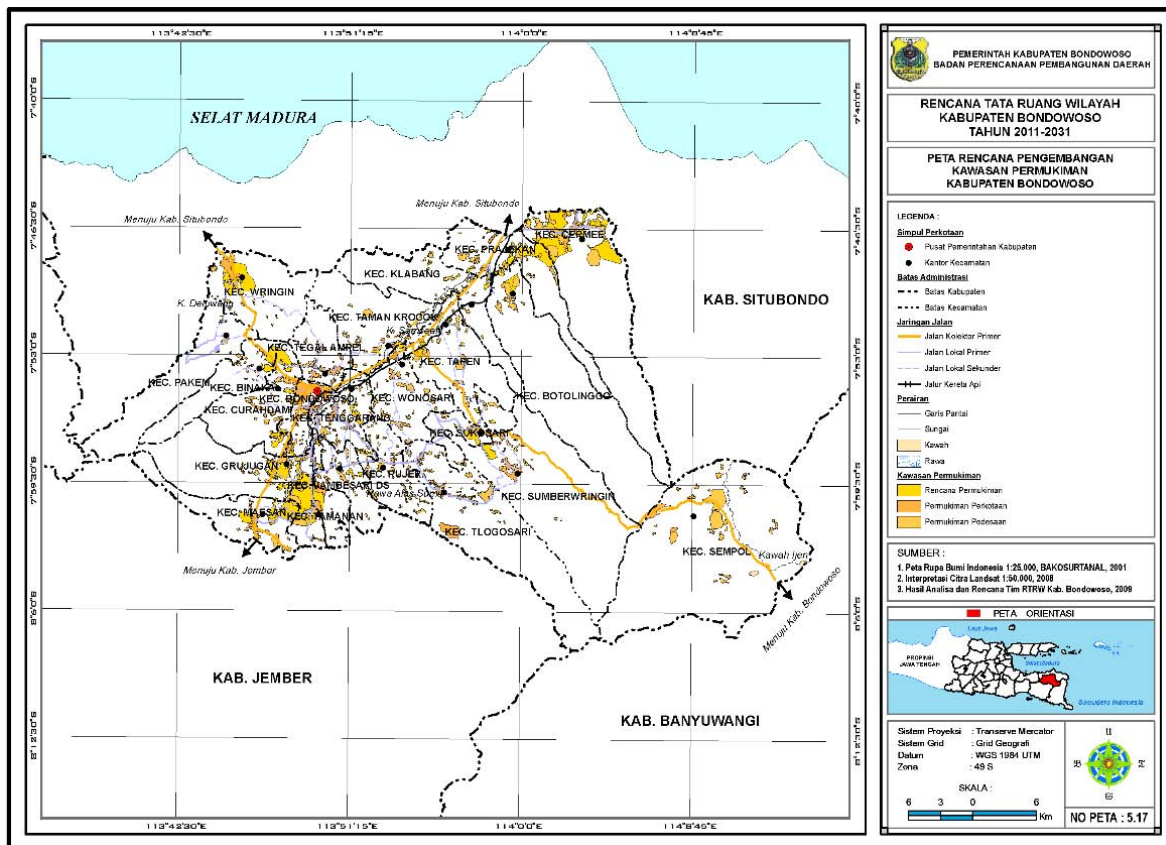
1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) terletak di Perkotaan Bondowoso yang meliputi Kecamatan Bondowoso, sebagian Kecamatan Curahdami yang meliputi Desa Penambangan, Sumbersuko, Curahpoh, Locare dan Kelurahan Curahdami, sebagian Kecamatan Tegalampel yang meliputi Desa Tegalampel, Karanganyar dan Kelurahan Sekarputih, dan sebagian Kecamatan Tenggarang yang meliputi Desa Bataan, Koncer Darulaman, Koncer Kidul, Lojajar, Kajar, Sumbersalam, dan Kelurahan Tenggarang, serta sebagian

Kecamatan Jambesari Darus Sholah yaitu Desa Grujugan Lor.

2. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) meliputi:
 - a. Perkotaan Maesan di Kecamatan Maesan yang meliputi Desa Maesan, Sumbersari, Pakuniran dan Penanggungan
 - b. Perkotaan Prajekan di Kecamatan Prajekan yang meliputi Desa Prajekan Kidul dan Prajekan Lor
 - c. Perkotaan Tamanan di Kecamatan Tamanan yang meliputi Desa Tamanan dan Kalianyar
 - d. Perkotaan Wonosari di Kecamatan Wonosari yang meliputi Desa Wonosari, Kapuran, dan Sumberkalong
 - e. Perkotaan Wringin di Kecamatan Wringin yang meliputi Desa Wringin dan Jatisari.
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi:
 - a. Perkotaan Cermee di Kecamatan Cermee yang meliputi Desa Suling Wetan dan Cermee
 - b. Perkotaan Pujer di Kecamatan Pujer yang meliputi Desa Maskuning Kulon, Maskuning Wetan dan Mangli
 - c. Perkotaan Sukosari di Kecamatan Sukosari yang meliputi Desa Sukosari Lor
4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi:
 - a. Perkotaan Binakal di Kecamatan Binakal yang meliputi Desa Baratan.
 - b. Perkotaan Botolinggo di Kecamatan Botolinggo yang meliputi Desa Botolinggo dan Lumutan.
 - c. Perkotaan Jambesari Darus Sholah di Kecamatan Jambesari Darus Sholah yang meliputi Desa Jambesari dan Pejagan

**Tabel 2.13 Kawasan Strategis Kabupaten Bondowoso**

NO	KAWASAN STRATEGIS	LOKASI
1	Kawasan Agropolitan	Kecamatan Ijen, Sukosari, Sumber Wringin, dan Tlogosari
2	Kawasan Segitiga Emas Ijen	Sebagian wilayah Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo
3	Kawasan Strategis Perkotaan Bondowoso	Seluruh wilayah Kecamatan Bondowoso Sebagian wilayah Kecamatan Curahdami, meliputi Kelurahan Curahdami, Desa Petung, Desa Curahpoh, Desa Penambangan, Desa Poncogati, Desa Selolembu dan Desa Locare Sebagian wilayah Kecamatan Tegallampel, meliputi Kelurahan Sekarputih dan Desa Karanganyar Sebagian wilayah Kecamatan Tenggarang, meliputi Kelurahan Tenggarang, Desa Bataan, Desa Kajar, Desa Sumpersalam, Desa Koncer Darul Aman, Desa Koncer Kidul, Desa Grujugan Lor dan Desa Kejawan.
4	Kawasan Strategis Tamanan	Wilayah Kecamatan Tamanan, Jambesari Darus Sholah, dan Pujer.
5	Kawasan Industri	Kawasan khusus Industri Grujugan-Maesana-Tamanan dan kawasan khusus industri Prajekan-Klabang.
6	Kawasan Daerah Tertinggal	Kawasan tertinggal Binakal dan sekitarnya, kawasan tertinggal Botolinggo dan sekitarnya, dan kawasan tertinggal Taman Krocok dan sekitarnya.
7	Kawasan Strategis Sosial Budaya	Kawasan Alun-alun dan pusat kota Kawasan utama situs megalitikum (Kawasan Desa Glingseran dan Desa Banyuputih di Kecamatan Wringin, Kawasan Desa Pekauman di Kecamatan Grujugan, dan Kawasan Desa Tanah Wulan Kecamatan Maesan)
8	Kawasan strategis peruntukan pertambangan mineral	Kawasan Pandak dan Leprak Kecamatan Klabang dengan potensi pasir dan kalsit Kawasan Walidono Kecamatan Prajekan dengan potensi batu gamping untuk semen Kawasan Cermee dengan potensi batu tras Kawasan Ijen dengan potensi gipsum sintetis Kawasan Binakal dengan potensi batu belah Kawasan Wringin dengan potensi batu tras.
9	Kawasan strategis peruntukan pemanfaatan panas bumi.	Kawasan geotermal Blawan – Ijen dan Raung (Kecamatan Ijen dan Sumber Wringin) dan Kawasan geotermal Pegunungan Hyang (Kecamatan Pakem, Binakal, Curahdami, Grujugan, dan Maesan)
10	Kawasan strategis lingkungan hidup	Kawasan hutan lindung, kawasan pelestarian alam, dan kawasan suaka alam dan marga satwa
11	Kawasan strategis pertahanan dan keamanan	Daerah Latihan Militer Dodilapur Bondowoso, Dodilapur Tamanan dan Dodilapur Gunung Merapi Daerah Latihan Militer Kostrad Divisi 2 di Desa Kluncing Kecamatan Sumber Wringin dan Desa Curahpoh Kecamatan Curahdami Kawasan batalyon 514



Gambar 2.10 Peta Kawasan Permukiman Kabupaten Bondowoso

II
-
20

- d. Perkotaan Klabang di Kecamatan Klabang yang meliputi Desa Klabang, Besuk, Klampokan dan Summersuko.
 - e. Perkotaan Pakem di Kecamatan Pakem yang meliputi Desa Pakem dan Patemon,
 - f. Perkotaan Ijen di Kecamatan Ijen yang meliputi Desa Sempol dan Kalisat
 - g. Perkotaan Sumber Wringin di Kecamatan Sumber Wringin yang meliputi Desa Sumber Wringin dan Sumbergading
 - h. Perkotaan Grujugan di Kecamatan Grujugan yang meliputi Desa Dadapan dan Taman
 - i. Perkotaan Taman Krocok di Kecamatan Taman Krocok yang meliputi Desa Taman
 - j. Perkotaan Tapen di Kecamatan Tapen yang meliputi Desa Cindogo, Tapen, dan Kalitapen
 - k. Perkotaan Tlogosari di Kecamatan Tlogosari yang meliputi Desa Pakisan dan Tlogosari.
5. Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) meliputi:
- a. Desa Botolinggo di Kecamatan Botolinggo,
 - b. Desa Bercak di Kecamatan Cermee,
 - c. Desa Suling Kulon di Kecamatan Cermee,
 - d. Desa Jetis di Kecamatan Curahdami,
 - e. Desa Grujugan Kidul di Kecamatan Grujugan,
 - f. Desa Sumberpandan di Kecamatan Grujugan,
 - g. Desa Sumberjeruk di Kecamatan Jambesari Darus Sholah,
 - h. Desa Blimbing di Kecamatan Klabang,
 - i. Desa Pakuniran di Kecamatan Maesan,
 - j. Desa Sumberdumpyong di Kecamatan Pakem,
 - k. Desa Sukowono di Kecamatan Pujer,



- l. Desa Sukorejo di Kecamatan Sumber Wringin,
- m. Desa Kalianyar di Kecamatan Ijen,
- n. Desa Mengen di Kecamatan Tamanan,
- o. Desa Wonokusumo di Kecamatan Tapen,
- p. Desa Lojajar di Kecamatan Tenggarang,
- q. Desa Kembang di Kecamatan Tlogosari,
- r. Desa Lombok Kulon di Kecamatan Wonosari,
- s. Desa Ampelan di Kecamatan Wringin,
- t. Desa Bukor di Kecamatan Wringin;

Sistem jaringan prasarana dan sarana meliputi transportasi Jalan raya, prasarana telekomunikasi, prasarana irigasi/pengairan, prasarana energi/listrik, prasarana air bersih, prasarana drainase, prasarana pengelolaan persampahan, dan prasarana sanitasi.

1. Sistem Prasarana Jalan

Sistem jaringan jalan di Kabupaten Bondowoso, terbagi menjadi:

- a. Jalan jalan strategis nasional yang merupakan jalan provinsi dan kolektor primer, yaitu Jalan Garduatak- - Kawah Ijen)
- b. Jalan provinsi, merupakan jalan kolektor primer, meliputi ruas jalan : Jalan penghubung Bondowoso–Jember; Jalan penghubung Bondowoso–Situbondo, Jalan penghubung Bondowoso–Besuki dan Jalan penghubung Maesan-Sukowono.
- c. Jalan kolektor sekunder, yaitu jalan yang menghubungkan kawasan pusat perkotaan Bondowoso dengan kawasan fungsional tertentu, seperti kawasan perdagangan, industri, perkantoran, wisata, dan lainnya.
- d. Jalan lokal primer, yaitu jalan yang menghubungkan Perkotaan

Bondowoso dengan pusat-pusat kegiatan (perkotaan kecamatan)

- e. Jalan lokal primer, yang merupakan jalan tembus antar kabupaten.

Rencana peningkatan jalan dan jembatan, serta prasarana transportasi merupakan arahan pembangunan jalan/jembatan baru untuk membuka kawasan terisolasi, untuk meningkatkan kelancaran pemasaran hasil-hasil produksi, serta untuk meningkatkan kelancaran kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya lainnya, meliputi:

- a. Peningkatan jalan kolektor primer, meliputi jalan yang menghubungkan wilayah kabupaten dengan wilayah Kabupaten Situbondo, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi. Peningkatan jalan untuk jenis jalan ini adalah berupa penambahan rambu-rambu lalu lintas dan perlengkapan jalan, serta pelebaran jalan.
- b. Peningkatan jalan lokal primer, meliputi jalan yang menghubungkan kawasan perkotaan Bondowoso sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan pusat kegiatan lainnya (PKLp, PPK dan PPL) serta dengan kawasan fungsional seperti kawasan perdagangan, industri, pariwisata, dan perkantoran. Jenis peningkatannya antara lain peningkatan kualitas perkerasan, penambahan rambu-rambu dan perlengkapan jalan, serta pelebaran jalan;
- c. Pengembangan dan peningkatan jalan kolektor sekunder dan lokal sekunder yang menuju kawasan perdagangan dan jasa, permukiman, pariwisata, agrobisnis dan sentra industri, dengan prioritas peningkatan kualitas perkerasan jalan.
- d. Peningkatan jalan poros desa dan jalan menuju daerah terisolir, dengan prioritas peningkatan perkerasan

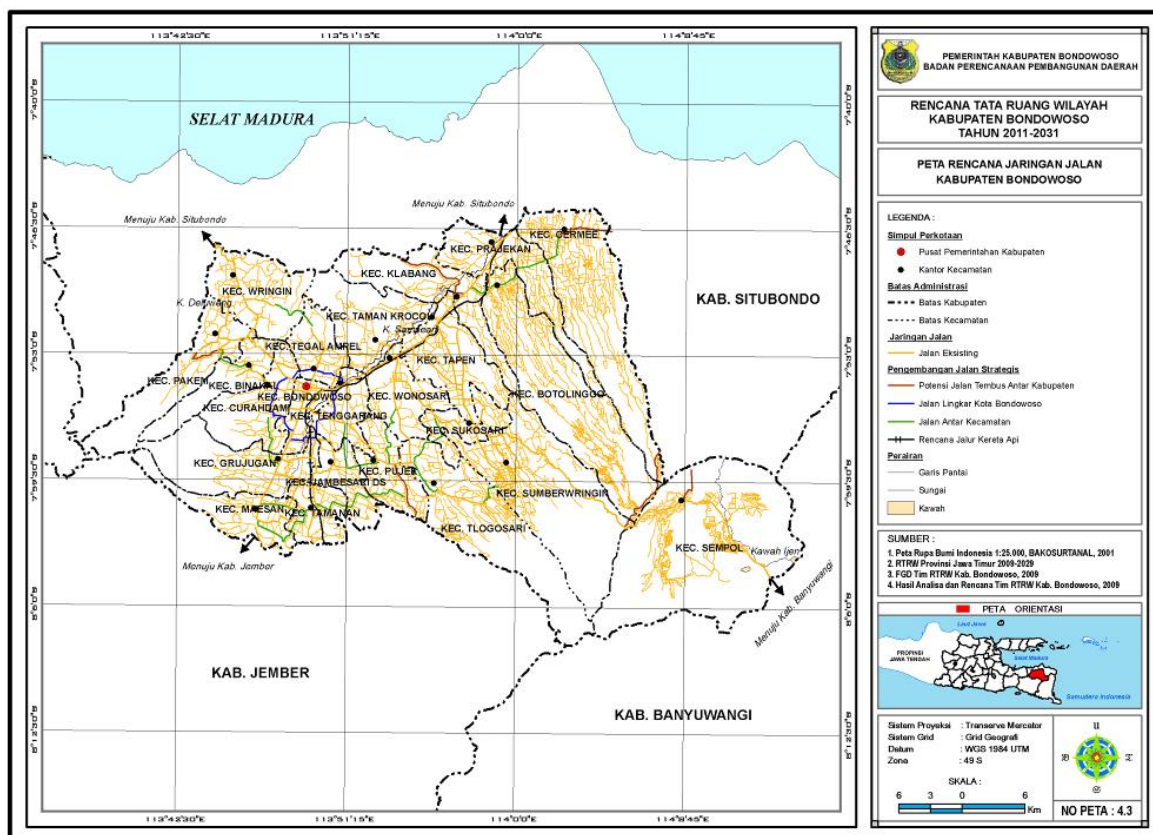


jalan dan pembangunan jembatan pada ruas :

- 1) jalan Botolinggo-Pancur;
 - 2) jalan Klabang-Wonoboyo;
 - 3) jalan Cermee-Batu Ampar-Solor-Silapak,
 - 4) jalan Pakem-Ardisaeng;
 - 5) jalan Prajekan-Penang;
 - 6) jalan Sukorejo-Puloagung;
 - 7) jalan Tlogosari-Brambang; dan
 - 8) jalan Wringin–Sumbercanting-Semampir-Banyuwulu.
- e. Pengembangan jalan lingkaran Perkotaan Bondowoso yang melalui wilayah Kecamatan Bondowoso, Kecamatan Curahdami, Kecamatan Tegalampel dan Kecamatan Tenggarang, dengan prioritas pada ruas Pancoran – Kejawan, mencakup

perencanaan, pembebasan lahan, pembangunan jembatan dan pembangunan jalan.

- f. Pengembangan Terminal Bondowoso menjadi terminal Tipe B yang berlokasi di jalur jalan lingkaran perkotaan Bondowoso.
- g. Pengembangan terminal penumpang tipe C di beberapa Pusat Pelayanan yang potensial, yaitu di Maesan, Prajekan, Ijen, Sukosari, Tamanan, Wonosari, dan Wringin.
- h. Pengembangan pelayanan angkutan umum penumpang.
- i. Pengembangan pelayanan transportasi kereta api di Kabupaten Bondowoso diarahkan untuk mengaktifkan kembali sarana kereta api pada jalur Kalisat – Bondowoso – Situbondo.



Gambar 2.11 Peta Rencana Jaringan Jalan Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031



2. Sistem Prasarana Lainnya

Arahan bagi pengembangan jaringan prasarana lainnya meliputi:

- a. Pengembangan sistem jaringan listrik diarahkan untuk menyediakan energi listrik yang layak untuk berbagai kegiatan konsumsi dan produksi oleh masyarakat dengan meningkatkan kapasitas terpasang dan kapasitas terpakai. Serta pengembangan pembangkit listrik dengan memanfaatkan energi mikrohidro, tenaga surya, panas bumi, dan energi alternatif lainnya.
- b. pengembangan prasarana telekomunikasi meliputi prasarana telekomunikasi dan prasarana penyampaian informasi yang terdiri atas jaringan kabel dan non kabel (pancaran gelombang), dalam bentuk jaringan kabel telepon, menara telekomunikasi, unit layanan (wartel, warnet, telepon umum), studio radio dan studio televisi, untuk mendukung aktifitas sosial ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah
- c. Pelestarian bentuk dan fungsi sungai dan rawa dengan pengawasan pemanfaatan sempadan secara ketat;
- d. Pembangunan bendungan dan penampung air baku lainnya, peningkatan kondisi prasarana irigasi pada kawasan potensial peningkatan produksi pangan, serta optimalisasi prasarana irigasi yang telah terbangun.
- e. Pengembangan sistem pengelolaan air bersih perdesaan yang dikelola sendiri oleh masyarakat memerlukan pembinaan teknis dan kelembagaan dari instansi terkait.
- f. Meningkatkan kinerja sistem perpipaan PDAM di kawasan

perkotaan yang telah ada, dengan optimalisasi kapasitas sumber pengambilan air, menurunkan tingkat kebocoran dan pemeliharaan/perbaikan jaringan secara rutin dan berkala;

- g. memantapkan saluran drainase primer dengan pembangunan saluran drainase yang memperhatikan kontur wilayah, pembuatan saluran drainase tersier yang layak pada kawasan permukiman dan sepanjang sisi jalan;

3. Sistem Prasarana Perhubungan

Perencanaan pembangunan kawasan perkotaan dan perdesaan secara komprehensif dan terpadu antarsektor dapat dilakukan melalui pengembangan sistem prasarana wilayah. Rencana sistem prasarana wilayah kabupaten Bondowoso dikembangkan menjadi sistem prasarana utama berupa sistem prasarana perhubungan yang terfokus pada sistem transportasi darat mengingat letak geografis wilayah Kabupaten Bondowoso secara keseluruhan berupa daratan. Sistem Transportasi darat sebagai sistem moda transportasi utama di Kabupaten Bondowoso berperan mendukung pembangunan dan melayani mobilitas manusia maupun distribusi komoditi perdagangan dan industri. Disisi lain perkembangan perekonomian Kabupaten Bondowoso dan kabupaten sekitar, memberikan manfaat yang besar bagi aktifitas masyarakat Bondowoso, salah satunya adalah meningkatnya mobilitas manusia dan barang.

Sistem prasarana utama yang dikembangkan di wilayah kabupaten Bondowoso terdiri dari rencana transportasi jalan raya dan rencana transportasi kereta api. Rencana transportasi jalan raya terdiri dari terdiri atas: jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, jaringan jalan kabupaten, jalan dan jembatan, rencana lokasi terminal dan rencana pengembangan



sarana prasarana angkutan umum masalah wilayah.

Rencana transportasi kereta api dikembangkan berupa pengembangan layanan kereta api, meliputi:

- a. Pengamanan dan konservasi jalur kereta api, stasiun dan prasarana pendukung lainnya dalam rangka revitalisasi sistem angkutan kereta api yang melalui wilayah Kecamatan Tamanan, Kecamatan Grujugan, Kecamatan Bondowoso, Kecamatan Tenggarang, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Tapen, Kecamatan Klabang dan Kecamatan Prajekan;
- b. Mengaktifkan kembali pelayanan angkutan kereta api yang melintasi Kalisat – Bondowoso – Situbondo – Panarukan;
- c. Meningkatkan peranan pemerintah dalam pelayanan kereta api; dan
- d. Mengembangkan kerjasama dengan pihak lain dalam mengoptimalkan pemanfaatan sistem angkutan kereta api, sebagai sarana transportasi umum dan pengembangan pariwisata.

Pemanfaatan ruang wilayah secara tepat serta terbangunnya infrastruktur wilayah diharapkan dapat mendorong pengembangan semua potensi sumberdaya di setiap wilayah Kecamatan di Kabupaten Bondowoso.

2.1.1.10 Wilayah Rawan Bencana

Secara geografis Kabupaten Bondowoso merupakan daerah pegunungan yang berbukit dengan kelerengan yang bervariasi dapat memungkinkan terjadinya kawasan rawan bencana. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Bondowoso terdiri dari daerah-daerah yang memiliki tingkat erosi tinggi, tanah gundul di kawasan hutan lindung, kawasan bantaran sungai, kawasan alur sungai (jalur) pembuangan air kawah,

kawasan bersudut lereng lebih dari 40% dengan struktur tanah relatif labil dan kawasan lain yang secara historis, geologis dan ekologis sering atau rawan mengalami bencana banjir, longsor dan vulkanis (gunung berapi).

Tingkat erosi tahunan berdasarkan studi Universitas Brawijaya (1989-1990) berkisar antara 26.500 – 34.715 ton/ha/tahun atau 1,07 mm/tahun. Sedangkan DAS akan mampu menahan erosi (mengendalikan kelestarian) apabila komposisi masing-masing guna lahan sebagai berikut: hutan 44,18%, perkebunan 28,71%, tegal 20,77%, sawah 3,12% dan permukiman 3,22%.

Berdasarkan peta Rawan Bencana dari terdapat beberapa potensi bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial di Wilayah Kabupaten Bondowoso, antara lain :

1. Bencana Gunung Api

Potensi bencana gunung api dapat terjadi di 6 kecamatan antara lain Tlogosari, Sumber Wringin, Ijen, Sukosari, Botolinggo, dan Tapen.

2. Bencana Gempa

Potensi bencana gempa dapat terjadi pada 23 kecamatan, yaitu Wringin, Tegalampel, Pakem, Binakal, Grujugan, Curahdami, Maesan, Bondowoso, Tenggarang, Tamanan, Jambesari DS, Pujer, Tlogosari, Sumber Wringin, Ijen, Sukosari, Botolinggo, Wonosari, Tapen, Taman Krocok, Klabang, Prajekan, dan Cermee.

3. Bencana Banjir

Potensi bencana banjir dapat terjadi 19 kecamatan antara lain Tegalampel, Binakal, Grujugan, Curahdami, Maesan, Bondowoso, Tenggarang, Tamanan, Jambesari DS, Pujer, Tlogosari, Sukosari, Botolinggo, Wonosari, Tapen, Taman Krocok, Klabang, Prajekan, dan Cermee.



4. Bencana Longsor

Potensi bencana longsor dapat terjadi di 15 kecamatan antara lain pada Wringin, Pakem, Grujugan, Curahdami, Maesan, Bondowoso, Tenggarang, Pujer, Tlogosari, Sumber Wringin, Ijen, Sukosari, Botolinggo, Taman Krocok, dan Klabang.

5. Bencana Angin Puyuh

Potensi bencana angin puyuh dapat terjadi pada 23 kecamatan, yaitu Wringin, Tegalampel, Pakem, Binakal, Grujugan, Curahdami, Maesan, Bondowoso, Tenggarang, Tamanan, Jambesari DS, Pujer, Tlogosari, Sumber Wringin, Ijen, Sukosari, Botolinggo, Wonosari, Tapen, Taman Krocok, Klabang, Prajekan, dan Cermee.

6. Bencana Badai

Potensi bencana badai dapat terjadi di 13 kecamatan antara lain pada Wringin, Tegalampel, Pakem, Curahdami, Bondowoso, Tamanan, Tlogosari, Sumber Wringin, Ijen, Botolinggo, Klabang, Prajekan, dan Cermee.

7. Bencana Kekeringan

Potensi bencana kekeringan dapat terjadi di 7 kecamatan antara lain pada Wringin, Tegalampel, Binakal, Botolinggo, Taman Krocok, Prajekan, dan Cermee.

8. Bencana Kebakaran

Potensi bencana kebakaran dapat terjadi pada 21 kecamatan, yaitu Wringin, Tegalampel, Pakem, Binakal, Grujugan, Curahdami, Bondowoso, Tenggarang, Tamanan, Jambesari DS, Pujer, Tlogosari, Sumber Wringin, Ijen, Sukosari, Botolinggo, Wonosari, Tapen, Taman Krocok, Prajekan, dan Cermee.

9. Bencana Kebakaran hutan

Potensi bencana kebakaran hutan dapat terjadi di 14 kecamatan antara lain pada

Wringin, Tegalampel, Pakem, Binakal, Grujugan, Curahdami, Maesan, Pujer, Tlogosari, Sumber Wringin, Ijen, Sukosari, Botolinggo, Klabang.

10. Bencana Epidemi

Potensi bencana epidemi dapat terjadi di 16 kecamatan antara lain pada Wringin, Tegalampel, Pakem, Grujugan, Curahdami, Maesan, Bondowoso, Tamanan, Tlogosari, Sumber Wringin, Ijen, Botolinggo, Wonosari, Tapen, Prajekan, dan Cermee.

11. Bencana Polusi Lingkungan

Potensi bencana polusi lingkungan dapat terjadi di 3 kecamatan antara lain pada Bondowoso, Tamanan, dan Prajekan.

12. Bencana Kecelakaan Industri

Potensi bencana kecelakaan industri dapat terjadi di 4 kecamatan antara lain pada Grujugan, Maesan, Ijen dan Prajekan.

13. Bencana Kecelakaan Transportasi

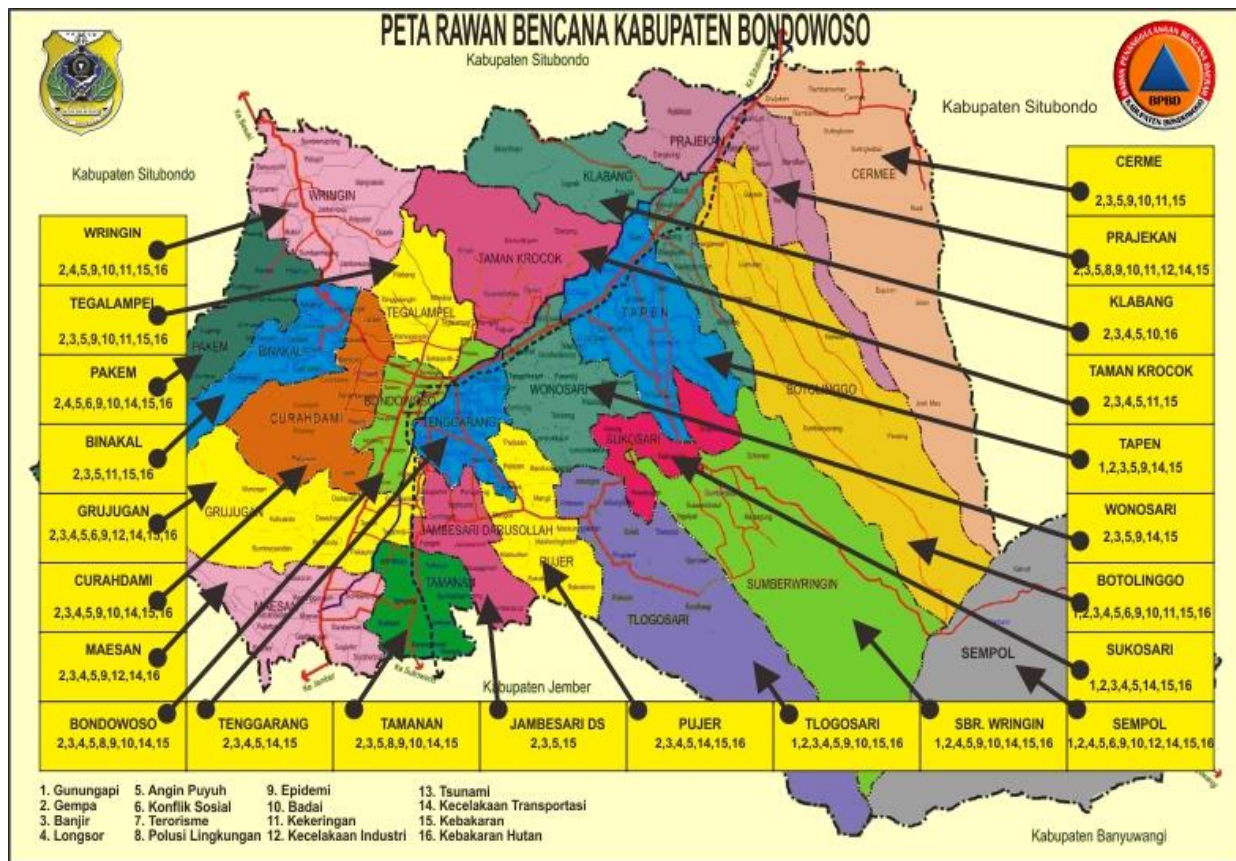
Potensi bencana kecelakaan transportasi dapat terjadi di 14 kecamatan antara lain pada Pakem, Grujugan, Curahdami, Maesan, Bondowoso, Tenggarang, Tamanan, Pujer, Sumber Wringin, Ijen, Sukosari, Wonosari, Tapen, dan Prajekan.

14. Bencana Konflik Sosial

Potensi bencana konflik sosial dapat terjadi di 3 kecamatan antara lain pada Pakem, Grujugan, dan Botolinggo.

Potensi bencana di wilayah Kabupaten Bondowoso tergambarkan dalam Gambar 2.12.

Berdasarkan data Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2013 yang dikeluarkan BNPB, Bondowoso masuk daerah dengan resiko bencana tinggi (skor : 166) berada pada urutan 200 dari 496 Kabupaten/kota selndonesia dan berada pada urutan 19 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.



Gambar 2.12 Peta Rawan Bencana Kabupaten Bondowoso

Tabel 2.14 Kejadian Bencana di Kabupaten Bondowoso Tahun 2013-2017

No	Jenis Bencana	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Bencana Gunung Api	Kejadian					
2	Bencana Gempa	Kejadian					
3	Bencana Banjir	Kejadian	21	3	6	4	8
4	Bencana Longsor	Kejadian	9	5	3	10	8
5	Bencana Angin Puyuh	Kejadian	29	26	14	10	23
6	Bencana Badai	Kejadian					
7	Bencana Kekeringan	Kejadian					
8	Bencana Kebakaran	Kejadian	20	18	19	10	20
9	Bencana Kebakaran Hutan	Kejadian					
10	Bencana Epidemi	Kejadian	4	4	6	3	8
11	Bencana Polusi Lingkungan	Kejadian					
12	Bencana Kecelakaan Industri	Kejadian					
13	Bencana Kecelakaan Transportasi	Kejadian					
14	Bencana Konflik Sosial	Kejadian					
Jumlah			83	56	48	44	67

Sumber : BPBD Kabupaten Bondowoso, 2018



Dari keseluruhan potensi bencana yang ada di Bondowoso, selama kurun waktu 2013 s.d 2017 kejadian bencana didominasi oleh bencana banjir, longsor, angin puyuh, epidemi, dan kebakaran dengan rata-rata mencapai 60 kejadian.

Disamping itu, kawasan sempadan sungai yang berada di sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi yang mempunyai fungsi penting untuk mempertahankan kelestarian bentuk dan fungsi sungai, memerlukan penanganan khusus untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, bentuk fisik pinggiran sungai dan dasar/kedalaman sungai.

Selain kawasan bencana tersebut diatas, di Kabupaten Bondowoso terdapat lahan kritis yang memiliki potensi menjadi penyebab awal terjadinya bencana alam. Pada tahun 2012 luas lahan kritis mencapai seluas 11.146,18 Ha, tahun 2013 seluas 9.721,1 Ha, tahun 2014 seluas 8.880,77 ha, tahun 2015 seluas 6.891,06 ha. Lahan kritis tersebut, tersebar di hampir seluruh kecamatan kecuali enam kecamatan, yaitu Tamanan, Jambesari DS, Wonosari, Tenggarang, Bondowoso dan Ijen.

Keberadaan lahan kritis disebabkan karena pengelolaan dan keterbatasan lahan yang dimiliki masyarakat mengakibatkan masyarakat merambah lahan dan menempati lahan garapan pada daerah-daerah yang masuk kawasan konservasi, disamping itu masih ada masyarakat yang membudidayakan tanaman tidak sesuai dengan fungsi lahan sehingga memicu terjadinya lahan kritis.

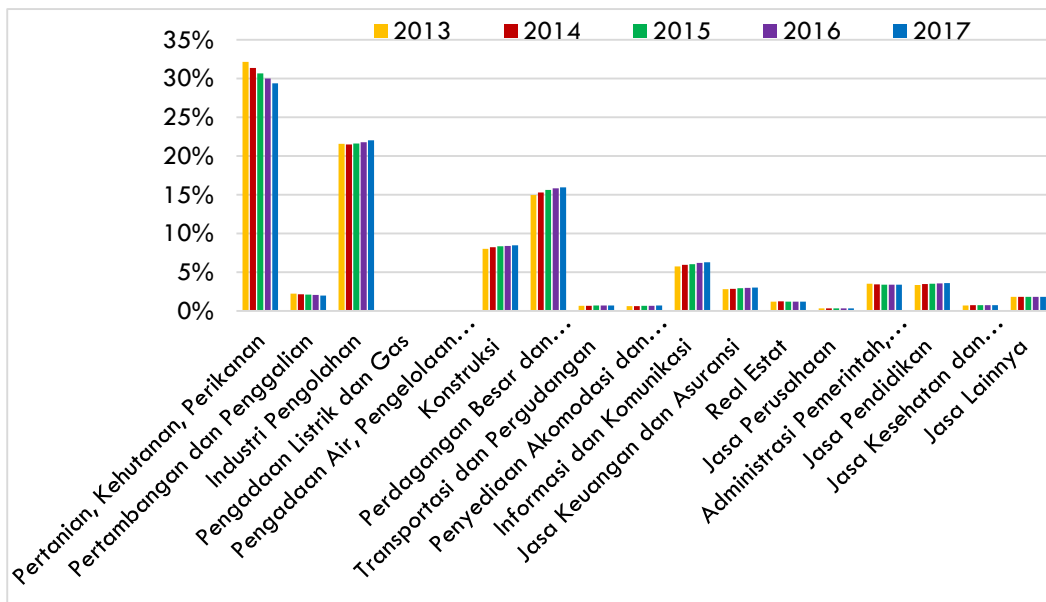
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, serta kesejahteraan sosial.

1. Pertumbuhan PDRB

Perekonomian suatu daerah secara alami, terus mengalami transformasi struktural dari tradisional ke industri yang ditunjukkan dengan semakin besarnya kontribusi lapangan usaha kategori non pertanian, kehutanan dan perikanan dari tahun ke tahun terhadap total PDRB. Hal ini sejalan dengan transformasi ekonomi di Jawa Timur yang semula bersifat subsisten dan bertumpu pada sektor pertanian menuju struktur perekonomian yang lebih modern yang didominasi sektor non primer, khususnya industri pengolahan, perdagangan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta jasa.

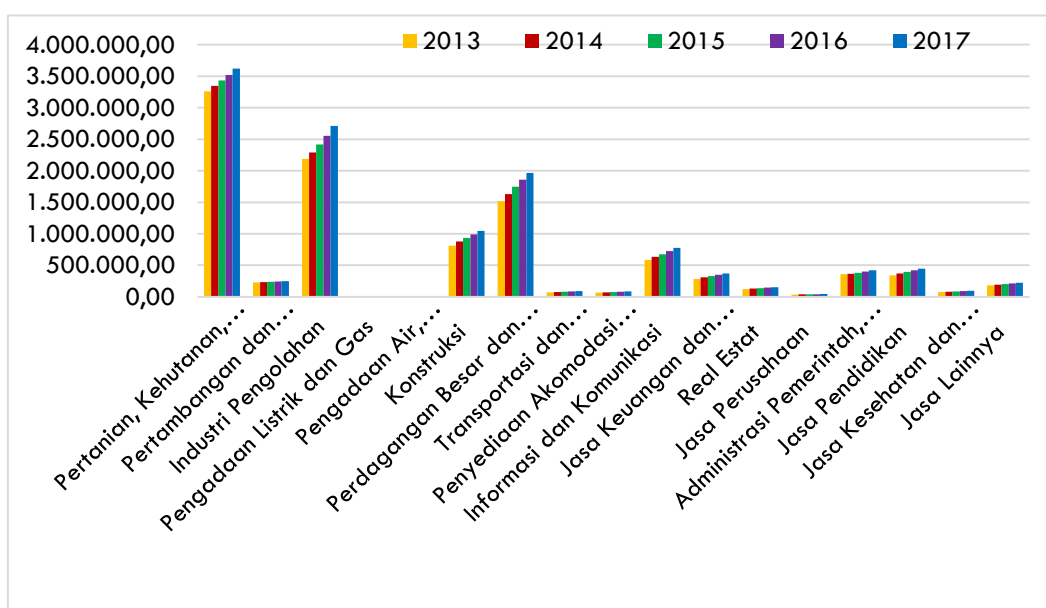
Implikasi dari perubahan perhitungan PDRB tahun dasar 2000 ke tahun dasar 2010 adalah bergesernya beberapa kategori dalam struktur perekonomian di Kabupaten Bondowoso. Lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan dan perikanan masih mendominasi. Share lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan dan perikanan paling besar terhadap total nilai tambah yang tercipta dalam perekonomian tahun 2012-2016. Terbesar kedua adalah lapangan usaha kategori industri pengolahan, dan terbesar ketiga adalah kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Selengkapnya dapat dilihat sebagaimana grafik dalam Gambar 2.13.



Gambar 2.13 Perkembangan Kontribusi Lapangan Usaha dalam PDRB Tahun 2013-2017 ADHK Tahun 2010 Kabupaten Bondowoso (Persen)

Apabila diperhatikan, kontribusi lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap pembentukan PDRB setiap tahun mengalami penurunan yaitu dari 32,16% tahun 2013 menjadi 29,40% tahun 2017. Namun demikian, tidak berarti bahwa volume produksi lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan dan perikanan berkurang selama periode tersebut, namun lebih disebabkan karena laju pertumbuhan lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan dan

perikanan lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan lapangan usaha lainnya. Hal ini dapat dilihat dari nilai PDRB lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan dan perikanan Tahun 2013 nilai kontribusinya sebesar 3,261 Trilyun dan tahun 2017 mencapai sebesar 3,623 Trilyun. Nilai ADHK yang terus meningkat setiap tahun, menunjukkan bahwa kuantum produksi pertanian, kehutanan dan perikanan terus mengalami peningkatan, sebagaimana pada grafik Gambar 2.14.



Gambar 2.14 Perkembangan Nilai Lapangan Usaha dalam PDRB Tahun 2013-2017 ADHK Tahun 2010 Kabupaten Bondowoso (Juta)



Di samping sebagai penyumbang terbesar pada pembentukan PDRB, lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, merupakan penyumbang terbesar dalam hal penyerapan angkatan kerja disamping lapangan usaha kategori industri pengolahan, dan lapangan usaha kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang mulai berkembang, maupun lapangan usaha kategori lainnya yang terus tumbuh.

Proses industrialisasi yang didukung sektor pertanian yang kuat, masih berada pada tahap awal, namun menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Secara struktural tampak pada upaya memberikan nilai tambah pada produk-produk pertanian yang sebagian besar terkait dengan sektor industri pengolahan hasil pertanian, kehutanan dan perikanan serta pasca panen yang memerlukan pemanfaatan teknologi dan kesiapan SDM. Sumbangan Lapangan usaha kategori industri pengolahan mencapai 22,03% terhadap total PDRB pada tahun 2017.

Sementara itu, lapangan usaha yang memiliki peningkatan sumbangan besar terhadap pembentukan PDRB tahun 2017 adalah kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, memberikan sumbangan sebesar 15,96% terhadap total PDRB serta menunjukkan laju pertumbuhan sumbangan tertinggi tahun 2016, yaitu sebesar 12,20%.

Sehingga memperhatikan kecenderungan yang terjadi, dimungkinkan selama 5 (lima) tahun ke depan perekonomian Kabupaten Bondowoso akan bergeser dan didominasi lapangan usaha kategori non pertanian, kehutanan dan perikanan, yaitu ke arah lapangan usaha kategori industri pengolahan serta lapangan usaha kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

Hasil analisis PDRB tahun 2013-2017 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.15 Nilai dan Kontribusi Lapangan Usaha dalam PDRB Tahun 2013-2017 ADHK Tahun 2010 Kabupaten Bondowoso

No	Lapangan Usaha	2013		2014		2015		2016		2017	
		(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	3.261,30	32,16	3.344,70	31,40	3.431,00	30,69	3.518,30	29,98	3.623,70	29,40
2	Pertambangan dan Penggalian	225,90	2,23	231,10	2,17	236,40	2,11	241,40	2,06	253,80	2,06
3	Industri Pengolahan	2.187,90	21,58	2.291,10	21,51	2.416,40	21,61	2.562,00	21,83	2.714,40	22,02
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,20	0,05	5,50	0,05	5,70	0,05	5,90	0,05	6,10	0,05
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	8,30	0,08	8,50	0,08	8,90	0,08	9,40	0,08	9,90	0,08
6	Konstruksi	813,60	8,02	878,10	8,24	932,90	8,34	988,50	8,42	1.052,00	8,54
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	1.520,10	14,99	1.628,70	15,29	1.748,10	15,64	1.859,10	15,84	1.975,90	16,03
8	Transportasi dan Pergudangan	69,50	0,69	74,10	0,70	79,30	0,71	84,40	0,72	90,30	0,73
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	63,50	0,63	68,90	0,65	74,30	0,66	80,40	0,69	86,80	0,70
10	Informasi dan Komunikasi	582,10	5,74	633,50	5,95	675,60	6,04	727,60	6,20	779,90	6,33
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	285,90	2,82	307,30	2,88	328,10	2,93	349,70	2,98	362,50	2,94
12	Real Estate	123,10	1,21	131,60	1,24	137,60	1,23	144,70	1,23	151,60	1,23
13	Jasa Perusahaan	36,40	0,36	37,70	0,35	40,20	0,36	42,30	0,36	44,60	0,36
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	358,60	3,54	366,30	3,44	380,50	3,40	398,60	3,40	413,90	3,36
15	Jasa Pendidikan	340,90	3,36	370,60	3,48	396,20	3,54	419,90	3,58	441,60	3,58
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	73,80	0,73	80,00	0,75	84,70	0,76	89,60	0,76	94,80	0,77
17	Jasa Lainnya	184,00	1,81	194,70	1,83	203,70	1,82	213,80	1,82	223,90	1,82
	PDRB	10.140,10	100	10.652,40	100	11.179,60	100	11.735,60	100	12.325,70	100

Sumber : BPS Kabupaten Bondowoso, 2018



Tabel 2.16 Nilai dan Kontribusi Lapangan Usaha dalam PDRB Tahun 2013-2017 ADHB Kabupaten Bondowoso

No	Lapangan Usaha	2013		2014		2015		2016		2017	
		(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	3.981,70	33,76	4.406,80	33,70	4.876,00	33,66	5.212,30	32,86	5.456,60	31,80
2	Pertambangan dan Penggalian	252,80	2,14	276,70	2,12	300,50	2,07	317,40	2,00	338,80	1,97
3	Industri Pengolahan	2.486,30	21,08	2.724,40	20,84	3.016,20	20,82	3.320,10	20,93	3.676,90	21,43
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,70	0,04	5,20	0,04	5,70	0,04	6,20	0,04	7,20	0,04
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	8,80	0,07	9,40	0,07	9,90	0,07	11,00	0,07	11,90	0,07
6	Konstruksi	1.021,30	8,66	1.195,00	9,14	1.334,90	9,22	1.508,10	9,51	1.666,40	9,71
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	1.692,10	14,35	1.866,90	14,28	2.074,90	14,32	2.341,20	14,76	2.584,40	15,06
8	Transportasi dan Pergudangan	74,60	0,63	84,70	0,65	97,40	0,67	107,90	0,68	119,80	0,70
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	74,40	0,63	87,00	0,67	98,60	0,68	111,70	0,70	124,20	0,72
10	Informasi dan Komunikasi	600,00	5,09	658,50	5,04	725,00	5,00	801,70	5,05	873,60	5,09
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	326,40	2,77	370,60	2,83	419,70	2,90	468,10	2,95	505,40	2,95
12	Real Estate	137,50	1,17	149,20	1,14	165,30	1,14	178,40	1,12	191,80	1,12
13	Jasa Perusahaan	41,70	0,35	46,80	0,36	52,40	0,36	57,70	0,36	63,30	0,37
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	416,50	3,53	434,00	3,32	463,20	3,20	510,90	3,22	552,10	3,22
15	Jasa Pendidikan	398,30	3,38	451,10	3,45	505,80	3,49	544,70	3,43	587,60	3,42
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	79,40	0,67	90,40	0,69	101,10	0,70	109,50	0,69	120,80	0,70
17	Jasa Lainnya	196,10	1,66	218,40	1,67	239,00	1,65	256,10	1,61	275,80	1,61
	PDRB	11.792,60	100	13.075,10	100	14.485,60	100	15.863,00	100	17.156,60	100

Sumber : BPS Kabupaten Bondowoso, 2018



Tabel 2.17 Perkembangan Kontribusi Lapangan Usaha dalam PDRB Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)

No	Lapangan Usaha	2013		2014		2015		2016		2017	
		Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	33,76	32,16	33,70	31,40	33,66	30,69	32,86	29,98	31,80	29,40
2	Pertambangan dan Penggalian	2,14	2,23	2,12	2,17	2,07	2,11	2,00	2,06	1,97	2,06
3	Industri Pengolahan	21,08	21,58	20,84	21,51	20,82	21,61	20,93	21,83	21,43	22,02
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,05	0,04	0,05	0,04	0,05	0,04	0,05	0,04	0,05
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	0,07	0,08	0,07	0,08	0,07	0,08	0,07	0,08	0,07	0,08
6	Konstruksi	8,66	8,02	9,14	8,24	9,22	8,34	9,51	8,42	9,71	8,54
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	14,35	14,99	14,28	15,29	14,32	15,64	14,76	15,84	15,06	16,03
8	Transportasi dan Pergudangan	0,63	0,69	0,65	0,70	0,67	0,71	0,68	0,72	0,70	0,73
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,63	0,63	0,67	0,65	0,68	0,66	0,70	0,69	0,72	0,70
10	Informasi dan Komunikasi	5,09	5,74	5,04	5,95	5,00	6,04	5,05	6,20	5,09	6,33
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,77	2,82	2,83	2,88	2,90	2,93	2,95	2,98	2,95	2,94
12	Real Estate	1,17	1,21	1,14	1,24	1,14	1,23	1,12	1,23	1,12	1,23
13	Jasa Perusahaan	0,35	0,36	0,36	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,37	0,36
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,53	3,54	3,32	3,44	3,20	3,40	3,22	3,40	3,22	3,36
15	Jasa Pendidikan	3,38	3,36	3,45	3,48	3,49	3,54	3,43	3,58	3,42	3,58
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,67	0,73	0,69	0,75	0,70	0,76	0,69	0,76	0,70	0,77
17	Jasa Lainnya	1,66	1,81	1,67	1,83	1,65	1,82	1,61	1,82	1,61	1,82
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Bondowoso, 2018





Tabel 2.18 Perkembangan PDRB Kabupaten Bondowoso Tahun 2013-2017 ADHB dan ADHK (Dalam Juta)

No	Provinsi/ Kabupaten	2013		2014		2015		2016		2017	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
1	Bondowoso	11.792,60	10.140,10	13.075,10	10.652,40	14.485,60	11.179,60	15.863,00	11.735,60	17.156,60	12.325,70
2	Jawa Timur	1.382.501,50	1.192.789,80	1.537.947,60	1.262.684,50	1.691.477,10	1.331.376,10	1.857.597,70	1.405.561,00	2.019.199,70	1.482.147,60
3	Nasional	9.546.134,00	8.156.497,8	10.569.705,3	8.564.866,6	11.526.332,80	8.982.517,1	12.401.728,5	9.434.613,40	13.587.212,6	9.912.703,6

Sumber : BPS, 2018

Tabel 2.19 Pertumbuhan Kontribusi Lapangan Usaha dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2013-2017

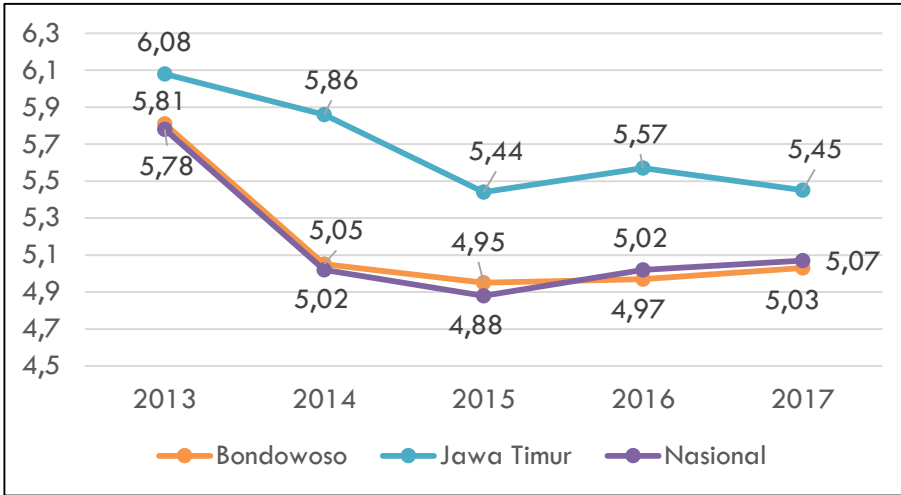
No	Lapangan Usaha	Pertumbuhan	
		Hb (%)	Hk (%)
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	37,04	11,11
2	Pertambangan dan Penggalian	34,02	12,35
3	Industri Pengolahan	47,89	24,06
4	Pengadaan Listrik dan Gas	53,19	17,31
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	35,23	19,28
6	Konstruksi	63,16	29,30
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	52,73	29,98
8	Transportasi dan Pergudangan	60,59	29,93
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	66,94	36,69
10	Informasi dan Komunikasi	45,60	33,98
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	54,84	26,79
12	Real Estate	39,49	23,15
13	Jasa Perusahaan	51,80	22,53
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	32,56	15,42
15	Jasa Pendidikan	47,53	29,54
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	52,14	28,46
17	Jasa Lainnya	40,64	21,68
	PDRB	45,49	21,55

Sumber: Data diolah Bappeda, 2018



Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu yang diukur dari perbedaan nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Salah satu cara agar pembangunan ekonomi berhasil adalah dengan memadukan kekuatan potensi segitiga ekonomi bangsa yaitu mengembangkan lapangan usaha kategori pertanian, melaksanakan industrialisasi dan memajukan lapangan usaha kategori jasa-jasa. Sehingga pengembangan ketiga kategori lapangan usaha di Kabupaten Bondowoso yaitu lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, lapangan usaha kategori industri pengolahan dan lapangan usaha kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor saling memperkuat satu sama lain. Berkembangnya lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan dan perikanan yang kuat akan memberikan landasan bagi pengembangan industri berbahan baku komoditi pertanian, kehutanan dan perikanan yang bernilai tambah tinggi. Industri pengolahan yang tumbuh pesat akan menyerap produksi komoditi pertanian, kehutanan dan perikanan sekaligus meningkatkan volume perdagangan secara simultan diikuti pengembangan kategori jasa-jasa serta lapangan usaha kategori yang lain



Gambar 2.15 Laju Pertumbuhan Riil PDRB (Persen) Tahun 2013-2017

tertentu dengan tahun sebelumnya. Perekonomian akan mengalami pertumbuhan apabila jumlah total output produksi barang dan penyediaan jasa tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya. Dapat dilihat bahwa selama periode tahun 2013-2017 lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makanan minum menunjukkan pertumbuhan tertinggi sebesar 37,59% dan yang terendah adalah pertambangan dan penggalian sebesar 10,12% mengingat sifatnya yang tidak sustain terkait dengan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terbarukan.

Selama tahun 2013-2017 atas dasar harga berlaku menunjukkan bahwa lima besar pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha konstruksi sebesar 63,95% diikuti jasa keuangan dan asuransi sebesar 58,88%, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 55,30%, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda sebesar 55,24% dan lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 47,76%.

Dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso mengalami fluktuasi dan pada tahun 2013- 2015 mengalami perlambatan dan bahkan tahun 2015 dan 2016 berada di bawah 5 (lima) persen. Walaupun menunjukkan peningkatan pada tahun 2015 dan 2016, tentunya hal ini juga dampak dari perekonomian nasional yang



juga mengalami perlambatan termasuk juga Provinsi Jawa Timur. Hal ini juga seiring dengan menurunnya harga-harga ekspor komoditi utama. Disamping kondisi ekonomi global yang belum membaik, juga disebabkan kebijakan pemerintah yang kurang kondusif bagi dunia usaha diantaranya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif Dasar Listrik (TDL) dan tingginya tingkat suku bunga bank (*BI rate*) yang memicu naiknya harga kebutuhan pokok maupun komoditas lain. Sehingga meskipun pada awal tahun 2015 pemerintah menurunkan harga BBM, dan kondisi sudah stabil hingga tahun 2016, tetapi tidak diikuti atau di respon dengan

turunnya harga kebutuhan pokok maupun harga komoditi lain. Pada tahun 2016 perekonomian Kabupaten Bondowoso mengalami peningkatan dan tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso kembali meningkat diatas 5 (lima) persen bahkan mendekati pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,07%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso masih di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur, namun laju inflasi di Kabupaten Bondowoso lebih rendah dan bahkan menurun pada tahun 2016 dan 2017. Sehingga yang perlu dilakukan adalah mempertahankan momentum peningkatan pertumbuhan ekonomi, mengingat di Kabupaten Bondowoso pola kecenderungan pertumbuhan dengan laju inflasi yang lebih stabil.

2. Laju Indeks Implisit

Laju pertumbuhan indeks implisit menunjukkan perkembangan harga tingkat produsen untuk masing-masing kategori maupun PDRB. Perkembangan laju Indeks Implisit/ laju inflasi tingkat

produsen cukup fluktuatif, laju indeks implisit Kabupaten Bondowoso berada pada level 4%-6%. Pada tahun 2013 laju indeks implisit berada pada angka 4,81% dan terus meningkat sampai pada tahun 2015 dengan angka 5,56%. Pada tahun 2016 mulai menurun dan terus menurun pada tahun 2017 dengan angka 2,98%. Pada tingkat ini usaha-usaha baru di Kabupaten Bondowoso akan terus tumbuh sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Perkembangan tingkat inflasi di Kabupaten Bondowoso selama tahun 2013 – 2017 disajikan pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20 Rata-rata Laju Indeks Implisit Tahun 2013-2017 Kabupaten Bondowoso

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata
Bondowoso	4,81	5,54	5,56	4,32	2,98	4,64
Jawa Timur	4,37	5,09	4,31	4,02	3,08	4,17
Nasional	4,97	5,44	3,98	2,44	4,27	4,22

Sumber: BPS, 2018

3. PDRB Perkapita

PDRB perkapita dipengaruhi besaran PDRB dan jumlah penduduk. PDRB perkapita penduduk Kabupaten Bondowoso meningkat selama kurun waktu 2013-2017 baik atas dasar harga berlaku maupun konstan. PDRB perkapita penduduk pada tahun 2013 yaitu Rp.15.665.000,- meningkat menjadi Rp.22.313.300,- pada tahun 2017.

Tabel 2.21 PDRB Perkapita Tahun 2013-2017 Kabupaten Bondowoso

Tahun	PDRB Perkapita (Rp.) HB	PDRB Perkapita (Rp.) HK
2013	15.665.000	13.469.900
2014	17.272.300	14.071.900
2015	19.030.000	14.686.800
2016	20.732.800	15.338.600
2017	22.313.300	16.030.300

Sumber: *BPS Kabupaten Bondowoso, ** Data diolah (Angka sangat sementara)



4. Disparitas Pendapatan

Nilai indeks Gini sebagai gambaran tingkat ketimpangan distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Bondowoso tergolong rendah, yaitu sebesar 0,28 pada tahun 2013 walaupun mengalami kenaikan menjadi 0,32 pada tahun 2015 (data terakhir BPS) tetapi di tingkat provinsi Jawa Timur masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan, yang dihitung menggunakan pendekatan tingkat pengeluaran perkapita penduduk dalam sebulan di Kabupaten Bondowoso tidak timpang, dengan struktur distribusi pendapatan yang merata pada tingkat pendapatan rendah.

Tabel. 2.22 Gini Rasio Kabupaten Bondowoso Tahun 2013-2017

Provinsi/ Kabupaten	Gini Rasio				
	2013	2014	2015	2016	2017
Bondowoso	0,28	0,27	0,32	0,35	0,32
Jawa Timur	0,36	0,37	0,42	0,40	0,40

Sumber : BPS Jawa Timur, 2018

Hal ini sesuai dengan gambaran kondisi kesejahteraan berdasarkan kriteria BPS, bahwa tahun 2016 sebanyak 44,47% penduduk Kabupaten Bondowoso yang masuk golongan pengeluaran antara

Rp.300.000,- - Rp.499.999,- perkapita perbulan. Persentase terendah sebesar 1,25% berada pada golongan pengeluaran antara Rp.150.000,- - Rp.199.999,- perkapita perbulan. Pengeluaran rata-rata perkapita perbulan untuk kelompok makanan mencapai Rp.342.531,-

sementara untuk kelompok non makanan sebesar Rp.261.905,-. Pada kelompok makanan, pengeluaran kelompok makanan dan minuman sedikit lebih banyak dibandingkan dengan kelompok padi padian, sementara pada kelompok non makanan, pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga paling tinggi dibanding barang-barang lainnya.

5. Kemiskinan

Indikator tingkat kemiskinan yang digunakan adalah kemiskinan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan dari sisi pengeluaran, sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Adapun perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bondowoso disajikan dalam Tabel 2.23.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2013 di Kabupaten Bondowoso diperoleh jumlah masyarakat miskin mencapai sebesar 115.300 jiwa (15,29%) dan dalam perkembangannya menurun pada tahun 2017 berdasarkan

Tabel 2.23 Jumlah dan Persentase, P1, P2 dan Garis Kemiskinan Kabupaten Bondowoso Tahun 2013-2017

No	Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Penduduk miskin (jiwa)	115.300	111.900	113.720	114.630	111.660
2	Persentase Kemiskinan (%)	15,29	14,76	14,96	15,00	14,54
3	Indek Kedalaman (P1)	2,06	2,28	1,93	2,54	2,11
4	Indeks Keparahan (P2)	0,50	0,60	0,39	0,64	0,48
5	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	290.792	299 819	313.734	331.975	343.124

Sumber: BPS Kabupaten Bondowoso, 2018

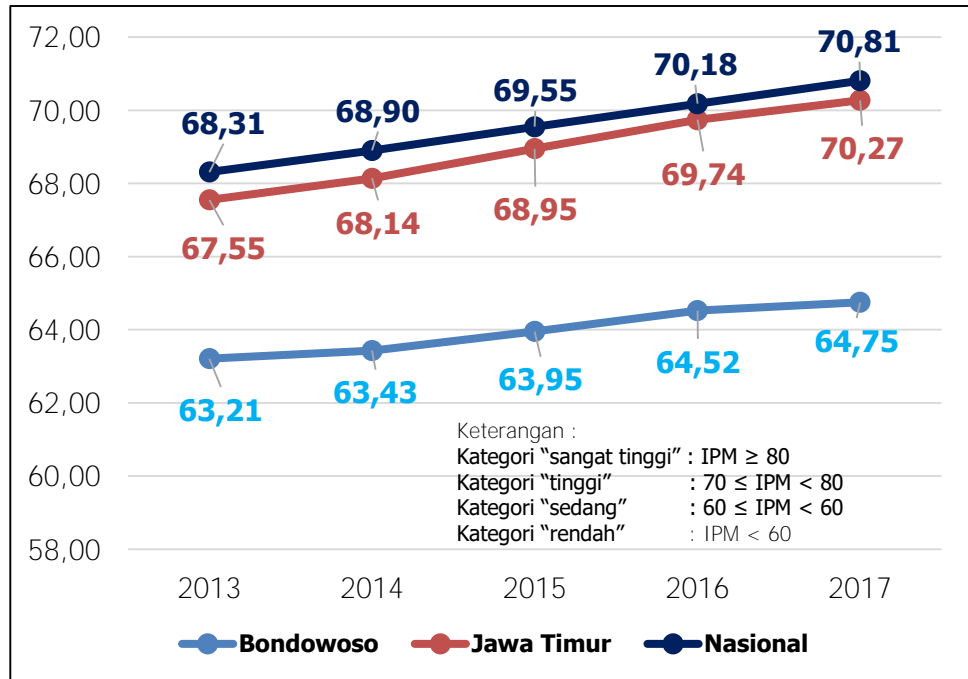
Pendataan Sosial Ekonomi BPS menjadi sebesar 111.660 Jiwa (14,54%), sehingga pengurangan jumlah penduduk miskin adalah sebanyak 3.640 jiwa



selama kurun waktu 4 tahun atau rata-rata sebanyak 910 jiwa/tahun.

mengalami peningkatan sebagaimana Gambar 2.16.

Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dan Nasional, kemiskinan di Kabupaten Bondowoso berada diatas tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan Nasional, dengan perbandingan pada tahun 2013 tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur sebesar 12,73%, tingkat kemiskinan nasional sebesar 11,47%, sedangkan tingkat kemiskinan Kabupaten Bondowoso sebesar 15,29%. Pada tahun 2017 tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur sebesar 11,20%, tingkat kemiskinan nasional sebesar 10,12% sedangkan tingkat kemiskinan Kabupaten Bondowoso sebesar 14,54%.



Gambar 2.16 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bondowoso Tahun 2013-2017

Berdasarkan gambar di atas, IPM Kabupaten Bondowoso pada tahun 2013 mencapai angka 63,21% dan meningkat menjadi 64,75% pada tahun 2017 atau berada pada kategori sedang. Peningkatan angka IPM menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat terus berkembang didukung oleh akses terhadap kebutuhan dasar yang semakin membaik. Namun demikian jika dibandingkan dengan IPM Jawa Timur dan Nasional yang berada pada kategori tinggi maka pencapaian IPM Kabupaten Bondowoso masih cukup jauh. Pada tahun 2017 selisih sebesar 5,52 poin dibanding Provinsi Jawa Timur dan selisih sebesar 6,06 poin dibanding Nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pencapaian IPM secara lebih terintegrasi.

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui bagaimana bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan ukuran keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Komponen pembentuk IPM adalah angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. IPM Kabupaten Bondowoso selama kurun waktu 2013-2017 terus

7. Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2013 sebesar 5,48 tahun meningkat hingga tahun 2017 menjadi sebesar 5,55



tahun. Peningkatan angka rata-rata lama sekolah menunjukkan semakin banyak penduduk usia 25 tahun ke atas yang menamatkan sekolah. Namun demikian jika dibandingkan pada tahun 2017, Provinsi Jawa Timur memiliki angka rata-rata lama sekolah mencapai 7,34 tahun dan nasional mencapai 8,10 tahun. Kabupaten Bondowoso termasuk kabupaten yang mempunyai tingkat pendidikan rendah yang ditamatkan oleh penduduk usia 15 tahun keatas.

Sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bondowoso mencapai 12,94 tahun, Provinsi Jawa Timur mencapai 13,09 tahun dan Nasional mencapai 12,85 tahun. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bondowoso lebih tinggi dibanding Nasional.

Hasil pencapaian Angka rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, disajikan dalam grafik Gambar 2.17.

8. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bondowoso tahun 2013 sebesar 65,36 tahun meningkat menjadi 66,04 tahun pada tahun 2017 atau mengalami kenaikan sebesar 0,68 tahun. Hal ini

menunjukkan bahwa rata-rata usia penduduk Kabupaten Bondowoso yang lahir pada tahun 2017 bertambah 0,68 tahun dibanding dengan penduduk yang lahir pada tahun 2013. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, AHH Kabupaten Bondowoso masih berada di bawah AHH Provinsi yang pada tahun 2017 telah mencapai sebesar 70,80 tahun dan Nasional mencapai 71,06 tahun.

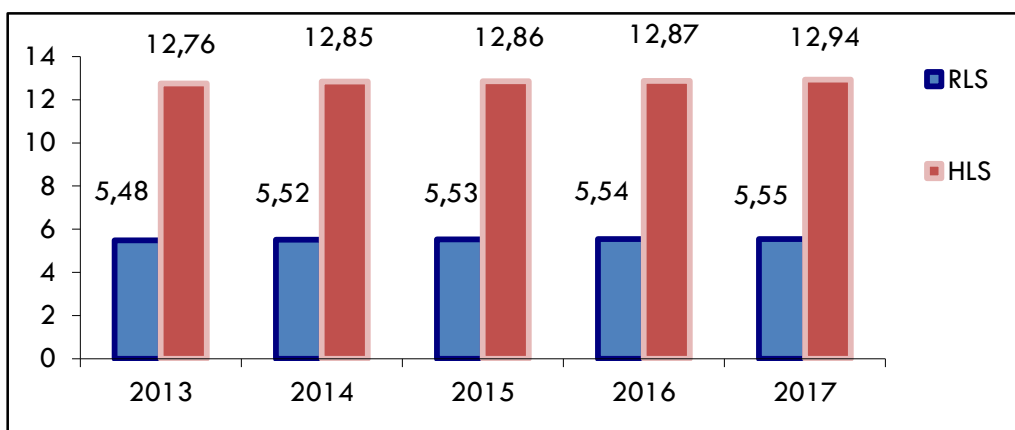
Tabel 2.24 Angka Harapan Hidup Tahun 2013-2017 Kabupaten Bondowoso

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
AHH (Tahun)	65,36	65,43	65,73	65,89	66,04

Sumber : BPS Kabupaten Bondowoso, 2018

Meskipun AHH Kabupaten Bondowoso masih dibawah AHH Provinsi tetapi setiap tahun mengalami kenaikan. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah menurunnya angka kematian bayi. Pada tahun 2013 angka kematian bayi mencapai 19 jiwa per 1.000 KH menurun menjadi 13,59 per 1.000 KH pada tahun 2017. Angka Kematian Ibu Melahirkan tahun 2013 mencapai 206,44 per 100.000 KH, menjadi 146,63 per 100.000 KH pada tahun 2017 dan Persentase Balita dengan Gizi Buruk tahun 2013 mencapai 1,85% menurun menjadi 1,04% pada tahun 2017.

Rendahnya AHH di Kabupaten Bondowoso disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :



Gambar 2.17 Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Tahun 2013-2017 Kabupaten Bondowoso



- 1) Tingginya angka pernikahan usia dini.
- 2) Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap gizi.
- 3) Tingginya angka kemiskinan.
- 4) Minimnya dokter spesialis kandungan di Kabupaten Bondowoso.
- 5) Kondisi tempat pelayanan di Puskesmas, Pustu, Ponkesdes masih kurang layak.
- 6) Masih kurangnya alat kesehatan di Puskesmas dan RSUD khususnya untuk persalinan dan perawatan bayi.
- 7) Masih banyak masyarakat yang melakukan persalinan melalui dukun.

(kesempatan) kerja semakin ketat yang berdampak penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka yang berarti semakin banyak tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan. Tingkat kesempatan kerja di Kabupaten Bondowoso tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26 Tingkat Kesempatan Kerja di Kabupaten Bondowoso Tahun 2013-2017

Rincian	2013	2014	2015	2016*	2017
Tingkat Kesempatan Kerja (%)	97,11	97,56	98,25	98,35	97,91

Sumber : BPS Kabupaten Bondowoso 2014-2016

*DPMPSTP dan Naker Kabupaten Bondowoso, 2018

9. Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Bondowoso selama tahun 2013-2017 tergolong rendah sesuai klasifikasi status gizi yang ditetapkan WHO yaitu dibawah 10%. Pada tahun 2013 mencapai sebanyak 1,85% dari total jumlah balita yang ada, sedangkan tahun 2017 menurun mencapai sebanyak 1,04%. Persentase balita gizi buruk sebagaimana Tabel 2.25.

Tabel 2.25 Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2013-2017 Kabupaten Bondowoso

Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Balita Dengan Gizi Buruk	(%)	1,85	0,47	1,31	1,40	1,04

Sumber : LKPJ AMJ Bupati Bondowoso, 2018

10. Kesempatan Kerja

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) tahun 2017 sebesar 97,91% meningkat dari tahun 2013 sebesar 97,11%. Peningkatan TKK menunjukkan bahwa semakin banyak angkatan kerja yang mendapatkan pekerjaan meskipun tingkat kompetisi

Pola pergeseran jenis lapangan pekerjaan penduduk juga terjadi di Kabupaten Bondowoso seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di sektor sekunder dan tersier, akan tetapi sektor primer khususnya lapangan usaha pertanian masih menjadi sektor yang dominan.

Perkembangan penduduk usia kerja diatas usia 15 tahun dari Tahun 2013 (605.169 jiwa) sampai dengan 2017 (606.189 jiwa) naik sebesar 0,17%, peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 14,21%, angkatan kerja yang telah bekerja sebesar 97,91% dan Tingkat Pengangguran sebesar 2,09%.

Pada tahun 2017 jumlah angkatan kerja sebanyak 606.189 orang, dari angkatan kerja tersebut sebanyak 435.046 orang yang bekerja, sedangkan pengangguran terbuka mencapai 9.286 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun dari tahun 2013-2017 dari sebesar 2,89% menjadi 2,09%. Pada tahun 2013 jumlah pengangguran sebanyak 11.236 orang dan tahun 2017 sebanyak 9.286 orang, mengalami penurunan sebesar 28,00% selama 5 tahun. Hal ini yang disebabkan semakin membaiknya perekonomian nasional dan regional sehingga menunjang upaya pemerintah daerah dalam



meningkatkan peluang usaha terbuka yang berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2013 mencapai 64,28% meningkat pada tahun 2017 sebesar 73,29%. Namun demikian tahun 2017 jumlah pengangguran terbuka meningkat sebanyak 2.144 orang jika dibandingkan tahun 2016, hal ini disebabkan karena ketersediaan lapangan pekerjaan jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan tenaga kerja baru belum seimbang, disamping itu kompetensi tenaga kerja yang tersedia belum sesuai dengan kesempatan kerja yang ada, sehingga masih diperlukan pelatihan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja dan mediasi tenaga kerja ke pasar kerja khususnya dari kecepatan penyampaian informasi. Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Bondowoso tahun 2013 – 2017 disajikan pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017
1	Usia Kerja (Jiwa)	605.169	631.218	595.589	603.895	606.189
2	Angkatan Kerja (Jiwa)	389.032	388.233	424.851	433.580	444.332
3	Bukan Angkatan Kerja (Jiwa)	216.137	242.985	170.738	170.345	161.857
4	Bekerja (Jiwa)	377.796	378.767	417.437	426.438	435.046
5	Pengangguran Terbuka (Jiwa)	11.236	9.466	7.414	7.142	9.286
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,89	2,44	1,75	1,65	2,09
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	64,28	61,51	71,33	72,00	73,29

Sumber : BPS Kabupaten Bondowoso, 2014-2018

* DPMPSTP dan Naker Kabupaten Bondowoso, 2017 (Data BPS tidak tersedia)

11. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh

dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparaturnya penyelenggaraan pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dalam penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan hasil survey persepsi pada tahun 2017 di Kabupaten Bondowoso sebagai penyelenggara layanan kepada masyarakat secara umum diperoleh hasil pengukuran sebesar 80,03, jika dibandingkan dengan standar pengukuran kinerja nasional, skor ini termasuk tinggi.

12. Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan mengindikasikan kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan. Pendapatan daerah Kabupaten Bondowoso, masih mengandalkan sumber dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak. Kontribusi dana perimbangan dalam struktur APBD masih sangat tinggi, sehingga optimalisasi terhadap sumber pendapatan yang lain menjadi fokus perhatian pemerintah daerah. Selama tahun 2013-2017 persentase PAD terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Bondowoso terus mengalami peningkatan.

Tahun 2013 kontribusi PAD mencapai 6,28% dan meningkat tahun 2017 mencapai 11,90%. Kontribusi penerimaan Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan



Dana Bagi Hasil (DBH) selama periode 2013-2017 masih sangat dominan yaitu berkisar antara 58,41% sampai 70,81% terhadap total pendapatan daerah. Sedangkan kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah berkisar 20,00% sampai 32,76% dari total Pendapatan. Persentase PAD Terhadap Pendapatan disajikan dalam tabel 2.28.

13. Nilai Opini BPK

Sebagaimana ketentuan perundang-undangan, dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel dan transparan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun pelaporan keuangan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan tahap audit. Berikutnya berdasarkan opini hasil audit dan pemeriksaan yang dilakukan, diberikan penilaian. LKPD Pemerintah Kabupaten Bondowoso dari kurun waktu tahun 2013-2017 mendapatkan penilaian dari BPK yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

14. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan

Kinerja pola pangan harapan menunjukkan kesadaran masyarakat dalam pemenuhan gizi keluarga. Untuk mencapai konsumsi energi dan PPH yang ideal perlu diimbangi dengan peningkatan konsumsi umbi-umbian dan sumber karbohidrat lainnya. Meskipun tren konsumsi umbi-umbian mengalami peningkatan, namun konsumsi beras masih mendominasi kontribusi energi dari pangan sumber karbohidrat. Hal ini menyebabkan jumlah agregat kebutuhan konsumsi beras di Kabupaten Bondowoso masih tinggi. Kondisi ini menunjukkan konsumsi energi penduduk masih belum memenuhi kaidah gizi seimbang yang dianjurkan. Untuk itu, di masa mendatang pola konsumsi pangan masyarakat diarahkan pada pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman. Pola konsumsi pangan yang ideal digambarkan dengan skor PPH 100. Pencapaian skor PPH berdasarkan angka kecukupan energi 2.100 Kkal/Kapita/hari di Kabupaten Bondowoso disajikan dalam Tabel 2.29

Tabel 2.28 Persentase PAD Terhadap Pendapatan Tahun 2013 - 2017

URAIAN	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
PENDAPATAN	1.266.838.948.992,13	1.534.483.291.061,68	1.800.277.754.980,00	1.945.061.615.767,86	1.924.903.618.063,64
PENDAPATAN ASLI DAERAH	79.559.722.884,13	134.684.701.401,68	158.974.210.144,00	177.025.949.242,13	229.151.109.430,64
1. Pendapatan Pajak Daerah	11.206.732.325,00	21.279.683.953,00	22.428.418.167,15	24.822.529.005,00	29.749.104.709,45
2. Hasil Retribusi Daerah	19.862.949.933,00	12.644.635.114,00	17.521.087.192,75	15.602.635.363,75	16.743.731.886,67
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.465.620.367,18	3.541.490.767,77	3.650.499.964,02	3.749.916.351,00	3.805.729.059,48
4. Lain-lain PAD yang Sah	45.024.420.258,95	97.218.891.566,91	115.374.204.820,08	132.850.868.522,38	178.852.543.775,04
Persentase PAD Terhadap Pendapatan	6,28	8,78	8,83	9,10	11,90

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, 2018

Tabel 2.29 Skor PPH Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 - 2017

Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Pola Pangan Harapan	%	80,21	81,81	78,90	79,16	72,60

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso, 2018





2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Pendidikan

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Perkembangan PAUD, TK dan RA di Kabupaten Bondowoso tahun 2013 - 2017 disajikan dalam Tabel 2.30.

Tabel 2.30 Perkembangan PAUD, TK dan RA Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017*
1	Tenaga Pendidik:					
	- Kelompok Bermain	2.108	2.708	2.369	2.341	1.926
	- TK & RA	1.711	2.236	2.325	2.014	2.200
2	Jumlah Sekolah:					
	- Kelompok Bermain	1.039	1.039	1.039	1.038	1.009
	- TK & RA	358	358	550	546	567
3	Jumlah Siswa:					
	- Kelompok Bermain	32.671	33.647	56.229	36.994	32.264
	- TK & RA	14.385	15.839	47.744	20.342	22.429
4	Rasio Guru : Murid					
	- Kelompok Bermain	1:16	1:12	1:54	1:16	1:17
	- TK & RA	1:8	1:7	1:21	1:10	1:10
5	Rasio Sekolah : Murid					
	- PAUD	1:32	1:32	1:54	1:36	1:32
	- TK & RA	1:40	1:44	1:87	1:37	1:40

Sumber : LKPJ AMJ Bupati Bondowoso, 2018

2. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Pencapaian indikator pendidikan angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni di Kabupaten Bondowoso tahun 2013 - 2017 disajikan dalam Tabel 2.31.

APK SD/MI/Paket A dan APM SD/MI/Paket A di Kabupaten Bondowoso meningkat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Kondisi ini merupakan indikasi positif perkembangan pendidikan

dasar, karena sebagian besar siswa adalah kelompok umur yang sesuai berdasarkan jenjang pendidikannya. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Bondowoso sedang menempuh pendidikan pada Sekolah Dasar (SD).

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B mengalami kenaikan dari 96,58% pada tahun 2013 menjadi 100,46% pada tahun 2017 sedangkan Angka

Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B juga

Tabel 2.31 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Tahun 2013-2017 (%)

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Angka Partisipasi Kasar:					
	PAUD 0-6 tahun	67,97	68,41	72,87	76,95	82,91
	PAUD 3-6 tahun	85,90	86,48	89,75	88,92	89,76
	SD/MI/Paket A	103,13	100,28	100,92	101,32	110,80
	SMP/MTs/Paket B	96,58	97,63	102,06	101,29	100,46
	SMA/SMK/MA/Paket C	76,74	86,28	86,18	86,71	-
2	Angka Partisipasi Murni:					
	SD/MI/Paket A	96,58	99,78	99,43	99,83	99,88
	SMP/MTs/Paket B	88,29	89,28	92,14	92,43	93,93
	SMA/SMK/MA/Paket C	68,94	77,65	77,90	79,75	-

Sumber : LKPJ AMJ Bupati Bondowoso, 2018



mengalami peningkatan, pada tahun 2013 mencapai 88,29% meningkat menjadi 93,93% pada tahun 2017, yang mengindikasikan semakin banyak jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah pada tingkat SMP.

Beberapa faktor yang mempengaruhi APK dan APM pada SMA/SMK/MA/Paket C diantaranya adalah pemahaman yang mulai tumbuh terhadap pentingnya pendidikan menengah khususnya SMA/SMK/MA/Paket C, terutama di kantong-kantong kemiskinan. Sehingga kecenderungan memilih bekerja setelah tamat SMP menjadi berkurang.

Pencapaian APM Kabupaten Bondowoso secara rata-rata masih lebih baik dari pencapaian Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017. Pencapaian APM provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 untuk APM SD/MI/SDLB/Paket A sebesar 97,24%, APM SMP/MTs/SMPLB/Paket B sebesar 93,93%, dan APM SMA/SMK/MA/SMA LB/Paket C sebesar 69,02%. Pencapaian rata – rata APK Kabupaten Bondowoso juga lebih tinggi dari pada APK Provinsi Jawa Timur pada setiap jenjang usia pendidikan yang berimplikasi bahwa prosentase siswa belajar (diluar dan dalam jenjang usia sekolah) di Kabupaten Bondowoso lebih besar daripada provinsi Jawa Timur. Adapun APK Provinsi Jawa Timur untuk jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A sebesar 104,9%, SMP/MTs/SMPLB/Paket B sebesar 104,86% dan SMA/SMK/MA/SMA LB/Paket C sebesar 89,39%.

3. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT)

Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah setara SD selama tahun 2015-2017 mengalami penurunan dari 40,88% menjadi 32,51%. Untuk penduduk yang pendidikan

tertingginya setara SD menurun menjadi 28,17%. Sementara untuk penduduk yang pendidikan tertinggi setara SMP meningkat dari 13,67% tahun 2015 menjadi 17,05% tahun 2017. Untuk penduduk yang menamatkan pendidikannya setara SMA meningkat dari 8,83% menjadi 18,61% tahun 2016 dan menurun tahun 2017 menjadi 17,14%. Sedangkan penduduk yang menamatkan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi menurun dari 7,14% (2015) menjadi 5,13%(2017), hal ini dimungkinkan karena mengikuti jenjang perguruan tinggi di luar Kabupaten Bondowoso. Fluktuasi ini yang menyebabkan rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Bondowoso masih berada pada kisaran 5-6 tahun.

Tabel 2.32 Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (%) Tahun 2015 - 2017

No.	Uraian	2015	2016	2017
1.	Tidak Punya Ijazah SD	40,88	31,20	32,51
2.	Setara SD	29,50	35,09	28,17
3.	Setara SMP	13,67	10,64	17,05
4.	Setara SMA	8,83	18,61	17,14
5.	> SMA	7,14	4,47	5,13
JUMLAH		100	100	100

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2015-2017

4. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2013 sebesar 81,22% atau sebanyak 18,78% penduduk usia diatas 15 tahun yang buta huruf, dan angka melek huruf pada tahun 2017 mencapai 81,59%, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat 18,41% penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih belum dapat membaca dan menulis. Hasil analisis Angka Melek Huruf, dapat disajikan dalam Tabel 2.33.



Tabel 2.33 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2013-2017
Kabupaten Bondowoso

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	% Angka Melek Huruf	81,22	86,91	85,29	84,31	81,59
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	577.585	586.974	590.273	593.321	596.312
3	Jumlah penduduk usia 10 tahun keatas	638.328	644.486	648.096	651.432	654.706

Sumber: BPS Jawa Timur, 2014-2018

Dari data perkembangan angka melek huruf tersebut, apabila ditinjau menurut jenis kelamin, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara penduduk laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2017, persentase angka melek huruf penduduk laki-laki berada pada kisaran 87,58% dari penduduk laki-laki usia 15 tahun keatas, sedangkan penduduk perempuan berada pada kisaran 76,05% dari penduduk perempuan usia 15 tahun keatas.

5. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Secara umum Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada pendidikan dasar meningkat selama tahun 2013-2017 disajikan dalam Tabel 2.34.

Penduduk kelompok usia 7-12 tahun secara keseluruhan (100%) masih bersekolah. Pada penduduk kelompok usia 13-15 tahun yang meningkat sebesar 5,09 poin.

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) tingkat pendidikan dasar menurut kecamatan sebagaimana Tabel 2.35.

Pencapaian APS pada tingkat SD/MI dan SMP secara umum merata di seluruh kecamatan, hanya pada beberapa kecamatan yang capaiannya belum maksimal.

Tabel 2.34 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Tahun 2013-2017 Kabupaten Bondowoso

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah murid usia 7-12 thn	73.022	73.205	70.695	68.806	68.542
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	73.176	73.362	70.695	68.806	68.542
1.3.	APS SD/MI (%)	97,42	98,98	100	100	100
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah murid usia 13-15 thn	31.551	30.778	31.493	31.165	35.851
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	34.317	34.474	33.470	32.528	37.381
2.3.	APS SMP/MTs (%)	90,85	92,58	94,09	95,81	95,91

Sumber : BPS Kabupaten Bondowoso, 2018



Tabel 2.35 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Tahun 2017 Menurut Kecamatan Kabupaten Bondowoso

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Σ Murid usia 7-12 thn	Σ Penduduk Usia 7-12 th	APS (%)	Σ Murid Usia 13-15 thn	Σ Penduduk Usia 13-15 th	APS (%)
1	Maesan	4352	4352	100	5446	2482	219,42
2	Grujugan	3371	3371	100	1099	1871	58,74
3	Tamanan	3564	3564	100	1527	1855	121,49
4	Jambesari Ds	3455	3455	100	2086	1957	106,60
5	Pujer	3231	3231	100	1470	1869	127,15
6	Tlogosari	3822	3822	100	1457	2202	151,14
7	Sukosari	1180	1180	100	1041	696	149,57
8	Sumber Wringin	3002	3002	100	1053	1640	155,75
9	Tapen	2618	2618	100	2308	1591	145,07
10	Wonosari	3110	3110	100	1877	1834	102,35
11	Tenggarang	3740	3740	100	1182	1887	159,65
12	Bondowoso	6914	6914	100	4828	3704	130,35
13	Curahdami	2942	2942	100	1081	1605	148,48
14	Binakal	1417	1417	100	803	803	100,00
15	Pakem	1963	1963	100	725	1205	166,21
16	Wringin	3167	3167	100	1902	1777	107,04
17	Tegalampel	2230	2230	100	593	1273	214,68
18	Taman Krocok	1174	1174	100	373	710	190,35
19	Klabang	1510	1510	100	541	781	144,37
20	Botolinggo	2695	2695	100	1191	1484	124,61
21	Ijen	1072	1072	100	326	677	207,67
22	Prajeakan	2059	2059	100	1066	1198	112,37
23	Cermee	4004	4004	100	1876	2280	121,54
Jumlah		68.542	68.542	100	35.851	37.381	95,91

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso, 2018

6. Angka Putus Sekolah

Perkembangan angka putus sekolah di Kabupaten Bondowoso tahun 2013-2017 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.36 Angka Putus Sekolah Tahun 2013-2017 Kabupaten Bondowoso

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	SD/MI	0,30	0,22	0,23	0,22	0,21
2.	SMP/MTs	0,30	0,26	0,25	0,24	0,23

Sumber : LKPJ-AMJ Bupati Bondowoso, 2018

7. Angka Kelulusan

Perkembangan angka kelulusan di Kabupaten Bondowoso tahun 2013-2017 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.37 Angka Kelulusan Tahun 2013 - 2017 Kabupaten Bondowoso

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	SD/MI	99,87	100	100	100	100
2.	SMP/MTs	99,59	99,89	100	100	100

Sumber : LKPJ-AMJ Bupati Bondowoso, 2018

**8. Angka Transisi**

Peningkatan APM SD/MI mendorong terjadinya peningkatan Angka Transisi SD/MI ke SMP/MTs, hal ini merupakan wujud meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Angka transisi SD/MI ke SMP/MTs tahun 2013 sebesar 96,30%, artinya sebagian kecil (3,70%) anak lulusan SD tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, angka ini meningkat menjadi 96,70% pada tahun 2017.

9. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Perkembangan ketersediaan sekolah (gedung) pada jenjang pendidikan SD/MI rasionya stabil mendekati rasio ideal, sedangkan pada jenjang pendidikan SMP/MTs rasionya belum mencapai ideal.

Rasio ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah jenjang pendidikan dasar menurut kecamatan sebagaimana Tabel 2.40.

Tabel 2.38 Angka Transisi Tahun 2013 - 2017 Kabupaten Bondowoso

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI ke SMP/MTs	96,30	98,29	98,31	98,32	96,70
2	SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	81,17	93,80	93,82	96,95	-

Sumber : LKPJ-AMJ Bupati Bondowoso, 2018

Tabel 2.39 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 – 2017

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI					
1.1	Jumlah gedung sekolah	618	618	521	517	521
1.2	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	73.176	73.362	70.695	68.806	68.542
1.3	Rasio	1:118	1:119	1:136	1:133	1:133
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah gedung sekolah	240	240	228	229	229
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	34.317	34.474	33.470	32.528	32.209
2.3	Rasio	1:143	1:144	1:147	1:142	1:141

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso, 2018



Tabel 2.40 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Bondowoso Tahun 2017

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Σ gedung sekolah	Σ penduduk usia 7-12 th	Rasio	Σ gedung sekolah	Σ penduduk usia 13-15 th	Rasio
1	Maesan	30	4.352	1:145	12	2.482	1:207
2	Grujugan	29	3.371	1:116	10	1.871	1:187
3	Tamanan	24	3.564	1:149	11	1.855	1:169
4	Jambesari Ds	28	3.455	1:123	19	1.957	1:103
5	Pujer	26	3.231	1:124	13	1.869	1:144
6	Tlogosari	46	3.822	1:83	18	2.202	1:122
7	Sukosari	20	1.180	1:59	8	696	1:87
8	Sumber Wringin	24	3.002	1:125	10	1.640	1:164
9	Tapen	29	2.618	1:90	6	1.591	1:265
10	Wonosari	33	3.110	1:94	12	1.834	1:153
11	Tenggarang	28	3.740	1:34	15	1.887	1:126
12	Bondowoso	39	6.914	1:177	19	3.704	1:195
13	Curahdami	26	2.942	1:113	13	1.605	1:123
14	Binakal	16	1.417	1:89	2	803	1:402
15	Pakem	18	1.963	1:109	6	1.205	1:201
16	Wringin	32	3.167	1:99	12	1.777	1:148
17	Tegalampel	16	2.230	1:40	5	1.273	1:255
18	Taman Krocok	16	1.174	1:73	3	710	1:237
19	Klabang	20	1.510	1:76	3	781	1:260
20	Botolinggo	37	2.695	1:73	11	1.484	1:135
21	Ijen	10	1.072	1:107	2	677	1:339
22	Prajekan	23	2.059	1:90	6	1.198	1:200
23	Cermee	49	4.004	1:82	12	2.280	1:190
Jumlah		521	68.542	1:133	229	32.209	1:141

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso, 2018

10. Rasio Guru/Murid

Perkembangan rasio guru dan murid pada tingkat pendidikan dasar tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel 2.41.

Perkembangan rasio guru dan murid menurut kecamatan pada jenjang pendidikan dasar sebagaimana Tabel 2.42

Tabel 2.41 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 - 2017

No.	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1 SD/MI						
1.1	Jumlah Guru	7.416	7.719	8.387	7.854	6.743
1.2	Jumlah Murid	74.645	72.743	71.023	69.058	67.725
1.3	Rasio	1:10	1:9	1:9	1:9	1:11
2 SMP/MTs						
2.1	Jumlah Guru	15.004	15.161	3.812	3.598	3.407
2.2	Jumlah Murid	32.632	31.513	31.493	31.165	33.700
2.3	Rasio	1:2	1:2	1:8	1:9	1:10

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kantor Kemenag Kabupaten Bondowoso dalam Kabupaten Bondowoso Dalam Angka, 2014-2018



Tabel 2.42 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan Tahun 2017

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Σ Guru	Σ Murid	Rasio	Σ Guru	Σ Murid	Rasio
1	Maesan	4.557	331	1:14	1.634	164	1:10
2	Grujugan	3.477	315	1:12	1.336	159	1:9
3	Tamanan	3.747	293	1:13	1.741	160	1:11
4	Jambesari Ds	3.370	312	1:11	2.217	259	1:9
5	Pujer	3.237	270	1:12	1.588	182	1:9
6	Tlogosari	4.016	471	1:9	1.560	222	1:8
7	Sukosari	1.614	213	1:8	1.075	120	1:9
8	Sumber Wringin	2.578	225	1:12	1.059	135	1:8
9	Tapen	2.366	323	1:8	1.410	115	1:13
10	Wonosari	3.285	353	1:10	2.043	218	1:10
11	Tenggarang	3.208	326	1:10	2.106	224	1:10
12	Bondowoso	8.974	621	1:15	5.658	399	1:15
13	Curahdami	2.545	281	1:10	1.232	142	1:9
14	Binakal	1.169	177	1:7	224	29	1:8
15	Pakem	1.860	158	1:12	756	86	1:9
16	Wringin	3.323	325	1:11	2.035	170	1:12
17	Tegalampel	1.920	172	1:12	565	42	1:4
18	Taman Krocok	1.151	137	1:9	181	24	1:8
19	Klabang	1.449	220	1:7	569	100	1:6
20	Botolinggo	2.828	408	1:7	1.245	144	1:9
21	Ijen	1.045	74	1:15	340	22	1:16
22	Prajekan	2.141	270	1:8	1.188	100	1:12
23	Cermee	3.865	468	1:9	1.938	191	1:11
	Jumlah	67.725	6743	1:11	33.700	3.407	1:10

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kantor Kemenag Kabupaten Bondowoso dalam Kabupaten Bondowoso Dalam Angka, 2014-2018

11. Pendidikan Luar Sekolah

Pengembangan pendidikan luar sekolah di Kabupaten Bondowoso tahun 2013-2017 yang meliputi pelaksanaan kejar paket A, B dan C selain melalui lembaga kursus dan bimbingan, disajikan dalam Tabel 2.43. Pelaksanaan pendidikan luas sekolah secara signifikan mampu meningkatkan tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan indikator lama sekolah dan jumlah penduduk yang memiliki ijazah.

12. Kualifikasi Guru jenjang SD dan SMP

Dalam upaya mencapai sasaran pendidikan bermutu, standar yang dinilai langsung berkaitan dengan mutu lulusan yang diindikasikan oleh kompetensi lulusan adalah standar pendidik yang dimiliki oleh seorang guru. Standar pendidik adalah kriteria kualifikasi akademik dan kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Kualifikasi guru jenjang pendidikan SD dan SMP selama tahun 2013-2017 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.44.



Tabel 2.43 Perkembangan Lembaga Kursus dan Bimbingan Tahun 2013 - 2017 Kabupaten Bondowoso

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kursus Menjahit	2	2	2	6	6
2	Kursus Mengemudi	3	3	3	2	2
3	Kursus Komputer	8	8	8	5	4
4	Kursus Bahasa	6	6	6	3	2
5	Kursus Akuntansi	-	-	-	-	-
6	Kursus Montir	2	2	2	1	1
7	Bimbingan Belajar	3	3	3	2	2
8	Kursus Kecantikan	-	-	-	1	1
9	Kursus Musik	1	1	1	1	1
10	Kursus Tata Rambut	11	11	11	3	3
11	Kursus Renang	4	4	4	-	-
12	Kursus Model	-	-	-	-	-
13	Kursus Tata Rias Pengantin	-	-	-	5	5
14	Kursus Tata Kecantikan Kulit	-	-	-	1	1
15	Kursus Tata Boga	-	-	-	2	2
16	SPA	-	-	-	1	1

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kantor Kemenag Kabupaten Bondowoso dalam Kabupaten Bondowoso Dalam Angka, 2014-2018

Tabel 2.44 Kualifikasi Guru jenjang SD dan SMP Berpendidikan S.1 dan D.IV Tahun 2013-2017

No	Jenjang	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD	68.63	84.84	85.04	83.02	84.57
2	SMP	79.06	87.59	88.1	92.48	92.81

Sumber : LKPJ-AMJ Bupati Bondowoso, 2018

Kualifikasi Guru jenjang SD dan SMP yang berpendidikan S.1/D.IV mengalami kenaikan sebesar 15.94% (SD) dan 13.75% (SMP). Hal ini akan berpengaruh positif terhadap kualitas pendidik sehingga mutu pendidikan juga akan meningkat.

2.3.1.2 Kesehatan

1. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Ibu (AKI) mengalami penurunan, pada tahun 2013 mencapai sebanyak 22 kasus atau 206,44 per 100.000 KH, sedangkan pada Tahun

2017 sebanyak 15 kasus atau 146,63 per 100.000 KH.

Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2013 mencapai 17,5 kasus per 1.000 KH menurun pada tahun 2015 menjadi 13,90 per 1.000 KH, dan pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan menjadi 13,59 per 1.000 KH. Tingginya AKI dan AKB berpengaruh terhadap relatif rendahnya AHH Kabupaten Bondowoso yaitu sebesar 66,04 tahun.

Perkembangan AKI dan AKB Kabupaten Bondowoso tahun 2013-2017 disajikan dalam Tabel 2.45.



Tabel 2.45 Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2013-2017 Kabupaten Bondowoso

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
AKI (Jiwa)	22	17	19	20	15
AKI per 100.000 KH	206,44	156	188	196	146,63
AKB per 1.000 KH	17,5	17	16,52	17,42	13,90

Sumber : LKPJ AMJ Bupati Bondowoso, 2018

2. Rasio Posyandu Persatuan Balita

Perkembangan Rasio posyandu per satuan balita Kabupaten Bondowoso Tahun 2013-2017 disajikan dalam Tabel 2.46

Tabel 2.46 Rasio Posyandu (%) Tahun 2013 – 2017

Jenis Sarana	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio posyandu per satuan balita	2	2	2	2	2,55

Sumber: LKPJ AMJ Bupati Bondowoso, 2018

3. Rasio Puskesmas, Ponkesdes, Pustu Per Satuan Penduduk

Sedangkan perkembangan rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk Kabupaten Bondowoso tahun 2013-2017 disajikan dalam Tabel 2.47.

Tabel 2.47 Rasio Sarana Prasarana Kesehatan (%) Tahun 2013- 2017

Jenis Sarana	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio puskesmas, ponkesdes, Pustu per satuan penduduk	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32

Sumber: LKPJ AMJ Bupati Bondowoso, 2018

Persentase jumlah puskesmas dan pusling yang berfungsi dengan baik tercapai sesuai target namun masih terdapat beberapa puskesmas dan pusling yang mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan serta terletak di daerah yang sulit dijangkau. Realisasi rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

sudah mencapai target namun masih diperlukan penambahan prasarana kesehatan di masyarakat agar dapat melayani kebutuhan masyarakat seiring dengan pertumbuhan penduduk.

4. Rasio Dokter, Perawat dan Bidan Per Satuan Penduduk

Rasio dokter persatuan penduduk dan rasio tenaga medis persatuan penduduk mengalami kenaikan sebesar 0,01 poin sebagaimana Tabel 2.48.

Tabel 2.48 Rasio Tenaga Kesehatan Tahun 2013 – 2017

Jenis Sarana	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio dokter per satuan penduduk	0,0001	0,0003	0,0005	0,0005	0,0005
Rasio perawat per satuan penduduk	0,004	0,004	0,004	0,003	0,003
Rasio bidan per satuan penduduk	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003

Sumber: LKPJ AMJ Bupati Bondowoso, 2018

Perkembangan sarana kesehatan di Kabupaten Bondowoso tahun 2013 - 2017 terdapat perkembangan pada sarana apotik dan posyandu yang secara lengkap disajikan dalam Tabel 2.49.



Tabel 2.49 Sarana Kesehatan Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 - 2017

No.	Jenis Sarana	2013	2014	2015	2016	2017*
1	Rumah Sakit Umum Daerah	1	1	1	1	1
2	Puskesmas	25	25	25	25	25
3	Puskesmas Pembantu	63	63	63	63	63
4	Puskesmas Keliling	25	25	25	35	38
5	Poskesdes	157	157	156	156	156
6	Poliklinik	5	5	3	7	7
7	Laboratorium Medis	5	5	5	5	5
8	Rumah Bersalin	1	1	1	1	1
9	Apotek	21	22	28	29	29
10	Toko Obat berijin	0	0	0	0	0
11	Posyandu	1.048	1.055	1.055	1.059	1.061

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso dalam Kabupaten Bondowoso Dalam Angka BPS Kabupaten Bondowoso, 2014-2017
*Dinas Kesehatan, 2018

Sedangkan perkembangan tenaga kesehatan Kabupaten Bondowoso tahun 2013 - 2017 disajikan dalam Tabel 2.50.

Tabel 2.50 Tenaga Kesehatan Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 – 2017

No.	Jenis Tenaga Kesehatan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dokter Spesialis	22	22	22	23	23
2	Dokter Umum	81	42	57	58	70
3	Dokter Gigi	35	35	37	35	33
4	Perawat	341	365	360	363	363
5	Bidan	282	282	322	318	334
6	Bidan Desa	205	216	217	215	209
7	Dukun Bermitra	383	449	441	434	439

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso dalam Kabupaten Bondowoso Dalam Angka BPS Kabupaten Bondowoso, 2014-2017

Tenaga kesehatan pada Tabel 2.49 diatas adalah tenaga kesehatan di Puskesmas-puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, sedangkan tenaga kesehatan di

RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso disajikan dalam Tabel 2.51.

Tabel 2.51 Tenaga Kesehatan RSUD Dr. H. Koesnadi Bondowoso Tahun 2013 – 2017

No.	Jenis Tenaga Kesehatan	2013	2014	2015	2016	2017*
1	Dokter Umum	2	2	20	20	20
2	Dokter Spesialis:					
-	Anak	2	2	2	1	1
-	Bedah	2	2	1	1	1
-	Penyakit Dalam	2	2	2	3	3
-	Kandungan	2	2	2	2	2
-	Saraf	1	1	1	1	1
-	Kelamin dan Kulit	1	1	0	0	0
-	THT	1	1	1	1	1
-	Radiologi	1	1	1	2	2
-	Mata	1	1	1	1	1
-	Jantung dan Pembuluh Darah	1	1	1	1	1
-	Bedah Onkologi	1	1	1	1	1
-	Orthopedi dan Traumatologi	1	1	1	1	1
-	Jiwa	1	1	1	1	1
-	Anastesiologi	1	1	1	1	1
-	Rehabilitasi Medik	1	1	1	1	1
-	Patologi Klinik	1	1	1	1	1
-	Patologi Anatomi	1	1	1	1	1
3	Dokter Gigi	1	1	3	3	3
4	Dokter Gigi Spesialis					
-	Bedah Mulut	0	0	1	1	1
-	Orthodonti	0	0	1	1	1
5	Paramedis	139	139	244	253	253
6	Penunjang Medis	68	68	87	89	89

Sumber : Rumah Sakit dr. Koesnadi Kabupaten Bondowoso dalam Kabupaten Bondowoso Dalam Angka, 2014-2017



5. Kinerja Kesehatan lainnya

Tabel 2.52 Capaian Kinerja Kesehatan Tahun 2013 – 2017

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	2013	85	85	100,00
		2014	86	81,74	95,05
		2015	87	82,19	94,47
		2016	88	86,3	98,07
		2017	89	90,4	101,57
AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	%	2013	3,61	3,61	100
		2014	≥2	2	100
		2015	≥2	2,93	100
		2016	≥2	3,51	100
		2017	≥2	7,61	100
Cakupan penderita pneumonia	%	2013	38	38	100,00
		2014	39	148	379,49
		2015	40	40	100,00
		2016	45	99,85	221,89
		2017	50	79,8	159,60
Cakupan penderita TBC BTA positif	%	2013	76	76	100,00
		2014	77	59,23	76,92
		2015	77	62,62	81,32
		2016	78	87,26	111,87
		2017	78	87,7	112,44
Cakupan penderita DBD	%	2013	61,38	61,38	100,00
		2014	51	67,71	132,76
		2015	50	120,07	240,14
		2016	50	45,86	91,72
		2017	50	43,57	87,14
Cakupan penderita Diare	%	2013	100	100	100,00
		2014	100	237	237,00
		2015	100	177,61	177,61
		2016	100	119,26	119,26
		2017	100	226	226,00
Penanganan HIV – AIDS	%	2013	100	100	100,00
		2014	100	100	100,00
		2015	100	100	100,00
		2016	100	100	100,00
		2017	100	100	100,00
Cakupan kunjungan bayi	%	2013	90	90	100,00
		2014	90	100,6	111,78
		2015	90	98,39	109,32
		2016	90	99,49	110,54
		2017	91	95,85	105,33



Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Cakupan kunjungan bumil K-4	%	2013	91,98	91,98	100,00
		2014	94	87,65	93,24
		2015	95	81,49	85,78
		2016	95	82,73	87,08
		2017	96	82,27	85,70
Cakupan pelayanan nifas	%	2013	95	95	100,00
		2014	95	96,49	101,57
		2015	95	91,53	96,35
		2016	95	93,5	98,42
		2017	96	92,87	96,74
Cakupan kunjungan neonatus	%	2013	89,92	89,92	100,00
		2014	90	104,2	115,78
		2015	90	94,64	105,16
		2016	91	96,29	105,81
		2017	91	96,21	105,73
Cakupan pelayanan anak balita	%	2013	87	87	100,00
		2014	87	88,11	101,28
		2015	90	88,78	98,64
		2016	90	91,06	101,18
		2017	90	89,93	99,92
Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	2013	93,14	93,14	100,00
		2014	95	96,14	101,20
		2015	96	99,16	103,29
		2016	97	99,4	102,47
		2017	98	100	102,04

Sumber : LKPJ-AMJ Bupati Bondowoso, 2018

Cakupan pelayanan pada penderita Pneumonia masih belum terpenuhi disebabkan masyarakat masih enggan memeriksakan diri ke petugas kesehatan sehingga cakupan menjadi lebih rendah dari fakta yang sebenarnya.

Yang menjadi perhatian penting pada Ibu Hamil dan Balita adalah status gizi. Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun. Sesuai hasil PSG tahun 2016 adalah 35,6 % dan tahun 2017 adalah 38,3 %. Tingkat stunting pada balita di Kabupaten termasuk

sangat tinggi dan perlu mendapat prioritas penanganan.

Balita Gizi Buruk pada Tahun 2013 sebesar 1,85% menurun pada tahun 2017 menjadi 1,04%, walaupun kondisi gizi masyarakat khususnya pada balita mempunyai kecenderungan semakin, namun demikian masalah gizi tetap menjadi ancaman dan perlu menjadi perhatian.

2.3.1.3 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

1. Jalan dan Jembatan

Kondisi prasarana jalan di Kabupaten Bondowoso tahun 2013 hingga tahun 2017 mengalami peningkatan. Hal ini



dapat dilihat dari jumlah jalan beraspal dan jembatan yang baik. Panjang jalan aspal tahun 2013 sepanjang 841,925 km meningkat menjadi 1.059,831 km pada tahun 2017, atau meningkat 25,88% sebagaimana Tabel 2.53.

baik, dan 19,53% (58 buah) dalam kondisi rusak.

Tabel 2.53 Kondisi Jalan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jalan Aspal (km)	841,925	967,335	972,705	981,72	1.059,831
2	Jalan makadam (km)	225,89	131,06	125,691	124,14	71,109
3	Jalan tanah (km)	250,275	242,64	242,64	235,18	210,10
4	Σ panjang jalan (km)	1.318,090	1.341,031	1.341,04	1.341,04	1.341,04

Sumber: LKPJ-AMJ Bupati Bondowoso, 2018

Namun demikian peningkatan panjang jalan beraspal belum mampu diimbangi dengan pemeliharaan jalan secara cukup, sehingga laju kerusakan jalan aspal cukup tinggi. Sedangkan jembatan jumlahnya mengalami peningkatan, pada tahun 2013 sebanyak 267 buah dan tahun 2017 sebanyak 297 atau naik sebanyak 11,24%. Kondisi jalan dan jembatan sepanjang tahun 2013 – 2017 tercantum dalam Tabel 2.54.

Kabupaten Bondowoso tidak dilintasi jalan

2. Jaringan Irigasi

Kondisi prasarana jaringan irigasi secara signifikan meningkat selama tahun 2013-2017, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah bangunan bendung dan dam, tertanganinya bangunan irigasi yang rusak, serta bertambah panjangnya saluran irigasi sekunder, tersier dan kuarter yang permanen dalam kondisi baik. Kondisi prasarana irigasi tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel 2.55.

Tabel 2.54 Kondisi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jalan Aspal (km)	841,925	967,335	972,705	981,72	1.059,831
-	Kondisi baik (km)	710,395	664,82	474,06	554,48	651,291
-	Kondisi rusak (km)	131,530	302,52	498,65	427,24	408,54
2	Jembatan (buah)	267	263	263	278	297
-	Kondisi baik (buah)	267	205	222	201	239
-	Kondisi rusak(buah)	-	58	41	77	58

Sumber: LKPJ-AMJ Bupati Bondowoso, 2018

nasional, tetapi dilintasi jalan provinsi sepanjang 68,880 Km, sedangkan jalan Kabupaten sepanjang 1.059,831 Km sampai tahun 2017 dengan kondisi baik 61,45% (651.291 m), dan rusak 38,55% (408,54 m) yang didukung oleh 297 buah jembatan meliputi 80,47% (239 buah)



Tabel 2.55 Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Bendung (buah)	438	438	438	438	438
2	Saluran sekunder (m)	163,089	163,089	163,089	163,089	163,089
3	Saluran tersier (m)	421.463	421.463	421.463	421.463	421.463
4	Bangunan pelengkap (unit)	4.367	4.367	4.367	4.367	4.367

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bondowoso, 2018

Perkembangan sarana prasarana irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Bondowoso tahun 2013 – 2017 disajikan dalam Tabel 2.56.

waduk lapangan, serta saluran primer, sekunder, tersier dan kuarter yang tersebar pada 523 Daerah Irigasi sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan

Tabel 2.56 Jumlah Jaringan Irigasi Kondisi Baik di Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ kondisi bendung yang baik	378	388	389	391	393
2	Σ kondisi saluran sekunder yang baik	133.764	134.826	135.512	135.949	136.239
3	Σ kondisi saluran tersier yang baik	244.713	251.738	255.165	258.139	259.939
4	Σ kondisi bangunan pelengkap yang baik	2.891	2.943	2.988	3.001	3.009

Sumber: LKPJ-AMJ Bupati Bondowoso, 2018

Pada tahun 2013 jumlah bendung yang baik sebanyak 378 buah meningkat menjadi 393 buah atau jumlah kondisi bendung yang baik mencapai 3,93%. Sedangkan jumlah bendung yang rusak dari 60 buah di tahun 2013 menurun menjadi 45 buah di tahun 2017.

Demikian juga dengan kondisi saluran sekunder baik dari 133.764 meter di tahun 2013 menjadi 136.239 meter di tahun 2017 atau jumlah saluran sekunder yang baik mencapai 83,54%. Demikian juga dengan kondisi saluran tersier baik meningkat dari 244.713 meter di tahun 2013 menjadi 259.939 meter di tahun 2017 atau saluran tersier yang baik mencapai 6,68%, dan bangunan pelengkap yang baik tahun 2013 sejumlah 2.891 buah menjadi 3.009 buah di tahun 2017 atau bangunan pelengkap yang baik mencapai 68,9%.

Luas lahan baku sawah di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2008 tercatat 32.385 Ha, dengan prasarana irigasi yang tersedia berupa bendung, dam,

Umum Nomor 390 Tahun 2007 yang menjadi daerah layanan irigasi di Kabupaten Bondowoso.

Kualitas sarana dan prasarana irigasi yang semakin meningkat dengan sistem pengelolaan irigasi yang semakin baik telah mampu menghasilkan sawah baru yang terlayani sistem irigasi teknis. Pada tahun 2013 baku sawah yang diairi seluas seluas 34.080 Ha, sedangkan pada tahun 2017 meningkat menjadi 37.464 Ha, yang berarti bertambah 3.384 Ha atau 9,93%. Perkembangan luas baku sawah selama kurun waktu 5 (lima) tahun disajikan pada Tabel 2.57.



Tabel. 2.57 Luasan Baku Sawah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 – 2017

No.	Jenis Sawah	2013	2014	2015	2016	2017
1	Teknis	30.011	30.260	30.837	31.236	31.352
2	Semi Teknis	1.887	2.201	2.322	2.418	2.444
3	Sederhana	2.182	3.272	2.852	3.751	3.668
	Jumlah	34.080	35.733	36.012	37.405	37.464
	Pertambahan Luas (Ha)	445	1.653	279	1.393	59
	Rata-rata per tahun (Ha)					765,8

Sumber: LKPJ-AMJ Bupati Bondowoso, 2018

3. Air Bersih dan Sanitasi

Penyediaan sarana prasarana air bersih perdesaan dilaksanakan berupa penyediaan jaringan perpipaan yang mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat desa dan bermanfaat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Cakupan rumah tangga yang menggunakan air bersih hingga tahun 2017 sebesar 58,55%, jika dibandingkan dengan pencapaian Provinsi Jawa Timur sebesar 73,44% dan secara nasional sebesar 72,01%, cakupan Kabupaten Bondowoso masih perlu terus ditingkatkan. Demikian juga dengan cakupan rumah tangga bersanitasi sebesar 55,21% pada tahun 2017, dibandingkan dengan capaian provinsi Jawa Timur sebesar 65,95% dan nasional sebesar 67,89%, maka cakupan rumah tangga bersanitasi

masih perlu ditingkatkan. Hal ini perlu dilakukan percepatan untuk mengejar ketertinggalan dan menjamin ketersediaan air dan sanitasi yang berkelanjutan, selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.58.

Disamping itu pada kawasan perkotaan, pelayanan air bersih dilaksanakan Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Dharma" Bondowoso melalui 12 sistem jaringan meliputi 1 unit BNA Bondowoso dan 11 unit UPK (Sukosari, Maesan, Tegalampel, Tapen, Prajekon, Tlogosari, Wringin, Curahdami, Pakem, Tamanan dan Tenggarang) yang menjangkau 16 kecamatan disajikan dalam Tabel 2.59.

PDAM telah berupaya untuk melaksanakan distribusi air bersih perkotaan melalui beberapa strategi, diantaranya pemberian diskon bagi pelanggan baru, peningkatan cakupan

Tabel 2.58 Kinerja Air Bersih dan Sanitasi Tahun 2013-2017

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
% rumah tangga yang menggunakan air bersih	%	2013	34,09	34,09	100
		2014	35,10	53,09	151,25
		2015	36,10	55,08	152,58
		2016	37,11	57,38	154,62
		2017	38,11	58,55	153,63
% rumah tangga bersanitasi)	%	2013	29,07	29,07	100
		2014	29,17	49,86	170,93
		2015	29,28	47,70	162,91
		2016	29,49	49,65	168,36
		2017	29,49	55,21	187,21

Sumber: LKPJ-AMJ Bupati Bondowoso, 2018



Tabel 2.59 Pelayanan Air Bersih Perkotaan oleh PDAM Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Sat	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kapasitas sumber air	L/dt	95,47	97,33	101,30	132	140,69
2	Jumlah sambungan	Unit	15.694	16.648	17.765	18.802	20.238
3	Penduduk terlayani	Jiwa	97.546	114.828	115.896	121.648	129.842
4	Prosentase pelayanan	%	12,99	15,17	15,28	15,93	16,83

Sumber: LKPJ-AMJ Bupati Bondowoso, 2018

pelayanan, peningkatan kualitas SDM, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dan penyedia Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) berupa Ijen Water, guna menarik minat masyarakat akan kebutuhan air bersihnya.

Dalam kurun waktu 2013 sampai 2017, kinerja PDAM menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun pada jumlah penduduk yang terlayani. Namun pada tahun 2017 mengalami penurunan pada kapasitas produksi dikarenakan sebagian masyarakat sudah menggunakan layanan air dari HIPPAM, PNPMP, Pamsimas, WSLIC, DD/ADD maupun non perpipaan.

4. Penataan Ruang

Dengan telah dimilikinya Perda No. 12 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bondowoso 2011-2031, beberapa Peraturan Bupati tentang ketentuan-ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, serta semakin optimalnya BKPRD dalam menangani dan mengantisipasi permasalahan penataan ruang di Kabupaten Bondowoso, maka kondisi lingkungan dan wilayah dapat tertata, terkelola, dan terkendali dengan baik.

Tabel 2.60 Capaian Kinerja Penataan Ruang Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	Ha	2013	1,38	1,38	100
		2014	1,38	1,38	100
		2015	1,39	1,38	99,28
		2016	1,39	1,38	99,28
		2017	1,4	1,39	99,29
Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	%	2013	55	55	100
		2014	60	54,55	90,92
		2015	55	55,54	100,98
		2016	55	55,8	102,29
		2017	55	57	103,6
Ruang Publik yang berubah peruntukannya	Ha	2013	0	0	-
		2014	5	0	200
		2015	5	0	200
		2016	5	0,004	199,92
		2017	5	0,003	199,94
Ketaatan terhadap RTRW	Ha	2013	98,08	98,08	100
		2014	95	99,9	105,16
		2015	95	96,03	101,08
		2016	95	96,03	101,08
		2017	95	99,9	105,16

Sumber: LKPJ-AMJ Bupati Bondowoso, 2018



Salah satu indikator kinerja penataan ruang adalah tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan permukiman sebagai unsur penyeimbang lingkungan. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan penyediaan RTH publik di kawasan perkotaan sebesar 20% dari luas kawasan perkotaan.

Selain RTH publik, pemerintah juga berkewajiban memfasilitasi penyediaan RTH privat (di lahan milik masyarakat dan swasta) sebesar 10% dari luas kawasan perkotaan. Bentuk RTH privat antara lain taman halaman rumah, kebun buah dan arena terbuka milik perorangan. Upaya menjamin penyediaan RTH privat dilakukan dengan mensyaratkan pada

Tabel 2.61 RTH Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Bondowoso Tahun 2017

No	Kawasan Perkotaan	Luas Perkotaan (Ha)	Kewajiban RTH Publik 20%	Luas RTH Publik Eksisting (Ha)	Tingkat Ketersediaan RTH Publik (%)
1	Binakal	80,76	16,15	7,78	9,63
2	Bondowoso	6720,56	1.344,11	967,46	14,40
3	Botolinggo	46,74	9,35	7,69	16,45
4	Cermee	517,08	103,42	43,61	8,43
5	Grujugan	381,32	76,26	34,95	9,16
6	Jambesari Ds	138,37	27,67	15,69	11,34
7	Klabang	350,8	70,16	52,78	15,05
8	Maesan	496,6	99,32	65,56	13,20
9	Pakem	305,06	61,01	26,13	8,57
10	Prajekan	496,0	99,19	93,03	18,76
11	Pujer	164,09	32,82	15,03	9,16
12	Sumber Wringin	113,64	22,73	13,46	11,85
13	Ijen	79,52	15,90	8,28	10,41
14	Sukosari	263,73	52,75	29,02	11,00
15	Tamanan	471,61	94,32	58,28	12,36
16	Taman Krocok	51,07	10,21	7,99	15,64
17	Tapen	546,84	109,37	81,15	14,84
18	Tlogosari	133,34	26,67	20,35	15,26
19	Wonosari	268,91	53,78	38,61	14,36
20	Wringin	357,93	71,59	30,65	8,56
	Jumlah	11.984	2.396,78	1.617,50	13,50

Sumber : Analisis Penyusunan RIPP RTHKP, 2017

Luas kawasan perkotaan di Kabupaten Bondowoso sebesar 11.984 ha yang tersebar pada 20 lokasi. Terluas adalah perkotaan Bondowoso yang mencakup 4 kecamatan, dan terkecil adalah perkotaan Taman Krocok. Dengan luasan tersebut RTH publik perkotaan seharusnya adalah 356,84 ha. Upaya penyediaan RTH publik masih sekitar 4,63% sehingga masih perlu terus ditingkatkan.

saat proses izin pemanfaatan ruang (izin lokasi, IMB) sehingga bangunan dan lahan tempat usaha/kegiatan yang dimohon harus diarahkan Koefisien dasar bangunan (KDB) dan Koefisien lantai bangunan (KLB)-nya.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau mengurangi



bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku. Sebagaimana ketentuan dalam Perda Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031, mewajibkan segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana harus memperoleh izin pemanfaatan ruang yang mengacu pada arahan RTRW Kabupaten Bondowoso.

Selama periode 2013-2017, ijin mendirikan bangunan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebanyak 5.124 ijin. Adapun secara terperinci ijin IMB yang dikeluarkan setiap tahun sebagai berikut : tahun 2008 sebanyak 250 ijin, tahun 2009 sebanyak 1.326 ijin, tahun 2010 sebanyak 2.233 ijin, tahun 2011 sebanyak 847 ijin dan tahun 2012 sebanyak 468 ijin. Penerbitan jumlah IMB pada tahun 2009 dan 2010 mengalami peningkatan cukup tajam sebagai dampak dari pelaksanaan Program Pemutihan/Dispensasi IMB Massal.

Tahun 2018 Penerbitan ijin mendirikan bangunan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, mengikuti regulasi sesuai Perda Kabupaten Bondowoso Nomor 6 tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Sedangkan syarat-syarat bangunan gedung, klasifikasi dan struktur bangunan gedung diatur dengan Perda Kabupaten Bondowoso Nomor 5 tahun 2017 tentang Bangunan Gedung.

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Jumlah rumah layak huni keluarga prasejahtera mengalami peningkatan walaupun kecil selama tahun 2013 - 2017. Rasio rumah layak huni dibanding jumlah keseluruhan rumah disajikan dalam Tabel 2.62.

Tabel. 2.62 Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2013 - 2017 Kabupaten Bondowoso

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Rumah Layak Huni (%)	60,97	61,22	61,22	61,22	61,40

Sumber: Bappeda, data diolah, 2018

Jumlah rumah tangga bersanitasi selama tahun 2013 – 2017 setiap tahun mengalami peningkatan kurang lebih 0,1%. Untuk luasan lingkungan permukiman kumuh juga mengalami penurunan yaitu di setiap tahunnya terjadi penurunan 1-1,5% luasan lingkungan permukiman kumuh.

Demikian pula rumah tangga yang menggunakan air bersih juga mengalami peningkatan setiap tahunnya antara 1-2%. Gambaran Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah tahun 2013 – 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.63.

Tabel 2.63 Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Tahun 2013 - 2017 Kabupaten Bondowoso

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rumah Tangga Bersanitasi (%)	29,07	49,86	47,70	49,65	55,21
2	Luasan Lingkungan Permukiman Kumuh (%)	31,53	30,42	29,31	28,21	26,55
3	Penanganan pengendalian banjir (%)	31	39,35	41,32	46,49	50,41
4	Jumlah layanan wilayah air limbah (%)	21,74	34,78	69,57	39,13	91,30
5	Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih (%)	34,09	53,09	55,08	57,38	58,55

Sumber: LKPJ-AMJ Bupati Bondowoso, 2018



Perilaku masyarakat dalam membuang sampah, mandi, cuci, buang air besar dan limbah (terutama limbah industri) secara sembarangan masih tampak menonjol di wilayah Kabupaten Bondowoso, sehingga turut memberikan andil terhadap menurunnya kualitas air di Sungai Sampean. Diperlukan pengembangan pengelolaan air limbah domestik dengan pengelolaan air limbah sistem *off site* dan *on site*, serta pengembangan prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) secara mandiri pada fasilitas tertentu maupun secara terpadu untuk pelayanan skala kabupaten.

Jaringan listrik di Kabupaten Bondowoso sudah menjangkau sebagian besar masyarakat, namun demikian masih ada yang belum terjangkau jaringan yaitu dusun terpencil. Selain menggunakan sumber energi listrik PLN, banyak desa yang memanfaatkan energi surya dan air sebagai tenaga pembangkit listrik, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swadaya masyarakat. Perkembangan jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Bondowoso yang dilayani PT PLN (Persero) tahun 2013 - 2017 dalam Tabel 2.64.

Jumlah pelanggan rumah tangga terlayani listrik tahun 2013 sebanyak 134.553 unit sedangkan tahun 2017 menjadi sebanyak 170.713 unit rumah tangga, atau sebanyak 9.040 unit rumah tangga pelanggan pertahun.

2.3.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Situasi yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan agar pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Bondowoso bergantung situasi yang aman, tertib dan tentram.

Pembangunan berwawasan kesatuan bangsa dan sosial politik dalam kerangka NKRI mengarah pada penciptaan situasi saling menghormati antar suku, agama, ras maupun antar golongan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui penataan instrumen sosial masyarakat Bondowoso yang mampu menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, HAM serta mampu menyerap aspirasi sosial politik masyarakat sehingga dapat meredam potensi konflik dan gejolak sosial politik di masyarakat.

Tabel 2.64 Perkembangan Jumlah Pelanggan Listrik Tahun 2013 - 2017

No	Golongan Tarif	2013	2014	2015	2016	2017
1	Sosial	3.818	3.818	4.750	5.495	6.648
2	Rumah Tangga	134.553	134.553	155.830	162.809	170.713
3	Usaha	2.373	2.373	3.050	3.589	4.637
4	Industri	75	75	87	97	105
5	Gedung Kantor	343	343	374	515	404
6	Jalan	152	152	205	287	484
7	Multiguna	171	171	-	98	138
Jumlah		141.485	141.485	164.296	172.890	183.129

Sumber: PLN Area Situbondo dalam Kabupaten Bondowoso Dalam Angka (BPS), 2014 – 2018



Tabel 2.65 Capaian Kinerja Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2013 – 2017

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) di Kabupaten Bondowoso	%	2013	0,25	0,25	100,00	
		2014	2,50	2,50	100,00	
		2015	18,75	18,75	100,00	
		2016	12,50	85,79	686,32	
		2017	18,75	90,94	485,01	
% Σ personil operasional	%	2013	30,30	30,30	100,00	
		2014	37,80	37,80	100,00	
		2015	45,50	45,50	100	
		2016	60,60	37,88	62,51	
		2017	75,70	37,88	50,04	
% peningkatan SDM personil Satpol PP melalui Bintek dan Kesamaptaan	%	2013	36,70	36,70	100,00	
		2014	33,30	33,30	100,00	
		2015	28,50	28,50	100,00	
		2016	25,00	26,00	104,00	
		2017	22,20	22,20	100,00	
Penegakan Perda	%	2013	33,30	33,30	100,00	
		2014	25,00	25,00	100,00	
		2015	25,00	25,00	100,00	
		2016	25,00	25,00	100,00	
		2017	25,00	30,00	120,00	
Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate)	%	(kejadian)	2013	65 (13)	65 (13)	100
			2014	70 (14)	5 (1)	7,14
			2015	80 (16)	95 (19)	118,75
			2016	80 (16)	5 (1)	6,25
			2017	85 (17)	30 (6)	35,29
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota	%	(km ²)	2013	11,30 (176,26)	11,30 (176,26)	100
			2014	11,30 (176,26)	11,30 (176,26)	100
			2015	16,95 (264,44)	16,95 (264,44)	100
			2016	16,95 (264,44)	11,30 (176,26)	66,65
			2017	23 (352,58)	81 (1.256)	356,24

Sumber : LKPJ-AMJ Bupati Bondowoso, 2018



Tabel 2.66 Jumlah Pol PP, Linmas, Pos Kamling dan Ketaatan Masyarakat Terhadap Perda Tahun 2013 – 2017 Kabupaten Bondowoso

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio jumlah Pol PP per 10.000 penduduk	3,62	3,98	4,61	2,83	2,96
Jumlah linmas per 10.000 penduduk	0	75,12	74,70	74,28	79,26

Sumber: LKPJ-AMJ Bupati Bondowoso, 2018

Tabel 2.67 Pembinaan LSM, Orpol, Pemuda dan LSM Tahun 2013 – 2017 Kabupaten Bondowoso

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Ormas, Orpol, pemuda dan LSM yang dibina (Total 51 Lembaga)	-	-	-	519	519

Sumber: LKPJ-AMJ Bupati Bondowoso, 2018

Pembinaan terhadap Ormas, Orpol, pemuda dan LSM harus terus dilakukan sebagai upaya untuk pemberdayaan, mencegah terjadinya potensi konflik sosial di masyarakat dan untuk menumbuh kembangkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dari total sebanyak 519 lembaga, jumlah lembaga Ormas, LSM dan OPK sebanyak 51 lembaga sedangkan sisanya sebanyak 468 lembaga meliputi organisasi kepemudaan dan Karang Taruna di desa.

2.3.1.6 Sosial

Penanganan masalah sosial merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, apabila tidak dilakukan secara tepat akan berakibat pada kesenjangan sosial yang semakin meluas dan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat serta dapat mendorong terjadinya konflik sosial.

Tabel 2.68 Perkembangan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2013 - 2017 Kabupaten Bondowoso

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Penurunan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (Orang)	220	360	560	526	312

Sumber : LKPJ-AMJ Bupati Bondowoso, 2018



Tabel 2.69 Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2013 - 2017 Kabupaten Bondowoso

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Σ lembaga kesejahteraan sosial yg dibantu & difasilitasi	Lbg	2013	3,05% (80 lbg)	3,05% (80 lbg)	100
		2014	5,35% (140 lbg)	3,39% (89 lbg)	63,36
		2015	5,73% (150 lbg)	5,73% (150 lbg)	100
		2016	6,49% (170 lbg)	2,86% (75 lbg)	44,07
		2017	6,49% (170 lbg)	1,64% (43 lbg)	25,26
Σ PMKS yg ditangani Orsos	Orang	2013	1,87% (717 org)	1,87% (717 org)	100
		2014	1,87% (717 org)	0,65% (250 org)	34,76
		2015	1,87% (717 org)	1,87% (717 org)	100
		2016	1,87% (717 org)	1,70% (653 org)	90,91
		2017	1,87% (717 org)	1,33% (514 org)	71,12
peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan PMKS	Orang	2013	12,03% (830 org)	12,03% (830 org)	100
		2014	5,33% (368 org)	9,43 (652 org)	176,92
		2015	5,33% (368 org)	5,33% (368 org)	100
		2016	5,33% (368 org)	5,33% (368 org)	100
		2017	5,33% (368 org)	5,33% (368 org)	100

Sumber : LKPJ-AMJ Bupati Bondowoso, 2018

Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2017 disajikan dalam Tabel 2.70.



Tabel 2.70 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2017

No.	Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Populasi Data Keluarga Miskin				
1	Keluarga Fakir Miskin			163.266
Populasi PMKS Prioritas				
1	Anak Jalanan	133	16	149
2	Tuna Susila	2	10	12
3	Pengemis	23	37	60
4	Gelandangan dan gelandangan Psikotik	15	10	25
Jumlah PMKS Prioritas		173	73	246
Populasi PMKS Lainnya				
1	Anak Balita Terlantar	1	5	6
2	Anak Terlantar	15	8	23
3	Anak Berhadapan dengan Hukum	27	2	29
4	Anak dengan Kedisabilitas	1	3	4
	a. Tubuh	159	84	243
	b. Netra	55	69	124
	c. Rungu wicara	66	51	117
	d. Mental	100	77	177
	e. Cacat Ganda	31	17	48
5	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	2	2	4
6	Anak yang memerlukan perlindungan Khusus	15	5	20
7	Lanjut Usia terlantar	34	221	255
8	Penyandang Disabilitas	10	8	18
	a. Tubuh	434	296	950
	b. Netra	149	168	317
	c. Rungu wicara	167	129	296
	d. Mental	259	156	415
	e. Cacat Ganda	47	22	69
	f. Bekas penderita penyakit kronis	72	74	146
9	Pemulung	139	27	166
10	Kelompok Minoritas	58	47	105
11	Bekas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan	184	13	197
12	a. Orang dengan HIV	15	11	26
	b. Orang dengan AIDS (ODHA)	3	2	5
13	Korban penyalahgunaan Napza	11	2	13
14	Korban Trafficking	1	0	1



No.	Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
15	Korban tindakan kekerasan atau yang diperlakukan salah	0	0	0
	a. Wanita	0	11	11
	b. Laki laki	6	0	6
	c. Lanjut usia	18	7	25
16	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	76	100	176
17	Korban Bencana Alam	11	5	16
18	Korban Bencana Sosial	16	509	525
19	Perempuan rawan sosial Ekonomi	0	2.411	2.411
20	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	53	38	91
21	Masyarakat daerah tertinggal dan terpencil	207	268	475
	Jumlah Populasi PMKS Lainnya	2.442	4.848	7.555
	Jumlah Populasi PMKS Prioritas dan Populasi PMKS Lainnya	2.615	4.921	7.801

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso dalam Kabupaten Bondowoso Dalam Angka (BPS), 2018

Panti wredha di Kabupaten Bondowoso tahun 2017 dihuni sebanyak 90 orang. Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) prioritas yang terdiri dari anak jalanan, tuna susila, pengemis dan gelandangan mencapai sebanyak 246 orang pada tahun 2017. PMKS prioritas umumnya berada di kawasan perkotaan dengan kondisi seseorang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai norma kehidupan yang layak. Penanganan terhadap PMKS prioritas terkendala kurangnya tenaga teknis sosial dan keberadaan dokter jiwa untuk menjangkau seluruh kasus. Penanganan terhadap populasi PMKS lainnya harus dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi melibatkan berbagai sektor dalam kerangka penanggulangan kemiskinan.

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Tenaga Kerja

Perkembangan penduduk usia kerja diatas usia 15 tahun dari Tahun 2013 (605.169 jiwa) sampai dengan 2017 (620.853 jiwa) naik sebesar 2,59%, peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 36,90%, angkatan kerja yang telah bekerja

sebesar 98,41% dan Tingkat Pengangguran sebesar 1,58%.

Pada tahun 2017 jumlah angkatan kerja sebanyak 620.853 orang, dari angkatan kerja tersebut sebanyak 532.596 orang yang bekerja, sedangkan pengangguran terbuka mencapai 8.444 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun dari tahun 2013-2017 sebesar 2,89%. Pada tahun 2013 jumlah pengangguran sebanyak 11.236 orang dan tahun 2017 sebanyak 8.444 orang, mengalami penurunan sebesar 28,00%. Hal ini yang disebabkan semakin membaiknya perekonomian nasional dan regional sehingga menunjang upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan peluang usaha terbuka yang berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2013 mencapai 64,28% meningkat pada tahun 2017 sebesar 72,25%. Namun demikian tahun 2017 jumlah pengangguran terbuka meningkat sebanyak 1.302 orang jika dibandingkan tahun 2016, hal ini disebabkan karena ketersediaan lapangan pekerjaan jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan tenaga kerja baru belum seimbang, disamping itu kompetensi tenaga kerja yang tersedia belum sesuai dengan kesempatan kerja yang ada,



sehingga masih diperlukan pelatihan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja dan mediasi tenaga kerja ke pasar kerja khususnya dari kecepatan penyampaian informasi. Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Bondowoso tahun 2013 – 2017 disajikan pada Tabel 2.71.

Tabel 2.71 Rasio Sengketa Ketenagakerjaan Tahun 2013 - 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun (%- Kasus)	11,04 (5)	21,37 (1)	18,56 (8)	13,78 (6)	1,24 (13)

Sumber : DPMPTSP dan Naker Kabupaten Bondowoso, 2018

Dalam rangka meningkatkan kapasitas pencari kerja dan perlindungan tenaga kerja dilakukan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, agar pencari kerja memiliki keterampilan guna memenuhi kualifikasi kebutuhan lapangan kerja dan peningkatan taraf hidup keluarga.

Tabel 2.72 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2013 - 2017 Kabupaten Bondowoso

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio daya serap tenaga kerja (org/ Perusahaan)	51,98	50,42	67,09	29,60	3,65

Sumber : LKPJ AMJ Bupati Bondowoso, 2018

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.73 Capaian Kinerja Ketenagakerjaan Tahun 2013-2017

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
Persentase Tenaga Kerja Telah Dilatih yang Terserap Pada Dunia Kerja	%	2013	57,13	57,13	100
		2014	59,40	56,44	95,01
		2015	64,87	80,27	123,74
		2016	70,89	88,25	124,49
		2017	74,96	60,36	80,52
Persentase yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan	%	2013	108,57	108,57	100
		2014	111,25	119,25	107,19
		2015	116,47	100	85,86
		2016	123,53	84,36	68,29
		2017	127,78	121,28	94,91
Persentase yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	2013	126,39	126,39	100
		2014	130,00	100	76,92
		2015	133,42	100	74,95
		2016	136,67	31,25	22,86
		2017	139,75	100	71,56
Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan (AKL)	%	2013	19,57	19,57	100
		2014	25,00	49,78	199,12
		2015	30,00	73,21	244,03
		2016	33,33	64,41	51,75
		2017	37,50	54,11	144,29
Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan (AKAD)	%	2013	18,29	18,29	100
		2014	15,00	3,13	20,87
		2015	20,00	2,24	11,2
		2016	20,83	1,73	8,31
		2017	21,67	2,72	12,55



Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan (AKAN)	%	2013	12,91	12,91	100
		2014	12,50	19,45	155,6
		2015	20,00	16,75	83,75
		2016	21,67	15,80	72,91
		2017	22,50	9,98	44,36
Penanganan/ Pemberdayaan TKI Bermasalah/ Deportasi	orang	2013	58	58	100
		2014	50	111	222
		2015	45	88	195,55
		2016	40	88	220
		2017	35	8	22,86
Persentase Penurunan Kecelakaan Kerja (Orang)	%	2013	116,66 (10)	116,66 (10)	100
		2014	50 (15)	170 (3)	340
		2015	60 (14)	110 (9)	183,33
		2016	70 (13)	20 (18)	28,57
		2017	70 (13)	120 (8)	171,43
Persentase Berkurangnya Jumlah Pelanggaran terhadap Perundang-undangan Ketenagakerjaan	%	2013	100	100	100
		2014	73,33	133,33	181,82
		2015	66,67	160	239,99
		2016	60	80	133,33
		2017	53,33	120	225,01
% meningkatnya peserta Jamsostek					
Persentase meningkatnya peserta jamsostek (pekerja/buruh peserta BPJS ketenagakerjaan aktif)	%	2013	17,62	17,62	100
		2014	18,99	14,31	75,35
		2015	20,33	45,53	223,98
		2016	21,71	61,51	283,34
		2017	22,96	20,78	90,50
Persentase meningkatnya peserta jamsostek (pekerja/buruh peserta BPJS ketenagakerjaan aktif s.d thn ybs)	%	2013	100	100	100
		2014	109,69	81,81	74,59
		2015	119,38	318,91	267,14
		2016	129,06	439,28	340,37
		2017	138,75	193,10	139,17
Persentase meningkatnya peserta jamsostek (perusahaan peserta BPJS ketenagakerjaan s.d thn ybs)	%	2013	107,22	107,22	100
		2014	109,35	168,27	153,88
		2015	117,27	196,15	167,26
		2016	153,96	94,24	61,21
		2017	184,17	558,99	303,52



Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)	
Persentase Peningkatan Upah Minimum Kabupaten	%	2013	172	172	100	
			946.000	946.000		
			2014	116,81	116,81	100
			1.105.000	1.105.000		
			2015	128,49	134,33	104
1.215.500	1.270.000					
2016	142,71	162,15	114			
1.350.000	1.533.902,5					
2017	159,83	176,27	110,29			
1.512.000	1.667.505					
Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	%	2013	42,86	42,86	100	
			2014	42,86	40	93,33
			2015	57,14	75	131,26
			2016	57,14	28,57	50
			2017	71,43	92,30	129,22
Persentase Pemeriksaan Perusahaan	%	2013	6,62	6,62	100	
			2014	25	12,82	51,28
			2015	35	8,35	23,86
			2016	50	45,77	91,54
			2017	52,58	-	-
Persentase pengujian peralatan diperusahaan	%	2013	44,87	44,87	100	
			2014	60,26	3,95	6,55
			2015	61,54	45,57	74,05
			2016	70,51	75	106,37
			2017	71,79	-	-

Sumber: LKPJ AMJ Bupati Bondowoso, 2018

Persentase tenaga kerja telah dilatih yang terserap pada dunia kerja pada tahun 2017 belum optimal dikarenakan adanya beberapa tenaga kerja belum mampu untuk berwirausaha karena kekurangan modal. Namun secara akumulatif jumlah tenaga kerja telah dilatih yang terserap pada dunia kerja selama periode 2013-2017 telah melampaui target. Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi belum optimal karena Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi sehingga secara terbatas dilaksanakan pelatihan melalui UPT Pelatihan kerja Jember dan Situbondo. Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan, terdiri dari: Angkatan Kerja Lokal (AKL) cenderung meningkat karena upaya perluasan kesempatan kerja melalui job fair dan informasi pasar kerja yang mudah diakses.

Penanganan/pemberdayaan TKI bermasalah/deportasi pada tahun 2017 tidak mencapai target karena jumlah TKI bermasalah/deportasi pada tahun 2017 hanya 8 orang namun disisi lainnya, hal ini berarti kesadaran masyarakat untuk bekerja ke luar negeri secara prosedural lebih meningkat.

Penurunan Kecelakaan Kerja selama kurun waktu 2013-2017 cenderung positif, kecuali pada tahun 2016 yang menunjukkan bahwa capaian kinerja penurunan kecelakaan lebih kecil dari target yang direncanakan. Untuk optimalisasi dilakukan upaya sosialisasi peraturan berbagai perundang-undangan ketenagakerjaan dan pembinaan kepada perusahaan untuk memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja.

Selama kurun waktu 5 tahun penurunan pelanggaran terhadap undang-undang



ketenagakerjaan telah mencapai target yang ditetapkan, kecuali pada tahun 2016 terjadi kenaikan jumlah kasus pelanggaran menjadi 18 kasus. Hal ini dikarenakan perusahaan kurang mematuhi peraturan ketenagakerjaan dan kurang melaksanakan kewajibannya untuk memberikan hak kepada pekerja sebagaimana mestinya.

Dalam rangka memberikan jaminan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja diperlukan Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) yang sekarang dikenal dengan BPJS ketenagakerjaan. Kepesertaan jamsostek wajib bagi perusahaan atau pekerja, dalam kurun waktu 5 tahun kepesertaan jamsostek terus meningkat. Peserta jamsostek selama lima tahun mengalami peningkatan, jumlah peserta perorangan dari 4.129 orang pada tahun 2013 meningkat menjadi 7.973 orang pada tahun 2017, sedangkan peserta perusahaan dari 104 perusahaan pada tahun 2013 meningkat menjadi 777 perusahaan pada tahun 2017. Peningkatan ini menunjukkan adanya kesadaran pekerja dan perusahaan tentang manfaat jaminan sosial tenaga kerja yaitu jaminan resiko kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja dan keluarganya. Perkembangan Upah Minimum Kabupaten Bondowoso sampai dengan Tahun 2017 mengalami kenaikan hingga 176,26% jika dibandingkan dengan Tahun 2013, dari Rp.946.000,- pada Tahun 2013 menjadi Rp. 1.667.505,- pada Tahun 2017. Kenaikan Upah Minimum Kabupaten yang terjadi di Kabupaten Bondowoso setiap tahun melampaui target yang ditetapkan.

Sengketa antara pengusaha dan pekerja atau perselisihan hubungan industrial difasilitasi penyelesaiannya melalui mediasi oleh mediator yang ditunjuk untuk diselesaikan dengan perjanjian bersama. Indikator kinerja persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama Tahun 2017 adalah 12 kasus dari 13 kasus yang tercatat sehingga tercapai 92,31%. Hal ini menunjukkan keberhasilan upaya fasilitasi perselisihan

hubungan industrial kedua pihak. Walaupun pada tahun 2016 capaian hanya 28,57% disebabkan salah satu pihak tidak ingin berdamai.

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan kaum perempuan dan perlindungan bagi anak dilakukan mengingat posisi perempuan dan anak dalam keluarga masih belum seimbang dan rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Perempuan dan anak rentan menjadi korban *human trafficking*. Pemberdayaan perempuan diupayakan dengan mengoptimalkan kesetaraan dan keadilan gender dalam memperoleh kesempatan dan hak peran maupun partisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam hal menikmati hasil pembangunan secara adil. Hal ini selaras dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap KDRT, artinya terjadi peningkatan pelaporan terhadap kasus KDRT yang mendapat penanganan. Fasilitasi terhadap korban KDRT juga secara intensif dilaksanakan melalui penyuluhan dan pembinaan terhadap para calon ibu maupun ibu rumah tangga.



Tabel 2.74 Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2013-2017

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Peningkatan advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	%	2013	100	100	100,00
		2014	100	100	100,00
		2015	100	100	100,00
		2016	100	116,88	116,88
		2017	100	100	100,00
Jumlah Kasus KDRT yang ditangani	%	2013	100	100	100,00
		2014	100	100	100,00
		2015	100	100	100,00
		2016	100	116,88	116,88
		2017	100	100	100,00
KDRT	%	2013	0,028	0,028	100,00
		2014	0,028	0,0197	70,36
		2015	0,028	0,036	128,57
		2016	0,028	0,036	128,57
		2017	0,03	0,036	120

Sumber: LKPJ AMJ Bupati Bondowoso, 2018

2.3.2.3 Pangan

Aspek pelayanan pada urusan pangan, meliputi subsistem ketersediaan pangan yang berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, kecukupan dan kesinambungannya, subsistem distribusi pangan melalui sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk mewujudkan aspek kesejahteraan masyarakat yang menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu, dengan harga yang terjangkau. Bervariasinya kemampuan produksi pangan antar wilayah dan antar musim menuntut kecermatan dalam mengelola subsistem distribusi, sehingga pangan tersedia sepanjang waktu di seluruh wilayah, serta subsistem konsumsi yang berfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan memenuhi mutu, keragaman, kandungan gizi, berimbang dan

aman, serta efisiensi konsumsi pangan dalam rumah tangga. Gambaran ketersediaan pangan tahun 2013 – 2017 sebagaimana Tabel 2.75.

Peningkatan Angka Kecukupan Gizi masyarakat selaras dengan peningkatan pola konsumsi masyarakat. Pada skor Pola Pangan Harapan (PPH) nampak bahwa Pola Konsumsi Masyarakat Bondowoso sangat bervariasi. Tahun 2013 skor PPH mencapai 80,21% dan pada tahun 2017 mencapai 72,60%, dengan dominasi konsumsi padi-padian, umbi-umbian dan kacang-kacangan.

Pada tahun 2013 ketersediaan beras mencapai jumlah yang cukup untuk konsumsi dan jumlahnya meningkat pada tahun 2017 mencapai 230.158 Ton. Sedangkan untuk jagung yang merupakan bahan pakan ternak tersedia pada tahun 2017 hingga sebanyak

Tabel 2.75 Perkembangan Kinerja Pangan Tahun 2013 - 2017

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Angka kecukupan gizi	Kkal/ Kpt/Hr	1.965	1.819	1.820	1.476	2.026
2	Pola Pangan Harapan	%	80,21	81,81	78,90	79,16	72,60

Sumber: LKPJ AMJ Bupati Bondowoso, 2018



90.178 Ton mengalami penurunan dibanding tahun 2013 yang sebanyak 196.837 Ton. Hal ini terjadi mengingat pelaksanaan peningkatan luas areal tanam padi melalui Upsus, dengan jumlah lahan yang tetap maka areal tanam jagung menurun sehingga ketersediaan menurun. Untuk gula pasir ketersediaannya fluktuatif namun masih dalam jumlah yang cukup. Sedangkan untuk telur dan daging ketersediaannya berfluktuatif, disebabkan berbagai faktor diantaranya keberadaan peternakan ayam petelur yang jumlahnya terbatas, demikian juga dengan ketersediaan daging mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh tinggi rendahnya permintaan dan harga ternak sapi.

Surplus dan minus ketersediaan bahan pangan dipengaruhi oleh jumlah konsumsi penduduk terhadap masing – masing ketersediaan komoditi. Komoditi beras, jagung, ubi kayu dan gula setiap tahun mengalami surplus ketersediaan bahan pangan sedangkan komoditi yang lain berfluktuasi tergantung dengan jumlah produksi yang dihasilkan pada masing-masing tahun. Surplus dan minus ketersediaan bahan pangan dapat diuraikan sebagaimana Tabel 2.76.

Tabel 2.76 Ketersediaan Bahan Pangan (dalam Ton) Tahun 2013 - 2017

No	Komoditi	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Beras	Ton	221.683,77	254.787	200.629	214.463,24	230.158
2	Jagung	Ton	196.837	177.975	177.975	106.558	90.178
3	Gula Pasir	Ton	29.506	29.506	29.506	28.708,77	24.937
4	Telur	Ton	19.246	17.367,76	2.738,85	2.266,71	2.629
5	Daging	Ton	1.303	1.989	3.274,90	2.550,33	2.540

Sumber: LKPJ AMJ Bupati Bondowoso, 2014-2017

Untuk menjaga kestabilan harga gabah, pembelian gabah dilakukan secara terintegrasi melalui kegiatan Upsus peningkatan Pajale (Padi Jagung Kedele) yang merupakan program nasional bekerjasama dengan Angkatan Darat dan Bulog dengan standar Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang pro petani didukung ketersediaan anggaran baik yang berasal dari APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten.

2.3.2.4 Pertanahan

Aspek pelayanan urusan pertanahan meliputi pemberian ijin lokasi dan penerbitan ijin membuka tanah untuk pembangunan, fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan untuk lokasi tanah yang digunakan dalam pembangunan oleh pemerintah daerah, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*, serta perencanaan penggunaan hamparan tanah dalam satu daerah kabupaten.

2.3.2.5 Lingkungan Hidup

Kualitas air Sungai Sampean saat ini memerlukan perhatian, karena terdapat beberapa parameter dari 6 parameter yang ada, perlu diwaspadai agar tidak melebihi ambang batas. Untuk parameter pH rata-rata mencapai 7,617 (ambang batas 6 – 9), DO rata-rata mencapai 5,405 mg/L (ambang batas > 3 mg/L), BOD rata-rata mencapai 3,234 mg/L (ambang batas 6 mg/L), COD rata-rata mencapai 11,782 mg/L (ambang

batas 50 mg/L), Nitrat mencapai 2,383 mg/L (ambang batas 20 mg/L), dan Nitrit mencapai 0,062 mg/L (ambang batas 0,06 mg/L).

Kondisi kualitas lingkungan yang meliputi kualitas udara, air dan pencemaran limbah masih dalam ambang batas kewajaran namun tetap harus terus menerus diwaspadai terutama penanganan terhadap limbah medis. Dengan meningkatnya kualitas layanan kesehatan di Puskesmas terhadap layanan



rawat inap menyebabkan meningkatnya volume sampah medis. Memerlukan perhatian secara intensif karena berdampak pada kesehatan masyarakat dan lingkungan sehingga diperlukan sarana pengolahan limbah medis dan B3 di setiap Puskesmas.

organik dan sistem 3R (*Reuse-Reduce-Recycle*) yang menyertai penampungan, pengangkutan, dan pengolahan sampah sebagai upaya pengurangan serta optimalisasi sistem pengelolaan sampah di TPA dengan perluasan TPA sesuai standar minimalnya.

Tabel 2.77 Kondisi Lingkungan Hidup Tahun 2013 - 2017 Kabupaten Bondowoso

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Sampah Tertangani (%)	85,25	84,76	85,34	86,34	93,4
2	Rasio TPS per penduduk	0,64	0,61	0,85	0,85	0,8
3	Pengangkutan sampah (unit)	7	7	7	8	8
4	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	N/A	64,29	64,87	64,27	64,27
	- Indek Kualitas Air (IKA)	50	50	51,818	50	50
	- Indek Kualitas Udara (IKU)	83,47	83,33	83,47	83,47	83,48
	- Indek Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	60,72	60,72	60,72	60,72	64,90
5	Perusahaan Wajib AMDAL Terawasi (%)	1	1	2	2	2
6	Penegakan Hukum Lingkungan (%)	1	5	5	5	8
7	Sumber air terpelihara (%)	4	78	145	189	213

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, 2018

Penanganan sampah masih terbatas di beberapa kawasan perkotaan. Pengelolaan penanganan sampah dipusatkan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Desa Paguan Kecamatan Taman krocok seluas 1.672 ha yang dilaksanakan dengan *open dumping system* yang mengolah sampah dari permukiman dan pasar di kawasan perkotaan Bondowoso dan beberapa kecamatan. Tahun 2013 volume sampah yang ditangani sebanyak 52.555 m³ meningkat menjadi 63.145 m³ pada tahun 2017. Bertambahnya luas wilayah pelayanan memerlukan pengembangan teknologi komposing sampah

Kondisi Kabupaten Bondowoso yang merupakan daerah perbukitan dan pegunungan memiliki potensi keberadaan lahan kritis yang cukup luas. Jumlah lahan kritis dan penyediaan bibit tanaman kehutanan tahun 2013 – 2016 sebagaimana Tabel 2.78.

Pada tahun 2013 luas lahan kritis mencapai 9.721,1 ha, tahun 2016 menurun menjadi seluas 5.370,03 Ha. Jumlah lahan kritis tersebut tersebar di hampir seluruh kecamatan kecuali 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Tamanan, Jambesari DS, Wonosari, Tenggarang, Bondowoso dan Ijen.

Tabel 2.78 Jumlah Lahan Kritis dan Penyediaan Bibit Tanaman Kehutanan Tahun 2013 – 2016

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Lahan Kritis (ha)	9.721,1	7.955,87	6.130,53	5.370,03
2	Penyediaan Bibit Tanaman Kehutanan (batang)	5.105.777	6.015.476	1.040.000	739.033

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, 2018



2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.79 Pelayanan Administrasi Kependudukan (Lembar) Tahun 2013 – 2017 Kabupaten Bondowoso

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Akta Kelahiran	21.363	24.505	17.973	72.219	14.457
2	Akta Perkawinan	29	56	25	32	42
3	Akta Perceraian	6	2	7	6	6
4	Akta Kematian	43	56	68	95	171
5	Akta Pengakuan/ Pengesahan Anak	0	0	0	0	0
6	Pengangkatan Anak	1	4	3	1	5
7	Kartu Keluarga	38.328	38.107	71.119	71.818	63.058
8	Kartu Tanda Penduduk	0	0	10.979	28.800	21.503
9	Surat Keterangan	8.049	4.468	2.888	3.801	39.99

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2018

Pelayanan administrasi kependudukan dari tahun 2013 - 2017 disajikan dalam Tabel 2.79.

Perkembangan penduduk ber-KTP di Kabupaten Bondowoso tahun 2013 – 2017 disajikan dalam Tabel 2.80.

Tabel 2.80 Persentase Penduduk ber-KTP dan ber-Akta Tahun 2013 - 2017 Kabupaten Bondowoso

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Ber-KTP	98,70	81,94	83,28	91,44	94,50
Ber-Akta	33,39	36,61	38,88	43,58	52,49

Sumber: LKPJ-AMJ Bupati Bondowoso, 2018

Realisasi perkembangan perekaman e-KTP pada masing-masing kecamatan disajikan pada Tabel 2.81.

Tabel 2.81 Realisasi Perekaman e-KTP Tahun 2017 Kabupaten Bondowoso

Kecamatan	Wajib KTP	Realisasi	Sisa
Bondowoso	59.074	56.981	2.093
Tenggarang	32.316	31.051	1.265
Tamanan	29.128	28.067	1.061
Tegalampel	20.078	18.125	1.953
Curahdami	25.156	23.934	1.222
Wringin	31.714	31.476	238
Pakem	18.738	16.950	1.788
Binakal	13.278	12.785	493
Maesan	36.392	34.394	1.998
Grujugan	27.388	25.698	1.690
Pujer	32.017	29.116	2.901
Wonosari	32.443	30.875	1.568
Sukosari	12.345	11.870	475
Tlogosari	36.125	32.651	3.474
Tapen	27.194	26.471	723
Sumber Wringin	26.410	25.313	1.097
Prajekan	21.112	20.013	1.099
Klabang	15.066	14.910	156
Cermee	36.078	32.295	3.783
Ijen	9.257	9.030	227
Taman Krocok	13.488	12.864	624
Jambesari DS	26.747	24.882	1.865
Botolinggo	22.837	21.374	1.463
JUMLAH	604.381	571.125	33.256

Sumber : LKPJ-AMJ Bupati Bondowoso,2018



2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sebagian besar penduduk miskin adalah masyarakat perdesaan, yang memiliki berbagai keterbatasan, sehingga memerlukan penanganan agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri. Disisi lain, wilayah perdesaan memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan sehingga selama tahun 2013 – 2017 dilakukan upaya untuk mendorong dan memfasilitasi terciptanya masyarakat yang partisipatif, berdaya, dan mandiri dalam menanggulangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, diantaranya melalui penerapan teknologi tepat guna, meningkatkan jumlah kelompok binaan PKK, serta meningkatkan pemenuhan terhadap sarana dan prasarana perdesaan.

Penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2013 secara bertahap terus mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator makro sosial ekonomi, seperti peningkatan PDRB, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dan IPM, serta penurunan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Namun demikian tingkat kemiskinan secara keseluruhan masih relatif tinggi, dimana sebagian besar penduduk miskin adalah masyarakat perdesaan, yang memiliki berbagai keterbatasan, sehingga memerlukan penanganan agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri.

Upaya sinergis pengentasan kemiskinan, peningkatan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memperhatikan potensi desa dan pengerahan seluruh sumberdaya dan *stakeholder* pembangunan. Hal ini dilakukan agar pemberdayaan masyarakat dapat menjadi dasar pembentukan pola pikir pembangunan kemasyarakatan.

Tabel 2.82 Pencapaian Kinerja Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Tahun 2013 - 2017

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Capaian
Teknologi Tepat Guna (TTG) diterapkan	%	2013	240
		2014	106
		2015	210
		2016	124
		2017	478
Rata-rata Jumlah Kelompok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK/ LPMD)	%	2013	100
		2014	100
		2015	100
		2016	100
		2017	100
Rata-rata Jumlah Kelompok binaan PKK	%	2013	100
		2014	100
		2015	100
		2016	100
		2017	100
% pemeliharaan/ Peningkatan sarana dan prasarana perdesaan	%	2013	100
		2014	100
		2015	33,33
		2016	-
		2017	1.700

Sumber: LKPJ-AMJ Bupati Bondowoso, 2018

Upaya meningkatkan kemandirian pemerintah desa dilaksanakan melalui pengembangan lembaga ekonomi perdesaan yang dilaksanakan melalui Penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam bentuk pengembangan unit usaha dan bantuan modal bagi BUMDES. Perkembangan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Bondowoso dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 per kecamatan adalah sebagai berikut :



Tabel 2.83 Perkembangan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 - 2017

Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017
Binakal	0	0	0	2	6
Bondowoso	0	0	0	2	2
Botolinggo	0	0	0	7	1
Cermee	0	0	9	2	4
Curahdami	0	0	0	8	3
Grujugan	0	1	3	3	4
Jambesari DS	0	0	1	7	1
Klabang	0	1	4	2	4
Maesan	0	1	1	8	2
Pakem	0	0	1	4	3
Prajekan	0	2	1	4	0
Pujer	0	0	2	5	4
Ijen	0	0	1	2	3
Sukosari	0	0	0	1	3
Sbr.wringin	0	0	1	5	0
Taman Krocok	0	0	2	4	1
Tamanan	0	0	1	8	0
Tapen	0	0	0	4	5
Tegalampel	0	0	2	1	4
Tenggarang	0	1	0	10	0
Tlogosari	0	0	1	8	1
Wonosari	0	0	1	10	1
Wringin	0	0	1	12	0
Jumlah	0	6	32	119	52

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2018

Pembinaan kelompok masyarakat membangun desa terus dilaksanakan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, upaya tersebut dilaksanakan dengan harapan akan dapat meningkatkan nilai tambah bagi usaha ekonomi rakyat dan menciptakan lapangan kerja.

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan instrumen baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pada awal tahun 2014 yang secara teknis diatur dengan Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dan PP No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari

APBN, mengamankan pengelolaan keuangan pemerintah desa dilakukan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat bagi masyarakat. Sumber pendapatan yang tercatat dalam APBDesa yang dikelola oleh Pemerintah Desa berasal dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Anggaran ini diperuntukkan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa sesuai dengan prioritas dan kebutuhan pembangunan di desa.

Tabel 2.84 Capaian Kinerja Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Tahun 2013 - 2017

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi
Persentase peningkatan kapasitas BUMDES/ LKD yang disehatkan	Unit	2013	43	43
		2014	46	21
		2015	50	28
		2016	54	64
		2017	58	100
Persentase kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah perdesaan	Unit	2013	0	0
		2014	5	20
		2015	5	2
		2016	10	0
		2017	25	200

Sumber: LKPJ-AMJ Bupati Bondowoso, 2018

Selanjutnya pengelolaan keuangan Pemerintah Desa yang meliputi tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa dan ADD yang menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun APBDesa pada setiap tahunnya, diatur melalui Peraturan Bupati sesuai amanat Peraturan Mendagri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.



2.3.2.8 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Keluarga berencana merupakan suatu konsep peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan fokus keluarga berencana dilaksanakan dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap

pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta pencegahan terhadap pernikahan dini khususnya terhadap anak dan remaja usia sekolah. Sehingga disamping meningkatkan skala kesejahteraan masyarakat juga memenuhi hak-hak reproduksi masyarakat. Disamping itu keluarga dapat mengatur jumlah anak dan jarak kelahiran secara ideal. Dampak pemenuhan hak-hak reproduksi tersebut secara langsung adalah terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Tabel 2.85 Capaian Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2013-2017

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Cakupan PUS yang istrinya berusia dibawah 20 tahun	%	2013	8,47	8,47	100,00
		2014	8,34	7,56	109,35
		2015	8,25	8,43	97,82
		2016	8,15	4,16	148,96
		2017	8,06	4,85	139,83
Cakupan PUS menjadi peserta KB aktif	%	2013	75,34	75,34	100,00
		2014	75,41	84	111,39
		2015	75,48	77,6	102,81
		2016	75,54	78	103,26
		2017	75,61	75,11	99,34
Cakupan PUS ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet)	%	2013	11,95	11,95	100,00
		2014	11,76	9,87	116,07
		2015	11,57	8,86	123,42
		2016	11,38	7,42	134,79
		2017	11,19	10,15	109,29
Cakupan PUS peserta UPPKS ber-KB	%	2013	79,63	79,63	100
		2014	80,28	92,2	114,85
		2015	80,90	88,45	109,33
		2016	81,05	90,1	111,17
		2017	81,89	88,99	108,67
Σ penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa dan kelurahan setiap tahun	%	2013	100	100	100
		2014	100	100	100
		2015	100	100	100
		2016	100	100	100
		2017	100	100	100



Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
rasio wilayah kerja terhadap PLKB/PKB	Desa/PKB (PLKB)	2013	3,27	3,27	100
		2014	2,84	2,84	100
		2015	2,52	2,52	100
		2016	2,26	2,84	125,66
		2017	1,99	2,38	119,59
Cakupan Bina Keluarga Remaja	%	2013	100	100	100
		2014	100	300	300
		2015	100	76	76
		2016	100	235	235
		2017	100	102,33	102,33
Cakupan bina keluarga balita	%	2013	100	100	100,00
		2014	100	120,62	120,62
		2015	100	100	100,00
		2016	100	99,69	99,69
		2017	100	114,32	114,32
Cakupan penyediaan alat obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat peserta KB aktif	%	2013	100	100	100
		2014	100	139,526	139,526
		2015	100	122,44	122,44
		2016	100	94,35	94,35
		2017	100	74,47	74,47
Cakupan penyediaan alat obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat peserta KB baru	%	2013	100	100	100
		2014	100	85,03	85,03
		2015	100	80,39	80,39
		2016	100	81,42	81,42
		2017	100	93,09	93,09

Sumber: LKPJ AMJ Bupati Bondowoso, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kinerja pembinaan keluarga remaja setiap tahun dilaksanakan secara terus-menerus dan meningkat dari 27 kelompok pada tahun 2013 menjadi 44 kelompok pada tahun 2017. Cakupan bina keluarga balita mencapai 278 kelompok pada tahun 2013 meningkat menjadi 391 kelompok pada tahun 2017. Jumlah PUS yang isterinya dibawah usia 20 tahun terus mengalami penurunan dari 15.725 orang pada tahun 2013 menjadi 7.486 orang pada tahun 2017. Jumlah PUS yang ikut KB aktif pada tahun 2013 sebanyak 140.503 pasangan dan pada tahun 2017 sebanyak 116.025 pasangan. Hal ini seiring dengan menurunnya jumlah PUS di Kabupaten Bondowoso dan secara umum capaian kinerja indikator PUS yang ikut KB aktif masih dapat dipertahankan. Jumlah PUS yang ingin ber-KB

tidak terpenuhi menunjukkan hasil positif dibawah target namun pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Cakupan PUS peserta UPPKS ber-KB menunjukkan hasil positif diatas target setiap tahun. Rasio wilayah kerja terhadap PLKB/PKB masih perlu ditingkatkan agar pelayanan terhadap masyarakat lebih maksimal.

Penyediaan alat dan obat kontrasepsi, sosialisasi, advokasi KIE, dan adanya kelompok masyarakat peduli KB dapat meningkatkan jumlah pasangan usia subur yang ikut KB (baru dan aktif) termasuk KB pria.

Perkembangan pasangan usia subur dan pencapaian kepesertaan KB aktifnya di Kabupaten Bondowoso tahun 2013 - 2017, disajikan dalam tabel berikut :



Tabel 2.86 Peserta KB Aktif dan Jenis Alat Kontrasepsi Tahun 2013 - 2017 Kabupaten Bondowoso

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	AKDR	33.676	29.903	27.543	23.505	12.037
2	Tablet	35.561	34.190	33.932	32.067	25.483
3	Kondom	1.563	1.163	1.174	1.175	604
4	MOP	2.676	2.567	2.581	2.498	1.228
5	MOW	2.068	2.228	2.232	2.233	1.750
6	Suntik	54.976	56.515	61.193	60.775	64.468
7	Susuk	12.083	12.960	13.900	14.894	10.455
	Jumlah	142.603	139.562	142.555	137.147	116.025

Sumber : Dinas PP dan KB, 2018

Tabel 2.87 Banyaknya PUS dan Pencapaian Peserta KB Aktif Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	PUS	188.337	184.406	183.707	175.824	154.473
2	% Terhadap PUS	75,72	75,66	77,60	78,00	75,11

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam Kabupaten Bondowoso dalam Angka (BPS), 2014-2018

2.3.2.9 Perhubungan

Arus penumpang angkutan umum di wilayah Bondowoso relative stagnan dan menurun, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.88.

maupun implementasi kebijakan. Transparansi pelaksanaan pembangunan berperan sebagai fungsi kontrol dan evaluasi bagi pemerintah daerah, utamanya dalam menilai keberhasilan pencapaian kinerja atas kebijakan yang telah

Tabel 2.88 Jumlah Rasio Ijin Trayek Tahun 2013 - 2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Ijin Trayek	4	5	5	5	5
2	Jumlah Penduduk	759.090	759.105	764.148	773.046	771.691

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, 2018

Guna mendukung kelancaran dan keselamatan arus lalu lintas penumpang dan barang, penyediaan prasarana dan sarana perhubungan senantiasa terus ditingkatkan. Pada tahun 2017 telah tersedia 69 APILL, 1.422 rambu lalu lintas, 8 halte dan 11.655 m marka jalan.

ditetapkan. Pelayanan terhadap ketersediaan informasi yang akurat, cepat dan informatif serta penyebarluasan informasi yang berkualitas kepada publik diharapkan dapat membangun aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Pelayanan komunikasi dan informatika mencakup upaya peningkatan jumlah jaringan komunikasi, fasilitasi peningkatan media massa (surat kabar, radio/TV/website serta peningkatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Gambaran pembangunan komunikasi dan informasi tahun 2013 – 2017 sebagaimana Tabel 2.89.

2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan pembangunan daerah menuntut adanya transparansi dan keterbukaan dalam setiap proses perencanaan



Tabel 2.89 Perkembangan Komunikasi dan Informatika Tahun 2013 - 2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kerjasama dengan media massa	16	17	26	36	74
2	Jumlah update website Pemkab per tahun	0	0	0	0	63
3	% Cakupan jaringan Intranet di lingkungan SKPD Kabupaten Bondowoso	0	0	0	0	74

Sumber: LKPJ-AMJ Bupati Bondowoso, 2018

2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Selama tahun 2013 – 2017 jumlah koperasi yang sehat, LKM dan IKM meningkat. Jumlah koperasi yang sehat meningkat, jika pada tahun 2013 sebanyak 248 koperasi,

hingga tahun 2017 jumlah koperasi yang sehat menjadi 288 koperasi. Jumlah permodalan koperasi sampai tahun 2017 tumbuh cukup signifikan sebesar 67% dari tahun 2013.

Tabel 2.90 Perkembangan Koperasi, LKM dan UKM Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah					
	Koperasi	846	857	871	924	931
	LKM	43	152	152	-	-
	UKM	34.340	36.924	37.022	38.856	39.146
2	Jumlah permodalan (juta Rp)					
	Koperasi	198.825,11	246.350	267.292	322.084	333.617
	LKM	198.825,11	199.725,11	267.292,25	-	-
	UKM	300.910,09	311.280,96	324.072,71	-	320.929,36
3	Jumlah volume usaha (juta Rp)					
	Koperasi	72.553,32	173.677	188.574	227.711	254.161
	LKM	1.743,15	1.815,15	1.815,15	-	-
	UKM	2.628.753,07	2.671.521,01	2.678.926,20	-	1.949.064,90
4	Jumlah anggota (orang)					
	Koperasi	76.697	84.991	87.348	90.320	91.434
	LKM	1.103	1.326	1.326		
	UKM	34.340	42.522	42.914	54.495	56.151
5	Jumlah kesehatan kelembagaan koperasi	248	258	268	278	288

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, 2018



2.3.2.12 Penanaman Modal

Perkembangan penanaman modal (investasi) di Kabupaten Bondowoso tahun 2014-2017 menurut nilai investasi dan jumlah proyek mengalami peningkatan berdasarkan jumlah nilai investasi non fasilitas.

Realisasi investasi non fasilitas pada tahun 2014-2017 mengalami trend pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2014, jumlah investasi pada 20 bidang usaha mencapai Rp.846.069.148.257,00 meningkat menjadi Rp.1.598. 839.920.350,00 pada akhir tahun 2017. Pertumbuhan kenaikan investasi non fasilitas periode tahun 2014-

2017 sebesar hampir 88,97% atau rata – rata mencapai 24,64% per tahun.

2.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Perkembangan kemajuan teknologi terkini sangat diperlukan bagi peningkatan kualitas kehidupan. Namun juga memiliki dampak yang buruk jika sistem kontrol tidak terbangun dengan baik. Kemajuan teknologi juga memiliki potensi berpengaruh negatif dalam pembentukan karakter generasi muda serta dapat merusak masa depan generasi muda jika tidak dapat dikontrol dengan baik.

Tabel 2.91 Nilai Investasi Non Fasilitas di Kabupaten Bondowoso 2014-2017

NO	BIDANG USAHA	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1	Pertanian	394.658.000.000	339.458.000.000	617.786.500.073	4.183.087.500
2	Peternakan	21.977.026.000	31.081.097.224	31.185.150.000	660.000.000
3	Perikanan	3.316.461.000	6.176.536.876	13.644.038.000	11.490.262.800
4	Perkebunan	85.335.000.000	138.724.820.000	191.407.473.400	1.020.000.000
5	Kehutanan	-	13.075.000.000	33.520.000.000	-
6	Pertambangan	50.000.000	-	-	480.063.450
7	Perindustrian	42.500.000.000	11.550.000.000	20.150.000.000	4.652.000.000
8	Perdagangan	109.948.701.657	144.536.800.000	147.279.134.627	37.003.000.000
9	Perhotelan/ Losmen/ Penginapan	-	1.500.000.000	-	12.416.065.950
10	Restoran, Rumah Makan , Cafe	-	-	820.000.000	2.416.572.150
11	Perumahan, Ruko	123.840.000.000	1.000.000.000	-	913.380.000.000
12	Perkantoran, Supermarket, Supermal	4.150.000.000	20.000.000.000	-	80.880.000.000
13	Jasa Konstruksi	15.975.000.000	33.625.450.000	29.807.750.000	8.505.000.000
14	Pergudangan	3.380.000.000	12.800.000.000	22.215.000.000	351.000.000
15	Transportasi Darat/Laut	17.108.150.000	17.706.000.000	14.434.000.000	8.775.000.000
16	Kesehatan	2.657.300.000	37.621.000.000	519.000.000	1.238.062.500
17	Koperasi	1.673.509.600	56.380.796.000	55.348.161.300	507.638.406.000
18	Lain-Lain (Jasa Hiburan, Tower, Usaha Wisata)	19.500.000.000	-	175.000.000	1.751.400.000
19	Produksi Air Minum	-	1.000.000.000	75.000.000	-
20	Tower	-	4.600.000.000	393.730.700	2.000.000.000
Jumlah		846.069.148.257	870.835.500.100	1.178.759.938.100	1.598.839.920.350

Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, 2018



Oleh karenanya, perlu pembinaan pemuda secara terus menerus dan berkesinambungan dilakukan untuk membentuk generasi yang berkepribadian, mandiri, tangguh, berkualitas, terampil, berdaya saing, sehat fisik maupun mental melalui kegiatan yang edukatif, rekreatif dan produktif. Pembinaan generasi muda diarahkan pada kegiatan inovatif, edukatif, rekreatif, dan sosial ekonomi produktif, olah raga serta kegiatan organisasi pemuda keagamaan.

Pembinaan olahraga diarahkan pada cabang olahraga yang memiliki pengurus cabang tingkat Kabupaten, pada tahun 2013-2017 sebanyak 19 cabang olahraga dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Cabang olahraga permainan : sepak bola, bola voli, bulutangkis, tenis lapangan, tenis meja, bola basket, catur, bridge, drumband.
- 2) Cabang olahraga terukur : atletik, renang, balap sepeda, panjat tebing, selam, senam.
- 3) Cabang bela diri : pencak silat, wushu, karate, taekwondo.

Tabel 2.92 Capaian Kinerja Kepemudaan Tahun 2013-2017

Uraian	Satuan	Tahun	Target		Realisasi		Capaian kinerja (%)
			%	satuan	%	satuan	
Σ Organisasi kepemudaan yg dibina	organisasi	2013	86,67	13	86,67	13	100,00
		2014	86,67	13	93,33	14	107,68
		2015	86,67	14	100	15	115,38
		2016	93,33	14	100	15	107,15
		2017	93,33	14	100	15	107,15
Peningkatan lomba kreasi dan karya tulis di kalangan pemuda	lomba	2013	25	1	25	1	100
		2014	25	1	25	1	100
		2015	50	2	50	2	100
		2016	75	3	50	2	66,67
		2017	100	4	125	5	125
Pertukaran pemuda	orang	2013	0,0009	3	0,0009	3	100,00
		2014	0,0009	3	0,0012	4	120,00
		2015	0,0012	4	0,0015	5	125,00
		2016	0,0012	4	0,0015	5	125,00
		2017	0,0015	5	0,0015	5	100,00
Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan	SP3	2013	2,28	5	2,28	5	100,00
		2014	2,28	5	2,28	5	100,00
		2015	4,57	10	6,85	15	149,89
		2016	6,85	15	6,85	15	100,00
		2017	9,13	20	6,85	15	75,03
Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP)	KUPP	2013	8,70	2	8,70	2	100,00
		2014	17,39	4	13,04	3	74,99
		2015	34,78	8	34,78	8	100,00
		2016	52,17	12	34,78	8	66,67
		2017	73,91	17	34,78	8	47,06

Sumber: LKPJ-AMJ Bupati Bondowoso, 2018



Tabel 2.93 Capaian Kinerja Olah Raga Tahun 2013-2017

Uraian	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
% jenis olah raga yang berprestasi dan non prestasi	%	2013	43,75 (7 jenis)	43,75 (7 jenis)	100,00
		2014	43,75 (7 jenis)	25 (4 jenis)	57,14
		2015	50,00 (8 jenis)	37,50 (6 jenis)	75,00
		2016	56,25 (9 jenis)	56,25 (9 jenis)	100,00
		2017	62,50 (10 jenis)	56,25 (9 jenis)	90,00
%klub olahraga yang dibina	%	2013	44,44 (8 Klub)	44,44 (8 Klub)	100,00
		2014	55,56 (10 klub)	50 (9 klub)	89,99
		2015	66,67 (12 klub)	55,56 (10 klub)	83,34
		2016	77,78 (14 klub)	66,67 (12 klub)	85,71
		2017	88,89 (16 klub)	66,67 (12 klub)	75,00
% peningkatan turnamen /kompetisi olah raga (turnamen)	%	2013	20 (4 kali)	20 (4 kali)	100,00
		2014	20 (4 kali)	20 (4 kali)	100,00
		2015	40 (8 kali)	30 (6 kali)	75,00
		2016	60 (12 kali)	50 (10 kali)	83,33
		2017	80 (16 kali)	50 (10 kali)	62,50
Rasio jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	%	2013	0,1985 (15 klub)	0,1985 (15 klub)	100
		2014	0,1972 (15 klub)	0,1972 (15 klub)	100,00
		2015	0,2613 (20 klub)	0,1960 (15 klub)	75,01
		2016	0,3115 (24 klub)	0,3115 (24 klub)	100,00
		2017	0,36 (28 klub)	0,31 (24 klub)	85,71

Sumber: LKPJ-AMJ Bupati Bondowoso, 2018

2.3.2.14 Statistik

Dalam era informasi, data statistik merupakan hal yang sangat penting dimana data yang dikumpulkan didasari oleh konsep dan definisi yang jelas dan baik sehingga semua pengguna dapat berkomunikasi dengan

persepsi yang sama. Penyediaan data digunakan untuk bahan perencanaan, evaluasi maupun pengukuran dalam berbagai indikator pencapaian pembangunan. Penyediaan data statistik sektoral terangkum dalam Kabupaten Bondowoso Dalam Angka, Indeks



Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bondowoso. Penyelenggaraan urusan Statistik dilaksanakan dengan koordinasi secara intensif dan berkelanjutan antara Perangkat Daerah Kabupaten dengan kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bondowoso.

2.3.2.15 Persandian

Pengamanan informasi pembangunan dalam bentuk persandian beserta segala aspek penyebarluasannya sangat diperlukan dalam rangka pengamanan berita rahasia yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori dan seni dari ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi. Pelaksanaan kegiatan persandian masih belum optimal dan memerlukan dukungan baik dari SDM, teknologi dan sarana prasarana.

2.3.2.16 Kebudayaan

Kabupaten Bondowoso memiliki sejarah yang sangat panjang dimulai dari zaman megalitikum yang ditandai dengan adanya peninggalan benda-benda purbakala seperti Dolmen, Punden Berundak, Menhir, Sarkopagus, Kubur Batu, Batu Kenong, Pelinggih, Stunchambers (batu ruang), Goa Buto, Ekopak, Abris Saus Roche, Arca Batu yang terdapat di Kecamatan Wringin, Grujungan, Pujer, Maesan, Tegalampel, Bondowoso, Wonosari, Tamanan, Jambesari Darus Sholah, Prajekan, Pujer, Tlogosari, Cermee, dan Ijen. Total terdapat 30 situs yang terdiri dari 1.123 benda. Pelestarian terhadap benda cagar budaya tersebut menjadi perhatian dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso agar perjalanan panjang sejarah ini dapat dikenal dan diketahui oleh masyarakat sebagai warisan dan maha karya budaya yang pernah ada di kabupaten Bondowoso. Selain itu kebudayaan daerah merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan melalui

wisata budaya. Masyarakat Kabupaten Bondowoso sebagian besar terdiri dari empat suku/etnis yaitu Jawa, Madura, Arab dan Tionghoa sehingga memiliki karakteristik yang beragam. Capaian kinerja kebudayaan disajikan sebagaimana Tabel 2.94.

Pengelolaan benda cagar budaya yang masih belum maksimal mengingat banyaknya benda cagar budaya yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Bondowoso, serta masih minimnya penyelenggaraan even yang bertema seni dan budaya sehingga diperlukan upaya pengelolaan dan pemeliharaan benda cagar budaya serta pelibatan masyarakat dalam melestarikan termasuk upaya meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pelestarian benda cagar budaya. Disamping itu perlu upaya meningkatkan minat masyarakat dalam melestarikan seni budaya tradisional dalam wadah penyelenggaraan even - even kesenian daerah.

2.3.2.17 Perpustakaan

Perpustakaan sebagai salah satu media pembelajaran maupun media transfer pengetahuan berperan dalam mencerdaskan masyarakat dan menciptakan sumber daya manusia berkualitas, karena perpustakaan dapat menjadi pusat kegiatan belajar mandiri yang dapat membantu masyarakat dalam belajar, tanggap dengan kemajuan berbagai ilmu pengetahuan dan kehidupan sosial politik. Keberadaan perpustakaan diharapkan mampu mendorong kebebasan serta kemampuan berfikir kreatif masyarakat untuk menghadapi tantangan jaman dengan konsep yang modern, inovatif, kreatif dan sistematis. Pelayanan perpustakaan diarahkan dalam meningkatkan jumlah perpustakaan yang tersedia untuk meningkatkan cakupan layanan sehingga meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan serta meningkatkan ketersediaan bahan bacaan berupa koleksi buku yang tersedia. Gambaran



Tabel 2.94 Capaian Kinerja Kebudayaan Tahun 2013-2017

Uraian	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
Σ benda situs dan kawasan cagar budaya yg dilestarikan	buah	2013	1.123	1.123	100
		2014	1.123	1.123	100
		2015	1.123	1.123	100
		2016	1.123	1.123	100
		2017	1.123	1.175	104,63
Sosialisasi cagar budaya	% (kali)	2013	11,11 (6)	11,11 (6)	100
		2014	22,22 (12)	12,96 (7)	58,34
		2015	33,33 (18)	20,37 (11)	61,11
		2016	48,15 (26)	46,30 (25)	96,15
		2017	62,96 (34)	63,08 (35)	100,19
Padepokan seni dan budaya yg dibantu	% (padepokan)	2013	16,67 (2)	16,67 (2)	100
		2014	16,67 (2)	16,67 (2)	100
		2015	33,33 (4)	25,00 (3)	75,00
		2016	50,00 (6)	83,33 (10)	166,67
		2017	66,67 (8)	91,67 (11)	137,49
Peningkatan even seni dan budaya	% (even)	2013	33,33 (4)	33,33 (4)	100
		2014	33,33 (4)	33,33 (4)	100
		2015	50,00 (6)	83,33 (10)	166,67
		2016	50,00 (6)	75,00 (9)	150,00
		2017	66,67 (8)	66,67 (8)	100
Rasio Σ group kesenian per 10.000 penduduk	%	2013	0,066	0,066	100,00
		2014	0,0657	0,0657	100,00
		2015	0,0784	0,0657	83,80
		2016	0,0779	0,1045	134,15
		2017	0,0903	0,0778	86,16
Rasio Σ Gedung kesenian per 10.000 penduduk	%	2013	0,0132	0,0132	100,00
		2014	0,0131	0,0131	100,00
		2015	0,0131	0,0131	100,00
		2016	0,013	0,013	100,00
		2017	0,0129	0,0129	100,00

Sumber: LKPJ-AMJ Bupati Bondowoso, 2018



perkembangan perpustakaan tahun 2013 - 2017 sebagaimana tabel 2.95.

pengelola kearsipan. Jumlah instansi pemerintah yang menerapkan sistem kearsipan

Tabel 2.95 Perkembangan Perpustakaan Tahun 2013 - 2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jangkauan layanan perpustakaan keliling (kali)	156	168	180	192	246
2	Perpustakaan Satker Kab, Kec dan Desa/Kel. (Unit)	49	52	55	73	77
3	Jumlah bahan pustaka di Perpustakaan umum daerah (Eksemplar)	48.865	52.416	55.037	72.766	74.666
4	Jumlah kunjungan ke Perpustakaan (Orang)	84.303	134.808	127.520	145.468	147.142

Sumber: LKPJ-AMJ Bupati Bondowoso, 2018

Minat baca masyarakat masih relatif rendah hal ini ditunjukkan dengan angka kunjungan perpustakaan pertahun yang masih mencapai 19,23%. Masyarakat belum seluruhnya memanfaatkan perpustakaan secara maksimal, apabila dibanding dengan jumlah penduduk diatas 15 tahun yang ada maka jumlah kunjungan masih kurang, meskipun jumlah kunjungan telah mencapai target yang ditetapkan. Jumlah koleksi bahan pustaka dan sarana dan prasarana pendukung perpustakaan masih terbatas, termasuk masih terbatasnya tenaga pustakawan yang dimiliki. Masih belum adanya web site untuk Perpustakaan Digital, hal ini sebagai upaya penerapan teknologi informasi sebagai sarana untuk menyimpan, mendapatkan, dan menyebarkan informasi ilmu pengetahuan dalam format digital.

2.3.2.18 Kearsipan

Penanganan dan pengelolaan arsip perlu dilakukan secara cepat, tepat, akurat dan profesional. Pengelolaan arsip secara profesional akan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan penyelamatan dokumen penyelenggaraan pemerintah daerah. Pelayanan kearsipan tahun 2013 – 2017 menitikberatkan pada pembinaan sistem informasi manajemen kearsipan, baik secara manual maupun elektronik secara baku dan peningkatan SDM

sesuai kaidah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, apabila dilihat capaian Tahun 2013 terdapat sebanyak 9 instansi atau sebesar 3,09%, maka pada Tahun 2017 instansi yang menerapkan sistem kearsipan sesuai kaidah adalah sebanyak 70 instansi atau sebesar 24,05%, melebihi dari target yang ditetapkan pada Tahun 2017 sebesar 15,46%.

Tabel 2.96 Perkembangan Sistem Administrasi Kearsipan Tahun 2013 - 2017

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi
% Instansi pemerintah yang menerapkan sistem kearsipan sesuai kaidah	%	2013	3,09
		2014	7,22
		2015	10,31
		2016	17,18
		2017	24,05

Sumber: LKPJ-AMJ Bupati Bondowoso, 2018

Dalam rangka menyelamatkan dan melestarikan dokumen daerah, penduplikatan dokumen maupun arsip daerah dalam bentuk data elektronik dan membangun sistem pengamanan penyimpanan data antara lain melalui penyediaan sarana pengolahan dan penyimpanan, penelurusan, penyelamatan arsip dan dokumentasi foto yang bernilai sejarah terus dilaksanakan.



Tabel 2.97 Perkembangan Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen dan Arsip Daerah Tahun 2013 - 2017

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi
% Jumlah arsip yang diselamatkan/diamankan	Eks	2013	1.750 (100%)
		2014	1.000 (100%)
		2015	1.250 (100%)
		2016	1.500 (100%)
		2017	1.750 (100%)

Sumber: LKPJ-AMJ Bupati Bondowoso, 2018

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.3.1 Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mempunyai kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB. Sektor pertanian dari tahun 2013 hingga tahun 2017 peranannya semakin menurun. Gambaran tentang struktur ekonomi Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 - 2017, sebagaimana Tabel 2.98.

Peranan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap pembentukan PDRB pada tahun 2013 mencapai 33,76% dari total PDRB sedangkan tahun 2017 menurun menjadi 32,40%. Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan terdiri dari beberapa sub lapangan

Tabel 2.98 Struktur Ekonomi Kabupaten Bondowoso dan Kontribusinya terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (%) Tahun 2013 - 2017

No.	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
A. Primer (Agriculture)						
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	33,76	33,70	33,66	32,86	31,80
2	Pertambangan dan Penggalian	2,14	2,12	2,07	2,00	1,97
B. Sekunder (Manufacture)						
3	Industri Pengolahan	21,08	20,84	20,82	20,93	21,43
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
6	Konstruksi	8,66	9,14	9,22	9,51	9,71
C. Tersier (Services)						
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	14,35	14,28	14,32	14,76	15,06
8	Transportasi dan Pergudangan	0,63	0,65	0,67	0,68	0,70
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,63	0,67	0,68	0,70	0,72
10	Informasi dan Komunikasi	5,09	5,04	5,00	5,05	5,09
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,77	2,83	2,90	2,95	2,95
12	Real Estate	1,17	1,14	1,14	1,12	1,12
13	Jasa Perusahaan	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,53	3,32	3,20	3,22	3,22
15	Jasa Pendidikan	3,38	3,45	3,49	3,43	3,42
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,67	0,69	0,70	0,69	0,70
17	Jasa Lainnya	1,66	1,67	1,65	1,61	1,61
PDRB		100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Bondowoso, 2014 – 2018



usaha yaitu pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian, kehutanan dan penebangan kayu, serta dan perikanan. Peranan Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kategori Pertanian, Peternakan dan Kehutanan tahun 2013 - 2017 sebagaimana Tabel 2.99.

Kontribusi masing-masing lapangan usaha tahun 2013 – 2017, lapangan usaha yang sumbangannya paling besar dalam pembentukan PDRB kategori pertanian, kehutanan dan peternakan tahun 2017 adalah lapangan usaha tanaman pangan sebesar 43,31%, disusul, peternakan, tanaman perkebunan, perikanan dan terkecil adalah lapangan usaha jasa pertanian dan perburuan sebesar 0,93%.

Tabel 2.99 Peranan Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kategori Pertanian, Peternakan dan Kehutanan (%) Tahun 2013 – 2017

No.	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	93,13	92,99	92,81	92,90	92,59
	a. Tanaman Pangan	43,81	43,76	43,68	43,31	4,07
	b. Tanaman Hortikultura	5,08	4,93	4,85	5,09	5,09
	c. Tanaman Perkebunan	21,68	21,72	21,42	21,39	21,13
	d. Peternakan	21,67	21,69	21,94	22,19	22,91
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,88	0,90	0,91	0,92	0,90
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	3,64	3,76	3,90	3,72	3,88
3	Perikanan	3,23	3,25	3,29	3,37	3,53
	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Bondowoso, 2014-2018

Tabel 2.100 Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Pertanian Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Sat	2013	2014	2015	2016	2017
I	Luas Panen						
1	Padi Palawija						
a	Padi	Ha	63.049	61.431	70.796	75.563	85.007
b	Jagung	Ha	41.463	35.361	29.552	25.368	30.861
c	Kedelai	Ha	33	58	40	31	26
d	Kc. Tanah	Ha	280	100	111	95	61
e	Kc. Hijau	Ha	240	48	100	42	42
f	Ubi Kayu	Ha	6.039	4.744	4.398	3.860	2.342
g	Ubi Jalar	Ha	103	145	175	54	53
2	Sayuran						
a	Bawang Merah	Ha	96	145	55	46	78
b	Kentang	Ha	245	149	224	318	274
c	Cabe Rawit	Ha	1.067	1.121	1.386	1.047	1.509
d	Cabe Besar	Ha	12	18	39	29	35
e	Tomat	Ha	90	98	121	131	154
f	Kubis	Ha	439	609	650	877	838



No	Uraian	Sat	2013	2014	2015	2016	2017
3			Buah-Buahan				
a	Mangga	Ha	5.621	5.623	5.632	5.643	5.681
b	Pepaya	Ha	20	91	95	100	101
c	Nangka	Ha	600	642	663	666	671
d	Durian	Ha	658	663	686	691	693
e	Pisang	Ha	2.012	2.016	2.701	2.760	2.764
f	Manggis	Ha	64	66	54,3	69	71
g	Alpukat	Ha	688	693	710	716	692
4			Bio Farmaka				
a	Jahe	Ha	173	117	108	115	57
b	Laos/Lengkuas	Ha	7	7	7,02	8	4
c	Kencur	Ha	1	2	0,75	1	1
d	Kunyit	Ha	159	165	112	118	441
e	Temulawak	Ha	0,2	1	1,88	2	2
f	Temu Ireng	Ha	1	1	1,19	1	1
5			Tanaman Hias				
a	Mawar	Ha	1	3	4	6	7
II			Produktivitas				
1			Padi Palawija				
a	Padi	Kw/Ha	58,97	59,66	60,39	60,83	61,43
b	Jagung	Kw/Ha	49,02	50,33	50,09	50,71	51,99
c	Kedelai	Kw/Ha	14,37	14,56	14,74	14,82	14,95
d	Kc. Tanah	Kw/Ha	13,22	13,88	13,55	13,66	8,87
e	Kc. Hijau	Kw/Ha	9,07	9,26	9,4	9,42	9,33
f	Ubi Kayu	Kw/Ha	218,12	221,13	222,62	222,64	227,56
g	Ubi Jalar	Kw/Ha	118,89	120,64	121,24	122,77	153,68
2			Sayuran				
a	Bawang Merah	Kw/Ha	99,33	100,87	102,94	102,41	103,58
b	Kentang	Kw/Ha	185,51	187,74	153,34	190,83	192,86
c	Cabe Rawit	Kw/Ha	80,41	81,34	82,34	82,84	83,51
d	Cabe Besar	Kw/Ha	96,59	97,56	98,55	99,47	100,85
e	Tomat	Kw/Ha	122,63	123,84	123,52	126,38	127,65
f	Kubis	Kw/Ha	276,09	278,75	236,86	284,24	286,92
3			Buah-Buahan				
a	Mangga	Kw/Ha	145,76	146,83	146,89	149,57	152,28
b	Pepaya	Kw/Ha	640,33	647,04	649,64	660,22	666,61
c	Nangka	Kw/Ha	310,36	313,78	313,82	319,74	322,78
d	Durian	Kw/Ha	142,27	143,94	144,1	146,87	147,96
e	Pisang	Kw/Ha	245,68	248,77	252,66	253,12	255,52
f	Manggis	Kw/Ha	65,68	66,21	59,57	68,05	68,32
g	Alpukat	Kw/Ha	158,43	160,22	160,29	163,14	165,04



No	Uraian	Sat	2013	2014	2015	2016	2017
4	Bio Farmaka						
a	Jahe	Kw/Ha	160,81	161,22	210,27	210,43	210,49
b	Laos/Lengkuas	Kw/Ha	124,6	124,72	124,97	125,09	125,51
c	Kencur	Kw/Ha	60,1	60,21	121,1	121,14	121,18
d	Kunyit	Kw/Ha	195,24	195,37	197,5	197,59	197,83
e	Temulawak	Kw/Ha	120	121,3	125,9	125,17	125,88
f	Temu Ireng	Kw/Ha	145	145,66	145,76	145,8	145,91
5	Tanaman Hias						
a	Mawar	Tangkai/Ha	3.881	3.802	4.016	4.023	4.052
III	Produksi						
1	Padi Palawija						
a	Padi	Ton	371.800	366.523	427.555	459.616	522.158
b	Jagung	Ton	203.119	177.975	148.013	128.650	160.454
c	Kedelai	Ton	47	84	59	46	39
d	Kc. Tanah	Ton	370	139	150	130	39
e	Kc. Hijau	Ton	218	44	94	40	54
f	Ubi Kayu	Ton	131.723	104.904	97.907	86.711	53.297
g	Ubi Jalar	Ton	1.225	1.749	2.122	663	814
2	Sayuran						
a	Bawang Merah	Ton	954	1.463	558	471	808
b	Kentang	Ton	4.545	2.797	3.435	6.068	5.284
c	Cabe Rawit	Ton	8.580	9.118	11.351	8.673	12.601
d	Cabe Besar	Ton	116	176	384	288	353
e	Tomat	Ton	1.104	1.214	1.487	1.833	1.966
f	Kubis	Ton	12.120	16.976	15.396	24.928	24.044
3	Buah-Buahan						
a	Mangga	Ton	81.932	82.563	82.726	84.402	86.515
b	Pepaya	Ton	6.403,30	5.888	6.172	6.602	6.704
c	Nangka	Ton	18.621,60	20.145	20.806	21.295	21.662
d	Durian	Ton	9.361	9.543	9.886	10.149	10.260
e	Pisang	Ton	49.431	50.152	68.244	69.860	80.328
f	Manggis	Ton	420	437	323,7	698,6	484
g	Alpukat	Ton	10.900	11.103	11.381	11.681	11.421
4	Bio Farmaka						
a	Jahe	Ton	834,6	1.886	2.271	2.420	2.520
b	Laos/Lengkuas	Ton	87,2	87,3	87,73	99	56
c	Kencur	Ton	6,01	12,04	9,08	12	12
d	Kunyit	Ton	1.835,25	3.224	2.212	2.332	8.724,30
e	Temulawak	Ton	0,2	1,21	2,35	20	25
f	Temu Ireng	Ton	15,1	14,57	17,35	18	18
5	Tanaman Hias						
a	Mawar	Tangkai	3.881	11.406	16.064	2.414	28.364

Sumber : LKPJ AMJ Bupati Bondowoso, 2018



Tabel 2.101 Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Perkebunan
Tahun 2013 – 2016

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
I Luas Panen						
1	Kopi (Ha)	5485,36	5505,21	5600,81	12231,88	13636
	Luar Kawasan Hutan					
	- Robusta (Ha)	268,89	1150,85	1050,90	1194,01	1177
	- Arabika (Ha)	268,89	269,09	353,67	338,87	434
	Dalam Kawasan Hutan					
	- Robusta (Ha)	1286,57	4100,40	4404,79	4350,77	4349
	- Arabika (Ha)	1286,57	1404,81	4853,37	7651,11	7676
2	Tebu (Ha)	6449,08	6853,33	6905,02	6905,02	6592,615
3	Tembakau (Ha)	7260,08	6039,00	6295,84	2342,23	6756,60
II Produksi						
1	Kopi (Ton)	2357,22	2894,25	3430,10	2654,32	3050,54
2	Tebu (Ton)	29505,73	403627	28708,77	28708,77	35652,72
3	Tembakau					
	Kasturi (Ton)	1090,98	958,11	745,11	599,58	1802,56
	Rajangan (Ton)	4515,76	4008,80	3758,88	1474,64	2901,14
III Produktivitas						
1	Kopi (Ton Oce)					
	Luar Kawasan Hutan					
	- Robusta (Ton/Ha)	0,53	0,46	0,40	0,30	0,32
	- Arabika (Ton/Ha)	0,23	0,57	0,31	0,36	0,34
	Dalam Kawasan Hutan					
	- Robusta (Ton/Ha)	0,53	0,46	0,41	0,30	0,32
	- Arabika (Ton/Ha)	0,23	0,57	0,23	0,36	0,34
2	Tebu (Ton)	60	58,9	49,8	70,7	51,5
3	Tembakau					
	Kasturi (Ton/Ha)	0,81	0,93	0,8	0,8	0,72
	Rajangan (Ton/Ha)	0,75	0,80	0,7	0,7	0,67

Sumber : Dinas Pertanian dalam Kabupaten Bondowoso Dalam Angka (BPS), 2014 – 2018



Tabel 2.102 Populasi, Produksi Ternak dan Tingkat Konsumsi Masyarakat Tahun 2013 - 2017

No.	Jenis Kegiatan	2013	2014	2015	2016	2017
I Populasi Ternak						
1	Sapi potong (ekor)	188.740	205.321	210.650	215.184	219.013
2	Sapi perah (ekor)	17	26	25	31	20
3	Kuda (ekor)	919	987	753	807	926
4	Kambing (ekor)	38.991	37.717	40.185	43.898	44.399
5	Domba (ekor)	32.782	32.912	36.524	38.723	41.156
6	Kelinci (ekor)	2.691	4.129	3.279	4.658	6.009
7	Ayam Buras (ekor)	508.684	502.347	592.459	627.078	662.655
8	Ayam Ras Petelur (ekor)	155.528	184.247	161.753	181.364	185.212
9	Ayam Ras Pedaging (ekor)	353.282	497.050	454.700	491.500	662.655
10	Itik (ekor)	62.017	64.263	59.485	61.058	84.638
11	Entok (ekor)	13.212	11.489	15.080	17.547	20.037
II Produksi Ternak						
1	Daging (kg/thn)	3.638	2.752,32	2.752,32	2.826	2.953,23
2	Telur (kg/thn)	1.589	1.749,79	1.749,79	2.060	2.122,49
3	Susu (litr/thn)	36,27	15,77	15,77	13,62	39,05
III Konsumsi						
1	Daging (Kg/Kpt/Th)	3,696	3,696	3.666	3,726	3.764
2	Telur (Kg/Kpt/Th)	2,960	2,960	2.936	2,983	2.996
3	Susu (Kg/Kpt/Th)	1,153	1,153	1.144	1,162	1.171

Sumber : Dinas Pertanian dalam Kabupaten Bondowoso Dalam Angka (BPS), 2014 – 2018

II
-

Selain peningkatan kesejahteraan dan SDM petani, dalam rangka penyediaan, pemeliharaan dan pengembangan penerapan teknologi pertanian dan perkebunan yang tepat guna diperlukan upaya sinergis yang berkelanjutan.

Upaya penyediaan sarana produksi dan pengembangan bibit unggul pertanian dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan bibit unggul dan hasil pertanian yang dapat bersaing dan diterima pasar. Standarisasi benih diperlukan untuk menjaga kualitas hasil produksi pertanian.

Perkembangan Luas areal dan produksi tanaman tebu di Kabupaten Bondowoso selama 4 tahun cenderung fluktuatif, walaupun produktifitas lahan

meningkat, tetapi produksinya mengalami penurunan karena adanya peralihan jenis tanaman.

Tabel 2.103 Luas Areal dan Produksi Tanaman Tebu Di Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 – 2016

No	Tebu	2013	2014	2015	2016	2017
1	Luas Areal (Ha)	6.449,08	6.853,33	6.905,02	6.905,02	6.592,615
2	Produktivitas (ton/ha/thn)	60,0	58,9	49,8	70,7	51,5

Sumber : Dinas Pertanian dalam Kabupaten Bondowoso Dalam Angka (BPS), 2014 – 2018

Luas areal dan produksi tanaman tembakau di Kabupaten Bondowoso selama 5 tahun terakhir secara rinci tercantum dalam Tabel 2.104.

Tingkat produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan peternakan masih rendah sebagai akibat dari masih rendahnya tingkat penguasaan teknologi oleh petani dan peternak serta akibat menurunnya daya dukung dan daya tampung sumber daya pertanian sehingga perlu diupayakan



Tabel 2.104 Luas Areal dan Produksi Tanaman Tembakau
Di Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 – 2017

No	Tembakau	2013	2014	2015	2016	2017
1	Luas Areal :					
	Tembakau (Ha)	7.260,08	6.039,00	6.295,84	2.342,23	5.255,00
2	Produksi (Ton)					
	Kasturi	1.090,98	958,11	745,11	599,58	1.765,70
	Rajangan	4.515,76	4.008,80	3.758,88	1.474,64	3.198,70

Sumber: LKPJ-AMJ Bupati Bondowoso, 2018

Tabel 2.105 Perkembangan Luas HMT dan Kelahiran Hasil IB Tahun 2013 - 2017

No.	Indikator Kinerja	2013	2014	2015	2016	2017
1	Peningkatan luas lahan HMT (ha)	3.869	3.865	3.993	4.187,5	4.000
2	Peningkatan kelahiran hasil IB (ekor)	37.239	38.565	42.869	44.289	61.045

Sumber: LKPJ-AMJ Bupati Bondowoso, 2018

peningkatan kemampuan dan ketrampilan SDM pertanian melalui pelatihan bimbingan di bidang pertanian khususnya dalam penerapan teknologi yang sesuai untuk peningkatan produksi secara efisien. Selain itu, dilakukan upaya peningkatan produksi dan produktivitas melalui Penerapan teknologi pertanian berkelanjutan melalui pertanian terpadu dengan cara sistem tanam ganda, komplementari hewan ternak dan tumbuhan, usaha terpadu peternakan dan perkebunan, *agroforestry*, pemeliharaan dan peningkatan sumberdaya genetik dan pengelolaan hama terpadu.

Lemahnya kelembagaan, posisi tawar dan sistem pemasaran yang belum berpihak pada petani dan peternak, maka perlu dilakukan penguatan kembali lembaga pertanian dan perdesaan (GAPOKTAN) untuk meningkatkan posisi tawar petani, mengaktifkan kembali koperasi sebagai lembaga pemasaran produk pertanian, mengembangkan pasar lelang komoditi.

Masih rendahnya mutu produk pertanian, sebagai akibat tidak dipenuhinya persyaratan teknis, sanitasi dan higienis sehingga produk yang dihasilkan belum memenuhi persyaratan mutu ekspor, maka perlu pendampingan dan pembinaan berkesinambungan dalam penanganan

praproduksi, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian dengan melibatkan pihak-pihak terkait terutama eksportir dan pengusaha produk hilir pertanian.

Peningkatan pengujian jumlah sampel bahan pangan asal hewan dan ikan memerlukan sosialisasi terhadap para pedagang di pasar-pasar tradisional di Kabupaten Bondowoso agar pedagang paham dan mengerti bahaya penggunaan borak dan formalin terhadap kesehatan konsumen.

2.3.3.2 Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang menunjukkan tren peningkatan dalam PDRB. Pengembangan sektor pariwisata dapat mendorong perkembangan sektor perdagangan, hotel dan restoran serta menyerap lebih banyak tenaga kerja. Karakteristik wilayah, sumber daya alam, seni dan budaya merupakan potensi bagi pengembangan pariwisata khususnya destinasi pariwisata regional, nasional dan internasional.



Tabel 2.106 Jumlah Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Nusantara)
Tahun 2013 – 2017 di Kabupaten Bondowoso

No	Obyek Wisata	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kawah Ijen	7.605	30.492	46.246	52.737	126.124
2	Kawah Wurung	-	-	6.094	20.452	35.357
3	Batu Susun Solor	-	-	-	-	-
4	Pemandian air panas Blawan	1.500	4.000	4.000	6.400	8.670
5	Agrowisata Kopi Ijen	850	5.609	6.577	2.416	-
6	Pemandangan alam Arak-arak	5.850	9.737	-	-	36.718
7	Pemandian alam Tasnan	5.215	1.045	25.440	11.311	30.229
8	Arung jeram Bosamba	650	990	1.103	500	399
9	Situs Glingseran	425	507	520	940	1.290
10	Situs Pekauman	750	670	750	956	1.307
11	Situs Tanah Wulan	480	507	425	505	860
12	Situs Tegalmijin	360	347	556	350	407
13	Situs Sumber Wringin	250	147	304	250	385
14	Situs Pujer	348	462	470	441	645
15	Situs Sukosari	216	375	412	350	324
16	Air terjun Polo Agung	-	-	-	-	-
17	Air Terjun Gentongan	-	-	-	1.781	3.322
18	Air terjun Tancak Kembar	-	-	-	-	4.705
19	Pendakian Gunung Argopuro	-	-	-	-	-
20	Pendakian gunung Raung	-	-	-	-	-
21	Desa Wisata Lombok Kulon	-	-	-	-	5.093
22	Desa Wisata Almour	-	-	-	-	53.385
23	Panjat tebing alam Patirana	-	-	-	-	28.858
24	Situs Megalitikum	4.088	4.180	4.013	4.020	5.609
25	Pemandian Kelapa Gading	-	-	27.950	-	23.350
26	Pemandian Kharisma	-	-	-	-	25.123
27	River Tubbing Tlogosari	-	-	-	-	1.054
28	Museum Kereta Api	-	-	-	-	11.356
29	Makam Ki Ronggo	-	-	-	-	4.509
30	Padepokan Sine Gema Buana	-	-	-	-	2.261
31	Batik Sumpersari	-	-	-	-	6.263
32	Sumber Salak	-	-	-	-	473
Jumlah		28.895	57.911	122.680	96.035	433.018

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Dalam Kabupaten Bondowoso Dalam Angka (BPS), 2014-2018, data diolah

Dukungan sumber daya manusia yang diperlukan masih sangat terbatas khususnya di lokasi destinasi wisata untuk dapat mengelola objek wisata dengan baik dalam rangka memberikan daya tarik dan kepuasan kepada wisatawan yang berkunjung dan menikmati atraksi wisata yang ada. Sedangkan di sisi lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata masih belum signifikan sehingga

dampak pembangunan pariwisata belum dapat dirasakan dari aspek pendapatan asli daerah.

Mutu dan ragam jenis even kabupaten selama ini masih dapat ditingkatkan agar dapat menyediakan lebih banyak panggung bagi insan kreatif Bondowoso serta menarik lebih banyak lagi kunjungan wisatawan ke



Bondowoso, baik untuk partisipasi aktif dalam even maupun untuk sekedar menonton.

2.3.3.3 Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan dalam struktur perekonomian setiap tahun terus meningkat dan memberikan kontribusi pada posisi kedua dalam struktur perekonomian Kabupaten Bondowoso setelah sektor pertanian. Berturut-turut kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB Kabupaten Bondowoso Atas Dasar Harga Konstan mulai tahun 2013 sampai 2017 adalah sebesar 14,99%, 15,29%, 15,64%, 15,84%, dan 15,96%. Secara agregat, pertumbuhan sektor perdagangan merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi diantara sektor-sektor lainnya pada tahun 2013. Hal ini merupakan dampak kondisi perekonomian di Kabupaten Bondowoso yang semakin membaik, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat. Aktivitas usaha perdagangan berperan dalam memasarkan dan mempromosikan potensi sumber daya alam lokal serta hasil produk atau olahan dari UMKM yang ada di Bondowoso. Kondisi pasar sebagai sarana perdagangan tahun 2013 – 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.107.

Tabel 2.107 Kondisi Pasar Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pasar tradisional	16	16	16	16	16
2	Ruko	38	38	38	38	38
3	Toko	105	119	130	108	130
4	Kios	1.233	779	790	1289	1315
5	Los	1.416	1553	1545	1616	1599
6	Jumlah pedagang pasar	4.914	5040	5102	3051	5146

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, 2018

Nilai komoditi berorientasi ekspor meningkat dari Rp. 14,812 milyar pada tahun 2013 menjadi Rp. 30,074 milyar tahun 2017. Nilai ekspor tersebut meningkat rata-rata

1,26% setiap tahunnya. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas dan daya saing produk di pasar internasional sehingga permintaan juga semakin meningkat. Perkembangan nilai komoditi berorientasi ekspor tahun 2013 – 2017 dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.108.

Tabel 2.108 Perkembangan Ekspor (Milyar) Tahun 2013 - 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Nilai komoditi berorientasi ekspor	15,262	33,315	33,738	39,206	30,074

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, 2018

Sedangkan jumlah pedagang kaki lima dan asongan serta wirausaha yang telah mendapat pembinaan tahun 2013 - 2017, sebagaimana Tabel 2.109.

Tabel 2.109 Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Serta Wirausaha Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang dibina (org)	600	1.352	600	1.250	960
2	Jumlah wirausaha yang dibina (org)	60	106	120	150	120

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, 2018

Beberapa pasar daerah masih memerlukan peningkatan sarana prasarana untuk memenuhi kriteria pasar sehat. Guna memenuhi kriteria tersebut, perlu dilakukan rehabilitasi pasar secara bertahap.

Kegiatan tera/tera ulang yang merupakan bagian dari perlindungan konsumen dalam kegiatan perdagangan masih belum dapat dilaksanakan secara optimal mengingat kelembagaan UPT metrologi Legal belum terbentuk. Dalam melaksanakan



kegiatan tera/tera ulang telah dilakukan kerjasama dengan Badan Standarisasi Metrologi Legal (BSML) Yogyakarta. Disamping itu implementasi sistem jaringan pasar rakyat (Sijaprak) belum dapat dilaksanakan secara optimal sehingga perlu dilakukan peningkatan sistem dan mengintensifkan sosialisasi kepada pedagang serta diperlukan publikasi kepada masyarakat secara lebih komprehensif.

2.3.3.4 Perindustrian

Peran sektor industri khususnya industri pengolahan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bondowoso meningkat dari tahun ke tahun. Kontribusinya terhadap total PDRB menempati urutan ketiga setelah sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Kontribusi sektor perindustrian Kabupaten Bondowoso mulai tahun 2013 sampai tahun 2016 adalah sebesar 21,08%, 20,83%, 20,82% dan 20,88%. Sumbangan sektor industri di Kabupaten Bondowoso lebih banyak didominasi usaha mikro, kecil dan menengah, yang terbukti tahan terhadap krisis

ekonomi dan tetap eksis bahkan cenderung meningkat.

Sub sektor yang paling besar peranannya dalam membentuk besaran PDRB sektor industri pengolahan adalah sub sektor kertas dan barang cetakan yaitu sebesar 28,67% atau 5,9% dari total PDRB kabupaten. Urutan kedua adalah sub sektor makanan, minuman dan tembakau yaitu sebesar 42,07% atau 8,7% dari total PDRB kabupaten. Perkembangan industri di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2013 – 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.110.

Jumlah industri kecil menenggang di Kabupaten Bondowoso berkisar sebanyak 20.080 unit, sementara jumlah aparatur pembina hanya berjumlah 15 orang. Hal tersebut menyebabkan jangkauan pembinaan sangat terbatas, sedangkan di sisi yang lain kompetensi aparatur pembina industri dituntut mengikuti metode dan teknologi produksi yang berkembang sejalan tuntutan pasar.

Tabel 2.110 Perkembangan Industri di Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Industri kecil dan menengah					
	- Jumlah unit usaha (unit)	19.431	19.583	19.888	19.997	20.112
	- Jumlah Tenaga Kerja (org)	61.953	62.336	63.078	63.315	63.755
	- Jumlah nilai investasi (M Rp.)	108.429.000	108.945.880	124.454.292	144.734.660	145.510.320
2	Sentra Industri					
	- Jumlah sentra IKM (unit)	55	55	60	63	65
	- Jumlah unit usaha (unit)	2.415	2.415	3.802	3.988	4.002
	- Jumlah tenaga kerja (org)	4.197	4.197	7.858	8.193	8.253
	- Jumlah nilai investasi (M Rp.)	5.373.266	5.373.266	8.562.950	8.864.050	9.044.520
3	Industri Non Formal					
	- Jumlah unit usaha (unit)	18.841	18.993	19.280	19.379	19.514
	- Jumlah tenaga kerja (org)	47.735	48.010	48.382	48.610	48.935
	- Jumlah nilai investasi (M Rp.)	26.640.000	27.150.000	27.739.684	30.339.684	30.542.445
4	Jumlah Industri					
	- Jumlah unit usaha (unit)	19.431	19.583	19.888	19.997	20.112
	- Jumlah tenaga kerja (org)	61.953	62.336	63.078	63.315	63.755
	- Jumlah nilai investasi (M Rp.)	108.429.000	108.945.880	124.454.292	144.734.660	145.510.320

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, 2018



2.3.3.5 Transmigrasi

Transmigrasi dilakukan dalam rangka penyebaran penduduk serta merupakan upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan transmigrasi bertujuan guna menurunkan tingkat pengangguran melalui program transmigrasi dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam menyelenggarakan pengiriman transmigran ke daerah transmigrasi didasarkan kepada Kerjasama Antar Daerah (KSAD) dan kuota yang telah ditetapkan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Perkembangan transmigrasi tahun 2013 – 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.111.

Tabel 2.111 Perkembangan Transmigrasi Tahun 2013 - 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Pengiriman Transmigran Keluar Jawa (KK)	1	0	5	5	1

Sumber : DPMPSTP dan Naker Kabupaten Bondowoso, 2018

2.3.3.6 Kelautan dan Perikanan

Pengembangan potensi perikanan di Kabupaten Bondowoso adalah perikanan darat berupa perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Perkembangan luas areal, dan produksi perikanan tahun 2013 – 2017 sebagaimana Tabel 2.112.

Usaha budidaya perikanan belum sepenuhnya berkembang secara optimal dan intensif, karena usaha perikanan masih dianggap pekerjaan sampingan. Namun demikian fasilitasi pemasaran produk perikanan perlu terus dilakukan melalui pembinaan budidaya perikanan secara intensif kepada pokdakkam dalam rangka peningkatan pendapatan dan sebagai upaya pemenuhan gizi masyarakat. Disamping itu penangkapan ikan diperairan umum masih belum menggunakan cara-cara ramah lingkungan, sehingga sosialisasi dan pembinaan secara intensif tentang penangkapan ikan ramah lingkungan perlu terus dilakukan.

Tabel 2.112 Luas Areal, Produksi Perikanan Budidaya, Perairan Umum dan Benih Ikan Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Luas areal Budidaya					
	Kolam pekarangan (ha)	19,096	19,46	13,71	13,83	13,93
	Karamba (unit)	65	65	65	86	126
	Mina padi (ha)	12,87	9,22	10,5	3,45	1,2
	Jaring apung (m ²)	0	320	960	1.120	1.248
2	Produksi perikanan budidaya	1.205.454	1.276.830	796.401	843.818	916.904
3	Produksi perikanan tangkap perairan umum	625.264	601.956	231.340	222.600	240.185
4	Produksi benih ikan (ekor)	12.948.000	18.408.000	23.383.210	23.704.000	26.417.500
5	Tingkat Konsumsi Ikan	24,19	25,84	19,86	18,82	20,67

Sumber : LKPJ AMJ Bupati Bondowoso, 2018



2.3.4 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Bondowoso mengalami perubahan, pada tahun 2019-2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi warga negara yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, diwajibkan penerapannya dengan target pencapaian 100%. SPM yang berkaitan dengan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal, juga dimaksudkan untuk menjawab isu-isu krusial yang bermuara pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat.

1. SPM Pendidikan

Dalam pemenuhan SPM pendidikan khususnya tingkat kemandirian sekolah masih belum memadai. Pada indikator Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik; Sampai dengan tahun 2017 masih 70,31% lembaga SMP/MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja kursi yang cukup untuk 36 peserta dan 77,13% minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.

Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan; sampai dengan tahun 2017 sudah 99,41% di setiap SD/MI tersedia 1 orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 orang guru untuk setiap satuan pendidikan dan untuk daerah khusus 4

orang guru setiap satuan pendidikan. Pada indikator Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, sampai dengan tahun 2017 sudah 99,01% Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;

Indikator di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing masing sebanyak 40% dan 20%, sampai dengan tahun 2017 sudah mencapai 98,98% Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing masing sebanyak 40% dan 20%. Indikator Setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan, sampai dengan tahun 2017 sudah mencapai 98,98% Setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Pada indikator setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik, sampai dengan tahun 2017 sudah 99,41% Setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan



telah memiliki sertifikat pendidik, sedangkan indikator Setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik yaitu

setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik sudah mencapai 81,63%.

Tabel 2.113 Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2016-2017

No	Pelaksanaan SPM	Capaian Seluruh Indikator SPM	Capaian Seluruh Indikator SPM
		2016	2017
1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;	100%	100%
2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;	100%	100%
3	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;	69,39%	73,72%
4	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	100%	90,71%
5	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;	88,76%	99,41%
6	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;	100%	100%
7	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;	100%	99,01%
8	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing masing sebanyak 40% dan 20%	100%	98,98%
9	Setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan	100%	98,98%
10	Setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	86,45%	99,41%



No	Pelaksanaan SPM	Capaian Seluruh Indikator SPM	Capaian Seluruh Indikator SPM
		2016	2017
11	Setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	77,64%	81,63%
12	Setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	100%	100%
13	Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;	100%	100%
14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.	100%	100%
15	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dan Pendidikan Kewarganegaraan dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;	100%	100%
16	Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;	100%	100%
17	Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;	100%	100%
18	Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku dan 20 buku referensi;		
19	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan, pembelajaran, melaksanakan, pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;	100%	100%
20	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : a) Kelas I – II : 18 jam per minggu; b) Kelas III : 24 jam per minggu; c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu; atau d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu;	100%	100%
21	Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;	100%	100%
22	Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;	100%	100%
23	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;	100%	100%



No	Pelaksanaan SPM	Capaian Seluruh Indikator SPM	Capaian Seluruh Indikator SPM
		2016	2017
24	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;	100%	100%
25	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian 26setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;	100%	100%
26	Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada akhir semester; dan	100%	100%
27	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).	100%	100%

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bondowoso, 2018

2. SPM Kesehatan

Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil di Provinsi Jawa Timur semua kabupaten masih dibawah 100% termasuk Kabupaten Bondowoso yang berada di posisi 4 terbawah dengan realisasi 82,27%. Hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk

melakukan pemeriksaan kehamilan pada trimester I (3 bulan pertama kehamilan) sehingga K1 masih rendah hal ini yang menyebabkan K4 rendah. Ibu hamil yang tidak mengalamni masalah pada kehamilannya merasa bahwa tidak memerlukan pemeriksaan pada awal keharnilan hanya pada saat akan melahirkan mereka datang pada fasilitas kesehatan. Kunjungan bumil K4 yang masih

Tabel 2.114 Realisasi Pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2017

No	Indikator	Target	Realisasi		
			Pembilang	Penyebut	Cakupan
1	Cakupan kunjungan bumil K-4	89%	9258	11.253	82,27%
2	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan/tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	96%	9669	10.741	84,76%
3	Cakupan Bayi paripurna	96%	9842	10.230	100,8%
4	Cakupan Balita Paripurna	90%	47.278	51.028	92,65%
5	Cakupan penjangingan kesehatan siswa 1 SD dan 7 SMP setingkat	96%	21.246	21.246	100%
6	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%	584.097	491.160	118,92%
7	Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut	70%	91.006	114.150	79,72%
8	Pelayanan tekanan darah tinggi di wilayah puskesmas	100%	65.792	110.627	59,47%
9	Pelayanan Diabetes Meliitus di wilayah puskesmas	100%	9.446	41.766	22,62%
10	Pelayanan gangguan jiwa di wilayah Puskesmas	100%	869	869	100%
11	Pelayanan orang dengan TB di wilayah Puskesmas	100%	1.077	1.077	100%
12	Pelayanan orang dengan risiko HIV di wilayah Puskesmas	100%	5.116	11.793	43,38%

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bondowoso, 2018



kurang dari 100% perlu dilakukan kerjasama yang lebih baik dengan pemangku kepentingan khususnya pada tingkat desa dan kecamatan seperti ibu kepala desa, ibu camat melalui lembaga PKK untuk meningkatkan cakupan kunjungan bumil K4.

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Di Jawa Timur dari 38 Kab/Kota hanya 2 Kabupaten yang mencapai 100% yaitu Lamongan dan Pasuruan. Untuk Kabupaten Bondowoso 90,02%. Salah satu faktor tidak tercapainya target 100% dikarenakan geografis kabupaten Bondowoso dimana masih ada ibu hamil yang tempat tinggalnya jauh dari fasilitas kesehatan sehingga ibu hamil persalinannya tidak dibantu oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Selain itu, hal ini juga disebabkan oleh adanya dukun bersalin yang masih belum bermitra sehingga masih menolong persalinan.

Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 96,21. Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir belum mampu mencapai target karena masih ada ibu yang tidak mendapatkan pelayanan persalinan di tenaga kesehatan. Hal ini menyebabkan bayi yang baru lahir tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar, yakni pengukuran berat badan, panjang badan, suhu tubuh, perawatan tali pusat, konseling ASI, pemeriksaan masalah pemberian ASI, konseling tanda, riwayat sakit, riwayat diare, serta pengecekan/pemberian HBO dan Vitamin K.

Pelayanan Kesehatan Balita 92,65. Cakupan pelayanan kesehatan balita tidak rncapai target karena masih ada sebagian balita yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan standar di posyandu. Keabsenan balita untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di posyandu banyak disebabkan oleh kesibukan orang tuanya, terutarna ibu balita. Kondisi ini menyebabkan mereka

tidak dapat mengantarkan balita mereka ke posyandu yang pelayanannya di pagi hari.

Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 79,72, pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Di Jawa Timur dari 38 Kab/Kota hanya 2 Kabupaten yang mencapai 100% yaitu Pasuruan dan Sampang. Rendahnya capaian pelayanan pada usia lanjut dikarenakan kesadaran para lansia untuk datang pada Posyandu Lansia masih rendah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kunjungan Posyandu Lansia antara lain :

- a. Faktor pengetahuan lansia mengenai pentingnya kegiatan di Posyandu Lansia bagi kesehatan para lansia
- b. Faktor jarak rumah yang jauh dari lokasi posyandu membuat para lansia enggan untuk datang ke posyandu lansia
- c. Faktor ekonomi yang menuntut para Lansia masih tetap bekerja sehingga pada saat jadwal pelaksanaan posyandu mereka lebih memilih untuk bekerja daripada datang ke posyandu lansia
- d. Faktor dukungan keluarga yang masih kurang karena para lansia terkadang lupa jadwal posyandu atau tidak ada yang mengantar karena anaknya harus kerja semua

Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 59,47. Rendahnya cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi disebabkan oleh target sasaran dinilai terlalu tinggi. Target sasaran ditentukan berdasarkan angka prevalensi per kabupaten, bukan berdasarkan jumlah sasaran yang terjadi sesungguhnya di masyarakat. Kondisi ini juga dihadapi oleh seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur kecuali Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, apabila dilihat dari sisi masyarakat, rendahnya cakupan pelayanan hipertensi dikarenakan kesadaran penderita



hipertensi untuk kontrol ke fasilitas kesehatan rendah padahal hipertensi merupakan penyakit yang memerlukan pengobatan seumur hidup agar tidak menderita komplikasi penyakit lainnya. Orang yang menderita hipertensi setelah didiagnosa hipertensi memiliki kecenderungan yang rendah untuk datang kembali untuk kontrol tekanan darah dan pengobatan.

Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 22,62. Rendahnya cakupan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus disebabkan oleh target sasaran dinilai terlalu tinggi. Target sasaran ditentukan berdasarkan angka prevalensi nasional, bukan berdasarkan jumlah sasaran yang terjadi sesungguhnya di masyarakat. Kondisi ini juga dihadapi oleh seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur kecuali Kabupaten Banyuwangi dan Pacitan. Selain itu, apabila dilihat dari sisi masyarakat, rendahnya cakupan pelayanan disebabkan oleh rendahnya kesadaran penderita untuk kontrol ke fasilitas kesehatan dan mencari pengobatan dengan rutin.

Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV 43,38. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV terkait dengan kesediaan setiap individu untuk kontak dengan Pelayanan, Dukungan, dan Pengobatan (PDP) HIV-AIDS. Terdapat beberapa orang dengan risiko terinfeksi HIV yang enggan mencari pelayanan ke PDP karena khawatir akan

mendapatkan pandangan negatif dari orang lain dan juga khawatir diketahui oleh orang yang mengenal mereka. Beberapa orang lainnya bahkan mencari pelayanan kesehatan ke PDP di luar wilayah Bondowoso agar identitas mereka tidak diketahui orang lain.

3. SPM Pekerjaan Umum

Pencapaian SPM penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari tahun 2017 sebesar 58,55 persen, sehingga masih ada sekitar 41,45% rumah tangga penduduk yang belum mendapatkan akses air minum secara aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi, dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari. Capaian ini masih cukup rendah mengingat target sesuai RPJMN bahwa seluruh rumah tangga penduduk harus mendapatkan akses air minum 100 persen. Secara faktual masih terdapat beberapa desa yang tidak memiliki sumber air dan pada saat kemarau mengalami kekeringan. Hal ini disebabkan kondisi wilayah setempat yang secara geografis kurang menguntungkan sehingga perlu dicarikan solusi secara tepat.

Untuk penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik tercapai sebesar 55,21 persen, capaian ini terendah di Provinsi Jawa Timur. Hal ini disebabkan masih tingginya perilaku masyarakat yang

Tabel 2.115 Realisasi Pencapaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2017

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Realisasi Tahun 2017
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari	58,55%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	55,21 %

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bondowoso, 2018



buang air sembarangan dan belum memiliki jamban sehat.

4. SPM Perumahan Rakyat

Pemenuhan rumah layak huni tahun 2017 tercapai sebesar 61,21 persen dari yang telah ditargetkan, sehingga masih terdapat 38,79 persen yang masih perlu mendapat penanganan melalui peningkatan rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat. Sedangkan cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU) mencapai 29,49 persen, sehingga lingkungan sehat dengan dukungan PSU harus terus diupayakan tercapai 100 persen.

5. SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tahun 2016 Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah yang terselesaikan sebanyak 592 pelanggaran, sedang jumlah pelanggaran peraturan daerah yang dilaporkan / dipantau 598 pelanggaran jadi prosentase Penegakan Peraturan Daerah Kepala Daerah diKabupaten/Kota adalah 98,99%, Sedangkan pada Tahun 2017 Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah yang terselesaikan sebanyak 292 pelanggaran, sedang jumlah pelanggaran peraturan daerah yang dilaporkan/dipantau 292 pelanggaran jadi prosentase Penegakan

Tabel 2.116 Realisasi Pencapaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2017

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Akumulasi Realisasi Sampai Tahun 2017
1	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	a. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	61,21%
		b. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	66.12%
2	Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	29,49%

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bondowoso, 2018

Tabel 2.117 Realisasi Pencapaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2017

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun	Realisasi Pencapaian SPM
1	Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	A. Cakupan Penegakan Peraturan daerah kepala Daerah di Kabupaten / Kota	2016 2017	98,99 % 100%
		B. Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	2016 2017	117 % 117 %
		C. Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten / Kota	2016 2017	1 orang 1 orang
2	Penanggulangan Bencana Kebakaran	A. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota	2016 2017	11,29 % 80,5 %
		B. Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan WMK	2016 2017	80 % 25 %
		C. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi	2016 2017	23,61 % 11,76%
		D. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000 – 5000 liter pada WMK	2016 2017	200 % 200 %

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bondowoso, 2018



Peraturan Daerah Kepala Daerah di Kabupaten/Kota adalah 100%

Tahun 2016 dan 2017 terealisasi sebanyak 9 kelompok patroli, dengan jumlah kecamatan 23 dan dilakukan patrol sebanyak 3 kali, sehingga diperhitungkan dalam melakukan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mencapai 117% patroli.

Tahun 2016 jumlah petugas LINMAS kabupaten 5.662 orang sedang jumlah RT 4.575 (219 Desa) jadi rasio petugas Linmas adalah 1 orang per RT. Tahun 2017 jumlah petugas Linmas kabupaten sebanyak 6.003 orang sementara jumlah total RT sebanyak 4.575 sehingga rasio petugas Linmas adalah 1 orang per RT.

Tahun 2016 jumlah luas cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Tahun 2016 adalah 11,29%, sedangkan tahun 2017 hanya mencapai 80.5%. Untuk tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) Tahun 2016 sebesar 80% dengan perhitungan kasus kebakaran yang terjadi

masuk jangkauan WMK yang tertangani dalam waktu 15 Menit sebanyak 5.

Jumlah ideal aparatur Pemadam Kebakaran yang dibutuhkan dalam pelayanan Bencana Kebakaran adalah 72 orang, sampai tahun 2016 jumlah aparatur Pemadam Kebakaran yang tersedia 17 orang sehingga persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi adalah : 23,61 % Sedang tahun 2017 persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi adalah 11.76%. sehingga sangat dibutuhkan aparatur pemadam kebakaran yang mampu mengelola dan merawat peralatan yang berhubungan dengan teknologi informasi bencana kebakaran.

Tahun 2016 jumlah WMK memiliki 2 unit mobil yang layak pakai sedangkan tahun 2017 dari 3 unit mobil pemadam kebakaran yang layak pakai sebanyak 2 unit mobil.

Tabel 2.118 Realisasi Pencapaian SPM Sosial Tahun 2014-2017

No.	Uraian	2014		2015		2016		2017	
		Target (%)	Real (%)	Target (%)	Real (%)	Target (%)	Real (%)	Target (%)	Real (%)
1	Panti sosial skala Kabupaten	7.25	33.6	7.25	35.6	7.25	33.6	7.25	21.2
2	Panti sosial skala luar Kabupaten	50	50	50	100	50	100	50	100
3	Bantuan sosial bagi korban bencana	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Evakuasi korban bencana	100	0	100	0	100	0	100	0
5	Penyelenggaraan jaminan sosial	50	40.04	50	74.29	50	78.21	50	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bondowoso, 2018

sebanyak 18 kasus yang masuk dalam jangkauan WMK sebanyak 5 kasus, dan jumlah kebakaran yang masuk jangkauan WMK yang tertangani dalam waktu 15 Menit sebanyak 4 kasus. Tahun 2017 tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) sebesar 25% dengan kasus kebakaran sebanyak 29 kasus yang masuk dalam jangkauan WMK sebanyak 5 kasus, dan jumlah kebakaran yang

6. SPM Sosial

Kondisi geografis wilayah berupa pegunungan dengan sebaran penduduk yang belum merata, aksesibilitas ke lokasi sasaran PMKS yang belum memadai, data populasi yang belum diverifikasi dan dilakukan validasi secara periodik, merupakan tantangan dan hambatan dalam pencapaian SPM sosial.



2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan (*sustainability*).

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran per kapita dapat dijadikan pendekatan untuk mengukur pendapatan penduduk. Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk Bondowoso tahun 2013 adalah Rp.437.518,00 yang berarti setiap orang mengeluarkan sejumlah 437.518 rupiah untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Pergeseran pengeluaran masyarakat dari pengeluaran yang lebih rendah ke kelas pengeluaran yang lebih tinggi atau sebaliknya, mencerminkan perubahan harga berbagai kebutuhan masyarakat, perubahan daya beli, serta kondisi kesejahteraan. Meningkatnya kesejahteraan penduduk biasanya ditandai dengan berkurangnya proporsi pengeluaran untuk keperluan makanan bergeser pada keperluan Non makanan.

Pengeluaran per kapita rata-rata pada tahun 2015 adalah Rp.584.309. Artinya setiap orang di Kabupaten Bondowoso mengeluarkan uang sejumlah Rp.584.309 untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Bila dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 21,76%.

Pengeluaran per kapita tersebut dibagi menurut kelompok barang makanan dan kelompok barang non makanan. Pengeluaran untuk makanan pada tahun 2015 adalah 311.733 rupiah atau 53,35% sedangkan untuk non makanan 272.576 atau 46,65%.

Terdapat pergeseran golongan pengeluaran antara 100.000,- - 499.999,- rupiah cenderung menurun sedangkan golongan pengeluaran 500.000 – 749.999 ke atas cenderung naik tepatnya sebesar 35,36% dibandingkan tahun 2014 yang hanya 27,62%. Untuk jenis pengeluaran makanan persentase terbesar pada konsumsi makanan dan minuman jadi dan padi-padian yaitu sebesar 69.151 rupiah dan 69.069 rupiah atau 22,18% dan 22,16%, sedangkan jenis pengeluaran non makanan konsumsi terbesar adalah kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga yaitu sebesar 119.268 rupiah atau 43,76%.

Sedangkan pada tahun 2016, terdapat 44,47% penduduk yang masuk golongan pengeluaran antara 300.000 – 499.999 per kapita per bulan. Persentase terendah sebesar 1,25% berada pada golongan pengeluaran terendah antara 150.000 – 199.999 per kapita perbulan.

Pengeluaran rata-rata per kapita perbulan untuk kelompok makanan mencapai 342.531 rupiah sedangkan untuk kelompok non makanan sebesar 261.905 rupiah. Pada kelompok makanan, pengeluaran kelompok makan dan minuman jadi lebih banyak dibandingkan dengan kelompok padi-padian, sementara pada kelompok non makanan, pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga paling tinggi dibanding barang-barang kebutuhan lainnya. Pada tahun 2017 rata-rata pengeluaran perkapita pertahun Provinsi Jawa Timur mencapai 10,97 juta rupiah sedangkan Nasional mencapai 10,66 juta rupiah.

2. Kriminalitas

Tingkat kriminalitas dilihat dari perkembangan jumlah kejahatan dipengaruhi berbagai macam faktor



sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi. Berbagai jenis tindak pidana menunjukkan angka yang fluktuatif, akan tetapi menunjukkan tingkat penyelesaian kasus yang cenderung meningkat setiap tahun. Pada tahun 2013 jumlah kejahatan mencapai 820 kasus dan terselesaikan sebanyak 389 kasus

(47,4%), tahun 2016 jumlah kejahatan mencapai 622 kasus yang terselesaikan sebanyak 411 kasus (66,0%) dan tahun 2017 terjadi kejahatan sebanyak 476 kasus yang terselesaikan sebanyak 382 kasus (80,25%). Perkembangan jumlah kejahatan menurut jenis tindak pidana tahun 2013-2017 disajikan dalam Tabel 2.119.

Tabel 2.119 Perkembangan Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Tindak Pidana Tahun 2013-2017 (kejadian)

No	Jenis Tindak Pidana	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pembunuhan	5	1	3	2	3
2	Pencurian dengan pemberatan	138	83	49	80	77
3	Pencurian Ranmor	72	39	42	47	31
4	Pencurian kayu jati	14	16	8	2	0
5	Pencurian dengan kekerasan	10	5	3	9	0
6	Pencurian hewan	18	11	21	22	6
7	Pencurian kawat telepon	0	0	0	0	10
8	Pencurian biasa	55	30	38	28	34
9	Penganiayaan berat	118	98	106	91	68
10	Perjudian	83	47	45	29	29
11	Kebakaran	16	9	13	12	10
12	Uang palsu	1	2	0	0	0
13	Penipuan	105	61	95	98	95
14	Penggelapan	43	0	19	16	-
15	Penganiayaan ringan	12	4	6	6	11
16	Perusakan	24	13	15	16	10
17	Pemalsuan keterangan	2	1	0	1	2
18	Pemalsuan surat	4	1	4	7	4
19	Serobot tanah	21	11	14	7	13
20	Membawa lari gadis di bawah umur	3	1	3	4	0
21	Perzinahan	8	6	6	4	2
22	Temu mayat	8	12	6	15	8
23	Pencemaran nama baik	12	7	8	5	8
24	Pemalsuan merk	0	0	0	0	0
25	Penadahan	2	1	1	2	0
26	VCD porno	0	0	1	1	0
27	Ancaman dengan keras	2	0	4	1	4
28	Pemerksaan	6	6	7	12	1
29	Pencurian sarang walet	0	0	0	0	0



No	Jenis Tindak Pidana	2013	2014	2015	2016	2017
30	Miras	0	7	3	0	0
31	Narkotika	0	43	0	0	47
32	Pencurian listrik	1	0	0	0	0
33	Penculikan	1	0	0	0	0
34	Bawa lari orang	0	0	0	0	0
35	Memiliki sajam tanpa ijin	1	4	9	14	1
36	Menyimpan obat petasan	13	0	4	0	0
37	Pemerasan	1	1	2	1	3
38	Pencurian dalam keluarga	2	0	0	0	0
39	Lain-lain	19	10	5	110	2
Jumlah		820	530	539	622	476

Sumber : Kepolisian Resort Bondowoso dalam Kabupaten Bondowoso Dalam Angka (BPS), 2014-2018

3. Rasio Ketergantungan

Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Pada tahun 2013 angka rasio ketergantungan di Kabupaten Bondowoso sebesar 47,21% sedangkan

pada tahun 2017 angka rasio ketergantungan menjadi sebesar 44,70% yang artinya pada tahun 2017 setiap 100 penduduk usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 45 orang yang belum produktif atau dianggap tidak produktif lagi.

Tabel 2.120 Komposisi Jumlah Penduduk Kabupaten Bondowoso Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2013-2017 (dalam jiwa)

No	Struktur Umur	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	0-14	175.215	170.015	170.932	171.773	172.600
2	15-64	511.378	523.137	526.040	528.719	531.349
3	65+	66.207	63.837	64.233	64.602	64.963
Jumlah		752.800	756.989	761.205	765.094	768.912

Sumber : BPS Kabupaten Bondowoso, 2014-2018



INTEGRASI



VISI MISI

kedalam



**RANCANGAN
TEKNOKRATIK**



**RPJMD KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN 2018-2023**





BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006). Pengelolaan keuangan daerah secara umum mengacu pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 33 Tahun 2004, bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan, keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi :

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang,

termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; serta

6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Oleh karenanya pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada *output* dengan menggunakan konsep *budgeting*, dengan mempertimbangkan *benefit and cost ratio* serta prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 39 disebutkan bahwa pendekatan anggaran berbasis kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil kinerja dari perencanaan alokasi biaya yang telah ditetapkan. Kinerja mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik dan harus berpihak pada kepentingan publik, sehingga dapat memaksimalkan penggunaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolannya.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Dalam hubungannya dengan dokumen rancangan awal RPJMD Tahun 2018-2023,



pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan gambaran komitmen penyelenggara pemerintahan daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan APBD yang dilakukan setiap tahun pada kurun waktu 2013-2017, selalu memperhatikan sumber-sumber pendapatan yang potensial dan melakukan optimalisasi terhadap sumber-sumber lain, yang memiliki potensi sebagai penyumbang pendapatan daerah, sehingga kebutuhan pembangunan selama 5 (lima) tahun dapat terpenuhi. Optimalisasi dan updating sumber daya yang menjadi pengungkit untuk meningkatkan pendapatan daerah menjadi sangat penting dan terus menerus menjadi perhatian, salah satunya melalui penyusunan regulasi secara komprehensif dan rasional.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah disusun berdasarkan asumsi dan proyeksi secara rasional, terukur dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan, sehingga antara jumlah pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber dengan jumlah pembiayaan yang dibelanjakan. Pendapatan daerah selama tahun 2013-2017 setiap tahun terus meningkat seiring dengan terus meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan.

Pendapatan daerah Kabupaten Bondowoso, masih mengandalkan sumber dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak. Kontribusi dana perimbangan dalam struktur APBD masih lebih dari 65% sehingga optimalisasi terhadap sumber pendapatan yang lain menjadi fokus perhatian pemerintah daerah.

Sebagaimana ketentuan perundang-undangan, dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel dan transparan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun pelaporan keuangan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD disusun berdasarkan Standar

Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan tahap audit. Berikutnya berdasarkan opini hasil audit dan pemeriksaan yang dilakukan, diberikan penilaian. LKPD Pemerintah Kabupaten Bondowoso dari kurun waktu tahun 2013-2017 mendapatkan penilaian dari BPK yaitu opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pertumbuhan total pendapatan daerah selama tahun 2013-2017 mencapai sebesar 11,02%. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan komponen pendapatan daerah, walaupun hanya memiliki tingkat kontribusi berkisar antara 6%-12% terhadap total pendapatan daerah, tetapi setiap tahun cenderung mengalami peningkatan. Realisasi PAD pada tahun 2013 sebesar Rp.79.559.772.884,13,- meningkat sebesar 188% menjadi Rp.229.151.109.430,64,- pada tahun 2017, dengan pertumbuhan rata-rata PAD sebesar 30,27% pertahun.

Kontribusi penerimaan Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) selama periode 2013-2017 masih sangat dominan yaitu berkisar antara 58,41% sampai 70,81% terhadap total pendapatan daerah. DAU memberikan porsi terbesar dalam menopang pendapatan daerah, yaitu berkisar antara 47,91% sampai 59,42%. Realisasi penerimaan dana perimbangan setiap tahun terus meningkat. Realisasi penerimaan Dana Perimbangan pada tahun 2013 mencapai Rp.897.073.140.840,00,- dan pada tahun 2017 mencapai Rp.1.311.071.739.391,00,- terjadi peningkatan sebesar 45,87% selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rata-rata pertumbuhan Dana Perimbangan setiap tahun mencapai 10,25%.



Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan unsur pendapatan daerah yang sangat fluktuatif, dimana sesuai peraturan perundang-undangan komponen ini merupakan agregat pendapatan daerah yang tidak dapat dimasukkan ke dalam pos pendapatan yang lain dan perolehannya setiap tahun mengalami fluktuasi tergantung ketersediaan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi. Komponen penyusun pendapatan ini terdiri dari penerimaan Hibah, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lain, serta bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan dana lainnya. Secara kumulatif lima tahun, pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai sebesar Rp.2.155.336.017.011,73. Perolehan dana lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2013 sebesar Rp.290.206.085.268,00 dan pada tahun 2017 sebesar Rp.384.680.769.242,00,- terjadi peningkatan sebesar Rp.94.474.683.974,00,- atau meningkat 32,55%, sedangkan pertumbuhan rata-rata tiap tahun mencapai 11,67%.

Selama periode tahun 2013-2017 akumulasi belanja daerah direncanakan sebesar Rp.9.021.161.962.691,75,- dan terserap sebesar Rp.8.441.775.422.464,93,- atau terealisasi 93,58% dari target. Penyerapan anggaran diatas 90,00% per tahun merupakan realisasi yang optimal untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

Analisis proporsi belanja tidak langsung dengan belanja langsung diperlukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan daerah. Selama tahun 2013-2017 belanja tidak langsung memiliki proporsi lebih besar dibanding belanja langsung. Selama 5 (lima) tahun rata-rata belanja tidak langsung mencapai 56,37% dan belanja langsung rata-rata mencapai 43,63%. Belanja tidak langsung adalah bersifat wajib, mengikat serta merupakan prioritas dalam belanja daerah.

Proporsi terbesar dalam belanja tidak langsung adalah peruntukan belanja pegawai. Proporsi belanja pegawai ini mengalami penurunan tiap tahun, hal ini bertolak belakang dengan proporsi belanja bantuan keuangan yang mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berimplikasi pada penerapan kebijakan otonomi desa yang makin menguat sehingga alokasi untuk belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa meningkat setiap tahun. Tahun 2013 belanja bantuan keuangan mencapai 8,95% dari total belanja tidak langsung dan pada tahun 2017 mencapai 25,39% serta terdapat kecenderungan untuk terus meningkat selama 5 tahun ke depan.

Kecenderungan/trend peningkatan alokasi belanja bantuan keuangan ini tentu mempengaruhi proporsi belanja daerah secara keseluruhan, khususnya terhadap belanja langsung, sehingga memerlukan kebijakan yang tepat mengingat dampaknya terhadap pelaksanaan pembangunan.

Belanja program dan kegiatan untuk pembangunan setiap tahun meningkat, hal ini dapat dilihat dari proporsi belanja langsung selama tahun 2013-2017 meningkat sebesar 5,41 poin dari 38,70% menjadi 44,11%. Proporsi belanja pegawai dalam belanja langsung yang mengalami penurunan setiap tahun, serta meningkatnya belanja barang dan jasa serta belanja modal, menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan semakin efisien dan dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Hal ini mengingat stimulan berupa berbagai bantuan yang diterima masyarakat masuk dalam proporsi belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Tahun 2013-2017 realisasi pemenuhan belanja kebutuhan aparatur yang termasuk dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung mengalami fluktuasi sesuai dengan peraturan perundangan. Belanja kebutuhan aparatur yang termasuk komponen belanja langsung meningkat pada tahun



2013-2016 mencapai 20,60% dan pada tahun 2017 mengalami penurunan yang disebabkan menurunnya biaya pemungutan pajak karena kewenangan yang ditangani Provinsi. Komponen belanja gaji dan tunjangan, belanja tambahan penghasilan ASN serta Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH naik secara signifikan. Belanja kebutuhan aparatur yang termasuk komponen belanja tidak langsung juga meningkat pada tahun 2013-2017 mencapai 20,30%. Komponen belanja yang mengalami peningkatan secara signifikan adalah belanja makanan dan minuman, serta belanja perjalanan dinas. Hal ini terjadi sesuai fluktuasi harga bahan kebutuhan pokok serta kenaikan biaya transportasi umum. Sedangkan komponen belanja yang mengalami penurunan signifikan adalah komponen belanja modal (kantor, mobil dinas, meubelair, peralatan dan perlengkapan) yang menyesuaikan dengan kebutuhan skala prioritas. Rata-rata pertumbuhan belanja daerah yang diperuntukkan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur selama 5 (lima) tahun mencapai sebesar 2,86%.

Gambaran rata-rata pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2013 - 2017 disajikan pada Tabel 3.1.

3.1.2 Neraca Daerah

Analisis Neraca Daerah dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir Neraca Daerah Kabupaten Bondowoso secara umum menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Rata-rata pertumbuhan neraca daerah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio

likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain Rasio Lancar dan *Quick Ratio*.

Berdasarkan perhitungan rasio lancar, yaitu aktiva lancar dibagi kewajiban jangka pendek, rasio lancar Kabupaten Bondowoso mengalami fluktuasi, rasio lancar paling rendah terjadi pada Tahun 2017 yaitu sebesar 16,25 dan paling tinggi pada Tahun 2015 yaitu sebesar 36,61.

Sedangkan untuk *quick ratio*, yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan, kemudian dibagi dengan kewajiban jangka pendek, rasio paling rendah terjadi pada Tahun 2017 yaitu sebesar 13,11 dan paling tinggi pada Tahun 2013 yaitu sebesar 25,28.

Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan adalah Rasio total hutang terhadap total aset. Berdasarkan perhitungan Rasio total hutang terhadap total aset, yaitu total hutang dibagi dengan total aset, Nampak bahwa rasio hutang Kabupaten Bondowoso terhadap total asetnya kurang dari 1 (satu), dimana rasio tertinggi terjadi pada Tahun 2015 sebesar 0,0039 dan terendah pada Tahun 2013 sebesar 0,0021.

Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2013 – 2017 Kabupaten Bondowoso

NO	URAIAN	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	Rata-Rata Pertumb (%)
1	PENDAPATAN	1.266.838.948.992,13	1.534.483.291.061,68	1.800.277.754.980,00	1.945.061.615.767,86	1.924.903.618.063,64	11,02
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	79.559.722.884,13	134.684.701.401,68	158.974.210.144,00	177.025.949.242,13	229.151.109.430,64	30,27
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	11.206.732.325,00	21.279.683.953,00	22.428.418.167,15	24.822.529.005,00	29.749.104.709,45	27,64
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	19.862.949.933,00	12.644.635.114,00	17.521.087.192,75	15.602.635.363,75	16.743.731.886,67	(4,18)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.465.620.367,18	3.541.490.767,77	3.650.499.964,02	3.749.916.351,00	3.805.729.059,48	2,37
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	45.024.420.258,95	97.218.891.566,91	115.374.204.820,08	132.850.868.522,38	178.852.543.775,04	41,18
1.2	DANA PERIMBANGAN	897.073.140.840,00	979.336.957.137,00	1.051.590.156.581,00	1.297.761.524.802,00	1.311.071.739.391,00	9,95
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	63.585.836.840,00	66.690.180.156,00	66.546.036.581,00	71.334.375.370,00	66.180.550.686,00	1,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	752.776.704.000,00	821.583.706.981,00	862.599.540.000,00	926.596.442.000,00	910.319.122.000,00	4,87
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	80.710.600.000,00	91.063.070.000,00	122.444.580.000,00	299.830.707.432,00	334.572.066.705,00	42,69
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	290.206.085.268,00	420.461.632.523,00	589.713.388.255,00	470.274.141.723,73	384.680.769.242,00	7,30
1.3.1	Pendapatan Hibah	825.400.091,00	1.025.229.286,00	1.677.952.078,00	90.156.129.296,73	3.063.341.500,00	38,80
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	39.128.918.697,00	70.094.953.637,00	68.585.413.177,00	73.290.896.927,00	96.235.994.742,00	25,23
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	177.907.456.000,00	188.430.431.000,00	271.902.640.000,00	142.509.649.000,00	173.908.433.000,00	(0,57)
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	72.343.065.000,00	160.162.277.000,00	245.649.553.000,00	164.317.466.500,00	111.473.000.000,00	11,41
1.3.5	Dana Proyek Pembangunan Daerah dan Desentralisasi	0,00	743.863.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.6	Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	1.245.480,00	4.878.600,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.7	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	1.897.830.000,00	0,00	0,00	



NO	URAIAN	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	Rata-Rata Pertumb (%)
2	BELANJA DAERAH	1.266.305.195.495,25	1.471.104.168.997,53	1.776.098.167.402,67	1.992.640.093.664,82	1.935.627.796.904,66	11,19
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	776.251.182.533,00	833.125.691.307,00	960.613.433.768,75	1.075.171.144.085,94	1.081.752.918.446,12	8,65
2.1.1	Belanja Pegawai	655.196.822.581,00	721.890.059.507,00	767.385.278.079,00	790.093.991.969,00	735.018.245.546,00	2,92
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	Belanja Subsidi	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.183.163.800,00	
2.1.4	Belanja Hibah	43.710.255.067,00	26.309.290.750,00	16.964.720.000,00	31.423.560.000,00	55.512.299.780,12	6,16
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.670.053.727,00	4.595.857.462,00	3.225.176.668,75	3.320.000.000,00	15.389.500.000,00	23,25
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	69.463.894.963,00	79.346.313.588,00	173.038.259.021,00	250.333.592.116,94	274.649.709.320,00	41,01
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	610.156.195,00	984.170.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	BELANJA LANGSUNG	490.054.012.962,25	637.978.477.690,53	815.484.733.633,92	917.468.949.578,88	853.874.878.458,54	14,89
2.2.1	Belanja Pegawai	27.841.842.809,00	21.008.432.750,00	25.714.044.164,00	31.617.497.637,00	31.190.110.146,00	2,88
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	211.067.522.577,25	305.474.554.811,53	385.194.156.060,53	460.426.362.121,71	439.110.394.549,54	20,10
2.2.3	Belanja Modal	251.144.647.576,00	311.495.490.129,00	404.576.533.409,39	425.425.089.820,17	383.574.373.763,00	11,17
3	PEMBIAYAAN	96.091.909.951,30	96.221.772.448,18	156.139.203.012,33	168.934.198.192,59	110.816.225.625,50	9,05
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	96.211.341.951,30	96.721.772.448,18	159.639.203.012,33	180.934.198.192,59	120.816.225.625,50	5,86
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	119.432.000,00	500.000.000,00	3.500.000.000,00	12.000.000.000,00	10.000.000.000,00	



Tabel 3.2 Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2013-2017

NO.	URAIAN	TAHUN 2013 (Rp)	TAHUN 2014 (Rp)	TAHUN 2015 (Rp)	TAHUN 2016 (Rp)	TAHUN 2017 (Rp)	Rata-rata pertumbuhan (%)
A	ASET	2.219.610.732.850,58	2.605.551.415.907,37	1.785.957.236.777,65	2.447.998.796.537,10	2.653.869.737.417,62	7,85
1.	ASET LANCAR	130.882.217.119,10	232.981.877.764,86	257.258.136.450,20	184.446.030.418,67	165.220.260.717,51	12,43
	Kas	96.734.990.389,18	159.647.138.032,33	180.860.228.555,78	121.355.720.295,63	100.230.762.951,48	7,00
	Piutang	20.458.702.364,71	12.375.416.614,09	9.908.400.990,67	26.917.945.704,12	33.054.840.878,20	33,76
	Persediaan	13.688.524.365,21	60.959.323.118,44	66.489.506.903,75	36.172.364.418,92	31.934.656.887,83	74,27
	Jumlah Aset Lancar	130.882.217.119,10	232.981.877.764,86	257.258.136.450,20	184.446.030.418,67	165.220.260.717,51	12,43
2.	INVESTASI JANGKA PANJANG	25.889.496.299,23	26.401.266.308,21	29.921.924.902,68	31.931.090.388,26	33.156.678.016,29	6,47
	Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investasi Permanen	25.889.496.299,23	26.401.266.308,21	29.921.924.902,68	31.931.090.388,26	33.156.678.016,29	6,47
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	25.889.496.299,23	26.401.266.308,21	29.921.924.902,68	31.931.090.388,26	33.156.678.016,29	6,47
3.	ASET TETAP	1.945.331.863.286,25	2.295.518.833.336,30	1.448.784.508.219,85	2.177.761.803.459,25	2.368.169.613.585,13	10,04
	Tanah	219.183.004.529,00	310.205.157.324,00	311.093.641.924,00	314.023.433.144,00	360.125.761.501,00	14,36
	Peralatan dan Mesin	267.759.806.566,10	271.227.507.640,95	346.729.110.825,98	426.228.273.799,25	461.488.469.568,25	15,08
	Gedung dan Bangunan	547.695.673.537,21	597.037.659.823,21	466.338.621.522,41	772.686.370.016,21	759.878.768.613,21	12,79
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	888.544.570.653,94	1.097.965.416.117,14	702.999.445.264,54	1.578.618.423.131,14	1.789.152.431.840,14	31,37
	Aset Tetap Lainnya	21.625.994.409,00	19.067.072.731,00	21.092.004.521,46	21.711.779.951,46	38.891.317.790,21	20,21
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	522.813.591,00	16.019.700,00	528.603.012,00	528.603.012,00	47.750.511.544,00	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00	(399.996.918.850,54)	(936.035.079.594,81)	(1.089.117.647.271,68)	
	Jumlah Aset Tetap	1.945.331.863.286,25	2.295.518.833.336,30	1.448.784.508.219,85	2.177.761.803.459,25	2.368.169.613.585,13	10,04
4.	DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	21.165.118.597,77	
	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	21.165.118.597,77	
	Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	21.165.118.597,77	



NO.	URAIAN	TAHUN 2013 (Rp)	TAHUN 2014 (Rp)	TAHUN 2015 (Rp)	TAHUN 2016 (Rp)	TAHUN 2017 (Rp)	Rata-rata pertumbuhan (%)
5.	ASET LAINNYA	117.507.156.146,00	50.649.438.498,00	49.992.667.204,92	43.859.872.270,92	66.158.066.500,92	-4,91
	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0	0,00	0,00		
	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	22.188.200,00	2.578.289.009,00	2.578.289.009,00	2.567.498.209,00	2.567.498.209,00	
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0	151.408.140,00	151.408.140,00	151.408.140,00	
	Aset Tak Berwujud	7.221.185.479,00	7.751.536.779,00	2.043.431.995,00	2.070.983.560,00	2.113.154.520,00	-15,73
	Aset Lain-lain	110.263.782.467,00	40.319.612.710,00	45.219.538.060,92	39.069.982.361,92	61.326.005.631,92	-1,98
	Jumlah Aset Lainnya	117.507.156.146,00	50.649.438.498,00	49.992.667.204,92	43.859.872.270,92	66.158.066.500,92	-4,91
	JUMLAH ASET DAERAH	2.219.610.732.850,58	2.605.551.415.907,37	1.785.957.236.777,65	2.447.998.796.537,10	2.653.869.737.417,62	7,85
B	KEWAJIBAN	4.636.103.823,79	8.609.132.942,79	7.027.080.068,96	8.883.169.282,04	10.168.385.842,77	27,05
1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4.636.103.823,79	8.609.132.942,79	7.027.080.068,96	8.883.169.282,04	10.168.385.842,77	27,05
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0	0,00	0,00	138.716.167,00	
	Utang Bunga	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Pendapatan Diterima di Muka	0,00	0	421.173.136,84	1.513.188.067,92	1.062.682.920,42	
	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.636.103.823,79	8.609.132.942,79	6.605.906.932,12	7.369.981.214,12	8.966.986.755,35	23,92
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	4.636.103.823,79	8.609.132.942,79	7.027.080.068,96	8.883.169.282,04	10.168.385.842,77	27,05
2.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH KEWAJIBAN	4.636.103.823,79	8.609.132.942,79	7.027.080.068,96	8.883.169.282,04	10.168.385.842,77	27,05



NO.	URAIAN	TAHUN 2013 (Rp)	TAHUN 2014 (Rp)	TAHUN 2015 (Rp)	TAHUN 2016 (Rp)	TAHUN 2017 (Rp)	Rata-rata pertumbuhan (%)
C	EKUITAS DANA	2.214.974.629.026,79	2.596.942.282.964,58	0,00	0,00	0,00	
1.	EKUITAS DANA LANCAR	126.246.113.295,31	224.372.744.822,07	0,00	0,00	0,00	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	96.625.663.448,18	159.600.894.512,33	0,00	0,00	0,00	
	Pendapatan yang Ditangguhkan	109.326.941,00	46.243.520,00	0,00	0,00	0,00	
	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Pendek	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Cadangan Piutang	20.458.702.364,71	12.375.416.614,00	0,00	0,00	0,00	
	Cadangan Persediaan	13.688.524.365,21	60.959.323.118,00	0,00	0,00	0,00	
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(4.636.103.823,79)	(8.609.132.942,79)	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	126.246.113.295,31	224.372.744.822,07	0,00	0,00	0,00	
2.	EKUITAS DANA INVESTASI	2.088.728.515.731,48	2.372.569.538.142,51	0,00	0,00	0,00	
	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	25.889.496.299,23	26.401.266.308,21	0,00	0,00	0,00	
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1.945.331.863.286,25	2.295.518.833.336,30	0,00	0,00	0,00	
	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	117.507.156.146,00	50.649.438.498,00	0,00	0,00	0,00	
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi	2.088.728.515.731,48	2.372.569.538.142,51	0,00	0,00	0,00	



NO.	URAIAN	TAHUN 2013 (Rp)	TAHUN 2014 (Rp)	TAHUN 2015 (Rp)	TAHUN 2016 (Rp)	TAHUN 2017 (Rp)	Rata-rata pertumbuhan (%)
3.	EKUITAS DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	0,00	0	0,00	0,00		
	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH EKUITAS DANA	2.214.974.629.026,79	2.596.942.282.964,58	1.778.930.156.708,69	2.439.115.627.255,06	2.643.701.351.574,85	7,81
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.219.610.732.850,58	2.605.551.415.907,37	1.785.957.236.777,65	2.447.998.796.537,10	2.653.869.737.417,62	7,85





Secara lebih jelas analisis rasio keuangan Kabupaten Bondowoso tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

2. Penyusunan naskah akademik penyesuaian tarif, rincian obyek, prosedur/sistem pemungutan dan ketentuan umum lainnya,

Tabel 3.3 Analisis Rasio Keuangan Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio lancar (<i>current ratio</i>)	28,23	27,06	36,61	20,76	16,25
2.	Rasio quick (<i>quick ratio</i>)	25,28	19,98	27,15	16,69	13,11
3.	Rasio total hutang terhadap total aset	0,0021	0,0033	0,0039	0,0036	0,0038

Dari tabel tersebut terlihat bahwa kemampuan pemerintah daerah untuk membayar kewajiban yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar yang dimiliki sangat baik. Demikian pula aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah hanya sedikit yang dibiayai oleh hutang.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Dalam pengelolaan keuangan daerah, komponen pendapatan yang memungkinkan untuk dilakukan optimalisasi adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi PAD selama periode 2013-2017 masih rendah dengan rata-rata proporsi 6%-12% dari total pendapatan daerah. Peningkatan potensi PAD melalui berbagai kebijakan dan regulasi oleh pemerintah daerah dilakukan dengan memperhatikan beban pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dan regulasi yang dilakukan diarahkan kepada peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah yang diselaraskan dengan tingkat pendapatan masyarakat.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah sebagai berikut :

1. Melakukan kajian terhadap kegiatan pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai upaya peningkatan PAD.

pajak dan retribusi daerah.

3. Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (WP) melalui kegiatan pembinaan, penyuluhan, sosialisasi langsung kepada WP atau melalui media elektronik, baliho, spanduk, dan lain-lain. Serta penyelesaian permasalahan perpajakan daerah dengan cepat dan tepat sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku serta memberikan penghargaan kepada aparatur pemungut pajak daerah yang berprestasi.
4. Melakukan kegiatan pemutakhiran data obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah dengan survei zona nilai tanah dan pendataan ulang obyek dan subyek pajak secara bertahap.
5. Meningkatkan kemampuan aparatur pemungut melalui pembinaan, diklat teknis dan fungsional serta studi banding/lapangan tentang sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah.
6. Meningkatkan pengawasan secara berkala pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
7. Meningkatkan koordinasi kepada OPD penghasil, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan dinas terkait terhadap pelaksanaan pemungutan sumber sumber pendapatan daerah.



8. Pemenuhan sarana dan prasarana pemungutan dan sistem pemungutan berbasis IT, pajak dan retribusi daerah.

Pengelolaan belanja yang dimulai dengan proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban menggunakan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Prinsip efektivitas bahwa belanja daerah harus dilaksanakan sesuai sasaran dan dapat dipergunakan oleh masyarakat. Prinsip efisien bahwa belanja harus memperhatikan masukan dan keluaran. Prinsip transparansi bahwa alokasi anggaran belanja dilaksanakan secara terbuka dapat diakses, dilaksanakan menurut skala prioritas serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan prinsip akuntabilitas bahwa belanja harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah diarahkan untuk melaksanakan urusan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja daerah merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk pencapaian visi dan misi pemerintah sehingga belanja daerah disusun dengan memperhatikan output yang akan dihasilkan yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Selama periode tahun 2013-2017 secara akumulasi, total belanja daerah direncanakan sebesar Rp.9.021.161.962.691,75 dan terserap sebesar Rp.8.441.775.422.464,93 atau terealisasi 93,58% dari target. Penyerapan anggaran diatas 90,00% per tahun merupakan realisasi yang optimal untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

Analisis proporsi belanja tidak langsung dengan belanja langsung diperlukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan daerah. Selama tahun 2013-2017 belanja tidak langsung memiliki proporsi lebih besar dibanding belanja langsung. Selama 5 (lima) tahun rata-rata belanja tidak langsung mencapai 56,37% dan belanja langsung rata-rata mencapai 43,63%. Belanja tidak langsung adalah bersifat wajib, mengikat serta merupakan prioritas dalam belanja daerah.

Proporsi terbesar dalam belanja tidak langsung adalah peruntukan belanja pegawai. Proporsi belanja pegawai ini mengalami penurunan tiap tahun, hal ini bertolak belakang dengan proporsi belanja bantuan keuangan yang mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berimplikasi pada penerapan kebijakan otonomi desa yang makin menguat sehingga alokasi untuk belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa meningkat setiap tahun. Tahun 2013 belanja bantuan keuangan mencapai 8,95% dari total belanja tidak langsung dan pada tahun 2017 mencapai 25,39% serta terdapat kecenderungan untuk terus meningkat selama 5 tahun ke depan.

Kecenderungan/trend peningkatan alokasi belanja bantuan keuangan ini tentu mempengaruhi proporsi belanja daerah secara keseluruhan, khususnya terhadap belanja langsung, sehingga memerlukan kebijakan yang tepat mengingat dampaknya terhadap pelaksanaan pembangunan.

Belanja program dan kegiatan untuk pembangunan setiap tahun meningkat, hal ini dapat dilihat dari proporsi belanja langsung selama tahun 2013-2017 meningkat sebesar 5,41 poin dari 38,70% menjadi 44,11%. Proporsi belanja pegawai dalam belanja langsung yang mengalami penurunan setiap tahun, serta meningkatnya belanja barang dan jasa serta belanja modal, menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan semakin



efisien dan dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Hal ini mengingat stimulan berupa berbagai bantuan yang diterima masyarakat masuk dalam proporsi belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Proporsi realisasi penyerapan anggaran belanja daerah per tahun disajikan pada Tabel 3.4.

Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibanding keseluruhan pengeluaran belanja ditambah pengeluaran pembiayaan selama tahun 2013-2017 terus mengalami penurunan. Hal ini sejalan dengan menurunnya jumlah rekrutmen ASN selama beberapa tahun terakhir dan meningkatnya pengeluaran pembiayaan untuk komponen belanja yang lain. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2013–2017 disajikan pada Tabel 3.5.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Realisasi peningkatan keuangan daerah selama 5 (lima) tahun terakhir diharapkan berkorelasi terhadap realisasi peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso. Realisasi APBD Kabupaten Bondowoso selama 5 tahun terakhir, menunjukkan kondisi pada tahun 2013-2015 tidak mengalami defisit riil, sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 mengalami defisit riil minus. Defisit riil yang terjadi tersebut, ditutupi dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, serta pencairan dana cadangan sebagaimana terlihat pada tabel 3.6 berikut.

Realisasi sisa lebih perhitungan anggaran selama 5 (lima) tahun terakhir, berasal dari berbagai sumber. Tabel 3.8 menyajikan jumlah serta persentase pelampauan penerimaan dan sisa penghematan belanja dari rentang tahun 2013 hingga tahun 2017 terhadap jumlah SILPA. Berdasarkan data tersebut terlihat

bahwa proporsi SILPA terbesar pada rentang tahun 2013 hingga 2017 adalah bersumber dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Yang terbesar adalah pada tahun 2017, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya menyumbangkan Rp.121.498.992.600,41 atau 121,39% dari total SILPA tahun 2017 Rp.100.092.046.784,48. Tabel 3.8 juga memberikan informasi rata-rata pertumbuhan SILPA antara tahun 2013 hingga tahun 2017 yaitu sebesar 6,98%.

3.3 Kerangka Pendanaan

Arah kebijakan pendanaan pembangunan daerah diarahkan dengan mengelola keuangan dan kekayaan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel serta bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan sebesar-besar manfaat untuk masyarakat melalui:

1. Peningkatan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah.
2. Peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah agar tercapai kesinambungan pembangunan serta kemandirian daerah.
3. Peningkatan pengendalian serta pengawasan keuangan dan kekayaan daerah untuk mencegah pemborosan dan segala bentuk penyimpangan.
4. Pengalokasian pembiayaan pembangunan secara efektif dan efisien tanpa mengurangi mutu pelayanan.

Tabel 3.4 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013		2014		2015		2016		2017	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
	BELANJA DAERAH	1.266.305.195.495,25	100,00	1.471.104.168.997,53	100,00	1.776.098.167.402,67	100,00	1.992.640.093.664,82	100,00	1.935.627.796.904,66	100,00
A	Belanja Tidak Langsung	776.251.182.533,00	61,30	833.125.691.307,00	56,63	960.613.433.768,75	54,09	1.075.171.144.085,94	53,96	1.081.752.918.446,12	55,89
1	Belanja Pegawai	655.196.822.581,00	51,74	721.890.059.507,00	49,07	767.385.278.079,00	43,21	790.093.991.969,00	39,65	735.018.245.546,00	37,97
2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Subsidi	600.000.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.163.800,00	0,06
4	Belanja Hibah	43.710.255.067,00	3,45	26.309.290.750,00	1,79	16.964.720.000,00	0,96	31.423.560.000,00	1,58	55.512.299.780,12	2,87
5	Belanja Bantuan Sosial	6.670.053.727,00	0,53	4.595.857.462,00	0,31	3.225.176.668,75	0,18	3.320.000.000,00	0,17	15.389.500.000,00	0,80
6	Belanja Bantuan Keuangan	69.463.894.963,00	5,49	79.346.313.588,00	5,39	173.038.259.021,00	9,74	250.333.592.116,94	12,56	274.649.709.320,00	14,19
7	Belanja Tidak Terduga	610.156.195,00	0,05	984.170.000,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Belanja Langsung	490.054.012.962,25	38,70	637.978.477.690,53	43,37	815.484.733.633,92	45,91	917.468.949.578,88	46,04	853.874.878.458,54	44,11
1	Belanja Pegawai	27.841.842.809,00	2,20	21.008.432.750,00	1,43	25.714.044.164,00	1,45	31.617.497.637,00	1,59	31.190.110.146,00	1,61
2	Belanja Barang dan Jasa	211.067.522.577,25	16,67	305.474.554.811,53	20,76	385.194.156.060,53	21,69	460.426.362.121,71	23,11	439.110.394.549,54	22,69
3	Belanja Modal	251.144.647.576,00	19,83	311.495.490.129,00	21,17	404.576.533.409,39	22,78	425.425.089.820,17	21,35	383.574.373.763,00	19,82

Tabel 3.5 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
1	Tahun 2013	724.966.392.013,00	1.266.424.627.495,25	58,24
2	Tahun 2014	786.752.557.780,00	1.471.604.168.997,53	53,46
3	Tahun 2015	837.344.481.301,00	1.779.598.167.402,67	47,05
4	Tahun 2016	874.032.725.815,07	2.004.640.093.664,82	43,60
5	Tahun 2017	805.132.822.897,00	1.945.627.796.904,66	41,38





Tabel 3.6 Defisit Riil Anggaran Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.266.838.948.992,13	1.534.483.291.061,68	1.800.277.754.980,00	1.945.061.615.767,86	1.924.903.618.063,64
Dikurangi Realisasi :						
2	Belanja Daerah	1.266.305.195.495,25	1.471.104.168.997,53	1.776.098.167.402,67	1.992.640.093.664,82	1.935.627.796.904,66
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	119.432.000,00	500.000.000,00	3.500.000.000,00	12.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Defisit Riil		414.321.496,88	62.879.122.064,15	20.679.587.577,33	-59.578.477.896,96	-20.724.178.841,02

Tabel 3.7 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	74.766.776.855,24	96.625.663.448,18	159.600.894.512,33	180.837.794.992,59	120.781.616.625,50
2	Pencairan Dana Cadangan	21.343.464.996,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	101.100.100,00	96.109.000,00	38.308.500,00	96.403.200,00	34.609.000,00
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah		96.211.341.951,30	96.721.772.448,18	159.639.203.012,33	180.934.198.192,59	120.816.225.625,50

Tabel 3.8 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2013-2017

No	Uraian	SiLPA 2013		SiLPA 2014		SiLPA 2015		SiLPA 2016		SiLPA 2017		Rata-Rata Pert (%)
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	
	Jumlah SiLPA	96.625.663.448,18	100	159.600.894.512,33	100	180.318.790.589,66	100	121.355.720.295,63	100	100.092.046.784,48	100	6,98
1	Pelampauan penerimaan PAD	2.079.013.634,13	2,15	7.180.485.934,68	4,50	16.643.611.687,00	9,23	14.539.431.043,13	11,98	(289.811.809,20)	(0,29)	65,63
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	8.089.557.255,00	8,37	18.440.667.927,00	11,55	(1.468.170.819,00)	(0,81)	(11.812.670.498,00)	(9,73)	(50.344.295.959,00)	(50,30)	262,69
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	3.127.911.868,00	3,24	12.147.782.887,00	7,61	1.528.765.719,50	0,85	873.895.939,20	0,72	29.227.161.952,27	29,20	850,65
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	83.329.180.691,05	86,24	121.831.957.763,65	76,34	163.614.584.002,16	90,74	117.755.063.811,30	97,03	121.498.992.600,41	121,39	13,91
5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





Strategi Pendanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan kebijakan adalah:

1. Peningkatan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah

- a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli daerah (PAD)

Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi pajak maupun retribusi daerah yang ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak dan retribusi daerah. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan pemanfaatan aset daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha atau industri pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat.

- b. Peningkatan penerimaan daerah dari pemerintah pusat, provinsi serta sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah.

Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan dengan pemerintah pusat/provinsi dan pihak lainnya agar pendanaan pembangunan dapat terpenuhi.

- c. Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah dapat dilakukan secara selektif dalam rangka menutup defisit berupa pinjaman jangka pendek, menengah dan jangka panjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (batasan maksimal defisit yang boleh dibiayai

dari pinjaman), dengan mempertimbangkan:

- 1) Waktu pelaksanaan dan jangka waktu pengembalian pinjaman yang harus dilunasi dalam kurun waktu tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah.
 - 2) Proyeksi kemampuan mengangsur kembali (*Debt Coverage Service Ratio*).
 - 3) Terkait dengan suku bunga bank atas pinjaman dimaksud agar dilakukan negosiasi seksama dengan calon pemberi pinjaman dan memperhatikan tingkat suku bunga bank yang berlaku di pasar maupun SBI, serta laju inflasi yang terjadi, sehingga diperoleh tingkat suku bunga yang memadai, kompetitif, dan tidak membebani keuangan daerah.
2. Peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah agar tercapai kesinambungan pembangunan serta kemandirian daerah
 - a. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi secara jujur dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Meningkatkan dan memperluas Kemitraan (*Public Private Partnership*)
Kemitraan/kerjasama merupakan suatu hubungan dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama. Pihak yang saling bekerjasama adalah pemerintah, swasta dan masyarakat dalam kegiatan usaha ekonomi, penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana pelayanan



dimana kemitraan/kerjasama ini dilaksanakan sesuai perundang-undangan yang berlaku sehingga kebutuhan pendanaan pembangunan secara berkelanjutan dapat tercukupi melalui pengerahan dana swasta dan masyarakat.

c. Optimalisasi Pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu komitmen dunia usaha untuk memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dan lingkungan sosial dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjaannya beserta seluruh keluarganya baik untuk saat ini maupun jangka panjang secara berkelanjutan. Sesuai peraturan perundang-undangan, perusahaan yang wajib melaksanakan CSR adalah yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam, sedangkan perusahaan yang tidak berkaitan dengan sumber daya alam dapat melaksanakan CSR dengan sukarela. Pelaksanaan CSR akan dilakukan melalui koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pola pendanaan dan waktu pelaksanaan pada obyek program/kegiatan antara pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan pihak perusahaan sehingga dapat berjalan efektif (tepat sasaran).

d. Mengembangkan Privatisasi/
Swastanisasi

Pengembangan privatisasi/swastanisasi dilakukan dalam rangka memberikan peluang seluas-luasnya peran swasta/masyarakat untuk sektor usaha pelayanan umum.

e. Optimalisasi Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga keuangan mikro Bank dan non Bank diarahkan untuk berperan dalam intermediasi secara praktis dan efektif antara Bank Umum dengan sektor usaha mikro, kecil dan menengah dengan strategi meningkatkan kapasitas SDM pengelola dan sumberdaya finansial.

f. Optimalisasi pemanfaatan Zakat, Infaq dan Shodaqoh

Efektifitas pemanfaatan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) dapat dilakukan melalui koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pola pendanaan dan waktu pelaksanaan pada obyek program/kegiatan berpedoman pada norma/kaidah-kaidah yang berlaku antara Lembaga Pengelola ZIS dengan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

g. Peningkatan Keswadayaan Masyarakat

Kontribusi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah dirasakan cukup penting, sehingga keswadayaan masyarakat dalam pembangunan perlu terus ditingkatkan melalui peningkatan kesadaran masyarakat.

3. Peningkatan pengendalian serta pengawasan keuangan dan kekayaan daerah untuk mencegah pemborosan dan segala bentuk penyimpangan

Langkah-langkah yang dilakukan yaitu :

a. Pemantapan kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan PAD.

b. Peningkatan pengendalian serta pengawasan atas pemungutan PAD.

4. Pengalokasian pembiayaan pembangunan secara efektif dan efisien tanpa mengurangi mutu pelayanan kepada masyarakat

a. Dalam pengalokasian pembiayaan pembangunan lebih mengutamakan



keberpihakan pada kepentingan publik disamping kepentingan aparatur.

- b. Pendanaan Pembangunan dengan pola cost sharing

Pola pendanaan pembangunan ini dilakukan melalui kesepakatan belanja antara Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam bentuk obyek program maupun kegiatan yang disepakati sesuai dengan kebutuhan daerah.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Kebijakan Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikembangkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun pada periode 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perencanaan APBD secara optimal dan terpadu dilaksanakan secara E-Government, baik belanja aparatur, belanja pelayanan publik maupun belanja pembangunan.
2. Transparansi penyusunan dan pemanfaatan APBD yang berbasis pada kinerja dan kebutuhan masyarakat.
3. Orientasi APBD yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan dilakukan dengan prinsip pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya untuk mengurangi kesenjangan sosial maupun kesenjangan antar wilayah.
4. Pengurangan dan pencegahan terjadinya kebocoran serta penyimpangan pengelolaan keuangan daerah.
5. Kemitraan strategis baik antar pemerintah daerah dan antar negara dengan masyarakat dan swasta maupun dengan lembaga-lembaga donor.
6. Optimalisasi pemanfaatan dana perimbangan dan dana tugas pembantuan/dekonsentrasi, bantuan

keuangan serta sumber dana lain dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

7. Meningkatkan efektivitas kebijakan belanja daerah melalui penciptaan partnership secara harmonis antara eksekutif, legislatif, serta partisipasi masyarakat dalam pembahasan dan penetapan anggaran belanja daerah.

Memperhatikan rencana target kinerja pembangunan daerah tahun 2019 – 2023 yang terus meningkat, maka dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bondowoso mengalami fluktuasi seiring dengan kemajuan dan keberhasilan pembangunan yang telah dicapai pada tahun – tahun sebelumnya, walaupun juga dipengaruhi oleh kondisi dan kemampuan keuangan negara.

Pada tahun 2019-2023, diperkirakan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah mengalami fluktuasi sesuai dengan kondisi perekonomian nasional dan keuangan negara. Dibandingkan tahun 2013-2017, PAD dari hasil pajak daerah diproyeksikan meningkat dari tahun dasar 2019 sebesar 1,00% dengan asumsi diantaranya berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB, retribusi daerah diproyeksikan meningkat 3,91% dan Lain lain PAD yang sah diproyeksikan naik 7,64%.

Dana perimbangan diproyeksikan meningkat 6,03% pada tahun 2019-2023 meliputi Dana bagi hasil pajak/bukan pajak yang diasumsikan naik 1,50%, Dana Alokasi Umum diasumsikan naik 4,00% sedangkan Dana Alokasi Khusus diasumsikan naik sebesar 11,00% setiap tahun.

Pada Lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan naik setiap tahun sebesar 16,53%, dimana komponen kenaikan terbesar dari Dana bagi hasil pajak provinsi yang naik setiap tahun sebesar 25,23%, disamping itu mengingat Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Jawa Timur sifatnya



sangat fluktuatif sehingga untuk tahun 2019-2023 tidak diasumsikan.

Belanja daerah selama 5 tahun harus dilakukan estimasi secara cermat sehingga jika terjadi defisit diperkirakan dapat ditutup dengan pembiayaan netto. Belanja Daerah diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 8,23%. Total belanja tidak langsung meningkat sebesar 6,99% serta belanja langsung meningkat sebesar 9,93% setiap tahun. Untuk belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung diasumsikan mengalami kenaikan sekitar 4,64% dimana hal ini telah memperhitungkan peningkatan pengeluaran gaji CPNS serta jumlah pegawai pensiun. Belanja pegawai pada Belanja Langsung diproyeksikan rata-rata menurun sebesar 41,58% per tahun, mengingat jika dilakukan penerapan pemberian tunjangan kinerja aparatur maka belanja pegawai pada Belanja Langsung menjadi berkurang secara signifikan. Belanja barang dan jasa serta belanja modal untuk kepentingan pembangunan diproyeksikan naik sebesar 5,00% dan 18,86% setiap tahun.

Guna meningkatkan kinerja, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelayanan kepada masyarakat serta mengembangkan perekonomian daerah, maka Pemerintah Kabupaten Bondowoso dapat melakukan penyertaan modal, khususnya pada PDAM dan PT. Bondowoso Gemilang sesuai peraturan perundang-undangan. Sesuai peraturan daerah, sampai dengan tahun 2018 penyertaan modal daerah telah dilakukan dan masih diperlukan tambahan penyertaan modal lagi, sebagaimana amanat :

1. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso, dari rencana sebesar Rp.15.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp.11.354.838.766,29,- sehingga masih memerlukan tambahan penyertaan modal sebesar Rp.3.645.161.233,71,-.

2. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bondowoso Gemilang dari rencana sebesar Rp.11.847.397.900,- terealisasi Rp.2.900.000.000,- sehingga masih memerlukan tambahan penyertaan modal sebesar Rp.8.847.397.900,-.

Secara keseluruhan kebutuhan penyertaan modal sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp.12.492.559.133,71,- akan direncanakan setiap tahun.

Secara garis besar, asumsi dan proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 3.9.

3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Belanja periodik yang wajib dan mengikat merupakan pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas pemerintah daerah. Belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas merupakan akumulasi belanja tidak langsung dan pos pengeluaran pembiayaan. Belanja tidak langsung berupa gaji dan tunjangan aparatur sebagai pelaksana pelayanan, belanja bunga, belanja subsidi dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik memiliki kecenderungan meningkat selama 5 (lima) tahun.

Tabel 3.9 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	Rata-Rata Pertumb (%)	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	PENDAPATAN	8,23	2.036.171.881.584,21	2.192.268.677.119,46	2.381.317.072.739,21	2.571.268.599.587,82	2.794.257.000.666,97
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7,11	193.325.576.023,77	209.764.744.085,93	222.079.545.201,43	239.250.089.467,58	254.446.959.204,08
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	3,44	38.368.485.505,00	39.063.237.492,16	39.348.737.943,66	43.134.238.395,17	43.919.738.846,67
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3,34	20.137.772.565,00	22.067.839.161,00	22.241.110.062,00	22.682.922.625,64	22.961.886.596,64
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	3.805.729.059,48	3.805.729.059,48	3.805.729.059,48	3.805.729.059,48	3.805.729.059,48
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8,83	131.013.588.894,29	144.827.938.373,29	156.683.968.136,29	169.627.199.387,29	183.759.604.701,29
1.2	DANA PERIMBANGAN	5,87	1.459.908.617.000,00	1.539.339.586.897,59	1.643.881.385.935,01	1.730.035.738.997,86	1.833.766.354.647,02
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1,50	95.323.196.000,00	96.753.043.940,00	98.204.339.599,10	99.677.404.693,09	101.172.565.763,48
1.2.2	Dana Alokasi Umum	3,73	940.848.730.000,00	972.238.815.947,59	1.023.591.069.354,81	1.050.842.899.855,75	1.089.331.656.645,13
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	11,00	423.736.691.000,00	470.347.727.010,00	522.085.976.981,10	579.515.434.449,02	643.262.132.238,41
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16,53	382.937.688.560,44	443.164.346.135,94	515.356.141.602,77	601.982.771.122,38	706.043.686.815,87
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	59.932.200.000,00	59.932.200.000,00	59.932.200.000,00	59.932.200.000,00	59.932.200.000,00
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	25,23	83.152.667.560,44	104.132.085.585,94	130.404.610.779,27	163.305.694.078,88	204.507.720.694,98
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	16,49	239.852.821.000,00	279.100.060.550,00	325.019.330.823,50	378.744.877.043,50	441.603.766.120,89
	- DD	17,00	230.866.115.000,00	270.113.354.550,00	316.032.624.823,50	369.758.171.043,50	432.617.060.120,89
	- DID	0,00	8.986.706.000,00	8.986.706.000,00	8.986.706.000,00	8.986.706.000,00	8.986.706.000,00
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Dana Proyek Pembangunan Daerah dan Desentralisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



NO	URAIAN	Rata-Rata Pertumb (%)	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
2	BELANJA DAERAH	8,29	2.058.935.448.012,51	2.179.145.537.336,03	2.363.193.932.955,78	2.553.145.459.804,40	2.831.133.860.883,55
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6,87	1.209.326.642.042,04	1.221.029.544.803,62	1.313.231.978.967,39	1.422.655.280.139,51	1.577.627.709.498,46
2.1.1	Belanja Pegawai	4,64	790.229.424.235,04	815.127.561.122,70	856.128.548.526,65	900.208.036.726,65	947.596.840.226,65
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	1.183.163.800,00	1.183.163.800,00	1.183.163.800,00	1.183.163.800,00	1.183.163.800,00
2.1.4	Belanja Hibah	-2,50	70.492.300.000,00	14.712.300.000,00	14.712.300.000,00	23.212.300.000,00	63.712.300.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	0,00	4.121.750.000,00	4.121.750.000,00	4.121.750.000,00	4.121.750.000,00	4.121.750.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa	3,40	5.850.625807,00	6.113.107.665,32	6.158.984.800,57	6.581.716.102,08	6.688.162.544,33
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	13,28	335.449.378.200,00	377.771.662.215,60	428.927.231.840,18	485.348.313.510,78	552.325.492.927,48
	- ADD	3,47	103.617.192.600,00	106.692.237.065,60	111.928.536.416,68	114.624.071.867,28	118.742.362.206,59
	- DD	17,00	230.866.115.000,00	270.113.354.550,00	316.032.624.823,50	369.758.171.043,50	432.617.060.120,89
	- Banpol	0,00	966.070.600,00	966.070.600,00	966.070.600,00	966.070.600,00	966.070.600,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	10,20	849.608.805.970,47	957.909.043.609,25	1.049.710.949.509,68	1.130.062.221.077,28	1.253.198.091.350,82
2.2.1	Belanja Pegawai	-38,94	31.800.345.125,00	23.026.515.107,50	13.034.132.873,13	7.559.847.160,22	4.419.547.694,12
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,49	506.428.243.033,43	542.599.571.765,10	569.839.902.944,36	599.542.845.641,57	627.190.936.583,65
2.2.3	Belanja Modal	18,86	311.380.217.812,04	392.282.956.736,65	466.836.913.692,19	522.959.528.275,49	621.587.607.073,05
3	PEMBIAYAAN						
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		22.763.566.428,30	0,00	0,00	0,00	40.000.000.000,0
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya		22.763.566.428,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000.000,00
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





NO	URAIAN	Rata-Rata Pertumb (%)	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		0,00	13.123.139.783,43	18.123.139.783,43	18.123.139.783,43	3.123.139.783,42
	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	10.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		0,00	3.123.139.783,43	3.123.139.783,43	3.123.139.783,43	3.123.139.783,42
	- PDAM		0,00	911.290.308,43	911.290.308,43	911.290.308,43	911.290.308,42
	- PT. BONDOWOSO GEMILANG		0,00	2.211.849.475,00	2.211.849.475,00	2.211.849.475,00	2.211.849.475,00
	Pembayaran Pokok Utang		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO		22.763.566.428,30	-13.123.139.783,43	-18.123.139.783,43	-18.123.139.783,43	36.876.860.216,58



Pada tahun 2019–2023 Belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas dari belanja tidak langsung rata-rata tumbuh sebesar 6,87% tiap tahun. Komponen belanja gaji dan tunjangan aparatur menunjukkan rata-rata pertumbuhan 4,64%. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik cenderung meningkat secara signifikan, diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar 13,28% sejalan dengan meningkatnya otonomi desa. Belanja bantuan keuangan ini merupakan proporsi peningkatan terbesar dari seluruh komponen belanja yang bersifat wajib, mengikat dan prioritas. Sedangkan untuk pengeluaran subsidi diasumsikan tetap dan untuk pos pengeluaran pembiayaan memiliki kecenderungan fluktuatif mengikuti kondisi perekonomian dan keuangan daerah. Gambaran pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

III
-
24

Berdasarkan analisis kerangka pendanaan Tahun 2019-2023 sebagaimana Tabel 3.8, maka diperoleh asumsi bahwa tingkat pertumbuhan pendapatan adalah sebesar 8,23% per tahun, pada Tabel 3.10 dapat dilihat sisa lebih riil perhitungan anggaran meningkat sebesar 7,00% per tahun dikurangi Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama yang diasumsikan naik setiap tahun sebesar 7,49%, maka diproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2019 sebesar Rp.932.073.481.777,17 sedangkan proyeksi pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp.1.359.866.755.977,01 naik sebesar 45,90% atau 9,90% per tahun.

Pada Tabel 3.11 Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ini diproyeksikan untuk penyelenggaraan pembangunan daerah melalui belanja langsung pada prioritas 1 yang bersifat wajib serta mengikat berupa belanja rutin

penyelenggaraan administrasi perkantoran diproyeksikan meningkat sebesar 3,00% per tahun dan alokasi tahun 2019 sebesar Rp.86.340.358.825,00 dan meningkat hingga tahun 2023 menjadi sebesar Rp.1.041.227.071.854,88. Untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dialokasikan tahun 2019 sebesar Rp.131.611.954.844,00 dan meningkat hingga tahun 2023 sebesar Rp.147.670.739.571,76 atau naik rata-rata sebesar 2,92% setiap tahun. Disamping itu dialokasikan belanja tak terduga sebesar Rp.2.000.000.000,- setiap tahun.

Belanja langsung prioritas 2 tahun 2019 yang digunakan untuk pencapaian visi misi pembangunan mencapai sebesar Rp.637.507.118.108,17 dan tahun 2023 mencapai sebesar Rp.1.045.185.131.889,15 atau meningkat sebanyak 63,95% selama 5 (lima) tahun atau rata-rata sebesar 13,16% pertahun. Belanja prioritas 2 di dalamnya termasuk program/kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus yang penggunaannya bersifat specific grant serta dapat diintegrasikan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Belanja langsung prioritas 3 tahun 2019 yang digunakan untuk hibah dan bantuan sosial mencapai sebesar Rp.74.614.050.000,00 dan total hingga tahun 2023 selama 5 (lima) tahun mencapai sebesar Rp.207.450.250.000,00.



Tabel 3.10 Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

No	Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan (%)	2019	2020	2021	2022	2023
A	Belanja Tidak Langsung	7,43	1.126.861.966.235,04	1.194.082.387.138,30	1.286.238.944.166,83	1.386.739.514.037,43	1.501.105.496.954,13
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	4,64	790.229.424.235,04	815.127.561.122,70	856.128.548.526,65	900.208.036.726,65	947.596.840.226,65
2	Belanja Bunga	0,00	-	-	-	-	-
3	Belanja Subsidi	0,00	1.183.163.800,00	1.183.163.800,00	1.183.163.800,00	1.183.163.800,00	1.183.163.800,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	13,28	335.449.378.200,00	377.771.662.215,60	428.927.231.840,18	485.348.313.510,78	552.325.492.927,48
B	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	13.123.139.783,43	18.123.139.783,43	18.123.139.783,43	3.123.139.783,42
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	-	10.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	-
2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	0,00	-	3.123.139.783,43	3.123.139.783,43	3.123.139.783,43	3.123.139.783,42
3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	-	-	-	-	-
Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama		7,49	1.126.861.966.235,04	1.207.205.526.921,73	1.304.362.083.950,26	1.404.862.653.820,86	1.504.228.636.737,55

Tabel 3.11 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Pendapatan	2.036.171.881.584,21	2.192.268.677.119,46	2.381.317.072.739,21	2.571.268.599.587,82	2.794.257.000.666,97
2	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000.000,00
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	22.763.566.428,00	24.357.016.078,28	26.062.007.203,76	27.886.347.708,02	29.838.392.047,59
	Total Penerimaan	2.058.935.448.012,21	2.216.625.693.197,74	2.407.379.079.942,97	2.599.154.947.295,84	2.864.095.392.714,56
	Dikurangi :					
	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	1.126.861.966.235,04	1.207.205.526.921,73	1.304.362.083.950,26	1.404.862.653.820,86	1.504.228.636.737,55
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	932.073.481.777,17	1.009.420.166.276,01	1.103.016.995.992,71	1.194.292.293.474,98	1.359.866.755.977,01

Tabel 3.12 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	932.073.481.777,17	1.009.420.166.276,01	1.103.016.995.992,71	1.194.292.293.474,98	1.359.866.755.977,01
2	BELANJA PRIORITAS 1	219.952.313.669,00	226.385.593.515,20	233.008.797.301,51	239.827.532.972,06	246.847.574.087,86
	1.Pemenuhan Belanja Rutin (ex BAU)	86.340.358.825,00	88.930.569.589,75	91.598.486.677,44	94.346.441.277,77	97.176.834.516,10
	2.Pemenuhan SPM	131.611.954.844,00	135.455.023.925,45	139.410.310.624,07	143.481.091.694,29	147.670.739.571,76
	3.Belanja Tak Terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
3	BELANJA PRIORITAS 2	637.507.118.108,17	764.200.522.760,81	851.174.148.691,20	927.130.710.502,92	1.045.185.131.889,15
	1.Pencapaian Visi Misi 2018-2023	637.507.118.108,17	764.200.522.760,81	851.174.148.691,20	927.130.710.502,92	1.045.185.131.889,15
4	BELANJA PRIORITAS 3	74.614.050.000,00	18.834.050.000,00	18.834.050.000,00	27.334.050.000,00	67.834.050.000,00
	1.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Lainnya (Hibah + Bansos)	74.614.050.000,00	18.834.050.000,00	18.834.050.000,00	27.334.050.000,00	67.834.050.000,00



**FOCUS GROUP DISCUSSION
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RPJMD KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN 2018-2023**

PILAR LINGKUNGAN

PILAR SOSIAL, HUKUM & TATA NEGARA

PILAR EKONOMI

SKLH
KLN
FGD
G
F







BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Berdasarkan gambaran umum kondisi Kabupaten Bondowoso dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing serta dan pelayanan umum, serta gambaran pengelolaan keuangan daerah selama 5 (lima) tahun pada periode 2013-2017, terdapat aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun demikian masih terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan serta program secara terencana, terukur, sinergis, serta berkelanjutan (*sustainable*).

Agar berbagai program pembangunan yang dirumuskan menjadi lebih efektif dan optimal dalam mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi, salah satu tahapan yang dilakukan adalah identifikasi isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Bondowoso yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2018-2023

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah adalah selisih (*gap*) antara kinerja pembangunan yang telah selama 5 (lima) tahun terakhir dibandingkan dengan yang telah direncanakan maupun yang menjadi target dan terukur secara nasional, serta antara kondisi riil pada saat perencanaan disusun terhadap apa yang ingin dicapai di masa mendatang. Beberapa permasalahan pada aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing dan aspek pelayanan umum yang penting untuk ditangani Pemerintah Kabupaten Bondowoso adalah

1. Makro sosial

Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bondowoso masih lebih rendah dibanding dengan IPM kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Timur, angka rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah, angka harapan hidup dan daya beli masyarakat yang masih rendah.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi terus meningkat, namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Bondowoso diharapkan lebih sejalan dengan perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global. Perkembangan ekonomi regional dan global telah memberikan dampak yang cukup signifikan terutama terhadap daya saing harga dan kualitas komoditas lokal di pasaran. Selain itu kebijakan ekonomi daerah juga diharapkan lebih didasarkan kepada pemanfaatan potensi daerah yang paling mungkin dapat mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas melalui penetapan kawasan penyangga pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak signifikan, luas dan merata bagi semua pemangku kepentingan dan masyarakat.

a. Pertanian

- Peningkatan nilai tambah produk pertanian masih belum optimal dalam meningkatkan pendapatan petani karena



tingkat efisiensi dalam berusaha tani yang masih rendah.

- Potensi industri pengolahan khususnya hasil pertanian sebagai pendorong peningkatan PDRB belum dikembangkan secara optimal.
- Peluang ekspor komoditi unggulan selain kopi sebagai faktor pengungkit untuk tumbuh sebagai penyumbang devisa dan berkembangnya sektor penunjang lainnya belum dikembangkan secara optimal.
- Potensi peternakan yang menjadi budaya sebagian besar masyarakat di Kabupaten Bondowoso bahkan sebagai lumbung ternak di Jawa Timur belum dikembangkan secara optimal.

b. Pariwisata

Potensi wisata di Kabupaten Bondowoso cukup banyak, pengembangan kawasan wisata berpotensi menggerakkan lapangan usaha yang lain tumbuh pesat. Masih banyak tujuan wisata dan budaya yang bisa dikembangkan untuk menggerakkan lapangan usaha lainnya untuk tumbuh seperti penyediaan akomodasi, penyediaan makan dan minum yang dapat terus dioptimalkan. Percepatan pengembangan pariwisata menjadi sebuah industri yang melibatkan seluruh masyarakat perlu dilakukan secara lebih fokus untuk meningkatkan perekonomian daerah.

c. Investasi

Investasi di Kabupaten Bondowoso dalam lima tahun terakhir nilainya naik, tapi diperlukan peningkatan yang lebih tinggi untuk memacu pertumbuhan ekonomi wilayah. Iklim

investasi yang kondusif perlu terus didorong melalui perbaikan pelayanan, disamping perlunya promosi investasi secara lebih intensif terhadap potensi ekonomi di Kabupaten Bondowoso untuk meningkatkan minat investor berinvestasi.

d. Koperasi dan UMKM

Berbagai keterbatasan dan kurangnya kadar keberdayaan sektor perekonomian rakyat untuk berkembang secara mandiri akibat kurang dimilikinya akses yang memadai terhadap sumber-sumber produksi dan permodalan, serta pemasaran. Industri kecil dan menengah, Koperasi dan UMKM yang ada di Kabupaten Bondowoso terbukti mampu eksis di tengah kondisi perekonomian yang labil, sehingga pengembangan ke arah kemandirian usaha ekonomi masyarakat harus terus menerus dibangun.

e. Perdagangan

Ketersediaan sarana prasarana penunjang perdagangan baik konvensional maupun non konvensional dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi masyarakat belum memadai dan masih perlu dikembangkan lebih lanjut.

f. Perindustrian

Pengembangan agroindustri, terutama di perdesaan perlu ditingkatkan, terutama untuk produk-produk yang diolah dalam skala kecil. Sementara kendala pengembangan agroindustri diantaranya adalah minimnya infrastruktur untuk mendukung agroindustri seperti jalan, listrik dan air serta kurangnya akses permodalan/perbankan.



3. Kemiskinan dan pengangguran

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bondowoso selama lima tahun terakhir terus mengalami penurunan, namun demikian jumlahnya masih cukup banyak meskipun dari tahun ke tahun mengalami penurunan.

Kondisi faktual yang dihadapi penduduk miskin adalah masih rendahnya akses penduduk miskin terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, berusaha dan permodalan. Disamping itu juga keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, sanitasi, rumah layak huni serta kecukupan pangan.

Permasalahan pengangguran ditunjukkan dengan angka tingkat pengangguran terbuka, walaupun persentasenya cukup rendah namun jumlah absolutnya masih tinggi sehingga perlu mendapat perhatian. Pertumbuhan angkatan kerja baru harus terus menerus diimbangi dengan peningkatan akses terhadap lapangan pekerjaan, sehingga tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat. Tingkat kesesuaian ketrampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja, serta akses informasi bagi angkatan kerja terhadap lapangan kerja yang tersedia masih perlu mendapat perhatian, agar dapat bersaing maka informasi pasar kerja harus dapat diperoleh dengan mudah.

4. Pendidikan

Permasalahan pendidikan di Kabupaten Bondowoso adalah rendahnya tingkat pendidikan penduduk dimana angka rata – rata lama sekolah jauh lebih rendah dibanding Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bondowoso walaupun lebih tinggi dibanding Nasional tetapi masih lebih rendah dibanding Provinsi Jawa Timur. Angka melek huruf untuk usia 15 tahun ke atas masih perlu terus ditingkatkan. Terkait dengan kualifikasi

pendidikan Guru SD/MI maupun SMP/MTs masih perlu terus ditingkatkan. Persentase SD/SMP yang berakreditasi B masih perlu ditingkatkan. Persentase melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA masih perlu ditingkatkan. Masih terdapat sekolah dalam kondisi fisik tidak baik di tingkat SD dan SMP sehingga memerlukan penanganan. Masih terdapat SD dan SMP yang belum memiliki Perpustakaan, Laboratorium komputer dan UKS yang perlu mendapat perhatian.

5. Kesehatan

Permasalahan kesehatan di Kabupaten Bondowoso adalah masih rendahnya Angka Harapan Hidup, angka Kematian Ibu (AKI) yang masih perlu diturunkan dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang masih tinggi. Angka stunting yang sangat tinggi, hal ini relevan dengan angka gizi buruk yang terjadi. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dan penerapan PHBS masih belum optimal, serta rendahnya akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi.

6. Keluarga berencana

Masih adanya pernikahan dini yang berakibat kepada resiko tinggi pada kehamilan dan persalinan serta gangguan kesehatan reproduksi yang menyebabkan munculnya permasalahan sosial lainnya seperti meningkatnya perceraian, kemiskinan dan pengangguran.

7. Pembinaan keagamaan

Potensi pengembangan lembaga keagamaan dan pemberdayaan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang mendukung pendidikan karakter perlu dimanfaatkan secara optimal dan dilakukan secara berkesinambungan, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, keberdayaan masyarakat, serta pembinaan akhlak dan budi pekerti.



8. Kesejahteraan sosial

Pemberdayaan dan penanganan terhadap populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) prioritas seperti anak jalanan, tuna susila, pengemis, gelandangan dan gelandangan psikotik, maupun PMKS lainnya, seperti anak dengan kedisabilitas, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar masih sangat terbatas dan belum menjangkau seluruh kasus. Minimnya tenaga teknis sosial, tenaga dokter jiwa serta aksesibilitas ke lokasi sasaran PMKS yang belum memadai, data populasi yang belum diverifikasi dan dilakukan validasi secara periodik, merupakan tantangan dan hambatan dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

9. Infrastruktur dan penataan ruang

Infrastruktur daerah belum tersedia secara memadai, seperti jalan dan jembatan, jaringan irigasi, air bersih, sanitasi dan drainase, sarana transportasi, serta akses terhadap jaringan komunikasi. Perlu upaya untuk terus meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur khususnya dalam rangka menurunkan disparitas desa-kota, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi secara lebih merata baik antar tingkat pendapatan maupun antar wilayah.

10. Pemberdayaan masyarakat

Proses pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan masih perlu dioptimalkan. Keberdayaan kelembagaan masyarakat desa dan peran sertanya dalam setiap proses pembangunan perlu ditingkatkan lebih lanjut sehingga terbentuk kemandirian desa. Sebagaimana diketahui pemberdayaan masyarakat merupakan nilai strategis dalam proses pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya serta dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah.

11. Perumahan dan kawasan permukiman

Adanya rumah tidak layak huni, ketidakteraturan bangunan gedung, dan keterbatasan prasarana, sarana, utilitas umum dapat berdampak pada kualitas perumahan dan kawasan permukiman. Terdapat beberapa kawasan permukiman kumuh yang memerlukan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman.

12. Lingkungan hidup

Kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem menjadi isu yang perlu terus diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya alam dan dalam proses pembangunan secara keseluruhan. Perubahan fungsi lahan, pencemaran lingkungan, pengelolaan persampahan, dampak perubahan iklim (*global warming*) menjadi fokus permasalahan yang harus diselesaikan. Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi bagian permasalahan lingkungan hidup yang perlu dicarikan solusinya.

13. Pelayanan Publik dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bondowoso menjadi tuntutan dan ekspektasi masyarakat dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik yang efektif, efisien dan berbasis teknologi informasi harus segera diwujudkan dan diselesaikan termasuk pemenuhan pelayanan dan ketersediaan sarana prasarana penyelenggaraan layanan inklusi pada semua fasilitas pelayanan publik agar menjadi faktor pendorong dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam keberhasilan pembangunan secara keseluruhan.

14. Kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak



Fasilitasi penanganan advokasi perlindungan ibu dan anak dan kesetaraan gender masih perlu ditingkatkan. Disisi lain peran perempuan dalam pembangunan dalam kategori masih perlu ditingkatkan. Dipandang perlu adanya upaya lanjutan untuk memperkuat peran perempuan dalam proses pembangunan serta dalam fasilitasi perlindungan yang proporsional kepada ibu dan anak dalam keluarga dan lingkungan masyarakat.

15. Peningkatan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat

Stabilitas ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat merupakan faktor fundamental yang sangat dibutuhkan sebagai syarat agar pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana secara optimal dan hasilnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Oleh karenanya diperlukan upaya secara konsisten dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat khususnya menjaga kerukunan antar suku, agama, ras, dan antar golongan, penegakan peraturan daerah serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.

4.2 Isu Strategis

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Provinsi Jawa Timur, proses pembangunan selama lima tahun ke depan dipengaruhi oleh dinamika lingkungan eksternal, baik di tingkat nasional maupun internasional, dan dinamika internal di Kabupaten Bondowoso. Oleh karena itu, untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, sinergis, dan berkelanjutan, serta memperhatikan dinamika yang berkembang maka kondisi lingkungan strategis perlu mendapat perhatian sebagai pertimbangan untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan ke depan. Kondisi

lingkungan strategis yang berpengaruh adalah :

1. Lingkungan Eksternal Internasional

Perbaikan ekonomi global sudah nampak mulai tahun 2016, ditandai dengan perekonomian AS yang menunjukkan perbaikan sebagaimana tercermin dari PDB yang membaik, tingkat pengangguran yang stabil dan inflasi yang cenderung meningkat. Di pasar komoditas, harga minyak dunia masih pada level yang rendah, sejalan dengan masih tingginya produksi minyak OPEC. Namun pertumbuhan ekonomi dunia di 2016 hanya sekitar 3,1%.

Perekonomian AS sebagai barometer ekonomi dunia menunjukkan perkembangan yang semakin baik, utamanya didorong peningkatan pertumbuhan ekspor dan investasi yang lebih besar dari penurunan pertumbuhan konsumsi. Ekspor AS semakin meningkat, dan dari sisi tenaga kerja, membaiknya perekonomian AS tercermin dari tingkat pengangguran yang stabil. Membaiknya perekonomian AS juga tercermin dari inflasi yang cenderung menurun. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi di negara maju lainnya, seperti Uni Eropa, cenderung masih terbatas dan dibayangi oleh risiko politik.

Di sisi lain, China yang selama ini menjadi motor perekonomian dunia dari Asia, hingga saat ini perekonomiannya masih melakukan konsolidasi sumber-sumber perekonomiannya. Hingga pertengahan Tahun 2016, pertumbuhan ekonomi China berada dalam titik stabil dan masih berada dalam target pemerintah yaitu pada kisaran 6,5 hingga 7%. Meski perekonomiannya semakin membaik, namun masih menghadapi ketidakpastian yang tinggi dan belum mampu kembali kepada kondisi sebelumnya yang mampu tumbuh di atas 7%. Sementara Negara



Asia lainnya yaitu India, berada dalam kondisi ekonomi yang berangsur membaik, terutama dipengaruhi oleh perkembangan yang pesat dalam perdagangan serta kebijakan yang diterapkan dengan efisien.

Ketidakpastian ekonomi global meningkat akibat tensi perdagangan AS-Tiongkok dan pengetatan likuiditas, yang akhirnya berpengaruh terhadap permintaan global. Harga komoditas dunia mengalami penurunan yang mempengaruhi nilai ekspor.

Pergerakan nilai Rupiah sepanjang 2018 dipengaruhi oleh normalisasi kebijakan moneter AS dan perang dagang AS-Tiongkok. Per 31 Desember Rupiah Rp.14.481/USD sehingga rata-rata hingga akhir tahun sebesar Rp.14.247/USD.

Dengan perkembangan ekonomi global yang baru mulai membaik (rebound) dan besarnya tantangan ekonomi global ke depan, pihak otoritas di berbagai negara pada umumnya tetap mempertahankan kebijakan yang cenderung akomodatif, kecuali kebijakan moneter AS yang mulai memasuki siklus pengetatan. Selain AS, Tiongkok juga mulai menunjukkan sinyal pengetatan melalui beberapa instrumen kebijakan moneternya. Berbagai perkembangan tersebut pada akhirnya menjadikan ekonomi global berpotensi untuk tumbuh lebih tinggi ke depan, apabila berbagai risiko dan tantangan yang ada dapat dikelola dengan baik.

IMF memperkirakan ekonomi global akan tumbuh meningkat mencapai 3,4% di 2017 dan 3,6% di 2018. Namun demikian, IMF juga melihat adanya risiko yang dapat menahan pertumbuhan ekonomi global, seperti (i) risiko politik dan kebijakan yang semakin proteksionis, (ii) restrukturisasi neraca keuangan di negara maju yang masih berjalan lambat, (iii) pertumbuhan Tiongkok yang melambat lebih tajam, (iv) risiko capital

reversal di negara berkembang, dan (v) risiko geopolitik (pengungsi, keamanan, terorisme).

Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap prospek pengembangan usaha dan pemasaran produk-produk hasil usaha masyarakat yang diperdagangkan di dalam negeri maupun ekspor.

Disamping itu, kesepakatan antar negara khususnya yang telah ditandatangani (disepakati) oleh Pemerintah Indonesia perlu didukung oleh seluruh masyarakat (Pemerintah Daerah). Komitmen internasional tersebut diantaranya adalah *Sustainable Development Goals* (SDG's) sebagai kelanjutan dari komitmen *Millenium Development Goals* (MDG's) tentang paradigma pembangunan global Sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World : The 2030 Agenda for Sustainable Development*, Protokol Kyoto tentang pengurangan emisi gas rumah kaca, *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW) tentang pembangunan dan pemberdayaan perempuan serta *Asean Economic Community* (AEC) tentang masyarakat ekonomi negara-negara Asean.

2. Lingkungan Eksternal Nasional dan Regional

Pada level nasional, perkembangan global yang belum sepenuhnya kondusif dan diwarnai ketidakpastian yang tinggi mempengaruhi kinerja perekonomian domestik yang tumbuh terbatas. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,02% (yoy) meski lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Dan pada keseluruhan tahun dapat tumbuh sekitar 5,1% meski lebih rendah dibandingkan perkiraan sekitar 5,3% sebelumnya akibat dampak ekonomi global yang tumbuh lebih rendah dibandingkan prakiraan sebelumnya. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi



Nasional masih relatif baik dibandingkan negara-negara lain. Kondisi ini terutama faktor permintaan domestik masih menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Nasional.

Secara spasial, perekonomian wilayah Jawa yang berbasis lapangan usaha industri pengolahan, perdagangan dan pertanian masih menjadi penopang utama dengan tumbuh di atas 5%. Sementara itu, di kawasan Sumatera, Kalimantan dan Papua masih terdapat provinsi yang tumbuh di bawah 4% sehingga perlu terus mendapat perhatian. Di sisi harga, inflasi terjaga dalam level yang rendah dan stabil yakni mencapai 3,02% pada 2016 lebih rendah dari Tahun 2015 sebesar 3,4%. Inflasi yang rendah ini tidak terlepas dari konsistensi kebijakan moneter dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mengendalikan harga kelompok makanan dan komoditas strategis.

Perekonomian nasional yang fleksibel dalam merespons perlambatan ekonomi global ditopang terutama oleh dua faktor. Faktor pertama, konsistensi dalam menjaga stabilitas ekonomi sebagaimana tercermin pada inflasi yang rendah dan stabil, nilai tukar rupiah yang terkendali, defisit transaksi berjalan dan defisit APBN yang berada dalam level yang sehat, serta stabilitas sistem keuangan. Stabilitas ekonomi yang terjaga dan risiko ekonomi yang terkendali pada gilirannya memberikan basis keleluasaan gerak yang positif bagi pelaku ekonomi untuk merespons kondisi yang ada.

Faktor kedua adalah pengaruh kebijakan countercyclical yang ditempuh Pemerintah dan Bank Indonesia. Stimulus fiskal yang besar, termasuk melalui belanja infrastruktur, mendukung sektor yang berhubungan langsung dengan pemerintah, seperti investasi bangunan. Langkah deregulasi dan debirokratisasi Pemerintah melalui berbagai paket

kebijakan, sebagai bagian dari upaya reformasi struktural, juga berkontribusi positif meningkatkan keyakinan untuk berusaha di Indonesia.

Prospek ekonomi global yang masih belum akan pulih segera dan ketidakpastian di harga komoditas dan pasar keuangan akan menjadi tantangan bagi perekonomian Nasional. Di sisi lain, tantangan jangka pendek dan struktural domestik yang belum terselesaikan berpotensi menghambat proses pemulihan ekonomi. Tantangan jangka pendek berasal dari pengaruh stimulus fiskal yang belum secara merata dapat menarik peran swasta untuk berinvestasi, khususnya investasi non-bangunan yang tercatat masih cukup rendah.

Sementara itu, tantangan struktural domestik terkait dengan sektor riil dan sektor keuangan. Dari sektor riil, tercatat tantangan terkait komposisi produk ekspor yang banyak bergantung pada produk sumber daya alam, struktur pasar dan tata niaga yang belum efisien, serta peran industri pengolahan yang terus menurun. Turunnya peran industri pengolahan menjadi persoalan sendiri di kawasan Jawa mengingat perannya yang cukup signifikan dalam perekonomian. Sementara itu di sektor keuangan, tantangan masih terkait dengan pembenahan struktur pembiayaan domestik yang masih belum beragam, struktur dana perbankan yang belum seimbang, serta pasar keuangan.

Perbaikan kinerja ekonomi nasional dalam tahun 2017 didukung oleh membaiknya konsumsi rumah tangga sejalan dengan inflasi yang relatif stabil terutama harga barang kebutuhan pokok. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga diperkirakan tetap memiliki kinerja cukup baik yang didorong oleh keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan penguatan konektivitas



nasional. Selain itu, kebijakan amnesti pajak diharapkan juga mampu mendorong investasi di sektor riil melalui penguatan likuiditas dari hasil repatriasi dana yang ada di luar negeri. Seiring membaiknya perekonomian global, kinerja perdagangan internasional juga diharapkan mengalami perbaikan.

Dari sisi sektoral, pertumbuhan sektor industri pengolahan sebagai penyumbang terbesar dalam perekonomian juga diperkirakan menunjukkan penguatan yang salah satunya dipengaruhi oleh perbaikan ekonomi dan arah kebijakan ekspor terhadap produk bernilai tambah tinggi. Komitmen Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur diperkirakan juga tetap mendorong kinerja pertumbuhan sektor konstruksi, transportasi, dan pergudangan. Selain itu, sektor keuangan juga diperkirakan meningkat sejalan dengan peningkatan arus dana dari kebijakan amnesti pajak.

PDB 2018 diperkirakan tumbuh sehat sebesar 5,15%, didukung oleh stabilitas pertumbuhan konsumsi rumah tangga, konsumsi Pemerintah, dan peningkatan investasi. Inflasi sepanjang tahun 2018 terjaga pada 3,13% (*year-on-year*), didukung oleh tidak adanya kebijakan harga energi domestik dan masih terkendalinya harga pangan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 diperkirakan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Perkiraan ini mempertimbangkan potensi dan berbagai risiko ekonomi baik yang berasal dari eksternal maupun domestik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 mengalami peningkatan terutama didorong oleh investasi dan konsumsi pemerintah, serta konsumsi rumah tangga yang stabil. Konsumsi RT tumbuh 5,01% ditopang oleh pertumbuhan konsumsi makanan dan minuman yang mampu tumbuh 5,21% sejalan dengan tingkat

harga yang stabil terutama harga kebutuhan pokok. Konsumsi LNPRT menjadi komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi 8,54% sehubungan dengan aktivitas persiapan pemilu legislatif dan presiden serta tingginya aktivitas sosial. Konsumsi Pemerintah juga tumbuh tinggi sejalan dengan tingginya realisasi belanja Pemerintah Pusat serta transfer ke daerah. PMTB kembali tumbuh kuat didorong oleh pertumbuhan komponen mesin perlengkapan. Komponen bangunan sebagai penopang investasi juga masih tumbuh 5,66% salah satunya didorong oleh pembangunan infrastruktur.

Dari sisi perdagangan internasional, defisit neraca perdagangan masih cukup dalam. Pertumbuhan ekspor pada triwulan III 2018 masih di bawah pertumbuhan impor. Ekspor tumbuh terbatas karena masih lemahnya permintaan dari negara mitra dagang meskipun pertumbuhan negara-negara tersebut masih positif. Impor kembali tumbuh tinggi, baik barang konsumsi, barang modal maupun bahan baku. Impor jasa juga mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan jasa angkutan untuk ekspor dan impor serta wisatawan Indonesia yang ke luar negeri.

Peningkatan aktivitas ekonomi domestik mendorong pertumbuhan ekspor impor tetap positif di tahun 2018. Faktor pendorong pertumbuhan impor adalah :

- Ekspor mencatat tren pertumbuhan yang meningkat, namun masih terbatas, terutama disebabkan oleh perlambatan pada ekspor sektor manufaktur berbasis komoditas seiring rendahnya harga CPO dan karet.
- Ekspor sektor pertambangan membaik terutama ditopang oleh naiknya harga batubara dan



komoditas pertambangan hingga triwulan III tahun 2018.

- Depresiasi nilai tukar nominal Rupiah belum mampu mendorong ekspor, karena secara riil nilai tukar masih menguat (pelemahan nilai tukar mata uang negara mitra masih lebih dalam terhadap USD. Disamping itu, masih relatif tingginya *import content* dalam rantai produksi (dan ekspor), juga menjadi penyebab terbatasnya pertumbuhan ekspor (sektor manufaktur).

Penurunan harga komoditas mempengaruhi ekspor tahun 2018:

- Impor barang-barang modal dan bahan baku terkait kegiatan infrastruktur, seperti buldozer, traktor, crane, besi dan baja, serta alat angkutan sektor pertambangan.
- Impor produk pangan dalam rangka stabilisasi harga dan persiapan menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri yang lebih awal, serta dalam rangka menjaga pasokan.
- Impor migas meningkat seiring peningkatan harga minyak, meskipun dalam tiga bulan terakhir menurun sejalan dengan implementasi B20 dan harga minyak yang turun.

Laju inflasi di tingkat yang rendah menjaga daya beli masyarakat dan pertumbuhan konsumsi. Inflasi tahun 2018 terjaga pada level 3,13%. Tidak adanya kebijakan harga energi domestik dan masih terkendalinya harga pangan berperan penting dalam pencapaian inflasi tahun 2018.

Secara umum perekonomian nasional tahun 2018 tetap tumbuh positif di tengah kondisi ketidakpastian global. Perekonomian diperkirakan tumbuh sekitar 5,15%, lebih tinggi dari pencapaian tahun 2017. Inflasi terkendali pada tingkat yang rendah, Nilai tukar rupiah dapat dijaga pada level rata-rata

Rp.14.247/USD, Realisasi APBN tahun 2018 menunjukkan kinerja yang sangat sehat dan Kredibel, Defisit sebesar 1,76% PDB lebih kecil dari target APBN 2,19% PDB, Keseimbangan Primer menuju nol (negatif Rp.1,8 triliun) jauh lebih baik dari rencana APBN sebesar negatif Rp.87,3 triliun. Pendapatan Negara sebesar Rp.1.942,3 triliun melampaui target APBN (102,5% dari APBN 2018). Belanja Negara dapat optimal mencapai 99,2% dari APBN 2018 mendukung target target pembangunan tahun 2018. Pembiayaan anggaran tahun 2018 dapat lebih rendah Rp.25,5 triliun dari target APBN sehingga tumbuh negatif dari realisasi tahun 2017. Hasil pembangunan menunjukkan terus perbaikan, Tingkat kemiskinan turun ke 9,82%, Tingkat pengangguran turun ke 5,34% serta Gini ratio lebih rendah ke tingkat 0,389.

Dengan perkembangan ekonomi yang terjaga sehat, serta kesejahteraan masyarakat secara umum yang terus membaik, sehingga target Gini ratio tahun 2019 adalah 0,38 – 0,39 dengan tantangan disparitas akses permodalan serta kondisi geografis. Target kemiskinan tahun 2019 adalah 8,5% - 9,5% tantangannya adalah akses pangan, kesehatan, dan pendidikan bagi orang miskin, serta perubahan iklim yang mempengaruhi harga pangan. Target pengangguran tahun 2019 4,8% - 5,2%, pencapaian IPM sebesar 71,98 dengan tantangan yang dihadapi yaitu perubahan ekonomi yang mempengaruhi struktur lapangan kerja, *skill mismatch* serta *4th Industrial Revolution (automasi, artificial intelligence)*. (Sumber: Siaran Pers Kementerian Keuangan RI, 2 Januari 2019).

Dinamika perekonomian nasional, target penerimaan pajak, dinamika sosial politik dan kebijakan pemerintah tentang kurs rupiah, harga BBM, tarif dasar listrik,



investasi, pengurangan subsidi dalam APBN, neraca perdagangan, ancaman membanjirnya tenaga asing sebagai dampak berlakunya *Asean Economic Community* (AEC), dan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang dikembangkan Provinsi Jawa Timur, akan mempengaruhi dinamika dan perkembangan masyarakat Kabupaten Bondowoso.

Kondisi perekonomian nasional akan berdampak pada pajak dan pendapatan dalam APBN yang akan berpengaruh terhadap dana perimbangan yang dialokasikan ke provinsi dan kabupaten/kota. Demikian juga kondisi perekonomian regional Jawa Timur akan berpengaruh terhadap bagi hasil pajak dari provinsi dan bantuan keuangan yang diberikan kepada kabupaten/kota.

Kondisi umum kinerja perekonomian Jawa Timur dari sisi permintaan, peningkatan didorong oleh kinerja konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan net ekspor antar daerah. Sementara dari sisi penawaran, kinerja industri pengolahan dan perdagangan yang tumbuh lebih tinggi menjadi penopang ekonomi. Namun demikian akselerasi ekonomi Jawa Timur yang lebih tinggi tertahan oleh peningkatan impor luar negeri dan perlambatan kinerja pertanian.

3. Sustainable Development Goals (SDG's)

Komitmen *Sustainable Development Goals* (SDG's)/tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 mengamanatkan perlunya penyesuaian terhadap kebijakan strategis serta tahapan-tahapan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2017 hingga tahun 2030 yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional, sasaran pembangunan tingkat provinsi

serta sasaran pembangunan daerah. Hal ini juga diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah bahwa untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan, pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan memperhatikan prinsip dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

4. Telaah RPJPD Kabupaten Bondowoso tahun 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2005–2025 ditetapkan dengan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–2025, disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional tahun 2005-2025 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007) serta memperhatikan RPJP Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2025 (Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025)

RPJPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2005–2025 disusun berdasarkan potensi, permasalahan, kebutuhan, serta aspirasi masyarakat, merupakan dokumen perencanaan daerah yang bersifat makro, memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah selama kurun waktu 20 tahun. Selain menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, juga menjadi pedoman bagi setiap calon Bupati dan Wakil Bupati dalam menyusun visi, misi, serta program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan



Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sehingga diharapkan dengan adanya RPJP Daerah dapat menjaga kesinambungan pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan selama lima tahunan.

RPJPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 – 2025 memiliki visi “**Mewujudkan Kabupaten Bondowoso Sebagai Kawasan Agribisnis Yang Maju, Religius, Adil Dan Makmur**”. Visi untuk mencapai tujuan yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur; serta tujuan pembangunan Provinsi Jawa Timur yang menitikberatkan pada agribisnis. Di dalam implementasinya, untuk mewujudkan Kabupaten Bondowoso yang maju, adil dan makmur harus diwarnai dengan nuansa religius melalui sektor pertanian sebagai andalannya.

Untuk RPJMD Kabupaten Bondowoso periode Tahun 2018-2023 secara substantif mengacu pada 2 tahapan RPJMD dalam RPJPD, yaitu tahap ketiga dan keempat, tetapi sebagian besar pada tahapan keempat. Adapun agenda-agenda prioritas pada tahapan keempat adalah :

- 1) Arah kebijakan misi Mewujudkan Tata Kelola Lingkungan Hidup Secara Seimbang dan Berkelanjutan.
- 2) Arah kebijakan misi Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi berbasis agribisnis yang berdaya saing dan mandiri secara berkelanjutan.
- 3) Arah kebijakan misi Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi secara lebih merata dan berkeadilan.
- 4) Arah kebijakan misi Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan berakhlak mulia.
- 5) Arah kebijakan misi Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup.

- 6) Arah kebijakan misi Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang handal, mandiri, inovatif, berdaya saing dan berwawasan lingkungan.
- 7) Arah kebijakan misi Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang berbudaya kerja transparan, partisipatif, bersih, akuntabel, profesional, dan unggul.

5. Telaah RTRW Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031

Sebagaimana tertuang dalam Perda No. 12 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 – 2031, bahwa Visi penataan ruang Kabupaten Bondowoso adalah “**Terwujudnya Wilayah Kabupaten Bondowoso Sebagai Kawasan Agropolitan, Wisata Agro dan Pegunungan Yang Maju, Berdaya Saing dan Lestari**” dengan misi :

- 1) Memperkuat peran sektor pertanian dengan menerapkan konsep agropolitan dalam pengembangan wilayah.
- 2) Mendorong peran sektor pariwisata yang berbasis potensi alam sebagai pendorong ekonomi daerah.
- 3) Membangun struktur ruang wilayah yang mendukung pelayanan sosial ekonomi masyarakat secara efektif dan efisien.
- 4) Menciptakan pola ruang wilayah yang responsif terhadap kebutuhan investasi dengan tetap memperhatikan daya dukung lahan dan konservasi sumber daya alam.
- 5) Mengembangkan kawasan-kawasan strategis sebagai penggerak perekonomian wilayah.

Penataan ruang dilaksanakan secara berkelanjutan dan sinergis antara aspek perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan



ruang Arahan penataan ruang merupakan matra ruang kebijakan pembangunan sektoral yang disusun sinergis dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), memuat :

- 1) Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten (pusat kegiatan dan sistem prasarana). Perwujudan pusat kegiatan meliputi pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) serta Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), pemantapan Pusat Pengembangan Kawasan (PPK), pemantapan Pusat Pengembangan Lingkungan (PPL), dan pengembangan pusat kawasan agropolitan. Perwujudan sistem prasarana meliputi transportasi jalan raya, transportasi kereta api, prasarana telekomunikasi, pengairan/irigasi, prasarana energi, air bersih, drainase, sampah, dan sanitasi.
- 2) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten (perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budidaya). Perwujudan kawasan lindung mencakup kegiatan: Penegasan dan penetapan kawasan hutan lindung penyangga, lindung setempat, pelestarian alam, cagar budaya dan bersejarah; Pemantauan dan pengendalian kawasan lindung cagar budaya, dan Pemantauan dan pengendalian pengelolaan kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu. Perwujudan kawasan budidaya mencakup hutan produksi dan hutan rakyat, perkebunan, pertanian, perikanan darat, pariwisata, industri, pertambangan, permukiman, peternakan, kawasan perdagangan dan jasa, dan kawasan khusus.

- 3) Perwujudan kawasan strategis kabupaten meliputi kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis sosio-budaya, kawasan strategis lingkungan hidup, kawasan strategis teknologi tinggi, dan kawasan strategis pertahanan dan keamanan.

Arahan penataan ruang tersebut merupakan prioritas dalam setiap tahapan pelaksanaan RTRW.

6. Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sekitar

Dalam rangka keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sekitar dalam pengelolaan pada Kawasan Perbatasan antar kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten Bondowoso 2011-2031, terbagi dalam 4 segmen batas daerah, yaitu Bondowoso - Jember, Bondowoso - Banyuwangi, Bondowoso - Situbondo, dan Bondowoso - Probolinggo. Arahan pada setiap segmen adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan perbatasan antara Kabupaten Bondowoso dengan Kabupaten Jember, meliputi Kecamatan Maesan, Tamanan, Jambesari Darus Sholah, Pujer dan Tlogosari :
 - Merupakan kawasan industri pengolahan hasil pertanian yaitu kawasan agroindustri durian,
 - Mempunyai akses yang sudah menyambung (Maesan - Jelbuk)
- b. Kawasan perbatasan antara Kabupaten Bondowoso dengan Kabupaten Banyuwangi adalah Kecamatan Ijen:
 - Merupakan kawasan yang direncanakan untuk pengembangan pariwisata dengan konsep ekotourism;



- Sebagai kawasan pengembangan agro yaitu strawberi dan kopi (Kabupaten Bondowoso), dan pengembangan sayur dan buah (Kabupaten Banyuwangi);
 - Merupakan kawasan pengembangan energi geotermal dengan mengambil sumber air panas dari kawah ijen dan pengolahannya di Kabupaten Bondowoso dengan memanfaatkan kawasan budidaya.
- c. Kawasan perbatasan antara Kabupaten Bondowoso dengan Kabupaten Situbondo, meliputi Kecamatan Pakem, Wringin, Tegalampel, Taman Krocok, Klabang, Prajekan dan Cermee:
- Pengadaan jalan tembus menuju Rajekwesi (Situbondo).
 - Pengelolaan bersama untuk pengendalian secara ketat penggunaan lahan Sumber Daya Alam di Kawasan sekitar Wringin.
 - Kawasan perbatasan antara Kabupaten Bondowoso dengan Kabupaten Probolinggo, di Kecamatan Pakem dan Binakal, merupakan kawasan lindung yaitu Taman Margasatwa Pegunungan Hyang, sehingga diarahkan untuk dijaga kelestariannya.

Arahan yang diberikan untuk daerah perbatasan adalah sebagai berikut:

- Pengelolaan dilakukan secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar pihak terkait secara kontinyu;
- Menyusun rencana tata ruang kawasan perbatasan secara bersama dan terpadu untuk memperoleh arahan yang jelas dalam pemanfaatan dan pengelolaannya; dan

- Dibutuhkan penyediaan mediator/fasilitator dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dan/atau pemerintah pusat untuk penanganan permasalahan kawasan perbatasan.

7. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi warga negara yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, diwajibkan penerapannya dengan target pencapaian 100% dengan jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

1) SPM Pendidikan

- a. Pendidikan anak usia dini
- b. Pendidikan dasar
- c. Pendidikan kesetaraan

2) SPM Kesehatan

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu hamil
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin
- c. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir
- d. Pelayanan Kesehatan balita
- e. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar
- f. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut
- h. Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi
- i. Pelayanan Kesehatan penderita diabetes mellitus
- j. Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberculosis



- k. Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif
- 3) SPM Pekerjaan Umum
 - a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
 - b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
 - 4) SPM Perumahan Rakyat
 - a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
 - b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah
 - 5) SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
 - a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
 - b. Pelayanan informasi rawan bencana
 - c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
 - d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
 - e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
 - 6) SPM Sosial
 - a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
 - b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
 - c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
 - d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
 - e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana

Berdasarkan kondisi lingkungan strategis, telaah pentahapan RPJPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025 dan telaah RTRW Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031 maka beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan isu strategis di Kabupaten Bondowoso yaitu: (i) merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bondowoso; (ii) besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap publik; (iii) tingkat kemungkinan/kemudahan penanganan; (iv) memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan; (v) memiliki daya ungkit terhadap percepatan pencapaian untuk pembangunan daerah; berdasarkan pertimbangan tersebut, maka isu strategis dalam jangka menengah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 adalah :

- 1) Perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan.
- 2) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
- 3) Peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- 4) Pengembangan industri pengolahan dan perdagangan.
- 5) Pengembangan potensi pariwisata.
- 6) Penyediaan sarana dan prasarana wilayah serta infrastruktur penunjang perekonomian.
- 7) Pengembangan Koperasi dan usaha mikro.



- 8) Peningkatan peluang investasi.
- 9) Peningkatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
- 10) Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup.
- 11) Peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL

RPJMD
KABUPATEN
BONDOWOSO
TAHUN
2018-2023



RANWAL





BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi

Visi pembangunan Kabupaten Bondowoso tahun 2018-2023 adalah :

**"TERWUJUDNYA BONDOWOSO
MANDIRI EKONOMI, LESTARI,
SEJAHTERA, ADIL DAN TERDEPAN
DALAM BINGKAI IMAN DAN TAKWA"**

Visi Pembangunan Kabupaten Bondowoso terdiri dari 5 (lima) kata kunci yaitu: *Mandiri Ekonomi, Lestari, Sejahtera, Adil Dan Terdepan, Dalam Bingkai Iman Dan Takwa* yang memiliki makna strategis dan mencerminkan cita-cita, harapan yang ingin diwujudkan masyarakat Bondowoso. Visi pembangunan tahun 2018-2023 mengandung pemahaman terjalannya sinergi yang harmonis antara 3 (tiga) pilar kekuatan pembangunan daerah yaitu pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam setiap proses manajemen pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bondowoso dalam mewujudkan cita-cita dan harapan masyarakat.

Secara filosofi, visi pembangunan tahun 2018-2023 dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung pada kata kunci dan pilar misi sebagai berikut:

1. Mandiri Ekonomi

Pilar Pembangunan Keemandirian Ekonomi

Adalah terwujudnya kondisi masyarakat Bondowoso yang memiliki kemampuan atau keberdayaan untuk membangun, dan memelihara kelangsungan hidup dengan mengandalkan kemampuan sendiri secara produktif. Membangun kemandirian ekonomi berarti mengembangkan kemampuan untuk proaktif melepas belenggu

ketergantungan dan hambatan struktural dalam mengembangkan seluruh potensi sumberdaya ekonomi yang dimiliki, dengan cara-cara kreatif dan inovatif, untuk meningkatkan nilai tambah yang dapat dinikmati seluruh elemen masyarakat untuk kesejahteraan bersama dalam kerangka pembangunan ekonomi daerah.

2. Lestari

Pilar Pembangunan Lingkungan

Mengandung arti bahwa masyarakat Bondowoso memiliki kemampuan dalam pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keragamannya sehingga kondisinya tetap dapat dipertahankan seperti keadaan semula. Sebab telah disadari dalam pengelolaan sumber daya alam, tidak hanya harus mengurangi kerusakan (dampak negatif sekecil mungkin) dan mempertahankan keberadaan sumber daya alam tidak terbarukan, tetapi juga memperbaiki sumber daya alam terbarukan, serta mencapai kembali keadaan sesuai kapasitasnya yang semula, sehingga dapat dinikmati oleh generasi berikutnya.

3. Sejahtera

Pilar Pembangunan Kesejahteraan

Adalah kondisi masyarakat Bondowoso yang terpenuhi segala kebutuhan hidupnya, semua hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat di semua wilayah Kabupaten Bondowoso, serta tercipta adanya

kesetaraan kondisi yang dibutuhkan bagi setiap warga untuk dapat mengembangkan dirinya secara proporsional sehingga makmur serta sejahtera lahir dan batin.

4. Adil dan Terdepan

Pilar Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan

Mengandung arti adil yang bersifat distributif, yaitu mendapatkan pelayanan yang sama tanpa pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik perseorangan, kelompok, maupun kewilayahan, tanpa korupsi, tanpa pungli maupun jual beli jabatan. Sehingga akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, menciptakan situasi aman, dan tenteram, menghapuskan potensi konflik sosial, taat regulasi dan supremasi hukum, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Dengan kondisi tersebut diharapkan 3 (tiga) pilar kekuatan pembangunan, pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan mampu berperan pada posisi terdepan, dalam setiap upaya meraih keunggulan-keunggulan sehingga mampu bersaing dalam segala bidang untuk tercapainya Bondowoso sebagai kawasan agribisnis yang maju, religius, adil dan makmur.

5. Iman dan Takwa

Pilar Pembangunan Manusia

Adalah kondisi masyarakat Bondowoso dengan tingkat pendidikan yang tinggi serta derajat kesehatan yang baik, dari semua tingkatan usia, hidup berlandaskan ajaran agama sesuai dengan keyakinan masing-masing individu, yang mengarah pada peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, bermuara pada terciptanya keharmonisan sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari serta diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagaimana dijelaskan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi pembangunan Kabupaten Bondowoso tahun 2018-2023 dibangun atas dasar kondisi dan potensi Kabupaten Bondowoso saat ini, dengan mempertimbangkan tantangan yang akan dihadapi hingga tahun 2023.

Disamping itu juga memperhatikan visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi, serta visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bondowoso tahun 2005-2025, yaitu mewujudkan Kabupaten Bondowoso yang maju, adil dan makmur diwarnai dengan nuansa religius melalui sektor pertanian sebagai andalan.

5.2 Misi

Misi yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Bondowoso Mandiri Ekonomi, Lestari, Sejahtera, Adil Dan Terdepan, dalam Bingkai Iman Dan Takwa” sebagai berikut:

1. Membangun kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor unggulan serta menggerakkan ekonomi kerakyatan.
2. Melestarikan lingkungan sebagai keunggulan kompetitif.
3. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
4. Mewujudkan pemerintahan yang jujur, adil, amanah, partisipatif dan inovatif
5. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul



5.2.1 Misi 1 : Membangun kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor unggulan serta menggerakkan ekonomi kerakyatan

Potensi sumberdaya alam yang dimiliki Kabupaten Bondowoso jika dikelola secara optimal akan memiliki nilai ekonomi yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pemanfaatan potensi sumberdaya ekonomi terutama sektor-sektor unggulan, diperlukan cara-cara kreatif dan inovatif untuk dapat menciptakan nilai tambah yang dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat. Penciptaan nilai tambah terhadap sumberdaya ekonomi ini harus dilakukan secara bersama-sama dan saling mendukung oleh 3 pilar kekuatan utama pembangunan ekonomi yaitu masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dengan mengatasi berbagai hambatan dan tantangan, sehingga mendorong kemampuan atau keberdayaan untuk memelihara kelangsungan hidup secara berkelanjutan, sehingga masyarakat dan dunia usaha memiliki kemandirian secara ekonomi. Hal-hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut diantaranya adalah revitalisasi sektor pertanian, perkebunan dan peternakan dalam payung kebijakan integratif BOTANI (Bondowoso Bertani), mengembangkan branding pertanian BONIC (*Bondowoso Organic*), menerapkan pertanian secara terintegrasi (*integrated farming system*), melindungi petani dari spekulasi harga komoditas, menguatkan citra Bondowoso sebagai “Kota Tape” dan daerah penghasil kopi rakyat kelas internasional, optimalisasi sektor pariwisata, revitalisasi dan branding destinasi wisata alam melalui pengelolaan promosi wisata dengan pemanfaatan teknologi informasi, memasukkan Bondowoso dalam peta wisata di Jawa Timur dan Nasional, optimalisasi peran UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), penataan pasar tradisional dan jaringan ritel pasar modern agar tidak saling mematikan namun saling melengkapi, pengembangan desa wisata secara terintegrasi dengan komoditi unggulan

pertanian dan perkebunan, menciptakan iklim yang kondusif untuk percepatan investasi melalui penyederhanaan dan percepatan izin usaha berbasis teknologi informasi serta penyusunan prospektus bisnis.

Dalam pemanfaatan potensi sumberdaya ekonomi perlu didukung dengan ketersediaan infrastruktur penunjang ekonomi diantaranya jalan, jaringan irigasi, ketersediaan air minum secara merata di semua wilayah agar seluruh potensi sumberdaya ekonomi khususnya sektor unggulan dapat dimanfaatkan secara optimal.

5.2.2 Misi 2 : Melestarikan lingkungan sebagai keunggulan kompetitif

Dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat harus dapat menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keragamannya sehingga kondisinya tetap dapat dipertahankan seperti keadaan semula. Mengingat pengelolaan sumber daya alam, tidak hanya harus mengurangi kerusakan (dampak negatif sekecil mungkin) dan mempertahankan keberadaan sumber daya alam tidak terbarukan, tetapi juga memperbaiki sumber daya alam terbarukan, serta mencapai kembali keadaan sesuai kapasitasnya yang semula, dan bukan saja merupakan keunggulan komparatif (*comparative advantage*), tetapi juga keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) sehingga dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Untuk mewujudkan hal tersebut adalah perlunya mendorong filosofi ramah lingkungan pada setiap pembangunan pemukiman dan infrastruktur, melakukan konservasi dan pencegahan seperti penyelamatan sumber mata air, pembuatan biopori, sumur resapan, pembuatan IPAL industri, pengelolaan ruang terbuka hijau, dan



pengurangan serta pengolahan sampah. Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dilakukan peningkatan jalan lingkungan, drainase, penanganan limbah rumah tangga.

5.2.3 Misi 3 : Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat

Keseluruhan proses dan semua hasil pembangunan daerah harus dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat di semua wilayah Kabupaten Bondowoso, sehingga tercipta adanya kesetaraan kondisi yang dibutuhkan bagi setiap warga untuk dapat mengembangkan dirinya secara proporsional dan berdaya sehingga dapat meraih penghidupan secara layak dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan dengan menjalankan *human integrated program* yang berbasis pada data terpadu (*one database*) secara valid dan aktual yang bertujuan untuk penajaman penetapan sasaran penerima program, keterpaduan program serta memudahkan monitoring dan evaluasi keberhasilan.

5.2.4 Misi 4 : Mewujudkan pemerintahan yang jujur, adil, amanah, partisipatif dan inovatif

Mewujudkan kualitas pelayanan yang semakin baik terhadap kebutuhan masyarakat, tanpa adanya pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik perseorangan, kelompok, maupun kewilayahan serta penyelenggaraan pemerintahan secara akuntabel, tanpa korupsi, tanpa pungli maupun jual beli jabatan. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, menciptakan situasi aman dan tenteram, menghapuskan potensi konflik sosial, taat regulasi dan sadar hukum, serta menghormati hak asasi manusia. sehingga 3 (tiga) pilar kekuatan pembangunan, pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan mampu

berperan pada posisi terdepan, dalam setiap upaya meraih keunggulan-keunggulan sehingga mampu bersaing dalam segala bidang. Untuk mewujudkan hal tersebut yang perlu dilakukan adalah pelaksanaan sistem rekrutmen yang jujur dan profesional, menerapkan sistem merit (manajemen SDM aparatur negara berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja tanpa membedakan suku, ras, agama dan golongan) pada seluruh formasi birokrasi dengan konsisten dan transparan, membangun budaya birokrasi yang melayani dan meneladani, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengawasannya di seluruh perangkat daerah, melakukan sinergi horizontal dalam penyusunan metode pengukuran objektif untuk mengukur integritas terhadap pelayanan masyarakat, mendorong lahirnya inovasi pelayanan publik di seluruh perangkat daerah dengan mengembangkan e-Gov melalui aplikasi sistem informasi menuju *smart city*, percepatan reformasi birokrasi yang berbasis pada keterbukaan informasi publik dan partisipasi, mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pada pemanfaatan APBD agar amanah rakyat dapat dilaksanakan dengan baik, memberdayakan pondok pesantren, masjid dan tempat ibadah lainnya sebagai pusat pendidikan karakter, meningkatkan peran serta tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya, tokoh pemuda dan tokoh perempuan untuk memberikan tauladan kesalehan sosial, serta membangun sinergi dengan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. Disamping itu juga perlu dilakukan penguatan masyarakat agar tangguh menghadapi bencana, menyiapkan tanggap darurat bencana sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat.

5.2.5 Misi 5 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul

Mewujudkan masyarakat Bondowoso dengan tingkat pendidikan yang tinggi serta derajat kesehatan yang baik, dari semua tingkatan usia, serta hidup berlandaskan



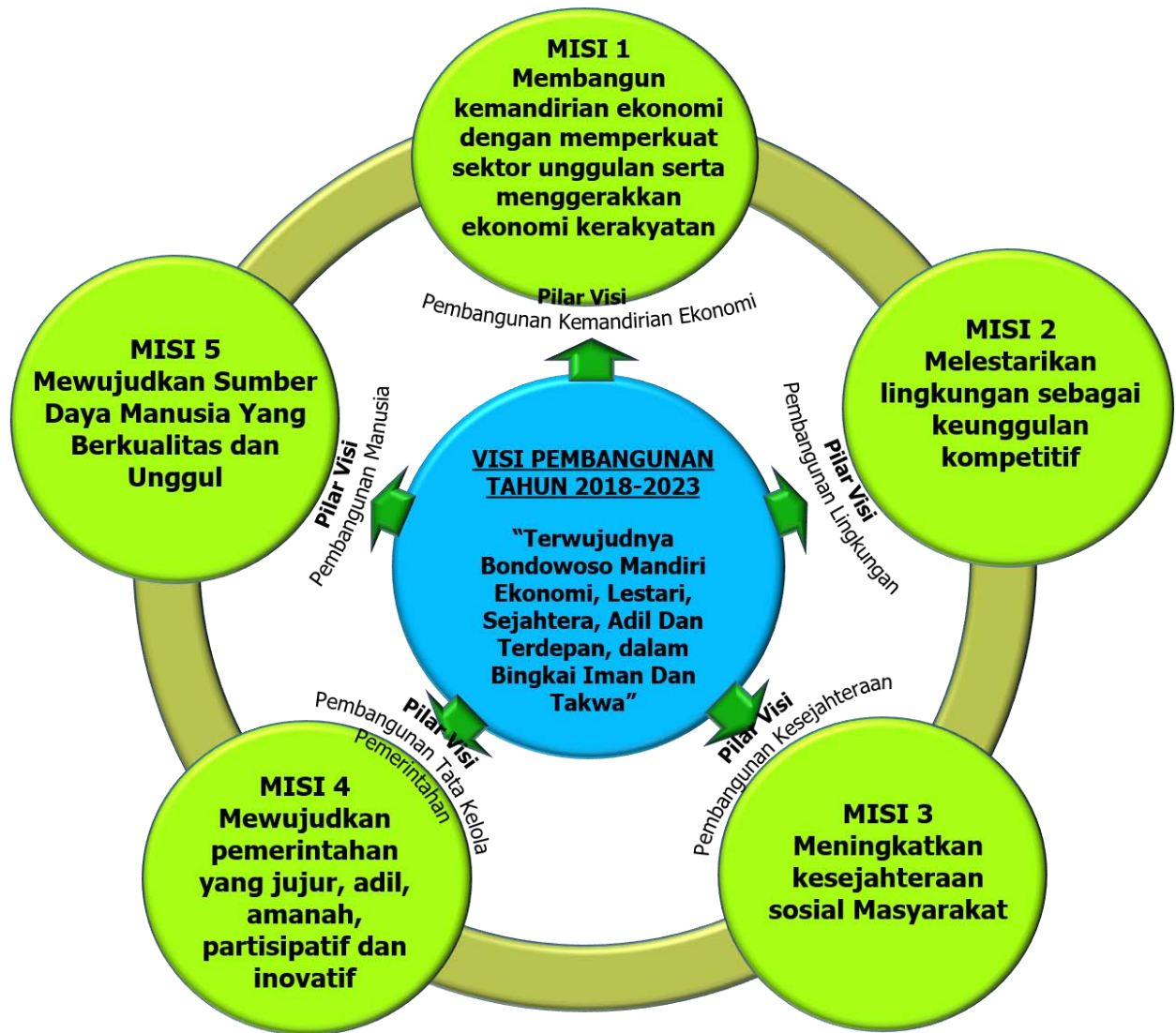
ajaran agama sesuai dengan keyakinan masing-masing individu, yang mengarah pada peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, bermuara pada terciptanya keharmonisan sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari serta diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan melalui optimalisasi pendidikan karakter melalui penguatan pondok pesantren dan madrasah diniyah serta lembaga pendidikan non formal lainnya yang disinergikan dengan pendidikan formal sebagai pilar pembangunan Bondowoso yang berdasarkan iman dan taqwa, pemberian penghargaan kepada pengasuh pesantren, guru madrasah diniyah, guru ngaji dan guru TPQ/TPA serta pendidik lembaga pendidikan non formal lainnya sebagai ujung tombak pendidikan karakter dalam menyelesaikan masalah sosial, memperkuat kurikulum pendidikan dengan muatan lokal yang berbasis keagamaan, kearifan lokal dan agrobisnis untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, mewujudkan layanan pendidikan yang komprehensif dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar dan staf pendukung kependidikan, penyediaan dan peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan dan alat bantu pendidikan, peningkatan jumlah sekolah negeri maupun swasta yang berkualitas, biaya terjangkau dan dekat dengan tempat tinggal peserta didik sesuai wilayah sasaran prioritas, memperluas dan mempermudah akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi, penambahan jumlah guru, medis dan tenaga medis untuk mendukung kebutuhan bidang pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah terpencil, mengintegrasikan Jaminan Sosial daerah Bondowoso dengan jaminan sosial yang ada di tingkat provinsi dan nasional (BPJS, KIS, KIP, dan Jamkesda), menjamin ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat serta terjangkau oleh masyarakat, ketersediaan berbagai kebijakan, pedoman dan akses sistem

informasi kesehatan (SIK) daerah di seluruh institusi pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan yang cukup, berkualitas dan profesional, terberdayakannya masyarakat melalui keterlibatan di dalam pelayanan kesehatan, seperti terlibat dalam Posyandu, Polindes, dan Pos-siaga serta Poskestren (Pos Kesehatan Pesantren), memperkuat program-program preventif (“dokter masyarakat”), pemenuhan fasilitas kendaraan siaga kesehatan desa, penyediaan fasilitas umum (taman kota edukatif, perpustakaan, sanggar seni) yang ditujukan untuk pemuda dan pelajar sebagai ruang publik positif, penyediaan fasilitas publik untuk berolahraga, serta menjadikan Bondowoso sebagai kabupaten yang ramah terhadap perempuan, anak dan disabilitas dengan memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak perempuan, anak dan disabilitas. Keramahan tersebut akan diwujudkan dalam aspek fasilitas umum, pelayanan publik termasuk dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan bidang lainnya yang terkait dengan kehidupan perempuan, anak dan disabilitas.

Keterkaitan visi dan misi pembangunan tahun 2018-2023 dijelaskan sebagaimana Gambar 5.1.

5.3 Tujuan dan sasaran

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 ditetapkan sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.1



Gambar 5.1 Keterkaitan Visi dan Misi Pembangunan Tahun 2018-2023



Tabel 5.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Bondowoso
VISI : Terwujudnya Bondowoso Mandiri Ekonomi, Lestari, Sejahtera, Adil dan Terdepan Dalam Bingkai Iman dan Takwa

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2017)	Target Tahun					Kondisi Akhir
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	Membangun Kemandirian Ekonomi Dengan Memperkuat Sektor Unggulan Serta Menggerakkan Ekonomi Kerakyatan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi Dan Berkualitas	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan	Persentase Pertumbuhan PDRB							
				ADHK	5,03%	5,04%	5,05%	5,06%	5,07%	5,08%	5,08%
				ADHB	8,15%	8,19%	8,20%	8,21%	8,22%	8,23%	8,23%
				Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian (ADHB)	4,52%	6,69%	7,11%	7,09%	7,08%	7,06%	7,06%
				Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (ADHB)	10,75%	8,97%	7,64%	7,63%	7,61%	7,59%	7,59%
				Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan (ADHB)	10,39%	9,83%	9,66%	9,65%	9,64%	9,62%	9,62%
				Persentase Kontribusi Kategori Pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	1,13%	1,16	1,18%	1,20%	1,22%	1,24%	1,24%
				Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	2,00%	4,00%	6,00%	8,00%	10,00%	12,00%	12,00%
			Meningkatkan Usaha Skala Mikro	Persentase Usaha Mikro Yang Mengalami Peningkatan Skala Usaha	1,89%	1,89%	2,02%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2017)	Target Tahun					Kondisi Akhir
						2019	2020	2021	2022	2023	
			Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penunjang Ekonomi	Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Memadai	58,32%	63,02%	66,71%	70,37%	74,05%	77,43%	77,43%
2	Melestarikan Lingkungan Sebagai Keunggulan Kompetitif	Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup		Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,27	66,59	67,08	67,12	67,52	67,53	67,53
			Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Indek Kualitas Air	50,00	51,82	53,33	53,33	54,61	55,71	55,71
				Indek Kualitas Udara	83,48	83,59	83,70	83,84	83,88	84,02	84,02
				Indek Kualitas Tutupan Lahan	64,90	64,92	64,93	64,93	64,93	64,94	64,94
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	2,63%	1,59%	1,17%	0,75%	0,33%	0,00	0,00
3	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Menurunnya Tingkat Kemiskinan		Persentase Tingkat Kemiskinan	14,54%	13,96%	13,66%	13,36%	13,06%	12,76%	12,76%
			Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,60	0,60	0,59	0,59	0,58	0,58	0,58
			Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,09	1,99	1,91	1,86	1,86	1,86	1,86
			Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indek Desa Membangun (IDM)	0,6565	0,6565	0,6650	0,6650	0,6750	0,6750	0,6750





No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2017)	Target Tahun					Kondisi Akhir
						2019	2020	2021	2022	2023	
4	Mewujudkan Pemerintahan Yang Jujur, Adil, Amanah, Partisipatif Dan Inovatif	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		Indek Reformasi Birokrasi (IRB)	80,09*	76,00*	77,50	77,50	78,00	78,50	78,50
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,03*	78,50*	79,00	79,50	80,00	80,50	80,50
				Nilai SAKIP	BB	A	A	A	A	A	A
				Nilai Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Terwujudnya Ketentraman Dan Ketertiban Serta Perlindungan Masyarakat		Persentase Potensi Konflik Sosial Yang Ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya Kerukunan Antar Suku, Agama, Ras Dan Antar Golongan	Persentase Potensi Konflik SARA Yang Ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat	Persentase Ketangguhan Daerah Dalam Menghadapi Bencana	73,63%	78,53%	83,86%	89,19%	94,52%	100%
5	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Unggul	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia		Indek Pembangunan Manusia (IPM)	64,75	65,72	66,18	66,58	67,00	67,46	67,46
			Meningkatnya Derajat Pendidikan	Indek Pendidikan	54,44	54,71	54,86	55,00	55,15	55,30	55,30
			Meningkatnya Derajat Kesehatan	Indek Kesehatan	70,83	71,66	72,11	72,43	72,81	73,33	73,33

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2017)	Target Tahun					Kondisi Akhir
						2019	2020	2021	2022	2023	
			Meningkatnya Kualitas Dan Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan	Status Kabupaten Layak Pemuda	N/A	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya
			Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase Atlet Berprestasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya Pemberdayaan Gender Serta Perlindungan Perempuan Dan Anak	Indek Pembangunan Gender (IPG) Status Kabupaten Layak Anak	89,63	89,63	89,65	89,67	89,69	89,72	89,72
					Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya



RANCANGAN AWAL



PEMBAHASAN RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018-2023



WANA WISATA BETOH SO'DON

THE STONEHENGE VAN JAVA



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan salah satu rujukan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang bermanfaat untuk mempercepat dan menjamin tercapainya visi misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan adanya rumusan strategi dan arah kebijakan yang tepat, maka pelaksanaan program prioritas pembangunan di Kabupaten Bondowoso dalam lima tahun ke depan diharapkan akan memiliki fokus yang jelas, terarah dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

6.1 Strategi

Strategi pembangunan merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisi *grand design* perencanaan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Berbagai strategi yang disusun menggambarkan kemantaban pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Perencanaan yang dilakukan secara efektif dan efisien akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas dan kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*), strategi dirumuskan berupa pernyataan yang menjelaskan cara mencapai tujuan dan sasaran yang diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu

strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Untuk kurun waktu 2018-2023, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menetapkan strategi yang akan dikembangkan sebagai langkah taktis dan efektif, untuk menjamin hasil secara maksimal dari pelaksanaan berbagai program pembangunan, yang merupakan strategi terpadu yang melibatkan dukungan dan komitmen seluruh stakeholder dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Secara garis besar, strategi terpadu yang dikembangkan dan akan menjadi acuan dalam pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan dalam kurun waktu 2018-2023 dengan prinsip :

1. Menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang
2. Mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan kebutuhan layanan masyarakat
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah

Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi selengkapnya disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Bondowoso

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 1 : Membangun kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor unggulan serta menggerakkan ekonomi kerakyatan		
1.1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas	1.1.1 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan	1 Mengembangkan agrobisnis perdesaan melalui revitalisasi pertanian dan perkebunan rakyat, meningkatkan kualitas dan nilai tambah komoditi unggulan, meningkatkan aksesibilitas petani terhadap teknologi, meningkatkan kapasitas pelaku usaha dagang kecil, fasilitasi usaha perdagangan konvensional dan non konvensional (<i>e-commerce</i>), penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/ pengusaha pengolahan dan pemasaran serta pencitraan produk dalam rangka promosi serta menarik investasi agrobisnis, perluasan pertanian organik, revitalisasi pasar tradisional serta penataan kawasan dan diversifikasi produk unggulan daerah
	1.1.2 Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata	2 Mengembangkan destinasi pariwisata sehingga layak kunjung, meningkatkan partisipasi usaha lokal perdesaan dalam industri pariwisata, meningkatkan citra kepariwisataan Bondowoso, promosi pemasaran dan pengelolaan obyek wisata secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi komunikasi
	1.1.3 Meningkatnya Investasi Daerah	3 Meningkatkan identifikasi potensi dan promosi investasi serta meningkatkan sistem pelayanan untuk mendorong kemudahan berinvestasi serta penataan dan pemanfaatan ruang
	1.1.4 Meningkatnya Usaha Skala Mikro dan kecil	4 Meningkatkan akses usaha mikro terhadap kesempatan pengembangan keterampilan, pendampingan, modal usaha dan teknologi, meningkatkan daya saing usaha mikro dan koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar ("naik kelas") dalam rangka mendukung kemandirian ekonomi daerah, pengembangan ekonomi pondok pesantren (<i>santripreneur</i>)
	1.1.5 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penunjang Ekonomi	5 Percepatan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum terutama penunjang ekonomi dan penunjang sektor unggulan lokal sebagai pengungkit utama perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
Misi 2 : Melestarikan lingkungan sebagai keunggulan kompetitif		
2.1 Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup	2.1.1 Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	1 Pengendalian pencemaran (air, udara, dan lahan) yang berupa pencegahan dan pengelolaan timbulnya limbah/sampah, pemulihan akibat pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan, penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan, serta peningkatan kesadaran masyarakat di lingkungan permukiman dan dunia usaha untuk berperilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari
	2.1.2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan permukiman	





TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 3 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		
3.1 Menurunnya Tingkat Kemiskinan	3.1.1 Terkendalinya pertumbuhan penduduk	1 Pengendalian Kuantitas Penduduk melalui Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
	3.1.2 Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran Terbuka	2 Memperluas kesempatan kerja melalui fasilitasi akses informasi ketenagakerjaan dan meningkatkan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pembinaan
	3.1.3 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	3 Melakukan fasilitasi terhadap masyarakat perdesaan dalam pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber daya lokal untuk kemandirian masyarakat
Misi 4 : Mewujudkan pemerintahan yang jujur, adil, amanah, partisipatif dan inovatif		
4.1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	4.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintah daerah	1 Meningkatkan kualitas kinerja aparatur yang profesional, menciptakan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi publik, serta kualitas kinerja akuntabilitas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah daerah, transparansi rekrutmen dalam jabatan dan pengembangan E-Gov
	4.2 Terwujudnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	1 Meningkatkan jalinan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga sosial keagamaan, tokoh agama, cendekiawan dan masyarakat dalam pembinaan karakter untuk meningkatkan pemahaman terhadap ajaran agama dalam rangka pencegahan serta penanganan konflik sosial dan politik
	4.2.2 Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat	2 Meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat khususnya dalam menghadapi bencana serta meningkatkan kesadaran dan budaya masyarakat yang tertib dan taat terhadap peraturan dan Norma
Misi 5 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul		
5.1 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	5.1.1 Meningkatnya derajat pendidikan	1 Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan infrastruktur, sarana prasarana, kualitas pembelajaran dan penguatan manajemen, serta kualitas pelayanan dengan melibatkan masyarakat secara optimal, pemberdayaan dan penguatan sumberdaya keagamaan serta kemasyarakatan untuk penguatan pendidikan karakter, fasilitasi pengembangan infrastruktur pendidikan dan kebudayaan, fasilitasi pengembangan infrastruktur kesehatan tingkat desa dan ponpes serta integrasi jaminan sosial
	5.1.2 Meningkatnya derajat kesehatan	
	5.1.3 Meningkatnya kualitas dan peran serta pemuda dalam pembangunan	2 Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang sudah tersedia secara optimal untuk mendukung pembinaan prestasi pemuda dan olah raga serta fasilitasi pengembangan infrastruktur keolahragaan
	5.1.4 Meningkatnya Prestasi Olahraga	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	5.1.5 Meningkatnya Pemberdayaan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak	3 Meningkatkan pemahaman dan komitmen pentingnya perspektif pemberdayaan gender dan implementasinya dalam berbagai bidang pembangunan termasuk pencapaian kabupaten layak anak serta peningkatan layanan publik bagi penyandang disabilitas





6.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, dengan mengacu pada strategi di atas, maka untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD ditetapkan arah kebijakan yang komprehensif. Arah kebijakan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan dalam kurun waktu 2018-2023 sebagai berikut :

1. Tahun 2019

Arah kebijakan yang ditetapkan adalah:

- 1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi, daya saing dan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan, meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata, meningkatnya investasi daerah, meningkatnya usaha skala mikro dan kecil, terkendalinya pertumbuhan penduduk, menurunnya angka tingkat pengangguran terbuka serta meningkatnya keberdayaan masyarakat.
- 2) Pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dengan sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur penunjang ekonomi, meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan, serta meningkatnya kualitas lingkungan permukiman.

Tema yang ditetapkan adalah: **Peningkatan pertumbuhan ekonomi, daya saing dan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.**

2. Tahun 2020

Arah kebijakan yang ditetapkan adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas Pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja berbasis teknologi informasi serta inovasi sistem pemerintahan yang terintegratif dalam proses bisnis di semua level pemerintahan dengan sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintah daerah
- 2) Pengembangan sektor unggulan dan potensi ekonomi lokal untuk mendorong peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan, meningkatnya investasi daerah, meningkatnya usaha skala mikro dan kecil.
- 3) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian dan pengembangan industri pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat dengan sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur penunjang ekonomi, Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran Terbuka, Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat, meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata, serta Meningkatnya kualitas dan peran serta pemuda dalam pembangunan.
- 4) Mengembangkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan pemberdayaan berbasis peningkatan karakter serta budaya masyarakat dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban umum menciptakan stabilitas sosial dan politik dengan sasaran Meningkatnya derajat pendidikan, Meningkatnya derajat kesehatan, Meningkatnya Pemberdayaan



Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak, Meningkatnya kualitas dan peran serta pemuda dalam pembangunan, Meningkatnya Prestasi Olahraga, Meningkatnya kerukunan antar Suku, Agama, Ras dan antar golongan, Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat, serta Terkendalinya pertumbuhan penduduk.

Tema yang ditetapkan adalah: Peningkatan SDM dan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan infrastruktur untuk mendorong potensi ekonomi lokal.

3. Tahun 2021

Arah kebijakan yang ditetapkan adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas Pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja berbasis teknologi informasi serta inovasi sistem pemerintahan yang terintegratif dalam proses bisnis di semua level pemerintahan dengan sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintah daerah
- 2) Pengembangan sektor unggulan dan potensi ekonomi lokal untuk mendorong peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan, meningkatnya investasi daerah, meningkatnya usaha skala mikro dan kecil.
- 3) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian dan pengembangan industri pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat dengan sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur penunjang ekonomi, Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran Terbuka, Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat, meningkatnya

pemanfaatan potensi pariwisata, serta Meningkatnya kualitas dan peran serta pemuda dalam pembangunan.

- 4) Mengembangkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan pemberdayaan berbasis peningkatan karakter serta budaya masyarakat dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban umum menciptakan stabilitas sosial dan politik dengan sasaran Meningkatnya derajat pendidikan, Meningkatnya derajat kesehatan, Meningkatnya Pemberdayaan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak, Meningkatnya kualitas dan peran serta pemuda dalam pembangunan, Meningkatnya Prestasi Olahraga, Meningkatnya kerukunan antar Suku, Agama, Ras dan antar golongan, Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat, serta Terkendalinya pertumbuhan penduduk.

Tema yang ditetapkan adalah: Peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja berbasis teknologi informasi serta pengembangan infrastruktur untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

4. Tahun 2022

Arah kebijakan yang ditetapkan adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas Pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja berbasis teknologi informasi serta inovasi sistem pemerintahan yang terintegratif dalam proses bisnis di semua level pemerintahan dengan sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintah daerah
- 2) Pengembangan sektor unggulan dan potensi ekonomi lokal untuk mendorong peningkatan pendapatan



dan kemandirian ekonomi masyarakat dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan, meningkatnya investasi daerah, meningkatnya usaha skala mikro dan kecil.

- 3) Mengembangkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan pemberdayaan berbasis peningkatan karakter serta budaya masyarakat dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban umum menciptakan stabilitas sosial dan politik dengan sasaran meningkatnya derajat pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan, meningkatnya pemberdayaan gender serta perlindungan perempuan dan anak, meningkatnya kualitas dan peran serta pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olahraga, meningkatnya kerukunan antar suku, agama, ras dan antar golongan, meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat, serta terkendalinya pertumbuhan penduduk.

Tema yang ditetapkan adalah: **Peningkatan inovasi sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi, mendorong kemandirian ekonomi masyarakat serta penciptaan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.**

5. Tahun 2023

Arah kebijakan yang ditetapkan adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas Pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja berbasis teknologi informasi serta inovasi sistem pemerintahan yang terintegratif dalam proses bisnis di semua level pemerintahan dengan sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintah daerah

- 2) Mengembangkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan pemberdayaan berbasis peningkatan karakter serta budaya masyarakat dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban umum menciptakan stabilitas sosial dan politik dengan sasaran meningkatnya derajat pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan, meningkatnya pemberdayaan gender serta perlindungan perempuan dan anak, meningkatnya kualitas dan peran serta pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olahraga, meningkatnya kerukunan antar suku, agama, ras dan antar golongan, meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat, serta terkendalinya pertumbuhan penduduk.

Tema yang ditetapkan adalah: **Peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintah daerah serta mengembangkan sumberdaya manusia yang berkarakter dan berbudaya.**

Secara garis besar arah kebijakan pembangunan dalam kurun waktu 2018-2023 disajikan pada Tabel 6.2 berikut.

Tabel 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bondowoso

Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan Pembangunan				
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Sasaran 4.1.1		Meningkatkan kualitas Pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja berbasis teknologi informasi serta inovasi sistem pemerintahan yang terintegratif dalam proses bisnis di semua level pemerintahan			
Sasaran 1.1.1 Sasaran 1.1.3 Sasaran 1.1.4		Pengembangan sektor unggulan dan potensi ekonomi lokal untuk mendorong peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat			
Sasaran 1.1.5 Sasaran 3.1.2 Sasaran 3.1.3 Sasaran 1.1.2 Sasaran 5.1.3		Percepatan pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian dan pengembangan industri pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat			
Sasaran 1.1.1 Sasaran 1.1.2 Sasaran 1.1.3 Sasaran 1.1.4 Sasaran 3.1.1 Sasaran 3.1.2 Sasaran 3.1.3	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat				
Sasaran 1.1.5 Sasaran 2.1.1 Sasaran 2.1.2	Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan				
Sasaran 5.1.1 Sasaran 5.1.2 Sasaran 5.1.3 Sasaran 5.1.4 Sasaran 5.1.5 Sasaran 4.2.1 Sasaran 4.2.2 Sasaran 3.1.1		Mengembangkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan pemberdayaan berbasis peningkatan karakter serta budaya masyarakat dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban umum menciptakan stabilitas sosial dan politik			





6.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah, dimana secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah di seluruh urusan (wajib dan pilihan). Berdasarkan rumusan permasalahan maka disusun program prioritas dengan mempertimbangkan faktor-

faktor penentu keberhasilan. Perhitungan pagu program dilakukan dengan menentukan output dari setiap kegiatan pada program, menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program selanjutnya menghitung alokasi Perangkat Daerah berdasarkan program yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah. Program prioritas pembangunan daerah yang disertai pagu indikatif disajikan pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3 Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Bondowoso

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	RP	
				Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP			
MISI 1	Membangun kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor unggulan serta menggerakkan ekonomi kerakyatan															
1.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas	Persentase Pertumbuhan PDRB														
		ADHK	5,03%	5,04%	5,05%	5,06%	5,07%	5,08%	5,08%							
		ADHB	8,15%	8,19%	8,20%	8,21%	8,21%	8,23%	8,23%							
1.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian (ADHB)	4,52%	6,69%	7,11%	7,09%	7,08%	7,06%	7,06%							
		Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (ADHB)	10,75%	8,97%	7,64%	7,63%	7,61%	7,59%	7,59%							
		Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan (ADHB)	10,39%	9,83%	9,66%	9,65%	9,64%	9,62%	9,62%							
	Pengembangan Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura	1 jumlah produktivitas tanaman pangan dan tanaman hortikultura														Diperta
		- padi	6,14	6,15	6,16	6,16	6,17	6,17	6,17							
		- jagung	5,17	5,17	5,18	5,18	5,19	5,19	5,19							
		- kedelai	1,50	1,51	1,51	1,52	1,52	1,53	1,53							
		- ubi kayu	22,75	22,76	22,77	22,77	22,78	22,78	22,78							
		- cabe rawit	8,35	8,36	8,37	8,37	8,38	8,38	8,38							
		- bawang merah	10,36	10,37	10,37	10,38	10,38	10,39	10,39							
		- jahe	16,09	16,09	16,10	16,10	16,11	16,11	16,11							
		- kunyit	19,50	19,54	19,54	19,55	19,55	19,56	19,56							





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		2	% pembenihan tanaman pangan dan hortikultura	75,00%	78,00%		81,00%		84,00%		87,00%		90,00%		90,00%		
		3	jumlah kerjasama pemasaran unggulan tanaman pangan dan hortikultura	15	15		15		15		15		15		15		
Pengembangan Tanaman Perkebunan	1	jumlah produktivitas tanaman perkebunan															Diperta
		- kopi arabika	0,41	0,43		0,45		0,47		0,49		0,51		0,51			
		- kopi robusta	0,38	0,40		0,42		0,44		0,46		0,48		0,48			
		- tembakau rajangan	0,80	0,85		0,90		0,95		1,00		1,05		1,05			
		- tembakau kasturi	1,40	1,45		1,50		1,55		1,60		1,65		1,65			
		- tebu	5,40	5,50		5,80		6,10		6,40		6,70		6,70			
						640.000.000		653.540.000		674.691.000		691.098.000		717.886.000		717.886.000	
		2	% pembenihan tanaman perkebunan	100	100		100		100		100		100		100		
		3	jumlah kerjasama pemasaran unggulan perkebunan	20	20		20		20		20		20		20		
Pengembangan Peternakan	1	% ternak ruminansia	10	15		20		25		30		35		35		35	Diperta
		2	% luas pakan ternak	10	20		30		40		50		60		60		
		3	% ternak non ruminansia	12,5	17,5		22,5		27,5		32,5		37,5		37,5		
					1.050.000.000		1.072.214.000		1.106.916.000		1.133.834.000		1.177.782.000		1.177.782.000		
Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian	1	% penyuluh, medik, paramedik & petugas IB pertanian terlatih	30	34		38		42		46		50		50		50	Diperta
		2	% data statistik pertanian	100	100		100		100		100		100		100		
		3	% keterampilan lembaga pertanian	30	34		38		42		46		50		50		
					2.097.000.000		2.141.365.000		2.210.670.000		2.264.428.000		2.352.200.000		2.352.200.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023			
				Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP		
	Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pertanian	1 % jaringan irigasi tersier dan lahan terbangun	20	20	20	7.087.849.000	20	7.237.803.000	20	7.472.054.000	20	7.653.757.000	20	7.950.425.000	Diperta
		2 % pemanfaatan alat dan mesin pertanian	16	16	16	7.087.849.000	16	7.237.803.000	16	7.472.054.000	16	7.653.757.000	16	7.950.425.000	
		3 % pembinaan usaha tani	16	16	16	7.087.849.000	16	7.237.803.000	16	7.472.054.000	16	7.653.757.000	16	7.950.425.000	
	Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 % pelayanan kesehatan ternak	1,7	2,4	2,7	640.000.000	2,7	653.540.000	3,1	674.691.000	3,4	691.098.000	3,7	717.886.000	Diperta
		2 jumlah kerjasama pemasaran unggulan peternakan	5	5	5	640.000.000	5	653.540.000	5	674.691.000	5	691.098.000	5	717.886.000	
		3 % kesehatan masyarakat veteriner	100	100	100	640.000.000	100	653.540.000	100	674.691.000	100	691.098.000	100	717.886.000	
	Peningkatan Kualitas Bahan Baku	1 % kualitas komoditas perkebunan yang pengolahannya sesuai SOP	31,2	31,8	32,5	2.552.119.000	32,5	3.783.016.000	33,1	4.440.857.000	33,7	5.001.917.000	34,3	5.633.572.000	Diperta
	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1 nilai produksi industri	798.502,24	862.735,52	932.180,83	5.685.071.000	932.180,83	6.406.840.000	1.007.286,00	6.879.238.000	1.088.595,42	7.911.281.000	1.176.501,89	8.805.474.000	Diskoperindag
		2 % pertumbuhan industri	0,66	0,69	0,70	5.685.071.000	0,70	6.406.840.000	0,71	6.879.238.000	0,72	7.911.281.000	0,73	8.805.474.000	
		3 % bina industri	3,78	3,85	3,92	5.685.071.000	3,92	6.406.840.000	4,01	6.879.238.000	4,08	7.911.281.000	4,13	8.805.474.000	
	Pembinaan Industri	1 % bina industri hasil tembakau	100	100	100	90.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	Diskoperindag





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	1 % bina pedagang	2,00	2,00	6.048.164.000	2,00	6.225.000.000	2,04	6.415.000.000	2,04	6.605.000.000	2,07	6.800.000.000	2,07	6.800.000.000	Diskoperindag
		2 nilai ekspor bersih perdagangan	31,60 milyar	33,22 milyar	6.048.164.000	34,94 milyar	6.225.000.000	36,78 milyar	6.415.000.000	38,74 milyar	6.605.000.000	40,85 milyar	6.800.000.000	40,85 milyar	6.800.000.000	
1.1.2	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata	Persentase Kontribusi Kategori Pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	1,13%	1,16%		1,18%		1,20%		1,22%		1,24%		1,24%		
	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	45.856	55.856	2.575.750.000	61.034	2.808.998.000	67.138	3.096.993.000	73.852	3.387.899.000	81.237	3.758.386.000	81.237	3.758.386.000	Disparpora
		jumlah kunjungan wisatawan nusantara	400.894	485.190		533.710		587.081		645.789		710.368		710.368		
		2 jumlah lama tinggal wisatawan mancanegara	2,5	2,5	2,5	2,7	2,7	3,0	3,0							
		jumlah lama tinggal wisatawan nusantara	1,5	1,5	1,5	1,7	1,8	2,0	2,0							
		3 angka pengeluaran wisatawan mancanegara	800.000	840.000	882.000	926.100	972.405	1.021.025	1.021.025							
		angka pengeluaran wisatawan nusantara	115.000	120.750	126.788	133.127	139.783	146.772	146.772							
	Pengembangan Destinasi Pariwisata	1 % destinasi wisata yg layak kunjung	80	80	3.365.332.000	84	6.820.329.000	88	7.041.066.000	92	7.212.288.000	100	7.491.843.000	100	7.491.843.000	Disparpora

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP			
1.1.3	Meningkatnya Investasi Daerah	Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	2,00%	4,00%	6,00%	8,00%	10,00%	12,00%	12,00%							
	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	jumlah kerjasama pengusaha besar dan kecil	2	4	563.596.600	4	575.520.000	4	594.149.000	5	608.599.000	5	622.226.000	5	622.226.000	DPM, PTSP & TK
	Peningkatan Layanan Perijinan	% penerbitan izin tepat waktu	95,08	98,60	413.882.400	98,76	472.207.000	98,80	485.998.000	98,89	496.332.000	98,93	514.073.000	98,93	514.073.000	DPM, PTSP & TK
		% penerbitan IUJK maksimal 5 hari kerja	96,15	96,15		96,15		96,15		96,15		96,15				
		% bangunan yg memiliki IMB	30,22	30,30		30,32		30,35		30,37		30,40		30,40		
		% publikasi layanan perijinan	76,00	78,00		78,00		79,00		79,00		79,00		79,00		
1.1.4	Meningkatnya Usaha Skala Mikro	Persentase Usaha Mikro yang mengalami peningkatan skala usaha	1,89%	1,89%	2,02%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%			
	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	% koperasi aktif	43,60	44,43	675.000.000	45,25	695.000.000	46,07	715.000.000	46,87	735.000.000	47,66	755.000.000	47,66	755.000.000	Diskoperindag
	Pemberdayaan Usaha Skala Mikro	% pertumbuhan usaha skala mikro	0,48	0,53	1.997.800.000	0,53	2.055.000.000	0,55	2.115.000.000	0,56	2.175.000.000	0,58	2.250.000.000	0,58	2.250.000.000	Diskoperindag
		% usaha mikro terfasilitasi akses permodalan dan kemitraan	0,51	0,56		0,60		0,68		0,75		0,79				





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.1.5	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penunjang Ekonomi	Persentase infrastruktur pekerjaan umum yang memadai	58,32%	63,02%	66,71%	70,37%	74,05%	77,43%	77,43%						
Perencanaan Teknis Infrastruktur Pekerjaan Umum	1	% dok perencanaan umum infrastruktur jalan dan jembatan	50,00	13,33	26,67	46,67	66,67	86,67	86,67	Dinas PU & PR					
	2	% dok perencanaan umum infrastruktur sumber daya air	55,56	13,33	26,67	46,67	66,67	86,67	86,67	Dinas PU & PR					
	3	% perencanaan teknis infrastruktur gedung dan air bersih	33,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas PU & PR					
Operasi dan Pemeliharaan	1	% intensitas tanam	94,35	95,42	95,82	96,22	96,62	97,02	97,02	Dinas PU & PR					
	2	% kinerja pelayanan rutin jalan	5,80	17,66	18,30	19,18	20,07	20,96	20,96	Dinas PU & PR					
Kemitraan dan Jasa Konstruksi	1	% peran HIPPA	23,97	24,79	25,62	28,51	28,51	29,75	29,75	Dinas PU & PR					
	2	% status HIPPA/GHIPPA	62,81	68,18	68,18	68,60	69,01	69,01	69,01	Dinas PU & PR					
	3	% kapasitas penyedia jasa konstruksi	15,87	23,39	24,85	24,85	26,02	26,90	26,90	Dinas PU & PR					

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023			
				Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP		
	Pembangunan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1 % panjang jalan yang dibangun	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas PU & PR		
		2 % jalan yang ditingkatkan	10,93	14,76	16,56	18,35	20,14	21,57	21,57	21,57	21,57	21,57	Dinas PU & PR		
		3 % rehabilitasi/ pemeliharaan kondisi jalan	11,92	19,21	21,72	24,22	26,73	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	Dinas PU & PR		
	Pembangunan, Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi	1 % kondisi bendung yang baik s.d thn ybs	89,73	90,64	91,10	91,55	92,01	92,01	92,01	92,47	92,47	92,47	Dinas PU & PR		
		2 % panjang kondisi saluran irigasi yang baik s.d th ybs	67,77	71,76	75,47	79,29	83,22	83,22	83,22	87,29	87,29	87,29	Dinas PU & PR		
		3 % kondisi bangunan pelengkap baik s.d th ybs	68,90	70,00	70,92	71,83	72,75	72,75	73,67	73,67	73,67	73,67	Dinas PU & PR		
	Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Penyediaan Air Baku	1 % waduk lapangan yg baik	57,89	68,42	73,68	73,68	78,95	78,95	78,95	78,95	78,95	78,95	Dinas PU & PR		
		2 % saluran waduk yg baik	11,67	18,33	21,67	25,00	28,33	28,33	31,67	31,67	31,67	31,67	Dinas PU & PR		
		3 % volume waduk lapangan yg baik	50,40	52,88	53,28	53,68	54,08	54,08	54,48	54,48	54,48	54,48	Dinas PU & PR		
	Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	1 RTH per satuan luas wilayah ber-HPL HGB	13,32	13,32	13,36	13,40	13,44	13,44	13,44	13,48	13,48	13,48	Dinas PU & PR		





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
	Pengelolaan Keciaptakarya	1 % layanan air minum	57,38	70,08	31.474.248.000	73,43	32.456.430.000	77,00	34.244.608.000	80,27	35.917.527.000	83,74	38.275.136.000	83,74	38.275.136.000	Dinas PU & PR
	Penyediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1 % penambahan sarana & prasarana	81,77	67,56	4.056.200.000	72,16	4.120.515.000	76,76	4.129.976.000	81,36	4.107.192.000	85,96	4.142.127.000	85,96	4.142.127.000	Dinas LH & Perhubungan
			80,00	40,00		45,00		60,00		75,00		85,00		85,00		
	Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1 % pelanggaran lalu-lintas angkutan orang dan barang	44,29	44,29	2.321.725.000	40,00	2.301.790.000	35,71	2.307.075.000	31,43	2.393.169.000	27,14	2.413.525.000	27,14	2.413.525.000	Dinas LH & Perhubungan
MISI 2	Melestarikan lingkungan sebagai keunggulan kompetitif															
2.1	Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,27	66,59		67,08	67,12	67,52	67,52	67,53	67,53	67,53	67,53	67,53		
2.1.1	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Indek Kualitas Air	50,00	51,82		53,33	53,33	54,61	54,61	55,71	55,71	55,71	55,71	55,71		
		Indek Kualitas Udara	83,48	83,59		83,70	83,84	83,88	83,88	84,02	84,02	84,02	84,02	84,02		
		Indek Kualitas Tutupan Lahan	64,90	64,92		64,93	64,93	64,93	64,93	64,94	64,94	64,94	64,94	64,94		
	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1 % kawasan yang dipantau dan dikendalikan		11,11	995.800.000											Dinas LH & Perhubungan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
	Perlindungan Konservasi Sumber daya Alam dan Peningkatan Akses Informasi	1 % kelompok sasaran peduli lingkungan	18,00	17,67	497.000.000											Dinas LH & Perhubungan
	Pengendalian Pencemaran, Konservasi Sumber Daya Alam dan Pemberdayaan Masyarakat	1 % kawasan yang dipantau dan dikendalikan	-	-		11,11	1.607.242.000	11,11	1.572.179.000	11,11	1.761.147.000	11,11	1.875.789.000	11,11	1.875.789.000	Dinas LH & Perhubungan
		2 % kelompok sasaran peduli lingkungan	18,00	-		12,53		13,42		14,03		16,78		16,78		
	Pengendalian Dampak Lingkungan dan Peningkatan Hukum Lingkungan	1 % pengaduan masyarakat yang ditangani	100,00	100,00	338.050.000	100,00	335.147.000	100,00	335.917.000	100,00	450.178.000	100,00	454.007.000	100,00	454.007.000	Dinas LH & Perhubungan
		2 % perusahaan yg tertib terhadap dokumen lingkungan	215,00	20,00		40,00		60,00		80,00		88,33		88,33		
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1 rasio Ruang Terbuka Hijau	78,13	78,13	3.907.566.000	81,25	13.874.016.000	84,38	3.783.541.000	87,50	4.131.284.000	90,63	4.166.424.000	90,63	4.166.424.000	Dinas LH & Perhubungan
		2 % penerangan jalan umum	88,04	74,47		76,21		77,95		79,69		81,43		81,43		
	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1 % sampah tertangani	68,28	70,06	3.900.491.000	76,64	4.263.567.000	83,83	5.266.983.000	91,70	5.237.926.000	95,75	5.382.141.000	95,75	5.382.141.000	Dinas LH & Perhubungan
		2 rasio tempat pembuangan per satuan penduduk	1,42	1,46		1,53		1,65		1,69		1,68		1,68		





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.1.2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	2,63%	1,59%	1,17%	0,75%	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	Lingkungan Sehat Perumahan	1 % lingkungan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	0,00	55,65	71,56	87,47	98,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perumahan & KP		
	Pengembangan Perumahan	1 % layanan rumah layak huni yang terjangkau	4,59	5,96	7,23	8,49	9,76	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	Dinas Perumahan & KP		
				9.069.713.101,38	9.660.096.000,00	10.359.661.000,00	11.004.925.000,00	11.859.681.000,00	11.859.681.000,00	11.859.681.000,00	11.859.681.000,00	11.859.681.000,00			
				6.419.750.000	31.398.399.000	34.491.925.000	37.756.262.000	41.873.357.000	41.873.357.000	41.873.357.000	41.873.357.000	41.873.357.000			
MISI 3	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat														
3.1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase Tingkat Kemiskinan	14,54%	13,96%	13,66%	13,36%	13,06%	12,76%	12,76%	12,76%	12,76%	12,76%			
3.1.1	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	0,60	0,60	0,59	0,59	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58			
	Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk	1 % PUP	41%	40%	39%	38%	37%	36%	36%	36%	36%	36%	DPPKB		
				9.165.359.000	10.054.262.840	11.040.946.102	12.136.164.523	13.742.441.971	13.742.441.971	13.742.441.971	13.742.441.971	13.742.441.971			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Pelayanan Kontrasepsi dan Pembinaan Keluarga	1 MKJP	15,21%	18,89%		21,01%		22,11%		23,19%		24,24%		24,24%	DPPKB
		2 <i>Unmeet Need</i>	11,42%	10,35%	975.000.000	10,16%	975.000.000	10,01%	975.000.000	9,87%	975.000.000	9,75%	1.375.000.000	9,75%	1.375.000.000
3.1.2	Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,09	1,99		1,91		1,86		1,86		1,86		1,86	
	Peningkatan Kesempatan Kerja	1 % tenaga kerja formal	N/A	37,98		38,00		38,01		38,03		38,06		38,06	DPM, PTSP & TK
		2 % pencari kerja terdaftar yg ditempatkan:													
		- penempatan TK AKL	54,11	54,24	898.132.500	54,37	2.510.109.500	54,48	2.596.996.500	54,64	2.627.880.500	54,76	2.781.093.500	54,76	2.781.093.500
		- penempatan TK AKAD	2,72	2,76		2,78		2,79		2,80		2,84		2,84	
		- penempatan TK AKAN	9,98	9,99		10,03		10,04		10,08		10,09		10,09	
		3 % pencari kerja yg mendapatkan pelatihan	N/A			18,52		19,60		21,28		22,04		22,04	
	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1 % kecelakaan kerja	0,03	0,02		0,02		0,02		0,01		0,01		0,01	DPM, PTSP & TK
		2 % perusahaan yang menerapkan UMK	N/A	15,36		15,88		16,40		16,91		17,43		17,43	
		3 % kasus yg diselesaikan dgn Perjanjian Bersama	92,31	87,50	211.801.500	87,50	236.110.000	75,00	243.154.000	75,00	248.473.000	71,43	257.505.000	71,43	257.505.000
		4 % pekerja/buruh peserta BPJS Ketenagakerjaan	20,05	20,05		20,07		20,09		20,10		20,12		20,12	
		5 % perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan	44,03	48,50		48,56		48,62		48,69		48,75		48,75	





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		6 % pelanggaran terhadap perundang-undangan ketenagakerjaan	2,20	1,04		0,92		0,92		0,80		0,80		0,80		
3.1.3	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indek Desa Membangun (IDM)	0,6565	0,6565		0,6650		0,6650		0,6750		0,6750		0,6750		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	1 % swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	67,07	68,23	3.651.732.250	69,99	3.728.990.000	71,65	3.849.678.000	73,52	3.943.294.000	75,36	4.096.141.000	75,36	4.096.141.000	DPMD
	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Ekonomi	1 % pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	100	100	3.075.467.750	100	3.140.533.000	100	3.242.175.000	100	3.321.016.000	100	3.449.742.000	100	3.449.742.000	DPMD
	Pembinaan Pemerintahan Desa	1 % cakupan sarana prasarana desa yang baik	100	100	1.561.200.000	100	2.202.942.000	100	2.275.775.000	100	2.332.645.000	100	2.424.600.000	100	2.424.600.000	DPMD
		2 % LPM aktif	22,49	25,36		29,67		35,41		40,67		44,50		44,50		
	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1 % penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	35,70	36,20	625.905.000	38,40	1.168.821.000	52,56	1.206.649.000	66,68	1.235.991.000	81,00	1.283.899.000	81,00	1.283.899.000	Dinsos

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Peningkatan Ketahanan Pangan	1	Jumlah ketersediaan pangan													DKPP
			- beras	240.971	255.429	255.500	255.550	255.600	255.650	255.650	255.650	255.650	255.650	255.650		
			- jagung	119.729	126.912	126.950	126.975	127.000	127.050	127.050	127.050	127.050	127.050	127.050		
			- gula pasir	32.257	34.193	34.197	34.200	34.225	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250		
			- telur	2.547	2.700	2.725	2.750	2.775	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
			- daging	2.866	3.037	3.039	3.040	3.047	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050		
		2	% Penanganan Daerah Rawan Pangan	2,28	9,13	11,42	13,70	16,00	18,26	18,26	18,26	18,26	18,26	18,26		
MISI 4	Mewujudkan pemerintahan yang jujur, adil, amanah, partisipatif dan inovatif															
4.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik		Indek Reformasi Birokrasi (IRB)	80,09*	76,00*	77,50	77,50	78,00	78,50	78,50	78,50	78,50	78,50	78,50		
4.1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintah daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,03*	78,50*	79,00	79,50	80,00	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50		
			Nilai SAKIP	BB	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
			Nilai Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		
			Nilai EKPPD	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22		
	Peningkatan Kualitas Rumusan Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Organisasi	1	% pengembangan kualitas pelayanan publik			98	98	98	98	98	98	98	98	98		Bag. Organisasi
		2	% PD dievaluasi tuisi dan kelembagaan			60	70	80	90	90	90	90	90	90		
		3	Ketepatan waktu penyusunan LKIP dan PK Kabupaten			90	90	90	90	90	90	90	90	90		





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab			
				2019		2020		2021		2022		2023						
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
	Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Publik	1 % OPD yg dilakukan penilaian pelayanan publik		100,00	992.000.000												Bag. Organisasi	
		2 % PD yg memiliki SOP tupoksi utama		57,89														
		3 % capaian indikator bidang SPM		100,00														
		4 % pengembangan KBK		100,00														
		5 % updating data anjab & ABK		100,00														
	Penataan Administrasi Kependudukan	1 % penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	94,50	98,18	4.407.103.000	98,28	4.667.152.000	98,37	5.003.788.000	98,48	5.330.331.000	98,58	5.766.272.000	98,58	5.766.272.000		Dispenduk-capil	
		2 % penerbitan KK	100	100	4.407.103.000	100	4.667.152.000	100	5.003.788.000	100	5.330.331.000	100	5.766.272.000	100	5.766.272.000		Dispenduk-capil	
	Pencatatan Sipil	1 % penerbitan Akta Kelahiran	52,49	54,13	884.409.000	54,56	903.119.000	54,99	932.348.000	55,44	948.783.000	55,88	985.559.000	55,88	985.559.000		Dispenduk-capil	
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	1 % implementasi e-gov	0,00	42,86	3.106.620.000												Diskominfo	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Pengelolaan Aplikasi Informatika	1 % aplikasi yang dapat diakses perangkat daerah			68,00	3.209.207.000	76,00	3.515.179.000	84,00	3.799.661.000	100,00	4.031.303.000	100,00	4.031.303.000	Diskominfo
	Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	1 % skor evaluasi SAKIP OPD berkategori minimal BB	77	80	85	155.000.000	90	163.401.000	95	167.374.000	100	173.809.000	100	173.809.000	Inspektorat
		2 Jumlah OPD dengan hasil audit kinerja minimal Baik	1	2	2	155.000.000	4	163.401.000	4	167.374.000	6	173.809.000	6	173.809.000	
	Peningkatan Kualitas Rumusan Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Pemerintahan	1 % Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	100	100	100		100		100		100		100		Bagian Administrasi Pemerintahan
		2 % Kecamatan yang menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) berkualitas baik	-	13,04	30	1.844.290.000	48	1.903.979.000	65	1.950.279.000	78	2.025.874.000	78	2.025.874.000	
		3 % capaian indikator bidang SPM		34,48	51,72		68,96		86,20		100		100		
	Peningkatan Kualitas Rumusan Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Pembangunan dan Keuangan	1 % Pedoman Kerja yang dihasilkan	100,00	100,00	100,00	1.212.050.000	100,00	1.596.507.000	100,00	1.648.178.000	100,00	1.688.258.000	100,00	1.753.696.000	Bagian AP dan Keuangan
		2 % dokumen perencanaan dan pelaporan yang selesai tepat waktu	100,00	100,00	100,00	1.212.050.000	100,00	1.596.507.000	100,00	1.648.178.000	100,00	1.688.258.000	100,00	1.753.696.000	





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1 % LK OPD sesuai SAP	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Inspektorat
		2 % OPD dengan maturitas penerapan SPIP mencapai level 3	55,00		70,00		80,00		90,00		100,00		100,00		100,00	
		3 % penyelesaian tindak lanjut temuan audit	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		4 % penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		5 Jumlah OPD/unit kerja dengan skor hasil evaluasi ZI minimal 75	1	1		2		2		4		4		4		
4.2	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat	Persentase Potensi Konflik Sosial Yang Ditangani	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	
4.2.1	Meningkatnya kerukunan antar Suku, Agama, Ras dan antar golongan	Persentase potensi konflik SARA yang ditangani	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	
	Peningkatan Integrasi Bangsa	1 % tingkat kesadaran wawasan kebangsaan	1,35	2,21	3,30		4,39		5,47		6,56		6,56			Bakesbang
						1.045.941.000			1.127.838.000			1.200.673.000			1.290.615.000	
															1.290.615.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab					
				2019		2020		2021		2022		2023								
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp			
	Stabilisasi Keamanan dan Kenyamanan Wilayah	1 % personil pemantau dan pengamanan wilayah	100,00	75,00	708.278.000	100,00	712.537.000	100,00	703.809.000	100,00	699.926.000	100,00	705.879.000	100,00	705.879.000	Bakesbang				
4.2.2	Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana	73,63%	78,53%		83,86%		89,19%		94,52%		100,00%		100,00%						
	Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1 % jangkauan patroli siaga ketertiban umum & ketenteraman masyarakat	39,13	39,13	1.993.619.000	39,13	1.984.388.000	39,13	2.097.919.000	52,17	2.147.049.000	52,17	2.228.340.000	52,17	2.228.340.000	Satpol PP				
		2 % pelanggaran penyakit masyarakat (Pekat) yang tertangani	42,40	70,66	1.993.619.000	69,33	1.984.388.000	68,00	2.097.919.000	66,66	2.147.049.000	65,33	2.228.340.000	65,33	2.228.340.000	Satpol PP				
	Penegakan Peraturan Daerah	1 % pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	72,00*	39,30*	176.020.000	39,30	177.126.000	35,71	180.195.000	35,71	181.889.000	32,14	186.188.000	32,14	186.188.000	Satpol PP				
	Mitigasi Bencana	1 % penduduk yang memahami mitigasi bencana	0,44	0,88	960.000.000		1.243.271.000		1.501.932.000		1.651.867.000		1.736.239.000		1.736.239.000	BPBD				
		1 % penduduk desa/kelurahan yang memahami mitigasi bencana				66,40				77,60				88,80				100,00		100,00
		2 % mitigasi struktural yang tertangani	4,00	8,00				12,00				16,00					20,00		24,00	





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Tanggap Darurat Bencana	1 % bencana yang tertangani	100,00	100,00	1.197.291.944	100,00	1.247.500.000	100,00	1.550.000.000	100,00	1.485.000.000	100,00	1.543.955.000	100,00	1.543.955.000	BPBD
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1 % kerusakan pasca bencana yang di rehabilitasi & rekonstruksi	100,00	100,00	20.000.000	100,00	40.000.000	100,00	47.500.000	100,00	47.500.000	100,00	47.500.000	100,00	47.500.000	BPBD
MISI 5	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul															
5.1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	64,75	65,72		66,18		66,58		67,00		67,46		67,46		
5.1.1	Meningkatnya derajat pendidikan	Indek Pendidikan	54,44	54,71		54,86		55,00		55,15		55,30		55,30		
	Pendidikan Anak Usia Dini	1 APK PAUD 3-6	89,76	90,00	11.488.730.000	90,05	33.712.193.000	90,10	35.744.511.000	90,15	37.457.248.000	90,20	39.449.375.000	90,20	39.449.375.000	Dikbud
	Pendidikan Dasar dan Pengembangan Budi Pekerti Luhur	1 APK SD / MI / Paket A	110,80	109,30	95.561.213.000	108,85	101.083.540.000	108,15	111.918.508.000	107,75	123.032.862.000	107,20	137.244.641.000	107,20	137.244.641.000	Dikbud
		2 APK SMP / MTs / Paket B	100,46	100,45		100,44		100,43		100,42		100,40				
		3 APM SD / MI / Paket A	99,88	99,89		99,90		99,91		99,92		99,93				
		4 APM SMP / MTs / Paket B	93,93	93,98		94,03		94,08		94,13		94,18				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023			
				Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP		
5	angka partisipasi sekolah SD / MI / Paket A	105,30	105,31		105,32		105,33		105,34		105,35		105,35		
6	angka partisipasi sekolah SMP / MTs / Paket B	95,91	95,92		95,93		95,94		95,95		95,96		95,96		
7	angka putus sekolah SD / MI / Paket A	0,21	0,21		0,20		0,20		0,19		0,19		0,19		
8	angka putus sekolah SMP / MTs / Paket B	0,23	0,22		0,21		0,21		0,20		0,20		0,20		
9	% SD/MI yang berakreditasi minimal B	78,12	79,07		80,03		80,67		82,11		83,07		83,07		
10	% SMP/MTs yang berakreditasi minimal B	66,81	67,70		68,58		69,47		70,35		71,68		71,68		
11	sekolah SD dengan kondisi bangunan yang baik	76,83	78,86		80,89		82,93		84,76		86,79		86,79		
12	sekolah SMP dengan kondisi bangunan yang baik	81,25	83,33		85,42		87,50		89,58		91,67		91,67		
13	rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia pendidikan dasar	80,89	80,92		80,95		80,98		81,01		81,04		81,04		
14	% kemampuan peserta didik dalam menulis dan membaca ayat suci agama yang dianut dengan baik dan benar jenjang SD / MI / Paket A	69,54	69,60		69,65		69,72		69,75		69,79		69,79		





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
		15 % kemampuan peserta didik dalam menulis dan membaca ayat suci agama yang dianut dengan baik dan benar jenjang SMP / MTs / Paket B	89,97	90,18		90,23		90,30		90,35		90,40		90,40		
		16 Presentase SD / SMP yang berakreditasi minimal B	72,35	100,00												
	Pendidikan Non Formal	1 angka melek huruf > 15 tahun	81,59	82,35	1.404.100.000	83,12	28.334.935.000	83,95	29.221.035.000	84,75	30.358.482.000	85,35	31.568.496.000	85,35	31.568.496.000	Dikbud
		2 % anak usia 7 - 15 tahun yang mengaji dan sekolah minggu	56,40	56,41		56,42		56,43		56,44		56,45				
5.1.2 Meningkatnya derajat kesehatan		Indek Kesehatan	70,83	71,66		72,11		72,43		72,81		73,33		73,33		
	Upaya Pelayanan Kesehatan	1 BOR	≤ 40%	≤ 40%	56.625.131.596,00	≤ 40%	65.861.551.795,79	≤ 40%	72.053.855.673,28	≤ 40%	75.405.413.098,13	≤ 40%	77.897.067.192	≤ 40%	77.897.067.192	Dinkes
		2 % Puskesmas terakreditasi (minimal madya)	40,00	48,00		56,00		64,00		72,00		80,00				
		3 % FKTP dengan kemampuan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat	75,00	80,00		84,00		88,00		92,00		96,00				
		4 % penduduk miskin yg tercakup dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	97,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
		5 % rumah sakit dan klinik utama yang memiliki ijin	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		6	% penyehat tradisional yang memiliki ijin	6,00	10,00		10,00		15,00		20,00		20,00		20,00		
		7	persentase capaian SPM	n/a	75,00												
Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Angka Kematian Bayi (AKB)	13,59	13,49	27.491.529.000	13,39	29.948.117.000,00	13,29	30.505.117.000,00	13,20	30.680.117.000,00	13,10	30.905.117.000,00	13,10	30.905.117.000,00		Dinkes
		2	Angka Kematian Ibu (AKI)	146,63		136,85		127,08		117,30		107,53		97,75		97,75	
		3	% pelayanan kesehatan ibu hamil	85,70		91,00		92,00		93,00		94,00		96,00		96,00	
		4	% pelayanan kesehatan ibu bersalin	92,00		95,50		96,00		96,50		97,00		97,50		97,50	
		5	% bayi yang mendapat ASI eksklusif	74,80		77,00		79,00		80,00		81,00		82,00		82,00	
		6	% balita gizi buruk	1,04		1,00		1,00		0,90		0,90		0,90		0,90	
		7	% balita <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek)	38,30		37,00		36,00		35,00		34,00		33,00		33,00	
		8	% desa siaga aktif PURI	13,00		14,00		15,00		16,00		17,00		18,00		18,00	
		9	% akses jamban	57,71		60,71		63,71		66,71		69,71		72,71		72,71	
Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	1	% ketersediaan alat kesehatan di Puskesmas	25,00	50,00	25.197.149.104,55	55,00	30.974.702.000,00	60,00	37.723.567.028,36	65,00	50.285.815.110,44	70,00	67.272.995.769,92	70,00	67.272.995.769,92		Dinkes
		2	% puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	0,00		0,00		96,00		96,00		96,00		96,00			
		3	% fasilitas IRTP (Indutri Rumah Tangga Pangan) sesuai standart	0,00		0,00		82,00		84,00		86,00		88,00		88,00	





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	1 % imunisasi dasar lengkap pada bayi	92,50	93,00	93,50	94,00	94,50	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	Dinkes		
		2 % desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	90,41	90,86	91,32	91,32	91,32	91,32	91,32	91,32	91,32	91,32			
		3 % pelayanan kesehatan penderita hipertensi	50,00	53,00	57,00	61,00	64,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00			
		4 % pelayanan kesehatan orang dengan TB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
		5 % pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
		6 angka kesakitan akibat penyakit (HIV, DBD, TB)	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23			
		7 angka kematian akibat penyakit (HIV, DBD, TB)	5,42	5,31	5,15	4,71	4,29	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89			
			1.659.490.000		1.785.000.000		1.975.000.000		2.110.000.000		2.265.000.000		2.265.000.000		
5.1.3	Meningkatnya kualitas dan peran serta pemuda dalam pembangunan	Status Kabupaten Layak Pemuda	N/A	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	Madya			
	Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan	1 % kelompok pemuda yang difasilitasi pemberdayaan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Disparpora		
				520.000.000		531.001.000		548.187.000		561.517.000		583.283.000		583.283.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
5.1.4	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase Atlet Berprestasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
	Peningkatan Pengembangan Keolahragaan	1 % atlet yg mengikuti kompetisi olahraga (tingkat regional)	N/A	40,00	1.240.000.000	40,00	1.266.234.000	40,00	1.307.215.000	40,00	1.339.003.000	40,00	1.390.905.000	40,00	1.390.905.000	Disparpora
5.1.5	Meningkatnya Pemberdayaan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Indek Pembangunan Gender (IPG)	89,63	89,63		89,65		89,67		89,69		89,72		89,72		
		Status Kabupaten Layak Anak	Pratama	Pratama		Pratama		Pratama		Madya		Madya		Madya		
	Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	1 partisipasi angkatan kerja perempuan	65,00	65,36	1.287.322.000	65,90	1.204.987.160	66,35	1.251.208.898	66,85	1.189.685.477	67,00	1.479.745.029	67,00	1.479.745.029	DPPKB
		2 jumlah forum anak yang aktif	70,00	73,00	1.287.322.000	75,00	1.204.987.160	78,00	1.251.208.898	80,00	1.189.685.477	82,00	1.479.745.029	82,00	1.479.745.029	DPPKB

Catatan : " * " terdapat perubahan formula perhitungan



UJI PUBLIK KLHS



**RPJMD KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN 2018-2023**



KAWAH WURUNG



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka pendanaan dalam konteks kemampuan pembiayaan pembangunan daerah berhubungan erat dengan kapasitas riil kemampuan keuangan. Kapasitas riil kemampuan keuangan adalah kemampuan belanja pembangunan yang telah disesuaikan dengan asumsi-asumsi pendapatan yang menjadi dasar proyeksi belanja, serta pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, yang meliputi komponen belanja tidak langsung berupa belanja pegawai, belanja subsidi, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa dan partai politik serta belanja tak terduga. Sedangkan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama yang meliputi komponen belanja langsung berupa belanja

rutin kebutuhan operasional organisasi perangkat daerah serta belanja pemenuhan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah menjadi dasar pendanaan dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra perangkat daerah. Kerangka pendanaan pembangunan daerah tahun 2019-2023 selengkapnya disajikan sebagaimana Tabel 7.1.

Keseluruhan program prioritas pembangunan dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program perangkat daerah, beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, dan perangkat daerah berdasarkan urusan selengkapnya disajikan sebagaimana Tabel 7.2

Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	932.073.481.777,17	1.009.420.166.276,01	1.103.016.995.992,71	1.194.292.293.474,98	1.359.866.755.977,01
BELANJA						
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.209.326.642.042,04	1.221.029.544.803,62	1.313.231.978.967,39	1.422.655.280.139,51	1.577.627.709.498,46
2.1.1	Belanja Pegawai	790.229.424.235,04	815.127.561.122,70	856.128.548.526,65	900.208.036.726,65	947.596.840.226,65
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	1.183.163.800,00	1.183.163.800,00	1.183.163.800,00	1.183.163.800,00	1.183.163.800,00
2.1.4	Belanja Hibah	70.492.300.000,00	14.712.300.000,00	14.712.300.000,00	23.212.300.000,00	63.712.300.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.121.750.000,00	4.121.750.000,00	4.121.750.000,00	4.121.750.000,00	4.121.750.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa	5.850.625807,00	6.113.107.665,32	6.158.984.800,57	6.581.716.102,08	6.688.162.544,33
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	335.449.378.200,00	377.771.662.215,60	428.927.231.840,18	485.348.313.510,78	552.325.492.927,48
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	849.608.805.970,47	957.909.043.609,25	1.049.710.949.509,68	1.130.062.221.077,28	1.253.198.091.350,82
2.2.1	Belanja Pegawai	31.800.345.125,00	23.026.515.107,50	13.034.132.873,13	7.559.847.160,22	4.419.547.694,12
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	506.428.243.033,43	542.599.571.765,10	569.839.902.944,36	599.542.845.641,57	627.190.936.583,65
2.2.3	Belanja Modal	311.380.217.812,04	392.282.956.736,65	466.836.913.692,19	522.959.528.275,49	621.587.607.073,05



Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
Urusan Wajib Pelayanan Dasar																		
1 Pendidikan																		
1	Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	1 % ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	$1 \frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap layanan administrasi perkantoran}}{\sum \text{ASN}}$	%	100,00	100,00	5.632.277.000	100,00	5.948.484.000	100,00	6.335.849.000	100,00	6.616.379.000	100,00	7.005.580.000	100,00	7.005.580.000	Dikbud
		2 % sarana & prasarana aparatur yg layak fungsi	$2 \frac{\sum \text{sarana \& prasarana yg ada}}{\sum \text{sarana \& prasarana yg layak fungsi}}$	%	100,00	100,00	5.632.277.000	100,00	5.948.484.000	100,00	6.335.849.000	100,00	6.616.379.000	100,00	7.005.580.000	100,00	7.005.580.000	Dikbud
2	Perencanaan dan Pelaporan	1 % dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg sesuai pedoman yg disusun tepat waktu	$1 \frac{\sum \text{dokumen penyelenggaraan yg sesuai pedoman (Perencanaan \& Pelaporan)}}{\sum \text{dokumen yg wajib disusun}}$	%	100,00	100,00	65.000.000	100,00	72.373.000	100,00	77.507.000	100,00	82.688.000	100,00	87.236.000	100,00	87.236.000	Dikbud
		2 % laporan keuangan yg disusun tepat waktu	$2 \frac{\sum \text{laporan keuangan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{laporan keuangan yg wajib disusun tiap thn}}$	%	100,00	100,00	65.000.000	100,00	72.373.000	100,00	77.507.000	100,00	82.688.000	100,00	87.236.000	100,00	87.236.000	Dikbud



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
3	Pendidikan Anak Usia Dini	1 APK PAUD 3-6	1 $\frac{\sum \text{siswa TK / RA / KB / Penitipan anak usia 3-6 thn}}{\sum \text{anak usia 3 - 6 thn}}$	%	89,76	90,00	11.488.730.000	90,05	33.712.193.000	90,10	35.744.511.000	90,15	37.457.248.000	90,20	39.449.375.000	90,20	39.449.375.000	Dikbud
4	Pendidikan Dasar dan Pengembangan Budi Pekerti Luhur	1 APK SD / MI / Paket A	1 $\frac{\sum \text{siswa SD / MI / Paket A}}{\sum \text{penduduk usia 7-12 thn}}$	%	110,80	109,30	95.561.213.000	108,85	101.083.540.000	108,15	111.918.508.000	107,75	123.032.862.000	107,20	137.244.641.000	107,20	137.244.641.000	Dikbud
		2 APK SMP / MTs / Paket B	2 $\frac{\sum \text{siswa SMP / MTs / Paket B}}{\sum \text{penduduk usia 13-15 thn}}$	%	100,46	100,45		100,44		100,43		100,42		100,40		100,40		
		3 APM SD / MI / Paket A	1 $\frac{\sum \text{siswa usia 7-12 thn SD / MI / Paket A}}{\sum \text{penduduk usia 7-12 thn}}$	%	99,88	99,89		99,90		99,91		99,92		99,93		99,93		
		4 APM SMP / MTs / Paket B	2 $\frac{\sum \text{siswa usia 13-15 thn SMP / MTs / Paket B}}{\sum \text{penduduk usia 13-15 thn}}$	%	93,93	93,98		94,03		94,08		94,13		94,18		94,18		
		5 angka partisipasi sekolah SD / MI / Paket A	1 $\frac{\sum \text{murid usia 7 - 12 thn}}{\sum \text{penduduk usia 7 - 12 thn} \times 1.000}$	%	105,30	105,31		105,32		105,33		105,34		105,35		105,35		





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
6	angka partisipasi sekolah SMP / MTs /Paket B	2	$\frac{\sum \text{murid usia 13 - 15 thn}}{\sum \text{penduduk usia 13 - 15 thn} \times 1.000}$	%	95,91	95,92		95,93		95,94		95,95		95,96		95,96		
7	angka putus sekolah SD / MI / Paket A	1	$\frac{\sum \text{siswa putus sekolah SD / MI / Paket A}}{\sum \text{siswa SD / MI / Paket A}}$	%	0,21	0,21		0,20		0,20		0,19		0,19		0,19		
8	angka putus sekolah SMP / MTs / Paket B	1	$\frac{\sum \text{siswa putus sekolah SMP / MTs / Paket B}}{\sum \text{siswa SMP / MTs / Paket B}}$	%	0,23	0,22		0,21		0,21		0,20		0,20		0,20		
9	% SD/MI yg berakreditasi minimal B	1	$\frac{\sum \text{SD / MI yg berakreditasi minimal B}}{\sum \text{SD / MI yg ada}}$	%	78,12	79,07		80,03		80,67		82,11		83,07		83,07		
10	% SMP / MTs yg berakreditasi minimal B	1	$\frac{\sum \text{SMP / MTs yg berakreditasi minimal B}}{\sum \text{SMP / MTs yg ada}}$	%	66,81	67,70		68,58		69,47		70,35		71,68		71,68		
11	sekolah SD dgn kondisi bangunan yg baik	1	$\frac{\sum \text{sekolah SD dgn kondisi bangunan yg baik}}{\sum \text{SD yg ada}}$	%	76,83	78,86		80,89		82,93		84,76		86,79		86,79		
12	sekolah SMP dgn kondisi bangunan yg baik	1	$\frac{\sum \text{sekolah SMP dgn kondisi bangunan yg baik}}{\sum \text{SMP yg ada}}$	%	81,25	83,33		85,42		87,50		89,58		91,67		91,67		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		13	rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia pendidikan dasar	$1 \frac{\sum \text{sekolah (SD / MI + SMP / MTs)}}{\sum \text{penduduk usia (7 s.d 12) thn + (13 s.d 15) x 10.000}}$	Rasio	80,89	80,92		80,95		80,98		81,01		81,04		81,04		
		14	% kemampuan peserta didik dalam menulis & membaca ayat suci agama yg dianut dgn baik & benar jenjang SD / MI / Paket A	$1 \frac{\sum \text{siswa yg mampu menulis \& membaca ayat suci SD / MI / Paket A}}{\sum \text{siswa SD / MI / Paket A}}$	%	69,54	69,60		69,65		69,72		69,75		69,79		69,79		
		15	% kemampuan peserta didik dalam menulis & membaca ayat suci agama yg dianut dgn baik & benar jenjang SMP / MTs / Paket B	$1 \frac{\sum \text{siswa yg mampu menulis \& membaca ayat suci SMP / MTs / Paket B}}{\sum \text{siswa SMP / MTs / Paket B}}$	%	89,97	90,18		90,23		90,30		90,35		90,40		90,40		
		16	% SD / SMP yg berakreditasi minimal B	$\frac{\sum \text{lembaga SD / SMP yg berakreditasi minimal B}}{\sum \text{lembaga SD / SMP}}$	%	72,35	100,00												
5	Pendidikan Non Formal	1	Angka Melek Huruf > 15 tahun	$1 \frac{\sum \text{penduduk > 15 tahun yg melek huruf}}{\sum \text{penduduk > 15 tahun}}$	%	81,59	82,35	1.404.100.000	83,12	28.334.935.000	83,95	29.221.035.000	84,75	30.358.482.000	85,35	31.568.496.000	85,35	31.568.496.000	Dikbud





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab			
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
		2	% anak usia 7 - 15 tahun yg mengaji & sekolah minggu	1 $\frac{\sum \text{anak usia 7 - 15 tahun yg mengaji \& sekolah minggu}}{\sum \text{penduduk usia 7 - 15 tahun}}$	%	56,40	56,41		56,42		56,43		56,44		56,45		56,45		
6	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	% guru berijazah D4 / S1 SD	1 $\frac{\sum \text{guru berijazah D4/S1 SD}}{\sum \text{semua guru SD}}$	%	84,57	85,65		86,45		87,15		87,95		88,65		88,65	Dikbud	
			% Guru berijazah D4 / S1 SMP	2 $\frac{\sum \text{guru berijazah D4 / S1 SMP}}{\sum \text{semua guru SMP}}$	%	92,81	92,92	1.335.700.000	93,56	2.955.896.000	93,85	3.071.509.000	94,30	3.174.136.000	94,95	3.314.419.000	94,95		3.314.419.000
		2	% guru TK / SD / SMP yg bersertifikat pendidik	1 $\frac{\sum \text{guru TK / SD / SMP yang bersertifikat pendidik}}{\sum \text{semua guru TK / SD / SMP}}$	%	32,46	32,88		33,30		33,72		34,14		34,56		34,56		
7	Fasilitasi Pendidikan	1	rata - rata tingkat pendidikan penduduk usia 19 - 22 Tahun	1 $\frac{\sum \text{penduduk menempuh Pendidikan Tinggi usia 19-22 tahun}}{\sum \text{penduduk usia 19-22 Tahun}}$	%	9,01	9,02	623.500.000	9,03	2.536.758.000	9,04	2.601.032.000	9,05	2.638.014.000	9,06	2.713.713.000	9,06	2.713.713.000	Dikbud
		2	Angka Partisipasi Pendidikan Tinggi	1 $\frac{\sum \text{penduduk menempuh Pendidikan Tinggi usia 19-24 tahun}}{\sum \text{penduduk usia 19-24 tahun}}$	%	n/a	9,09			2.536.758.000		2.601.032.000		2.638.014.000		2.713.713.000		2.713.713.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
2	Kesehatan																	
1	Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	1 % ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	$\frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap layanan administrasi perkantoran}}{\sum \text{ASN}}$	%	100,00	100,00	4.067.380.000	100,00	4.067.380.000	100,00	4.067.380.000	100,00	4.067.380.000	100,00	4.067.380.000	100,00	4.067.380.000	Dinkes
		2 % sarana & prasarana aparatur yg layak fungsi	$\frac{\sum \text{sarana \& prasarana yg layak fungsi}}{\sum \text{sarana \& prasarana yg ada}}$	%	100,00	100,00	4.067.380.000	100,00	4.067.380.000	100,00	4.067.380.000	100,00	4.067.380.000	100,00	4.067.380.000	100,00	4.067.380.000	Dinkes
2	Perencanaan dan Pelaporan	1 % dokumen penyelengga- raan pemerintahan yg sesuai pedoman yg disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{dokumen penyelenggaraan yg sesuai pedoman (Perencanaan \& Pelaporan)}}{\sum \text{dokumen yg wajib disusun}}$	%	100,00	100,00	58.500.000	100,00	58.500.000	100,00	58.500.000	100,00	58.500.000	100,00	58.500.000	100,00	58.500.000	Dinkes
		2 % laporan keuangan yg disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{laporan keuangan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{laporan keuangan yg wajib disusun tiap thn}}$	%	100,00	100,00	58.500.000	100,00	58.500.000	100,00	58.500.000	100,00	58.500.000	100,00	58.500.000	100,00	58.500.000	Dinkes





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
3	Upaya Pelayanan Kesehatan	1 BOR	$1 \frac{\sum \text{hari perawatan}}{\sum \text{tempat tidur} * \sum \text{hari dalam sebulan di puskesmas rawat inap ybs}}$	%	≤ 40%	≤ 40%		≤ 40%		≤ 40%		≤ 40%		≤ 40%		Dinkes		
		2 % Puskesmas terakreditasi (minimal madya)	$1 \frac{\sum \text{puskesmas terakreditasi minimal madya}}{\sum \text{seluruh puskesmas}}$	%	40,00	48,00		56,00		64,00		72,00		80,00			80,00	
		3 % FKTP dgn kemampuan gawat darurat yg dapat diakses masyarakat	$1 \frac{\sum \text{FKTP dgn kemampuan gawat darurat yg dapat diakses masyarakat}}{\sum \text{seluruh FKTP}}$	%	75,00	80,00	56.625.131.596,00	84,00	65.861.551.795,79	88,00	72.053.855.673,28	92,00	75.405.413.098,13	96,00	77.897.067.192,31		96,00	77.897.067.192,31
		4 % penduduk miskin yg tercakup dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	$1 \frac{\sum \text{penduduk miskin yg tercakup dlm Program JKN}}{\sum \text{penduduk miskin}}$	%	97,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			100,00	
		5 % rumah sakit & klinik utama yg memiliki ijin	$1 \frac{\sum \text{rumah sakit & klinik utama yg memiliki ijin}}{\sum \text{seluruh rumah sakit & klinik utama}}$	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			100,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab												
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD											
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp										
		6	% penyehat tradisional yg memiliki ijin	1	$\frac{\sum \text{penyehat tradisional yg memiliki ijin}}{\sum \text{seluruh penyehat tradisional}}$	%	6,00	10,00			10,00			15,00			20,00			20,00			20,00					
		7	% capaian SPM	1	$\frac{\sum \text{SPM yg mencapai target}}{\sum \text{seluruh SPM}}$	%	n/a	75,00																				
4	Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Angka Kematian Bayi (AKB)	1	$\frac{\sum \text{bayi lahir meninggal}}{\sum \text{kelahiran hidup} * 1.000}$	per 1000 KH	13,59	13,49			13,39			13,29			13,20			13,10			13,10			Dinkes		
		2	Angka Kematian Ibu (AKI)	1	$\frac{\sum \text{kematian ibu hamil, bersalin, \& nifas tahun bersangkutan}}{\sum \text{kelahiran hidup} * 100.000}$	per 100.000 KH	146,63	136,85	27.491.529.000,00			127,08	29.948.117.000,00			117,30	30.505.117.000,00			107,53	30.680.117.000,00			97,75	30.905.117.000,00			30.905.117.000,00





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		3	% pelayanan kesehatan ibu hamil	1	$\frac{\sum \text{kelahiran hidup} * 100.000 \text{ ibu hamil yg mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah \& swasta}}{\sum \text{kelahiran hidup} * 100.000 \text{ semua bumil pada wilayah kerja tersebut pada periode yg sama}}$	%	85,70	91,00	92,00	93,00	94,00	96,00	96,00	96,00				
		4	% pelayanan kesehatan ibu bersalin	1	$\frac{\sum \text{Ibu bersalin yg mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standart di fasilitas kesehatan}}{\sum \text{semua ibu bersalin yg ada di wilayah kabupaten/kota tersebut dlm kurun waktu satu thn}}$	%	92,00	95,50	96,00	96,50	97,00	97,50	97,50	97,50				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
5	% bayi yg mendapat ASI eksklusif	1	$\frac{\sum \text{bayi usia 0-5 bulan yg hanya mendapat ASI saja}}{\sum \text{seluruh bayi usia 0-5 bulan}} * 100\%$	%	74,80	77,00	79,00	80,00	81,00	82,00	82,00						
6	% balita gizi buruk	1	$\frac{\sum \text{balita yg berstatus gizi buruk tahun ybs}}{\sum \text{balita yg diukur pada periode waktu yg sama}} * 100\%$	%	1,04	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90						
7	% balita stunting (pendek & sangat pendek)	1	$\frac{\sum \text{balita Stunting (pendek & sangat pendek) pada tahun ybs}}{\sum \text{balita yg diukur pada periode waktu yg sama}}$	%	38,30	37,00	36,00	35,00	34,00	33,00	33,00						
8	% desa siaga aktif PURI	1	$\frac{\sum \text{desa siaga aktif PURI}}{\sum \text{seluruh desa}}$	%	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	18,00						
9	% akses jamban	1	$\frac{\sum \text{rumah tangga yg mengakses jamban}}{\sum \text{rumah tangga}}$	%	57,71	60,71	63,71	66,71	69,71	72,71	72,71						





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab			
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
5	Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu & Jaringannya	1	% ketersediaan alat kesehatan di Puskesmas	1	$\frac{\sum \text{alkes di Puskesmas yg tervalidasi}}{\sum \text{alat kesehatan di Puskesmas}}$	%	25,00	50,00										Dinkes	
		2	% puskesmas dgn ketersediaan obat & vaksin esensial	1	$\frac{\sum \text{puskesmas yg memiliki obat \& vaksin esensial}}{\sum \text{seluruh puskesmas yg ada}}$	%	0,00	0,00											
		3	% fasilitas IRTP (Indutri Rumah Tangga Pangan) sesuai standart	1	$\frac{\sum \text{fasilitas IRTP yg mendapatkan SPP-IRT}}{\sum \text{fasilitas IRTP yg mengajukan permohonan}}$	%	0,00	0,00											
6	Pembinaan Lingkungan Sosial	1	% sarana kesehatan yg memanfaatkan dana cukai	1	$\frac{\sum \text{sarana kesehatan yg memanfaatkan dana cukai}}{\sum \text{sarana kesehatan yg ada tahun ybs}}$	%	29,63	30,00										Dinkes	
		2	% pembayaran premi masyarakat miskin	1	$\frac{\sum \text{masyarakat miskin yg preminya terbayarkan}}{\sum \text{masyarakat miskin pada tahun ybs}}$	%	100,00	100,00											

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7	Pencegahan & Penanggula-ngan Penyakit	1 % imunisasi dasar lengkap pada bayi	1 \sum bayi (umur 0-12 bulan) sdh mendapat imunisasi dasar lengkap	%	92,50	93,00		93,50		94,00		94,50		95,00		95,00	Dinkes
		2 % desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>	1 \sum desa/ kelurahan dgn cakupan IDL (bayi) minimal 80%	%	90,41	90,86		91,32		91,32		91,32		91,32			
			\sum desa/ kelurahan														
		3 % pelayanan kesehatan penderita hipertensi	1 \sum penderita hipertensi yg mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	50,00	53,00	1.659.490.000	57,00	1.785.000.000	61,00	1.975.000.000	64,00	2.110.000.000	67,00	2.265.000.000	67,00	2.265.000.000
			\sum penderita hipertensi														
		4 % pelayanan kesehatan orang dgn TB	1 \sum penderita TB yg mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
			\sum penderita TB														
		5 % pelayanan kesehatan orang dgn risiko terinfeksi HIV	1 \sum orang berisiko HIV yg diperiksa	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
			\sum orang berisiko HIV														





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab			
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
		6	angka kesakitan akibat penyakit (HIV, DBD, TB)	$1 \frac{\sum \text{kasus penyakit HIV, DBD, TB}}{\sum \text{penduduk}}$	%	0,21	0,21	0,21		0,22		0,22		0,23		0,23			
		7	angka kematian akibat Penyakit (HIV, DBD, TB)	$1 \frac{\sum \text{kematian akibat penyakit HIV, DBD, TB}}{\sum \text{kasus penyakit HIV, DBD, TB}}$	%	5,42	5,31	5,15		4,71		4,29		3,89		3,89			
8	Pemberdayaan 1 SDM Kesehatan	1	% Puskesmas yg memiliki tenaga strategis	$1 \frac{\sum \text{puskesmas yg memiliki tenaga strategis (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, gizi, kesmas, farmasi, sanitarian, laborat)}}{\sum \text{seluruh puskesmas}}$	%	36,00	48,00	60,00	951.412.000	72,00	1.000.000.000	84,00	1.025.000.000	96,00	1.050.000.000	96,00	1.100.000.000	1.100.000.000	Dinkes
		2	% tenaga kesehatan yg kompeten	$1 \frac{\sum \text{tenaga kesehatan yg memiliki STR}}{\sum \text{seluruh tenaga kesehatan}}$	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
9	Obat & Perbekalan Kesehatan	1	% puskesmas dgn ketersediaan obat & vaksin esensial	$1 \frac{\sum \text{puskesmas yg memiliki obat & vaksin esensial}}{\sum \text{seluruh puskesmas yg ada}}$	%	N/A	96,00		4.712.197.000									Dinkes	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		2	% fasilitas IRTP (Indutri Rumah Tangga Pangan) sesuai standart	$1 \frac{\sum \text{fasilitas IRTP yg mendapatkan SPP-IRT}}{\sum \text{fasilitas IRTP yg mengajukan permohonan}}$	%	N/A	80,00											
10	Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	1	NDR (Net Death Rate)	$1 \frac{\sum \text{pasien mati} > 48 \text{ jam} \times 1000}{\sum \text{pasien keluar (hidup + mati)}}$	permil	2.77	2.5		2.5		2.5		2.5		2.5		RSU dr. H. Koesnadi	
		2	BOR (Bed Occupancy Ratio)	$1 \frac{\sum \text{hari perawatan rumah sakit} \times 100 \%}{(\sum \text{tempat tidur} \times \sum \text{hari dlm satu periode})}$	%	63,38	63,50		64,00		66,00		69,00		72,00		72,00	
		3	% mutu pelayanan keperawatan	$1 \frac{\sum \text{pasien yg mendapatkan perawatan holistik yg disurvei}}{\sum \text{pasien}}$	%	76,00	86,00	89.700.000.000	87,00	98.670.000.000	88,00	108.537.000.000	89,00	119.391.000.000	90,00	131.330.000.000	90,00	131.330.000.000
		4	% mutu unit pelayanan penunjang	$1 \frac{\sum \text{unit pelayanan yg meningkat}}{\sum \text{unit layanan keseluruhan}}$	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		5	% kapasitas aparatur	$1 \frac{\sum \text{aparatur yg terlatih}}{\sum \text{aparatur keseluruhan}}$	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab				
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
		6	% pelayanan administrasi RS	1	$\frac{\sum \text{pengelolaan administrasi terpenuhi}}{\sum \text{pelayanan pengelolaan administrasi}}$	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
		7	ketepatan waktu penyusunan pelaporan keuangan	1	$\frac{\sum \text{dokumen keuangan disusun tepat waktu}}{\sum \text{dokumen keuangan yg disusun}}$	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
		8	ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan & pelaporan	1	$\frac{\sum \text{dokumen perencanaan \& pelaporan disusun tepat waktu}}{\sum \text{dokumen perencanaan \& pelaporan yg disusun}}$	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
		9	% mutu pelayanan medis	1	$\frac{\sum \text{unit pelayanan medik yg meningkat}}{\sum \text{unit layanan keseluruhan}}$	%	N/A	100,00												
11	Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit	1	% peralatan kesehatan sesuai dgn kebutuhan	1	$\frac{\sum \text{peralatan di unit pelayanan}}{\sum \text{peralatan yg sesuai standar}}$	%	0,00	5,59	20.106.140.000	10,25	20.350.121.000	14,91	20.823.139.000	19,57	21.141.066.000	24,23	21.766.495.000	24,23	21.766.495.000	RSU dr. H. Koesnadi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab				
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
		2	% kecukupan gedung pelayanan sesuai dgn standart rumah sakit kelas B	1	$\frac{\sum \text{luas ruang kelas III yg ada (M}^2\text{)}}{\sum \text{standar luas ruang kelas III (M}^2\text{)}}$	%	0,00	18,21		36,42		54,63		69,75		87,87		87,87		
12	Pembinaan Lingkungan Sosial	1	% minimal kunjungan pasien rawat jalan	1	$\frac{\sum \text{kunjungan (baru + lama)}}{\sum \text{target kunjungan}}$	%	0,00	92,50		93,75		95,00		96,25		98,75		98,75		RSU dr. H. Koesnadi
		2	% minimal kunjungan pasien rawat inap	1	$\frac{\sum \text{kunjungan (baru + lama)}}{\sum \text{target kunjungan}}$	%	0,00	92,31	1.600.000.000	95,00	1.600.000.000	95,77	1.600.000.000	96,15	1.600.000.000	98,08	1.600.000.000	98,08	1.600.000.000	
		3	% minimal kunjungan pasien di poliklinik jantung & paru	1	$\frac{\text{total kunjungan (baru + lama)}}{\sum \text{target kunjungan}}$	%	N/A	89,47												





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
3 Pekerjaan Umum & Penataan Ruang																		
1	Pelayanan Administrasi & Sarana Prasarana Perkantoran	1 % ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	$\frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap layanan administrasi perkantoran}}{\sum \text{ASN}}$	%	100,00	100,00	5.182.650.000	100,00	5.279.280.000	100,00	5.415.612.000	100,00	5.558.672.000	100,00	5.780.361.000	100,00	5.780.361.000	Dinas PU & PR
		2 % sarana & prasarana aparatur yg layak fungsi	$\frac{\sum \text{sarana \& prasarana yg layak fungsi}}{\sum \text{sarana \& prasarana yg ada}}$	%	100,00	100,00	5.182.650.000	100,00	5.279.280.000	100,00	5.415.612.000	100,00	5.558.672.000	100,00	5.780.361.000	100,00	5.780.361.000	Dinas PU & PR
2	Perencanaan & 1 Pelaporan	1 % dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg sesuai pedoman yg disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{dokumen penyelenggaraan yg sesuai pedoman (Perencanaan \& Pelaporan)}}{\sum \text{dokumen yg wajib disusun}}$	%	100,00	100,00	200.000.000	100,00	198.282.000	100,00	198.738.000	100,00	197.641.000	100,00	199.322.000	100,00	199.322.000	Dinas PU & PR
		2 % laporan keuangan yg disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{laporan keuangan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{laporan keuangan yg wajib disusun tiap thn}}$	%	100,00	100,00	200.000.000	100,00	198.282.000	100,00	198.738.000	100,00	197.641.000	100,00	199.322.000	100,00	199.322.000	Dinas PU & PR
3	Perencanaan Teknis Infrastruktur Pekerjaan Umum	1 % dokumen perencanaan umum infrastruktur jalan & jembatan	$\frac{\sum \text{dokumen yg direncanakan}}{\sum \text{kebutuhan dokumen}}$	%	50,00	13,33	2.647.140.000	26,67	2.701.603.000	46,67	2.782.333.000	66,67	2.874.910.000	86,67	2.959.943.000	86,67	2.959.943.000	Dinas PU & PR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab			
						2019		2020		2021		2022		2023						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		2	% dokumen perencanaan umum infrastruktur sumber daya air	1	\sum dokumen yg direncanakan \sum kebutuhan dokumen	%	55,56	13,33		26,67		46,67		66,67		86,67		86,67		
		3	% perencanaan teknis infrastruktur gedung & air bersih	1	\sum dokumen yg direncanakan \sum kebutuhan dokumen	%	33,33	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
4	Operasi & Pemeliharaan	1	% intensitas tanam	1	intensitas tanam s.d thn ybs intensitas tanam yg diinginkan	%	94,35	95,42		95,82		96,22		96,62		97,02		97,02	Dinas PU & PR	
		2	% kinerja pelayanan rutin jalan	2	rerata dari (% jalan yg rutin dipelihara + % jembatan yg rutin dipelihara + % drainase yg rutin dipelihara)	%	5,80	17,66	21.564.040.000	18,30	21.882.492.000	19,18	22.606.456.000	20,07	23.222.899.000	20,96	24.118.059.000	20,96	24.118.059.000	Dinas PU & PR
5	Kemitraan & Jasa Konstruksi	1	% peran HIPPA	1	\sum HIPPA/GHIPPA yg melaksanakan konstruksi s.d thn berjalan \sum HIPPA/GHIPPA seluruhnya	%	23,97	24,79	2.550.000.000	25,62	2.603.949.000	28,51	2.687.932.000	28,51	2.752.160.000	29,75	2.858.787.000	29,75	2.858.787.000	Dinas PU & PR
		2	% status HIPPA/GHIPPA	2	\sum HIPPA yg berbadan hukum s.d thn berjalan \sum HIPPA/GHIPPA seluruhnya	%	62,81	68,18	2.550.000.000	68,18	2.603.949.000	68,60	2.687.932.000	69,01	2.752.160.000	69,01	2.858.787.000	69,01	2.858.787.000	Dinas PU & PR





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		3	% kapasitas penyedia jasa konstruksi	$3 \frac{\sum \text{penyedia jasa yg memiliki sertifikasi}}{\sum \text{penyedia jasa seluruhnya}}$	%	15,87	23,39		24,85	24,85	26,02	26,90	26,90					
6	Pembangunan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan & Jembatan	1	% panjang jalan yg dibangun	$1 \frac{\text{panjang jln baru s.d thn ybs}}{\text{panjang jln kab secara keseluruhan}}$	%	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Dinas PU & PR			
		2	% jalan yg ditingkatkan	$1 \frac{\text{panjang jln yg telah ditingkatkan s.d thn ybs}}{\text{panjang jln kab secara keseluruhan}}$	%	10,93	14,76	16,56	18,35	20,14	21,57	21,57	21,57					
		3	% rehabilitasi/ pemeliharaan kondisi jalan	$1 \frac{\text{panjang jln yg telah di rehabilitasi/ pelihara s.d thn ybs}}{\text{panjang jln kab secara keseluruhan}}$	%	11,92	19,21	21,72	24,22	26,73	28,88	28,88	28,88					
7	Pembangunan, Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi	1	% kondisi bendung yg baik s.d thn ybs	$1 \frac{\sum \text{kondisi bendung yg baik s.d thn ybs}}{\sum \text{bendung di thn dsr}}$	%	89,73	90,64	91,10	91,55	92,01	92,47	92,47	92,47		Dinas PU & PR			
		2	% panjang kondisi saluran irigasi yg baik s.d thn ybs	$2 \frac{\sum \text{panjang saluran yg baik s.d thn ybs}}{\sum \text{panjang saluran di thn dsr}}$	%	67,77	71,76	75,47	79,29	83,22	87,29	87,29	87,29					

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab						
						2019		2020		2021		2022		2023									
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp				
		3	% kondisi bangunan pelengkap baik s.d thn ybs	3	\sum kondisi bangunan pelengkap baik s.d thn ybs	%	68,90	70,00		70,92		71,83		72,75		73,67		73,67					
					\sum bangunan pelengkap di thn dsr																		
8	Peningkatan & Pemeliharaan Bangunan Penyediaan Air Baku	1	% waduk lapangan yg baik	1	\sum waduk lapangan yg baik s.d thn ybs	%	57,89	68,42		73,68		73,68		78,95		78,95		78,95				Dinas PU & PR	
		2	% saluran waduk yg baik	2	\sum sal waduk yg baik s.d thn ybs	%	11,67	18,33	2.000.000.000	21,67	2.181.111.000	25,00	2.484.226.000	28,33	2.717.573.000	31,67	3.089.503.000	31,67	3.089.503.000				
					\sum sal waduk yg ada s.d thn ybs																		
		3	% volume waduk lapangan yg baik	3	\sum vol waduk lapangan yg baik s.d thn ybs	%	50,40	52,88		53,28		53,68		54,08		54,48		54,48					
					\sum vol tampungan waduk yg ada s.d thn ybs																		
9	Perencanaan, Pemanfaatan & Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	1	RTH per satuan luas wilayah ber-HPL HGB	1	\sum luas ruang terbuka hijau	%	13,32	13,32	1.856.051.000	13,36	1.716.025.000	13,40	1.719.781.000	13,44	1.710.294.000	13,48	1.724.841.000	13,48	1.724.841.000				Dinas PU & PR
					\sum luas wilayah ber-HPL/HGB																		





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
10	Pengelolaan Keciptakarya	1 % layanan air minum	1 $\frac{\sum \text{cakupan layanan air minum s.d thn berjln}}{\sum \text{cakupan layanan air minum yg ditargetkan s.d thn 2023}}$	%	57,38	70,08	31.474.248.000	73,43	32.456.430.000	77,00	34.244.608.000	80,27	35.917.527.000	83,74	38.275.136.000	83,74	38.275.136.000	Dinas PU & PR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4 Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman																	
1	Pelayanan Administrasi & Sarana Prasarana Perkantoran	1 % ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	$\frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap layanan administrasi perkantoran}}{\sum \text{ASN}}$	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perumahan & KP		
		2 % sarana & prasarana aparatur yg layak fungsi	$\frac{\sum \text{sarana \& prasarana yg layak fungsi}}{\sum \text{sarana \& prasarana yg ada}}$	%	100,00	100,00	963.147.000	100,00	1.054.018.000	100,00	1.155.808.000	100,00	1.248.252.000	100,00		1.358.531.000	1.358.531.000
2	Perencanaan & 1 Pelaporan	1 % dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg sesuai pedoman yg disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{dokumen penyelenggaraan yg sesuai pedoman (Perencanaan \& Pelaporan)}}{\sum \text{dokumen yg wajib disusun}}$	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perumahan & KP		
		2 % laporan keuangan yg disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{laporan keuangan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{laporan keuangan yg wajib disusun tiap thn}}$	%	100,00	100,00	95.800.000	100,00	94.977.000	100,00	95.195.000	100,00	94.670.000	100,00		95.475.000	95.475.000





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
3	Lingkungan Sehat Perumahan	1 % lingkungan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	1 $\frac{\% \text{ luasan permukiman kumuh yg tertangani}}{\text{luas permukiman kumuh di perkotaan}}$	%	0,00	55,65	9.069.713.101,38	71,56	9.660.096.000,00	87,47	10.359.661.000,00	98,08	11.004.925.000,00	100,00	11.859.681.000,00	100,00	11.859.681.000,00	Dinas Perumahan & KP
4	Pengembangan Perumahan	1 % layanan rumah layak huni yg terjangkau	1 $\frac{\sum \text{RTLH yg ditangani}}{\sum \text{RTLH}}$	%	4,59	5,96	6.419.750.000	7,23	31.398.399.000	8,49	34.491.925.000	9,76	37.756.262.000	11,02	41.873.357.000	11,02	41.873.357.000	Dinas Perumahan & KP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat																	
1	Pelayanan Administrasi & Sarana Prasarana Perkantoran	1	% ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	$\frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap layanan administrasi perkantoran}}{\sum \text{ASN}}$	%	100,00	100,00	464.558.000	100,00	460.569.000	100,00	461.626.000	100,00	459.080.000	100,00	462.985.000	Bakesbang
		2	% sarana & prasarana aparatur yg layak fungsi	$\frac{\sum \text{sarana \& prasarana yg layak fungsi}}{\sum \text{sarana \& prasarana yg ada}}$	%	100,00	100,00	464.558.000	100,00	460.569.000	100,00	461.626.000	100,00	459.080.000	100,00	462.985.000	
2	Perencanaan & 1 Pelaporan	1	% dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg sesuai pedoman yg disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{dokumen penyelenggaraan yg sesuai pedoman (Perencanaan \& Pelaporan)}}{\sum \text{dokumen yg wajib disusun}}$	%	100,00	100,00	30.000.000	100,00	38.105.000	100,00	31.027.000	100,00	36.802.000	100,00	45.982.000	Bakesbang
		2	% laporan keuangan yg disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{laporan keuangan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{laporan keuangan yg wajib disusun tiap thn}}$	%	100,00	100,00	30.000.000	100,00	38.105.000	100,00	31.027.000	100,00	36.802.000	100,00	45.982.000	
3	Peningkatan Integrasi Bangsa	1	% tingkat kesadaran wawasan kebangsaan	$\frac{\sum \text{masyarakat yg dibina thn (N)}}{\sum \text{masyarakat yg seharusnya dibina}}$	%	1,35	2,21		3,30	1.045.941.000	4,39	1.127.838.000	5,47	1.200.673.000	6,56	1.290.615.000	Bakesbang





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
4	Hubungan Antar Lembaga & Politik Dalam Negeri	1	tingkat partisipasi pemilu	$\frac{\sum \text{kehadiran pemilih}}{\sum \text{daftar pemilih tetap}}$	%	79,32	79,32										Bakesbang	
		2	% masyarakat yg dibina pemahaman politik demokratis	$\frac{\sum \text{masyarakat yg dibina pemahaman politik demokratis thn (N)}}{\sum \text{masyarakat yg seharusnya dibina}}$	%	0,00	13,81	15,92	823.528.000	16,44	856.084.000	17,23	861.243.000	18,28	878.535.000	18,28		878.535.000
5	Stabilisasi Keamanan & Kenyamanan Wilayah	1	% personil pemantau & pengamanan wilayah	$\frac{\sum \text{personil pemantau \& pengamanan thn (N)}}{\sum \text{kebutuhan personil pemantau \& pengamanan thn (N)}}$	%	100,00	75,00	100,00	712.537.000	100,00	703.809.000	100,00	699.926.000	100,00	705.879.000	100,00	705.879.000	Bakesbang
1	Pengembangan Wawasan Kebangsaan		% masyarakat yg dibina wawasan kebangsaan	$\frac{\text{masyarakat yg dibina thn (N)}}{\text{masyarakat yg seharusnya dibina}}$	%		30		975.000.000								Bakesbang	
2	Pendidikan Politik Masyarakat		% masyarakat yg dibina pemahaman politik demokratis	$\frac{\text{masyarakat yg dibina thn (N)}}{\text{masyarakat yg seharusnya dibina}}$	%		20		839.020.000								Bakesbang	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	Pelayanan Administrasi & Sarana Prasarana Perkantoran	1	% ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	$\frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap layanan administrasi perkantoran}}{\sum \text{ASN}}$	%	100,00	100,00	1.890.882.500	100,00	1.959.006.000	100,00	2.051.862.000	100,00	2.132.367.000	100,00	2.247.277.000	Satpol PP
		2	% sarana & prasarana aparatur yg layak fungsi	$\frac{\sum \text{sarana \& prasarana yg layak fungsi}}{\sum \text{sarana \& prasarana yg ada}}$	%	100,00	100,00	1.890.882.500	100,00	1.959.006.000	100,00	2.051.862.000	100,00	2.132.367.000	100,00	2.247.277.000	
2	Perencanaan & Pelaporan	1	% dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg sesuai pedoman yg disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{dokumen penyelenggaraan yg sesuai pedoman (Perencanaan \& Pelaporan)}}{\sum \text{dokumen yg wajib disusun}}$	%	100,00	100,00	50.000.000	100,00	51.801.000	100,00	54.256.000	100,00	56.385.000	100,00	59.424.000	Satpol PP
		2	% laporan keuangan yg disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{laporan keuangan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{laporan keuangan yg wajib disusun tiap thn}}$	%	100,00	100,00	50.000.000	100,00	51.801.000	100,00	54.256.000	100,00	56.385.000	100,00	59.424.000	
3	Penegakan Peraturan Daerah	1	% pengawasan & penegakan Peraturan Daerah & Peraturan Kepala Daerah	$\frac{\sum \text{Perda \& Perkada yg dilanggar}}{\sum \text{Perda \& Perkada yg dipantau}}$	%	72,00	39,30	176.020.000	39,30	177.126.000	35,71	180.195.000	35,71	181.889.000	32,14	186.188.000	Satpol PP





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab					
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp			
4	Ketertiban Umum & Ketenteraman Masyarakat	1	% jangkauan patroli siaga ketertiban umum & ketenteraman masyarakat	$1 \frac{\sum \text{kelompok patroli X 3 kali patroli dlm sehari}}{\sum \text{kecamatan}}$	%	39,13	39,13	1.993.619.000	39,13	39,13	2.097.919.000	52,17	52,17	2.147.049.000	52,17	52,17	2.228.340.000	Satpol PP			
		2	% pelanggaran penyakit masyarakat (Pekat) yg tertangani	$1 \frac{\sum \text{pelanggaran pekat yg tertangani}}{\sum \text{pelanggaran pekat}}$	%	42,40	70,66	1.993.619.000	69,33	68,00	2.097.919.000	66,66	65,33	2.147.049.000	65,33	65,33	2.228.340.000				
5	Perlindungan Masyarakat & Pemadam Kebakaran	1	% petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	$\frac{\sum \text{petugas Linmas}}{\sum \text{RT}}$	%	1,33	1,33		1,33	1,33		1,53	1,53		1,53	1,53		Satpol PP			
		2	% pelayanan bencana kebakaran	$\frac{\sum \text{kasus kebakaran di WMK yg tertangani}}{\sum \text{kasus kebakaran di WMK}}$	%	124,00	100,00	906.563.400	100,00	100,00	857.306.000	100,00	100,00	1.640.969.000	100,00	100,00	1.968.360.000		100,00	100,00	1.968.360.000
		3	% penyelamatan & evakuasi jumlah korban kebakaran	$\frac{\sum \text{korban kebakaran yg tertangani}}{\sum \text{korban kebakaran}}$	%	N/A	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	Pelayanan Administrasi & Sarana Prasarana Perkantoran	1 % ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	$1 \frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap layanan administrasi perkantoran}}{\sum \text{ASN}}$	%	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BPBD		
		2 % sarana & prasarana aparatur yg layak fungsi	$2 \frac{\sum \text{sarana \& prasarana yg layak fungsi}}{\sum \text{sarana \& prasarana yg ada}}$	%	100,00	100,00	1.700.800.000	100,00	1.410.000.000	100,00	960.500.000	100,00	965.750.000	100,00		976.000.000	976.000.000
		3 % laporan keuangan yg disusun tepat waktu	$3 \frac{\sum \text{laporan keuangan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{laporan keuangan yg wajib disusun tiap thn}}$	%	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
2	Perencanaan & Pelaporan	1 % dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg sesuai pedoman yg disusun tepat waktu	$1 \frac{\sum \text{dokumen penyelenggaraan yg sesuai pedoman (Perencanaan \& Pelaporan)}}{\sum \text{dokumen yg wajib disusun}}$	%	100,00	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	60.000.000	100,00	70.000.000	100,00	80.000.000	BPBD	
		2 % laporan keuangan yg disusun tepat waktu	$2 \frac{\sum \text{laporan keuangan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{laporan keuangan yg wajib disusun tiap thn}}$	%	100,00	100,00	50.000.000	-	50.000.000	-	60.000.000	-	70.000.000	-	80.000.000		80.000.000





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab						
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp				
3	Mitigasi Bencana	1 % penduduk yg memahami mitigasi bencana	1 $\frac{\sum \text{penduduk yg dilatih}}{\sum \text{penduduk Kab Bondowoso}}$	%	0,44	0,88													BPBD			
							1 % penduduk desa/kelurahan yg memahami mitigasi bencana	1 $\frac{\sum \text{penduduk desa/kelurahan yg dilatih}}{\sum \text{penduduk desa/kelurahan yg ditargetkan}}$	%													
										66,40	1.243.271.000	77,60	1.501.932.000	88,80	1.651.867.000	100,00	1.736.239.000	100,00		1.736.239.000		
2	% mitigasi struktural yg tertangani	2 $\frac{\sum \text{mitigasi struktural yg dilaksanakan}}{\sum \text{mitigasi struktural yg diperlukan}}$	%	4,00	8,00	12,00	1.243.271.000	16,00	1.501.932.000	20,00	1.651.867.000	24,00	1.736.239.000	24,00	1.736.239.000							
4	Tanggap Darurat Bencana	1 % bencana yang tertangani	1 $\frac{\sum \text{kejadian bencana yg tertangani}}{\sum \text{kejadian bencana}}$	%	100,00	100,00	1.197.291.944	100,00	1.247.500.000	100,00	1.550.000.000	100,00	1.485.000.000	100,00	1.543.955.000	100,00	1.543.955.000	BPBD				
5	Rehabilitasi & Rekonstruksi	1 % kerusakan pasca bencana yg di rehabilitasi & rekonstruksi	1 $\frac{\sum \text{kerusakan pasca bencana yg di rehabilitasi \& rekonstruksi}}{\sum \text{kerusakan pasca bencana yg terjadi}}$	%	100,00	100,00	20.000.000	100,00	40.000.000	100,00	47.500.000	100,00	47.500.000	100,00	47.500.000	100,00	47.500.000	BPBD				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
6	Sosial																
1	Pelayanan Administrasi & Sarana Prasarana Perkantoran	1 % ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	$\frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap layanan administrasi perkantoran}}{\sum \text{ASN}}$	%	100,00	96,92		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinsos	
		2 % sarana & prasarana aparatur yg layak fungsi	$\frac{\sum \text{sarana \& prasarana yg ada}}{\sum \text{sarana \& prasarana yg layak fungsi}}$	%	100,00	51,55	1.351.461.000	100,00	1.235.136.000	100,00	1.243.810.000	100,00	1.242.928.000	100,00	1.259.714.000	1.259.714.000	
2	Perencanaan & 1 Pelaporan	% dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg sesuai pedoman yg disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{dokumen penyelenggaraan yg sesuai pedoman (Perencanaan \& Pelaporan)}}{\sum \text{dokumen yg wajib disusun}}$	%	100,00	5,33		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinsos	
		2 % laporan keuangan yg disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{laporan keuangan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{laporan keuangan yg wajib disusun tiap thn}}$	%	100,00	100	50.000.000	100,00	49.570.000	100,00	49.684.000	100,00	49.410.000	100,00	49.830.000	49.830.000	





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab						
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp				
3	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1	% lembaga kesejahteraan sosial yg dibantu & difasilitasi	1	$\frac{\sum \text{lembaga kesejahteraan sosial yg dibantu \& difasilitasi}}{\sum \text{lembaga kesejahteraan sosial yg ada}}$	%	1,64	69,03	940.855.000												Dinsos	
		2	% peran serta masyarakat (PSKS) dlm penanganan PMKS	1	$\frac{\sum \text{PSKS (masy) yg berperan dlm penanganan PMKS}}{\sum \text{masyarakat yg berperan dlm penanganan PMKS}}$	%	5,33	80,55														
4	Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT & PMKS Lainnya	1	% masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial yg ditangani	1	$\frac{\sum \text{PMKS yg ditangani (thn N-1 s.d thn N)}}{\sum \text{PMKS yg ada}}$	%	3,99	5,32	1.396.090.000	6,90	1.035.440.000	12,81	1.071.933.000	19,00	1.100.965.000	25,30	1.146.629.000	25,30	1.146.629.000			Dinsos

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
5	Pelayanan & Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1 % penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan & pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	1 \sum penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan & pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (thn N-1 s.d thn N)	%	35,70	36,20	625.905.000	38,40	1.168.821.000	52,56	1.206.649.000	66,68	1.235.991.000	81,00	1.283.899.000	81,00	1.283.899.000	Dinsos
			\sum populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan & pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti															
6	Pembinaan Para Penyandang Cacat & Eks Trauma	1 % penyandang cacat & eks trauma yg diberi pelatihan & UEP	1 \sum penyandang cacat & eks trauma yg diberi pelatihan & UEP	%	2,45	5,33	300.000.000											Dinsos
			\sum penyandang cacat & eks trauma															





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
7	Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	1 % eks penyandang penyakit sosial yg diberi pelatihan & UEP	1 $\frac{\sum \text{eks penyandang penyakit sosial yg diberi pelatihan \& UEP}}{\sum \text{eks penyandang penyakit sosial}}$	%	100,00	100,00	200.000.000										Dinsos	
8	Perlindungan Jaminan Sosial korban bencana alam & bencana Sosial	1 % korban bencana alam & sosial yg terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat & setelah tanggap darurat bencana	1 $\frac{\sum \text{korban bencana alam \& sosial yg terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\sum \text{populasi korban bencana alam \& sosial yg membutuhkan perlindungan \& jaminan sosial pada saat \& setelah tanggap darurat bencana}}$	%	100,00	100,00	1.448.510.000	100,00	1.495.392.000	100,00	1.531.757.000	100,00	1.591.129.000	100,00	1.591.129.000		Dinsos	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Urusan Wajib yg Tidak Berkaitan dgn Layanan Dasar																	
7 Tenaga Kerja																	
1	Peningkatan Kesempatan Kerja	1 % tenaga kerja formal	1 $\frac{\sum \text{tenaga kerja di bidang formal}}{\sum \text{tenaga kerja di bidang formal \& informal}}$	%	N/A	37,98		38,00		38,01		38,03		38,06		38,06	DPM, PTSP & TK
		2 % pencari kerja terdaftar yg ditempatkan:															
-	penempatan TK AKL	1 $\frac{\sum \text{penempatan tenaga kerja AKL}}{\sum \text{pencari kerja terdaftar}}$	%	54,11	54,24		54,37		54,48		54,64		54,76		54,76		
-	penempatan TK AKAD	1 $\frac{\sum \text{penempatan tenaga kerja AKAD}}{\sum \text{pencari kerja terdaftar}}$	%	2,72	2,76	898.132.500	2,78	2.510.109.500	2,79	2.596.996.500	2,80	2.627.880.500	2,84	2.781.093.500	2,84	2.781.093.500	
-	penempatan TK AKAN	1 $\frac{\sum \text{penempatan tenaga kerja AKAN}}{\sum \text{pencari kerja terdaftar}}$	%	9,98	9,99		10,03		10,04		10,08		10,09		10,09		
		3 % pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	$\frac{\sum \text{pencari kerja yg dilatih}}{\sum \text{pencari kerja terdaftar}}$	%	N/A		18,52		19,60		21,28		22,04		22,04		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab			
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
3	Pembinaan Lingkungan Sosial	1	% tenaga kerja yg mendapatkan pelatihan kewirausahaan	$1 \frac{\sum \text{tenaga kerja yg dilatih}}{\sum \text{pendaftar pelatihan kewirausahaan}}$	%	93,70	93,90	3.724.597.500	74,17	2.624.597.500	76,50	3.124.597.500	78,51	4.624.597.500	81,45	5.124.597.500	81,45	5.124.597.500	DPM, PTSP & TK
		2	% tenaga kerja yg mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	$1 \frac{\sum \text{tenaga kerja yg dilatih}}{\sum \text{pendaftar pelatihan berbasis kompetensi}}$	%	73,85	74,07												
		3	% peserta pelatihan yg bekerja	$\frac{\sum \text{peserta pelatihan yg bekerja}}{\sum \text{peserta pelatihan}}$															





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
8 Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak																		
1	Pelayanan Administrasi & Sarana Prasarana Perkantoran	1 % ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	$\frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap layanan administrasi perkantoran}}{\sum \text{ASN}}$	%	100,00	100,00	471.700.000	100,00	481.679.000	100,00	497.288.000	100,00	509.362.000	100,00	529.102.000	100,00	529.102.000	DPPKB
		2 % sarana & prasarana aparatur yg layak fungsi	$\frac{\sum \text{sarana \& prasarana yg layak fungsi}}{\sum \text{sarana \& prasarana yg ada}}$	%	100,00	100,00	471.700.000	100,00	481.679.000	100,00	497.288.000	100,00	509.362.000	100,00	529.102.000	100,00	529.102.000	DPPKB
2	Perencanaan & 1 Pelaporan	1 % dokumen penyelengga- raan pemerintahan yg sesuai pedoman yg disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{dokumen penyelenggaraan yg sesuai pedoman (Perencanaan \& Pelaporan)}}{\sum \text{dokumen yg wajib disusun}}$	%	100,00	100,00	34.950.000	100,00	35.690.000	100,00	36.644.000	100,00	37.739.000	100,00	39.206.000	100,00	39.206.000	DPPKB
		2 % laporan keuangan yg disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{laporan keuangan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{laporan keuangan yg wajib disusun tiap thn}}$	%	100,00	100,00	34.950.000	100,00	35.690.000	100,00	36.644.000	100,00	37.739.000	100,00	39.206.000	100,00	39.206.000	DPPKB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
3	Pengarus-utamaan Gender & Pemenuhan Hak Anak	1	partisipasi angkatan kerja perempuan	$\frac{\sum \text{partisipasi angkatan kerja perempuan}}{\sum \text{angkatan kerja perempuan}}$	%	65,00	65,36		65,90		66,35		66,85		67,00		67,00	DPPKB
		2	% forum anak yg aktif	$\frac{\sum \text{forum anak yg aktif}}{\sum \text{total forum anak}}$	%	70,00	73,00	1.287.322.000	75,00	1.204.987.160	78,00	1.251.208.898	80,00	1.189.685.477	82,00	1.479.745.029	82,00	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab				
						2019		2020		2021		2022		2023							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
		2	% Penanganan Daerah Rawan Pangan	$\frac{\sum \text{desa yg diintervensi}}{\sum \text{desa}}$	%	2,28	9,13		11,42		13,70		16		18,26		18,26				
4	Peningkatan Diversifikasi Pangan	1	nilai Pola Pangan Harapan (PPH)	1 nilai skor (PPH) thn (N)	skor				80,00		80,25		80,50		80,75		80,75		DKPP		
		2	Angka Kecukupan Protein (AKP)	1 tingkat kecukupan protein konsumsi masy thn (N)	gr/kapita/hari				61,30	364.394.000	62,28	884.559.000	63,25	1.079.995.000	64,21	1.291.281.000	64,21	1.291.281.000			
		3	Angka Kecukupan Energi (AKE)	1 tingkat kecukupan energi konsumsi masy thn (N)	kkal/kapita/hari				2,107		2,129		2,150		2,159		2,159				
5	Peningkatan Penganeka-ragaman Pangan	1	Angka Kecukupan Gizi	1 tingkat kecukupan gizi konsumsi masy thn (N)	kkal/kapita/hari	2.026	2.026												DKPP		
		2	nilai Pola Pangan Harapan (PPH)	1 nilai skor Pola Pangan Harapan (PPH) thn (N)	skor	74,5	77,5		365.000.000												
6	Pembinaan Lingkungan Sosial	1	% peningkatan SDM kelompok pangan olahan yg terlatih	$\frac{\sum \text{kelompok wanita yg ikut pelatihan thn (N)}}{\sum \text{total kelompok wanita}}$	%	0,00	10,00		210.000.000		15,00	208.196.000	20,00	208.674.000	20,00	207.523.000	25,00	209.288.000	25,00	209.288.000	DKPP





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
10 Pertanahan																		
1	Penyuluhan tentang Peraturan & Pemanfaatan Tanah	1 % luas lahan bersertifikat	1 $\frac{\sum \text{kecamatan yg telah dilakukan penyuluhan}}{\sum \text{kecamatan}}$	%	0,00	26,09	100.000.000	39,13	123.926.000	52,17	149.053.000	65,22	172.936.000	78,26	199.322.000	78,26	199.322.000	Dinas Perumahan & KP
2	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan & Pemanfaatan Tanah	1 % penyelesaian izin lokasi/membuka lahan	1 $\frac{\sum \text{izin lokasi/membuka lahan yg terbit}}{\sum \text{izin lokasi/membuka lahan yg dimohon}}$	%	N/A	100,00	20.000.000										DPM, PTSP & TK	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
11 Lingkungan Hidup																	
1	Pelayanan Administrasi & Sarana Prasarana Perkantoran	1 % ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	$1 \frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap layanan administrasi perkantoran}}{\sum \text{ASN}}$	%	100,00	100,00	19.016.610.000	100,00	19.349.042.000	100,00	19.492.837.000	100,00	19.582.942.000	100,00	20.570.605.000	Dinas LH & Perhubungan	
		2 % sarana & prasarana aparatur yg layak fungsi	$2 \frac{\sum \text{sarana \& prasarana yg layak fungsi}}{\sum \text{sarana \& prasarana yg ada}}$	%	100,00	100,00	19.016.610.000	100,00	19.349.042.000	100,00	19.492.837.000	100,00	19.582.942.000	20.570.605.000	20.570.605.000	Dinas LH & Perhubungan	
2	Perencanaan & Pelaporan	1 % dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg sesuai pedoman yg disusun tepat waktu	$1 \frac{\sum \text{sarana \& prasarana yg layak fungsi}}{\sum \text{sarana \& prasarana yg ada}}$	%	100,00	100,00	226.975.000	100,00	225.026.000	100,00	225.542.000	100,00	224.298.000	226.206.000	226.206.000	Dinas LH & Perhubungan	
		2 % laporan keuangan yg disusun tepat waktu	$2 \frac{\sum \text{laporan keuangan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{laporan keuangan yg wajib disusun tiap thn}}$	%	100,00	100,00	226.975.000	100,00	225.026.000	100,00	225.542.000	100,00	224.298.000	226.206.000	226.206.000	Dinas LH & Perhubungan	
3	Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup	1 % kawasan yang dipantau & dikendalikan	$1 \frac{\sum \text{kawasan yg ditangani}}{\sum \text{seluruh kawasan yg ditetapkan}}$	%		11,11	995.800.000								Dinas LH & Perhubungan		





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
4	Perlindungan Konservasi Sumber daya Alam & Peningkatan Akses Informasi	1 % kelompok sasaran Peduli lingkungan	\sum komulatif kelompok sasaran yg dibina \sum kelompok sasaran yg ada	%	18,00	17,67	497.000.000										Dinas LH & Perhubungan	
5	Pengendalian Pencemaran, Konservasi Sumber Daya Alam & Pemberdayaan Masyarakat	1 % kawasan yang dipantau & dikendalikan	1 \sum kawasan yg ditangani \sum seluruh kawasan yg ditetapkan	%				11,11		11,11		11,11		11,11		11,11	Dinas LH & Perhubungan	
		2 % kelompok sasaran Peduli lingkungan	\sum kelompok sasaran yg dibina \sum kelompok sasaran yg ada	%	18,00		1.607.242.000	12,53	13,42	1.572.179.000	14,03	1.761.147.000	16,78	1.875.789.000	16,78	1.875.789.000		
6	Pengendalian Dampak Lingkungan & Penegakan Hukum Lingkungan	1 % pengaduan masyarakat yg ditangani	1 \sum pengaduan yg ditangani \sum perkiraan pengaduan per tahun	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas LH & Perhubungan	
		2 % perusahaan yg tertib terhadap dokumen lingkungan	2 \sum kumulatif usaha yg memiliki dok. lingkungan s.d thn berjalan \sum usaha yg di target memiliki dok. lingkungan s.d akhir RPJMD	%	215,00	20,00	338.050.000	40,00	60,00	335.147.000	80,00	450.178.000	100,00	454.007.000	100,00	454.007.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
7	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1 rasio Ruang Terbuka Hijau	$1 \frac{\sum \text{RTH yg terpelihara}}{\sum \text{RTH taman yg ada}}$	%	78,13	78,13		81,25		84,38		87,50		90,63		90,63	Dinas LH & Perhubungan	
		2 % penerangan jalan umum	$2 \frac{\sum \text{komulatif titik PJU s.d. thn bersangkutan}}{\sum \text{kebutuhan titik PJU jalan/kawasan utama}}$	%	88,04	74,47	3.907.566.000	76,21	13.874.016.000	77,95	3.783.541.000	79,69	4.131.284.000	81,43	4.166.424.000	81,43		4.166.424.000
8	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1 % sampah tertangani	$1 \frac{\text{volume sampah yg tertangani}}{\text{volume produksi sampah kawasan pelayanan}}$	%	68,28	70,06	3.900.491.000	76,64	4.263.567.000	83,83	5.266.983.000	91,70	5.237.926.000	95,75	5.382.141.000	95,75	5.382.141.000	Dinas LH & Perhubungan
		2 rasio tempat pembuangan per satuan penduduk	$2 \frac{\sum \text{daya tampung TPS}}{\sum \text{penduduk yg terlayani per 1000}}$		1,42	1,46	3.900.491.000	1,53	4.263.567.000	1,65	5.266.983.000	1,69	5.237.926.000	1,68	5.382.141.000	1,68	5.382.141.000	





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
12 Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil																	
1	Pelayanan Administrasi & Sarana Prasarana Perkantoran	1 % ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	$\frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap layanan administrasi perkantoran}}{\sum \text{ASN}}$	%	100,00	100,00	683.255.000	100,00	697.709.000	100,00	720.290.000	100,00	737.805.000	100,00	766.403.000	766.403.000	Dispenduk-capil
		2 % sarana & prasarana aparatur yg layak fungsi	$\frac{\sum \text{sarana \& prasarana yg layak fungsi}}{\sum \text{sarana \& prasarana yg ada}}$	%	100,00	100,00	683.255.000	100,00	697.709.000	100,00	720.290.000	100,00	737.805.000	100,00	766.403.000	766.403.000	Dispenduk-capil
2	Perencanaan & 1 Pelaporan	1 % dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg sesuai pedoman yg disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{dokumen penyelenggaraan yg sesuai pedoman (Perencanaan \& Pelaporan)}}{\sum \text{dokumen yg wajib disusun}}$	%	100,00	100,00	46.100.000	100,00	47.075.000	100,00	48.598.000	100,00	49.780.000	100,00	51.709.000	51.709.000	Dispenduk-capil
		2 % laporan keuangan yg disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{laporan keuangan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{laporan keuangan yg wajib disusun tiap thn}}$	%	100,00	100,00	46.100.000	100,00	47.075.000	100,00	48.598.000	100,00	49.780.000	100,00	51.709.000	51.709.000	Dispenduk-capil

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab				
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
3	Penataan Administrasi Kependudukan	1	% penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	1	$\frac{\sum \text{penduduk ber-KTP elektronik}}{\sum \text{penduduk wajib KTP elektronik}}$	%	94,50	98,18	4.407.103.000	98,28	4.667.152.000	98,37	5.003.788.000	98,48	5.330.331.000	98,58	5.766.272.000	Dispenduk-capil		
		2	% penerbitan KK	1	$\frac{\sum \text{KK yg diterbitkan}}{\sum \text{pemohon KK}}$	%	100,00	100,00	4.407.103.000	100,00	4.667.152.000	100,00	5.003.788.000	100,00	5.330.331.000	100,00	5.766.272.000			
4	Pencatatan Sipil	1	% penerbitan Akta Kelahiran	1	$\frac{\sum \text{akte kelahiran yg diterbitkan}}{\sum \text{penduduk}}$	%	52,49	54,13	884.409.000	54,56	903.119.000	54,99	932.348.000	55,44	948.783.000	55,88	985.559.000	55,88	985.559.000	Dispenduk-capil
5	Pengelolaan & Pemanfaatan Data Kependudukan	1	% penerbitan informasi data kependudukan	1	$\frac{\sum \text{data \& informasi yg diterbitkan}}{\sum \text{data \& informasi yg seharusnya diterbitkan}}$	%	100,00	100,00	319.600.000	100,00	326.361.000	100,00	336.926.000	100,00	351.359.000	100,00	364.978.000	100,00	364.978.000	Dispenduk-capil





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
13 Pemberdayaan Masyarakat & Desa																		
1	Pelayanan Administrasi & Sarana Prasarana Perkantoran	1 % ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	$1 \frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap layanan administrasi perkantoran}}{\sum \text{ASN}}$	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DPMD			
						860.900.000		780.674.000		805.940.000		825.538.000		857.536.000	857.536.000			
		2 % sarana & prasarana aparatur yg layak fungsi	$1 \frac{\sum \text{sarana \& prasarana yg layak fungsi}}{\sum \text{sarana \& prasarana yg ada}}$	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
2	Perencanaan & Pelaporan	1 % dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg sesuai pedoman yg disusun tepat waktu	$1 \frac{\sum \text{dokumen penyelenggaraan yg sesuai pedoman (Perencanaan \& Pelaporan)}}{\sum \text{dokumen yg wajib disusun}}$	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DPMD			
						49.700.000		51.057.000		51.175.000		50.892.000		51.325.000	51.325.000			
		2 % laporan keuangan yg disusun tepat waktu	$1 \frac{\sum \text{laporan keuangan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{laporan keuangan yg wajib disusun tiap thn}}$	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
3	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat & Ekonomi	1 % pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	\sum program pemberdayaan masyarakat yg dikembangkan & dipelihara masyarakat	%	100,00	100,00	3.075.467.750	100,00	3.140.533.000	100,00	3.242.175.000	100,00	3.321.016.000	100,00	3.449.742.000	100,00	3.449.742.000	DPMD
			\sum total pasca program pemberdayaan masyarakat															
4	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dlm Membangun Desa	1 % swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	\sum swadaya masyarakat mendukung pemberdayaan masyarakat	%	67,06	68,23	3.651.732.250	69,99	3.728.990.000	71,65	3.849.678.000	73,52	3.943.294.000	75,36	4.096.141.000	75,36	4.096.141.000	DPMD
			\sum total program pemberdayaan masyarakat															
5	Pembinaan Lingkungan Sosial	1 % penerima bantuan yg berdaya	\sum Penerima Bantuan Yang Aktif	%	54,70	57,89	500.000.000	63,16	500.000.000	68,42	500.000.000	73,68	500.000.000	78,95	500.000.000	78,95	500.000.000	DPMD
			Total Penerima Bantuan															
6	Pembinaan Pemerintahan Desa	1 % sarana prasarana desa yg baik	\sum desa yg terpenuhi sarana prasarana perdesaan	%	100,00	100,00	1.561.200.000	100,00	2.202.942.000	100,00	2.275.775.000	100,00	2.332.645.000	100,00	2.424.600.000	100,00	2.424.600.000	DPMD
			\sum desa															
		2 % LPM aktif	\sum LPM aktif	%	22,49	25,36	1.561.200.000	29,67	2.202.942.000	35,41	2.275.775.000	40,67	2.332.645.000	44,50	2.424.600.000	44,50	2.424.600.000	DPMD
			\sum LPM															





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
14 Pengendalian Penduduk & KB																		
1	Keluarga Berencana & Pengendalian Penduduk	1. % PUP	1 $\frac{\sum \text{perkawinan wanita} < 20 \text{ th}}{\sum \text{total perkawinan}} \times 100\%$	%	41	40	9.165.359.000	39	10.054.262.840	38	11.040.946.102	37	12.136.164.523	36	13.742.441.971	36	13.742.441.971	DPPKB
2	Pelayanan Kontrasepsi & Pembinaan Keluarga	1. MKJP	$\frac{\sum \text{MKJP (IUD + IMP + MOP + MOW)}}{\sum \text{total PASM}} \times 100\%$	%	15,21	18,89	975.000.000	21,01	975.000.000	22,11	975.000.000	23,19	975.000.000	24,24	1.375.000.000	24,24	1.375.000.000	DPPKB
		2. <i>Unmeet Need</i>	$\frac{\sum \text{PUS (tak KB) IAT + TIAL}}{\sum \text{total PUS}} \times 100\%$	%	11,42	10,35	975.000.000	10,16	975.000.000	10,01	975.000.000	9,87	975.000.000	9,75	1.375.000.000	9,75	1.375.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
15 Perhubungan																		
1	Penyediaan Prasarana & Fasilitas Perhubungan	1 % penambahan sarana & prasarana	1 $\frac{\sum \text{rambu yg ada s.d thn ybs}}{\sum \text{rambu yg dibutuhkan}}$	%	81,77	67,56		72,16		76,76		81,36		85,96	85,96	Dinas LH & Perhubungan		
			2 $\frac{\sum \text{sarana prasarana pengujian di thn ybs}}{\sum \text{sarana pengujian yg dibutuhkan}}$	%	80,00	40,00	4.056.200.000	45,00	4.120.515.000	60,00	4.129.976.000	75,00	4.107.192.000	85,00	4.142.127.000	4.142.127.000		
2	Pengendalian Lalu Lintas & Angkutan Jalan	1 % pelanggaran lalu lintas angkutan orang & barang	1 $\frac{\sum \text{pelanggaran lalu lintas angkutan orang & barang yg ditindak}}{\sum \text{pelanggaran yg diperkirakan per tahun}}$	%	44,29	44,29	2.321.725.000	40,00	2.301.790.000	35,71	2.307.075.000	31,43	2.393.169.000	27,14	2.413.525.000	2.413.525.000	Dinas LH & Perhubungan	





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
16 Komunikasi & Informatika																		
1	Pelayanan Administrasi & Sarana Prasarana Perkantoran	1 % ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	$\frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap layanan administrasi perkantoran}}{\sum \text{ASN}}$	%	100,00	100,00	1.313.376.500	100,00	1.351.372.000	100,00	1.442.121.000	100,00	1.624.210.000	100,00	1.838.451.000	Diskominfo		
		2 % sarana & prasarana aparatur yg layak fungsi	$\frac{\sum \text{sarana \& prasarana yg layak fungsi}}{\sum \text{sarana \& prasarana yg ada}}$	%	100,00	100,00	1.313.376.500	100,00	1.351.372.000	100,00	1.442.121.000	100,00	1.624.210.000	100,00	1.838.451.000	Diskominfo		
2	Perencanaan & Pelaporan	1 % dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg sesuai pedoman yg disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{dokumen penyelenggaraan yg sesuai pedoman (Perencanaan \& Pelaporan)}}{\sum \text{dokumen yg wajib disusun}}$	%	100,00	100,00	45.000.000	100,00	49.570.000	100,00	64.589.000	100,00	79.056.000	100,00	99.661.000	Diskominfo		
		2 % laporan keuangan yg disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{laporan keuangan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{laporan keuangan yg wajib disusun tiap thn}}$	%	100,00	100,00	45.000.000	100,00	49.570.000	100,00	64.589.000	100,00	79.056.000	100,00	99.661.000	Diskominfo		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
3	Pemanfaatan Teknologi Informasi	1 % implementasi e-gov	1 $\frac{\sum \text{aplikasi yg terintegrasi}}{\sum \text{aplikasi yg direncanakan}}$	%	0,00	42,86	3.106.620.000										Diskominfo	
4	Pengelolaan Aplikasi Informatika	1 % aplikasi yg dapat diakses Perangkat Daerah	1 $\frac{\sum \text{aplikasi yg tayang di web}}{\sum \text{aplikasi yg ada di OPD}}$	%				68,00	3.209.207.000	76,00	3.515.179.000	84,00	3.799.661.000	100,00	4.031.303.000	100,00	4.031.303.000	Diskominfo
5	Pengembangan Komunikasi, Informasi & Media Massa	1 % kerjasama dgn media massa	1 $\frac{\sum \text{kerjasama dg media massa}}{\sum \text{media massa yg terdaftar}}$	%	68,00	72,00												Diskominfo
		2 % pengembangan & pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	1 $\frac{\sum \text{KIM yg dibentuk}}{\sum \text{kecamatan}}$	%	13,04	43,48	2.702.310.500											Diskominfo
6	Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik	1 % penyebaran informasi publik melalui media	1 $\frac{\sum \text{informasi yg disebarikan}}{\sum \text{informasi yg dikelola}}$					69,58		84,49		89,46		100,00		100,00		Diskominfo
		2 % pengembangan & pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	1 $\frac{\sum \text{KIM yg dibentuk}}{\sum \text{kecamatan}}$					43,48	2.652.032.000	43,48	2.916.481.000	43,48	3.014.035.000	43,48	3.288.826.000	43,48	3.288.826.000	





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab			
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
17 Koperasi, Usaha Kecil, & Menengah																			
1	Pelayanan Administrasi & Sarana Prasarana Perkantoran	1	% ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	$\frac{\sum \text{ASN yg puas}}{\sum \text{ASN yg ada}}$	%	100,00	100,00	100,00	1.485.000.000	100,00	100,00	100,00	1.575.000.000	100,00	100,00	1.620.000.000	100,00	1.670.000.000	Diskoperin- dag
		2	% sarana & prasarana aparatur yg layak fungsi	$\frac{\sum \text{sarana \& prasarana yg layak fungsi}}{\sum \text{sarana \& prasarana yg ada}}$	%	100,00	100,00	100,00	1.485.000.000	100,00	100,00	100,00	1.575.000.000	100,00	100,00	1.620.000.000	100,00	1.670.000.000	
2	Perencanaan & Pelaporan	%	dokumen penyelengga- raan pemerintahan yg sesuai pedoman yg disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{dokumen penyelenggaraan yg sesuai pedoman (Perencanaan \& Pelaporan)}}{\sum \text{dokumen yg wajib disusun}}$	%	100,00	100,00	100,00	1.200.000.000	100,00	100,00	100,00	1.300.000.000	100,00	100,00	1.350.000.000	100,00	1.400.000.000	Diskoperin- dag
			% laporan keuangan yg disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{laporan keuangan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{laporan keuangan yg wajib disusun tiap thn}}$	%	100,00	100,00	100,00	1.200.000.000	100,00	100,00	100,00	1.300.000.000	100,00	100,00	1.350.000.000	100,00	1.400.000.000	
3	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1	% koperasi aktif	$\frac{\sum \text{koperasi aktif thn ybs}}{\sum \text{koperasi yg ada}}$	%	43,60	44,43	45,25	675.000.000	46,07	46,87	47,66	715.000.000	47,66	47,66	735.000.000	47,66	755.000.000	Diskoperin- dag

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4	Pemberdayaan Usaha Skala Mikro	1	% pertumbuhan usaha skala mikro	$\frac{\sum \text{usaha mikro tahun } n - \sum \text{usaha mikro thn } (N-1)}{\sum \text{usaha mikro thn } (N-1)}$	%	0,48	0,53	1.997.800.000	0,53	2.055.000.000	0,55	2.115.000.000	0,56	2.175.000.000	0,58	2.250.000.000	Diskoperindag
		2	% usaha mikro terfasilitasi akses permodalan & kemitraan	$\frac{\sum \text{usaha mikro yg difasilitasi akses permodalan \& kemitraan thn ybs}}{\sum \text{usaha mikro thn ybs}}$	%	0,51	0,56	1.997.800.000	0,60	2.055.000.000	0,68	2.115.000.000	0,75	2.175.000.000	0,79	2.250.000.000	
5	Pembinaan Lingkungan Sosial	1	% usaha mikro terfasilitasi penguatan SDM & produksi	$\frac{\sum \text{usaha mikro yg difasilitasi pembinaan penguatan SDM \& produksi}}{\sum \text{seluruh usaha mikro}}$	%	0,81	0,89	4.309.000.000	0,93	4.284.000.000	1,00	4.284.000.000	1,04	4.284.000.000	1,11	4.284.000.000	Diskoperindag





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab				
						2019		2020		2021		2022		2023							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
18 Penanaman Modal																					
1	Pelayanan Administrasi & Sarana Prasarana Perkantoran	1	% ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	$\frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap layanan administrasi perkantoran}}{\sum \text{ASN}}$	%	100,00	100,00	100,00	823.568.000	100,00	100,00	840.991.000	100,00	100,00	868.210.000	100,00	100,00	889.322.000	100,00	923.793.000	DPM, PTSP & TK
		2	% sarana & prasarana aparatur yg layak fungsi	$\frac{\sum \text{sarana \& prasarana yg layak fungsi}}{\sum \text{sarana \& prasarana yg ada}}$	%	100,00	100,00	100,00	823.568.000	100,00	100,00	840.991.000	100,00	100,00	868.210.000	100,00	100,00	889.322.000	100,00	923.793.000	
2	Perencanaan & Pelaporan	1	% dokumen penyelengga- raan pemerintahan yg sesuai pedoman yg disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{dokumen penyelenggaraan yg sesuai pedoman (Perencanaan \& Pelaporan)}}{\sum \text{dokumen yg wajib disusun}}$	%	100,00	100,00	100,00	46.983.000	100,00	100,00	47.976.000	100,00	100,00	49.528.000	100,00	100,00	50.732.000	100,00	52.698.000	DPM, PTSP & TK
		2	% laporan keuangan yg disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{laporan keuangan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{laporan keuangan yg wajib disusun tiap thn}}$	%	100,00	100,00	100,00	46.983.000	100,00	100,00	47.976.000	100,00	100,00	49.528.000	100,00	100,00	50.732.000	100,00	52.698.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
3	Peningkatan Iklim Investasi & Realisasi Investasi	1 jumlah kerja sama pengusaha besar & kecil	1 \sum kerja sama	kerja sama	2	4	563.596.600	4	575.520.000	4	594.149.000	5	608.599.000	5	622.226.000	622.226.000	DPM, PTSP & TK	
4	Peningkatan Layanan Perijinan	1 % penerbitan izin tepat waktu	1 $\frac{\sum \text{penerbitan izintepat waktu}}{\sum \text{perizinan ygterbit}}$	%	95,08	98,60		98,76		98,80		98,89		98,93		98,93	DPM, PTSP & TK	
		2 % penerbitan IUJK maksimal 5 hari kerja	2 $\frac{\sum \text{IUJK yg terbitmaksimal 5 harikerja}}{\sum \text{IUJK yg terbit}}$	%	96,15	96,15	413.882.400	96,15	472.207.000	96,15	96,15	485.998.000	96,15	96,15	514.073.000	96,15		514.073.000
		3 % bangunan yg memiliki IMB	1 $\frac{\sum \text{bangunan berIMB}}{\sum \text{bangunankeseluruhan}}$	%	30,22	30,30		30,32		30,35		30,37		30,40		30,40		
		4 % publikasi layanan perijinan	2 $\frac{\sum \text{responden ygmenerimainformasi dg baik}}{\text{total respondenyg ditargetkan}}$	%	76,00	78,00		78,00		79,00		79,00		79,00		79,00		





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
19 Kepemudaan & Olahraga																		
1	Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan	1 % kelompok pemuda yg difasilitasi pemberdayaan	1 $\frac{\sum \text{kelompok} \text{ pemuda yg dibina}}{\sum \text{kelompok} \text{ pemuda yg ditargetkan}}$	%	100,00	100,00	520.000.000	100,00	531.001.000	100,00	548.187.000	100,00	561.517.000	100,00	583.283.000	100,00	583.283.000	Disparpora
2	Peningkatan Pengembangan Keolahragaan	1 % atlet yg mengikuti kompetisi olahraga (tingkat regional)	1 $\frac{\sum \text{atlet yg mengikuti kompetisi}}{\sum \text{atlet yg dibina}}$	%	N/A	40,00	1.240.000.000	40,00	1.266.234.000	40,00	1.307.215.000	40,00	1.339.003.000	40,00	1.390.905.000	40,00	1.390.905.000	Disparpora

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
20 Statistik																	
1	Pengembangan Data / Informasi Statistik Daerah	% pemanfaatan dokumen statistik sektoral	1 \sum perangkat daerah yg memanfaatkan dokumen statistik sektoral	%	0,00	34,48	250.000.000									Diskominfo	
			\sum perangkat daerah														
2	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	% pemanfaatan dokumen statistik sektoral	1 \sum perangkat daerah yg memanfaatkan dokumen statistik sektoral	%		43,10	522.638.000	60,34	548.107.000	77,59	595.872.000	100,00	623.730.000	100,00	623.730.000	Diskominfo	
			\sum perangkat daerah														





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
21 Persandian																		
1	Pemanfaatan Persandian Daerah	1 % keterhubungan antar perangkat daerah dlm jaringan komunikasi sandi	1 \sum perangkat daerah yg telah menggunakan sandi dlm komunikasi antar daerah	%	0,00	34,48										Diskominfo		
			\sum total perangkat daerah				175.000.135,16											
2	Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	1 % keterhubungan antar perangkat daerah dlm jaringan komunikasi sandi	1 \sum perangkat daerah yg telah menggunakan sandi dlm komunikasi antar daerah	%				43,10	188.368.000	60,34	203.706.000	77,59	232.228.000	100,00	254.136.000	100,00	254.136.000	Diskominfo
			\sum total perangkat daerah															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
22 Kebudayaan														Dikbud				
1	Pengelolaan Kekayaan & Keragaman Budaya	1 % cagar budaya yg dapat dijadikan potensi kabupaten	$1 \frac{\sum \text{cagar budaya yg dapat dijadikan potensi}}{\sum \text{cagar budaya}}$	%	17,39	17,41	17,43	3.073.383.000	17,45	3.234.462.000	17,47	3.377.444.000	17,49		3.576.481.000	17,49	3.576.481.000	
2		2 % group kesenian	$1 \frac{\sum \text{group kesenian} \times 10.000}{\sum \text{penduduk}}$	%	38,50	38,55	38,60	3.073.383.000	38,65	3.234.462.000	38,70	3.377.444.000	38,75		3.576.481.000	38,75	3.576.481.000	
3		3 % kekayaan budaya yg dilestarikan	$1 \frac{\sum \text{kekayaan budaya yg dilestarikan}}{\sum \text{seluruh kekayaan budaya}}$	%	N/A	84,82												
						2.344.085.000												





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
23 Perpustakaan																		
1	Pelayanan Administrasi & Sarana Prasarana Perkantoran	1 % ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	$\frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap layanan administrasi perkantoran}}{\sum \text{ASN}}$	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perpustakaan & Kearsipan			
		2 % sarana & prasarana aparatur yg layak fungsi	$\frac{\sum \text{sarana \& prasarana yg layak fungsi}}{\sum \text{sarana \& prasarana yg ada}}$	%	100,00	100,00	536.133.000	100,00	547.475.000	100,00	565.194.000	100,00	578.937.000	601.396.000	601.396.000	Dinas Perpustakaan & Kearsipan		
2	Perencanaan & 1 Pelaporan	1 % dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg sesuai pedoman yg disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{dokumen penyelenggaraan yg sesuai pedoman (Perencanaan \& Pelaporan)}}{\sum \text{dokumen yg wajib disusun}}$	%	100,00	100,00	34.514.000	100,00	35.243.000	100,00	36.383.000	100,00	37.268.000	38.713.000	38.713.000	Dinas Perpustakaan & Kearsipan		
		2 % laporan keuangan yg disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{laporan keuangan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{laporan keuangan yg wajib disusun tiap thn}}$	%	100,00	100,00	34.514.000	100,00	35.243.000	100,00	36.383.000	100,00	37.268.000	38.713.000	38.713.000	Dinas Perpustakaan & Kearsipan		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
3	Pengembangan Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan	1	jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	\sum kunjungan ke perpustakaan selama 1 thn	Orang	147.142	152.000		153.520		155.055		156.606		158.172	158.172	Dinas Perpustakaan & Kearsipan		
		2	% perpustakaan	$\frac{\sum \text{perpustakaan}}{\sum \text{Desa \& Kelurahan}}$	%	35,16	36,07		36,99		37,90		38,81		39,73	39,73			
		3	jumlah koleksi judul buku perpustakaan	\sum koleksi judul buku perpustakaan	Judul	30.733	31.731	3.192.986.000	32.431	3.195.104.000	33.231	3.232.933.000	34.031	3.245.714.000	34.931	3.306.017.000		34.931	3.306.017.000
		4	\sum perpustakaan berstandart SNP (Standart Nasional Perpustakaan)	\sum perpustakaan berstandar SNP	lem-baga	0	20		25		30		35		40			40	





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
24 Kearsipan																		
1	Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	1 % instansi pemerintah yg menerapkan sistem kearsipan sesuai kaidah	$\frac{\sum \text{instansi yg menerapkan sistem baku}}{\sum \text{instansi pemerintah (desa, kelurahan, OPD)}}$	%	24,05	24,05	25,77	27,49	29,21	30,93	30,93			Dinas Perpustakaan & Kearsipan				
2	% arsip yg diselamatkan	1 $\frac{\sum \text{arsip diselamatkan}}{\sum \text{arsip yg diakuisisi dari instansi pemerintah/ lembaga}}$	%	57,14	60,17	65,36	70,47	75,64	81,09	81,09								
						325.500.000	332.386.000	343.142.000	352.101.000	365.457.000	365.457.000							
3	% arsip yg di sajikan dlm bentuk digital	1 $\frac{\sum \text{arsip diselamatkan}}{\sum \text{arsip yg ditata}}$	%	124,32	87,93	87,98	88,12	88,25	88,47	88,47								
4	% arsip yg disusutkan/ dimusnahkan	$\frac{\sum \text{arsip yg disusutkan}}{\sum \text{arsip yg ditata}}$	%	N/A	9,17	9,84	10,58	11,41	12,47	12,47								

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Urusan Pilihan																		
25 Kelautan & Perikanan																		
1	Peningkatan Produksi, Pengolahan & Pemasaran Perikanan	1	angka produktivitas perikanan budidaya	$\frac{\sum \text{produksi perikanan}}{\sum \text{luas panen perikanan}}$	ton/ha	65,869	70,00		75,00		80,00		85,00		90,00	90,00	DKPP	
		2	% luas areal perikanan yg produktif	$\frac{\sum \text{luas areal produksi}}{\sum \text{luas areal yg ditargetkan}}$	%	100,00	93	1.653.947.000	93	1.674.959.000	93	94	2.043.076.000	100,00	2.266.683.000	100,00		2.523.967.000
		3	% SDM perikanan yg terampil	$\frac{\sum \text{SDM yg ikut pelatihan thn (N)}}{\sum \text{total SDM perikanan}}$	%	100,00	16	1.653.947.000	16	1.674.959.000	16	16	2.043.076.000	16	2.266.683.000	16		2.523.967.000
		4	% kelembagaan perikanan yg aktif	$\frac{\sum \text{kelompok thn (N)}}{\sum \text{kelompok yg ditargetkan}}$	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			100,00
2	Pembinaan Lingkungan Sosial	1	% kapasitas kelompok perikanan yg terlatih	$\frac{\sum \text{masy perikanan yg ikut pelatihan thn (N)}}{\sum \text{total masy perikanan}}$	%	22,95	3,13	1.000.000.000	3,13	1.000.000.000	3,08	1.000.000.000	3,03	1.000.000.000	2,99	1.000.000.000	2,99	DKPP
		2	% sarana prasarana perikanan yg memadai	$\frac{\sum \text{sarana thn (N)}}{\sum \text{sarana yg ditargetkan}}$	%	100	33	1.000.000.000	50	1.000.000.000	66,67	1.000.000.000	83,33	1.000.000.000	100,00	1.000.000.000	100,00	





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
26 Pariwisata																		
1	Pelayanan Administrasi & Sarana Prasarana Perkantoran	1 % ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	$\frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap layanan administrasi perkantoran}}{\sum \text{ASN}}$	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Disparpora		
		2 % sarana & prasarana aparatur yg layak fungsi	$\frac{\sum \text{sarana \& prasarana yg layak fungsi}}{\sum \text{sarana \& prasarana yg ada}}$	%	100,00	100,00	587.620.000	100,00	600.052.000	100,00	619.472.000	100,00	634.536.000	100,00	659.131.000		659.131.000	
2	Perencanaan & Pelaporan	% dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg sesuai pedoman yg disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{dokumen penyelenggaraan yg sesuai pedoman (Perencanaan \& Pelaporan)}}{\sum \text{dokumen yg wajib disusun}}$	%	100,00	100,00	20.750.000	100,00	21.189.000	100,00	21.875.000	100,00	22.406.000	100,00	23.274.000	Disparpora		
		% laporan keuangan yg disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{laporan keuangan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{laporan keuangan yg wajib disusun tiap thn}}$	%	100,00	100,00	20.750.000	100,00	21.189.000	100,00	21.875.000	100,00	22.406.000	100,00	23.274.000		23.274.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
3	Pengembangan 1 Pemasaran Pariwisata	jumlah kunjungan wisatawan	1 \sum kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	45.856	55.856		61.034		67.138		73.852		81.237		81.237	Disparpora	
			2 \sum kunjungan wisatawan nusantara		400.894	485.190		533.710		587.081		645.789		710.368		710.368		
		2 jumlah lama tinggal wisatawan	1 \sum lama tinggal wisatawan mancanegara	hari	2,5	2,5	2.575.750.000	2,5	2.808.998.000	2,7	3.096.993.000	2,7	3.387.899.000	3,0	3.758.386.000	3,0		3.758.386.000
			2 \sum lama tinggal wisatawan nusantara	hari	1,5	1,5		1,5		1,7		1,8		2,0		2,0		
		3 angka pengeluaran wisatawan	1 rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara	Rp	800.000	840.000		882.000		926.100		972.405		1.021.025		1.021.025		
			2 rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara	Rp	115.000	120.750		126.788		133.127		139.783		146.772		146.772		
4	Pengembangan 1 Destinasi Pariwisata	% destinasi wisata yg layak kunjung	1 $\frac{\sum \text{destinasi wisata yg layak kunjung}}{\sum \text{destinasi wisata seluruhnya}}$	%	80,00	80,00		84,00		88,00		92,00		100,00		100,00	Disparpora	
						3.365.332.000		6.820.329.000		7.041.066.000		7.212.288.000		7.491.843.000		7.491.843.000		





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
27 Pertanian																	
1	Pelayanan Administrasi & Sarana Prasarana Perkantoran	1 % ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	$\frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap layanan administrasi perkantoran}}{\sum \text{ASN}}$	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Diperta		
		2 % sarana & prasarana aparatur yg layak fungsi	$\frac{\sum \text{sarana \& prasarana yg layak fungsi}}{\sum \text{sarana \& prasarana yg ada}}$	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
						780.100.000		796.604.000		822.386.000		842.384.000		875.036.000	875.036.000		
2	Perencanaan & Pelaporan	% dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg sesuai pedoman yg disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{dokumen penyelenggaraan yg sesuai pedoman (Perencanaan \& Pelaporan)}}{\sum \text{dokumen yg wajib disusun}}$	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Diperta		
		% laporan keuangan yg disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{laporan keuangan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{laporan keuangan yg wajib disusun tiap thn}}$	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
						55.000.000		56.163.000		57.981.000		59.391.000		61.693.000	61.693.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
3	Pengembangan 1 Tanaman Pangan & Tanaman Hortikultura	jumlah produktivitas tanaman pangan & tanaman hortikultura															Diperta	
	- padi	1	$\frac{\text{produksi thn ybs}}{\text{luas areal tanam thn ybs}}$	ton/ha	6,14	6,15	790.000.000	6,16	806.713.000	6,16	832.822.000	6,17	853.075.000	6,17	886.141.000	6,17	886.141.000	
	- jagung	1	$\frac{\text{produksi thn ybs}}{\text{luas areal tanam thn ybs}}$	ton/ha	5,17	5,17		5,18		5,18	5,19		5,19		5,19			
	- kedelai	1	$\frac{\text{produksi thn ybs}}{\text{luas areal tanam thn ybs}}$	ton/ha	1,50	1,51		1,51		1,52	1,52		1,53		1,53			
	- ubi kayu	1	$\frac{\text{produksi thn ybs}}{\text{luas areal tanam thn ybs}}$	ton/ha	22,75	22,76		22,77		22,77	22,78		22,78		22,78			
	- cabe rawit	1	$\frac{\text{produksi thn ybs}}{\text{luas areal tanam thn ybs}}$	ton/ha	8,35	8,36		8,37		8,37	8,38		8,38		8,38			
	- bawang merah	1	$\frac{\text{produksi thn ybs}}{\text{luas areal tanam thn ybs}}$	ton/ha	10,36	10,37		10,37		10,38	10,38		10,39		10,39			
	- jahe	1	$\frac{\text{produksi thn ybs}}{\text{luas areal tanam thn ybs}}$	ton/ha	16,09	16,09		16,10		16,10	16,11		16,11		16,11			
	- kunyit	1	$\frac{\text{produksi thn ybs}}{\text{luas areal tanam thn ybs}}$	ton/ha	19,50	19,54		19,54		19,55	19,55		19,56		19,56			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
		2	% pembenihan tanaman perkebunan	6 $\frac{\sum \text{tanaman perkebunan yg dikembangkan}}{\sum \text{tanaman perkebunan yg ada}}$	%	100	100		100		100		100		100			
		3	jumlah kerjasama pemasaran unggulan perkebunan	7 $\sum \text{promosi unggulan perkebunan thn ybs}$	Kali	20	20		20		20		20		20			
5	Pengembangan 1 Peternakan	% ternak ruminansia	1 $\frac{\sum \text{penambahan ternak ruminansia}}{\sum \text{populasi ternak ruminansia}}$	%	10	15		20		25		30		35		35	Diperta	
		2	% luas pakan ternak	2 $\frac{\sum \text{penambahan lahan hmt}}{\sum \text{luas lahan hmt seluruhnya}}$	%	10	20	1.050.000.000	30	1.072.214.000	40	1.106.916.000	50	1.133.834.000	60	1.177.782.000	60	1.177.782.000
		3	% ternak non ruminansia	3 $\frac{\sum \text{penambahan ternak non ruminansia}}{\sum \text{populasi ternak non ruminansia}}$	%	12,5	17,5		22,5		27,5		32,5		37,5		37,5	
6	Pemberdayaan 1 Penyuluhan Pertanian	% penyuluh, medik, paramedik & petugas IB pertanian terlatih	1 $\frac{\sum \text{petugas lapang mendapat pelatihan}}{\sum \text{petugas lapang pertanian seluruhnya}}$	%	30	34	2.097.000.000	38	2.141.365.000	42	2.210.670.000	46	2.264.428.000	50	2.352.200.000	50	2.352.200.000	Diperta





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		2	% data statistik pertanian	$2 \frac{\sum \text{data statistik pertanian yg tersusun}}{\sum \text{data statistik pertanian seluruhnya}}$	%	100	100	100		100		100		100				
		3	% keterampilan lembaga pertanian	$3 \frac{\sum \text{lembaga pertanian yg dibina}}{\sum \text{lembaga pertanian seluruhnya}}$	%	30	34	38		42		46		50		50		
7	Optimalisasi Sarana & Prasarana Pertanian	1	% jaringan irigasi tersier & lahan terbangun	$1 \frac{\sum \text{irigasi tersier terbangun}}{\sum \text{panjang saluran irigasi tersier}}$	%	20	20	20		20		20		20		20	Diperta	
		2	% pemanfaatan alat & mesin pertanian	$1 \frac{\sum \text{UPJA yg dibina}}{\sum \text{poktan seluruhnya}}$	%	16	16	16	7.087.849.000	16	7.237.803.000	16	7.472.054.000	16	7.653.757.000	16	7.950.425.000	
		3	% pembinaan usaha tani	$1 \frac{\sum \text{kelompok tani yg terbina}}{\sum \text{gapoktan seluruhnya}}$	%	16	16	16		16		16		16		16		
8	Peningkatan Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner	1	% pelayanan kesehatan ternak	$1 \frac{\sum \text{ternak yg terlayani kesehatannya thn ybs}}{\sum \text{populasi ternak}}$	%	1,7	2,4	2,7	640.000.000	2,7	653.540.000	3,1	674.691.000	3,4	691.098.000	3,7	717.886.000	Diperta
		2	jumlah kerjasama pemasaran unggulan peternakan	$1 \frac{\sum \text{promosi unggulan peternakan thn ybs}}{\sum \text{populasi ternak}}$	kali	5	5	5	640.000.000	5	653.540.000	5	674.691.000	5	691.098.000	5	717.886.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		3	% kesehatan masyarakat veteriner	1	\sum sampel bahan pangan asal hewan yg diuji	%	100	100		100		100		100				
					\sum sampel bahan pangan asal hewan yg ditargetkan													
9	Pembinaan Lingkungan Sosial	1	% produksi komoditas peternakan	1	\sum penambahan populasi ternak	%	30	32,5		35		40		42,5		42,5	Diperta	
					\sum ternak seluruhnya				1.500.000.000		1.531.734.000		1.581.309.000		1.619.763.000		1.682.546.000	
10	Peningkatan Kualitas Bahan Baku	1	% kualitas komoditas perkebunan yg pengolahannya sesuai SOP	1	\sum sarana & prasarana kelompok	%	31,2	31,8		32,5		33,7		34,3		34,3	Diperta	
					\sum sarana & prasarana seluruhnya				2.552.119.000		3.783.016.000		4.440.857.000		5.001.917.000		5.633.572.000	





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
28 Perdagangan																		
1	Perlindungan Konsumen & Pengamanan Perdagangan	1 % pedagang yg dibina tentang perlindungan konsumen	1 $\frac{\sum \text{wirausaha perdagangan yg dibina ttg perlindungan konsumen thn ybs}}{\sum \text{seluruh pedagang}}$	%	1,40	1,40	1.454.500.000	1,41	1.469.500.000	1,44	1.469.500.000	1,46	1.484.500.000	1,47	1.484.500.000	Diskoperindag		
2	Pengembangan Perdagangan dlm Negeri	1 % bina pedagang	1 $\frac{\sum \text{pedagang yg dibina thn ybs}}{\sum \text{seluruh pedagang}}$	%	2,00	2,00	6.048.164.000	2,00	6.225.000.000	2,04	6.415.000.000	2,04	6.605.000.000	2,07	6.800.000.000	Diskoperindag		
		2 ekspor bersih perdagangan	1 nilai ekspor - nilai impor	Rp	31,60 milyar	33,22 milyar	6.048.164.000	34,94 milyar	6.225.000.000	36,78 milyar	6.415.000.000	38,74 milyar	6.605.000.000	40,85 milyar	6.800.000.000	Diskoperindag		
3	Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	1 % pengawasan cukai ilegal	1 $\frac{\sum \text{wilayah pendataan cukai ilegal}}{\sum \text{wilayah yg ada}}$	%	100	100	45.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	Diskoperindag		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
29 Perindustrian																			
1	Pengembangan Industri Kecil & Menengah	nilai produksi industri	1	nilai produksi industri thn ybs	Juta Rp	798.502,24	862.735,52		932.180,83		1.007.286,00		1.088.595,42		1.176.501,89		1.176.501,89	Diskoperindag	
2	% pertumbuhan industri	1	$\frac{\sum \text{industri thn ybs} - \sum \text{industri thn sebelumnya}}{\sum \text{industri thn sebelumnya}}$	%	0,66	0,69	5.685.071.000	0,70	6.406.840.000	0,71	6.879.238.000	0,72	7.911.281.000	0,73	8.805.474.000	0,73	8.805.474.000	Diskoperindag	
3	% bina industri	1	$\frac{\sum \text{industri yg dibina thn ybs}}{\sum \text{total industri}}$	%	3,78	3,85		3,92		4,01		4,08		4,13		4,13		Diskoperindag	
2	Pembinaan Industri	% bina industri hasil tembakau	1	$\frac{\sum \text{industri hasil tembakau yg dibina thn ybs}}{\sum \text{seluruh industri hasil tembakau}}$	%	100	100	90.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	Diskoperindag





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
30 Transmigrasi																		
1	Transmigrasi Regional	1 % pengiriman transmigran ke luar Jawa	1 $\frac{\sum \text{transmigran yg dikirim}}{\sum \text{transmigran yg terdaftar}}$	%	50,00	100		30.000.000									DPM, PTSP & TK	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Urusan Fungsi Penunjang																	
31 Keuangan																	
1	Pelayanan Administrasi & Sarana Prasarana Perkantoran	1 % ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	$1 \frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap layanan administrasi perkantoran}}{\sum \text{ASN}}$	%	100,00	100,00	2.214.717.000	100,00	2.238.563.909	100,00	2.291.375.300	100,00	2.348.699.300	100,00	2.407.707.300	BPKAD	
		2 % sarana & prasarana aparatur yg layak fungsi	$2 \frac{\sum \text{sarana \& prasarana yg layak fungsi}}{\sum \text{sarana \& prasarana yg ada}}$	%	100,00	100,00	2.214.717.000	100,00	2.238.563.909	100,00	2.291.375.300	100,00	2.348.699.300	100,00	2.407.707.300		
2	Perencanaan & 1 Pelaporan	1 % dokumen penyelengga- raan pemerintahan yg sesuai pedoman yg disusun tepat waktu	$1 \frac{\sum \text{dokumen penyelenggaraan yg sesuai pedoman (Perencanaan \& Pelaporan)}}{\sum \text{dokumen yg wajib disusun}}$	%	100,00	100,00	70.000.000	100,00	80.000.000	100,00	90.000.000	100,00	100.000.000	100,00	110.000.000	BPKAD	
		2 % laporan keuangan yg disusun tepat waktu	$2 \frac{\sum \text{laporan keuangan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{laporan keuangan yg wajib disusun tiap thn}}$	%	100,00	100,00	70.000.000	100,00	80.000.000	100,00	90.000.000	100,00	100.000.000	100,00	110.000.000		





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
3	Optimalisasi Manajemen Anggaran Daerah	1 % ketepatan waktu penetapan APBD	1 $\frac{\text{Penetapan APBD tepat waktu} = 100\% - N\%}{N \text{ adalah } \sum \text{ hari yg melebihi tgl 31 Des thn } x}$	%	100,00	100,00	1.494.270.600	100,00	1.514.270.600	100,00	1.554.270.600	100,00	1.574.270.600	100,00	1.624.270.600	100,00	1.624.270.600	BPKAD
4	Pengelolaan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	1 % ketepatan penyelesaian LKD	1 $\frac{\text{Penyelesaian LKD tepat waktu} = 100\% - N\%}{N \text{ adalah } \sum \text{ hari yg melebihi tgl 31 Mar thn } x}$	%	100,00	100,00	1.329.241.000	100,00	1.379.241.000	100,00	1.449.241.000	100,00	1.499.241.000	100,00	1.599.241.000	100,00	1.599.241.000	BPKAD
5	Penatausahaan Keuangan Daerah	1 % penyerapan anggaran APBD	1 $\frac{\text{realisasi APBD}}{\text{anggaran APBD}}$	%	95,30	100,00	600.000.000	100,00	625.000.000	100,00	650.000.000	100,00	675.000.000	100,00	700.000.000	100,00	700.000.000	BPKAD
6	Manajemen Aset Daerah	1 % aset tanah yg sdh dilegalisasi	1 $\frac{\sum \text{ aset tanah yg sdh dilegalisasi } x 100\%}{\sum \text{ aset tanah yg ada}}$	%	42,72	47,23	1.793.897.100	48,67	1.823.897.100	50,12	1.873.897.100	51,57	1.903.897.100	53,02	1.973.897.100	53,02	1.973.897.100	BPKAD
		2 % pemanfaatan aset	1 $\frac{\sum \text{ aset yg dimanfaatkan}}{\sum \text{ potensi aset yg dapat dimanfaatkan}}$	%	100,00	100,00	1.793.897.100	100,00	1.823.897.100	100,00	1.873.897.100	100,00	1.903.897.100	100,00	1.973.897.100	100,00	1.973.897.100	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	Pelayanan Administrasi & Sarana Prasarana Perkantoran	1 % ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	$1 \frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap layanan administrasi perkantoran}}{\sum \text{ASN}}$	%	100,00	100,00	777.432.700	100,00	793.879.000	100,00	819.573.000	100,00	839.503.000	100,00	872.045.000	Bapenda	
		2 % sarana & prasarana aparatur yg layak fungsi	$1 \frac{\sum \text{sarana \& prasarana yg layak fungsi}}{\sum \text{sarana \& prasarana yg ada}}$	%	100,00	100,00	777.432.700	100,00	793.879.000	100,00	819.573.000	100,00	839.503.000	100,00	872.045.000		
2	Perencanaan & Pelaporan	1 % dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg sesuai pedoman yg disusun tepat waktu	$1 \frac{\sum \text{dokumen penyelenggaraan yg sesuai pedoman (Perencanaan \& Pelaporan)}}{\sum \text{dokumen yg wajib disusun}}$	%	100,00	100,00	50.000.000	100,00	51.057.000	100,00	52.710.000	100,00	53.991.000	100,00	56.084.000	Bapenda	
		2 % laporan keuangan yg disusun tepat waktu	$1 \frac{\sum \text{laporan keuangan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{laporan keuangan yg wajib disusun tiap thn}}$	%	100,00	100,00	50.000.000	100,00	51.057.000	100,00	52.710.000	100,00	53.991.000	100,00	56.084.000		
3	Peningkatan Pendapatan Daerah	1 % penerimaan pajak daerah	$1 \frac{\sum \text{penerimaan pajak daerah thn ybs}}{\sum \text{penerimaan pajak daerah thn N-1}}$	%	105,12	105,12	1.183.249.000	102,64	1.208.215.000	106,28	1.233.708.000	105,34	1.259.739.000	108,39	1.286.319.000	Bapenda	





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
2	% penerimaan retribusi daerah	1	$\frac{\sum \text{penerimaan retribusi daerah thn ybs}}{\sum \text{penerimaan retribusi daerah thn (N-1)}}$	%	106,40	106,47	113,83	97,03	101,99	101,23	101,23							
3	% hasil pengelolaan kekayaan daerah yg di pisahkan	1	$\frac{\sum \text{hasil pengelolaan kekayaan daerah yg di pisahkan thn ybs}}{\sum \text{hasil pengelolaan kekayaan daerah yg di pisahkan thn (N-1)}}$	%	98,96	98,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
4	% penerimaan lain-lain PAD yg sah	1	$\frac{\sum \text{penerimaan peningkatan lain-lain PAD yg sah thn ybs}}{\sum \text{penerimaan peningkatan lain-lain PAD yg sah thn (N-1)}}$	%	98,72	98,72	110,92	107,82	108,26	108,33	108,33							
5	% wajib pajak	1	$\frac{\sum \text{wajib pajak baru}}{\sum \text{wajib pajak thn sebelumnya}}$	%	112,93	112,93	113,08	114,46	115,16	115,36	115,36							

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
4	Pelayanan PBB & BPHTB	1 rasio ketepatan pemuktahiran data obyek & subyek PBB	1 $\frac{\sum \text{data obyek \& subyek PBB yg dimutahirkan (thn ybs)}}{\sum \text{data obyek \& subyek PBB yg belum dimutahirkan (thn ybs)}}$	%	6,03	6,03		6,42		6,86		7,36		7,95		7,95	Bapenda	
			2 % pelunasan PBB & BPHTB	1 $\frac{\sum \text{wajib pajak PBB yg melunasi}}{\sum \text{wajib pajak PBB seluruhnya}}$	%	100,00	80		100,00		100,00		100,00		100,00			100,00
		3 % ketepatan pelunasan PBB	2 $\frac{\sum \text{realisasi penerimaan BPHTB thn n (Rp)}}{\sum \text{target penerimaan BPHTB thn n (Rp)}}$	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			7 $\frac{\sum \text{desa yg Lunas PBB (thn ybs)}}{\sum \text{seluruh desa pengelola PBB (thn ybs)}}$	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
4	% ketepatan validasi BPHTB	8 $\frac{\sum \text{yg terbayarkan/ terealisasi}}{\sum \text{permohonan validasi (thn ybs)}}$	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
32 Perencanaan																		
1	Pelayanan Administrasi & Sarana Prasarana Perkantoran	1 % ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	$\frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap layanan administrasi perkantoran}}{\sum \text{ASN}}$	%	100,00	100,00	2.678.507.500	100,00	2.711.801.000	100,00	2.032.613.510	100,00	2.742.366.097	100,00	2.089.030.351	100,00	2.089.030.351	Bappeda
		2 % sarana & prasarana aparatur yg layak fungsi	$\frac{\sum \text{sarana \& prasarana yg layak fungsi}}{\sum \text{sarana \& prasarana yg ada}}$	%	100,00	100,00	2.678.507.500	100,00	2.711.801.000	100,00	2.032.613.510	100,00	2.742.366.097	100,00	2.089.030.351	100,00	2.089.030.351	Bappeda
2	Perencanaan & Pelaporan	1 % dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg sesuai pedoman yg disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{dokumen penyelenggaraan yg sesuai pedoman (Perencanaan \& Pelaporan)}}{\sum \text{dokumen yg wajib disusun}}$	%	100,00	100,00	105.992.800	100,00	108.235.000	100,00	111.611.000	100,00	114.326.000	100,00	118.757.000	100,00	118.757.000	Bappeda
		2 % laporan keuangan yg disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{laporan keuangan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{laporan keuangan yg wajib disusun tiap thn}}$	%	100,00	100,00	105.992.800	100,00	108.235.000	100,00	111.611.000	100,00	114.326.000	100,00	118.757.000	100,00	118.757.000	Bappeda

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
3	Perencanaan Pembangunan Daerah	1	% dokumen perencanaan pembangunan tahunan yg disusun tepat waktu	1	$\frac{\sum \text{dokumen perencanaan yg di susun tepat waktu tiap tahun}}{\sum \text{dokumen perencanaan yg wajib disusun tiap tahun}}$	%	100,00 (7 Dok)		100,00 (2 Dok)		100,00 (3 Dok)		100,00 (2 Dok)		100,00 (3 Dok)		Bappeda	
		2	% dokumen perencanaan pembangunan tahunan yg dimanfaatkan perangkat daerah	1	$\frac{\sum \text{dokumen perencanaan pembangunan daerah yg dimanfaatkan perangkat daerah}}{\sum \text{dokumen perencanaan pembangunan daerah yg disusun tiap tahun}}$	%	100,00 (7 Dok)	2.383.788.000	100,00 (2 Dok)	1.698.538.000	100,00 (3 Dok)	2.600.984.000	100,00 (2 Dok)	1.911.022.000	100,00 (3 Dok)	2.744.714.000		2.744.714.000
		3	ketersediaan dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn Peraturan Daerah	1	ketersediaan dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn Peraturan Daerah	Ada/ Tidak Ada	100% Ada		100% Ada		100% Ada		100% Ada		100% Ada			





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab			
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
		4	ketersediaan dokumen perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn Peraturan Daerah	1	ketersediaan dokumen perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn Peraturan Daerah	Ada/ Tidak Ada	100% Ada		100% Ada		100% Ada		100% Ada		100% Ada				
		5	ketersediaan dokumen perencanaan RTRW yg telah ditetapkan dgn Peraturan Daerah	1	ketersediaan dokumen perencanaan RTRW yg telah ditetapkan dgn Peraturan Daerah	Ada/ Tidak Ada	100% Ada		100% Ada		100% Ada		100% Ada		100% Ada				
		6	ketersediaan dokumen perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn Peraturan Kepala Daerah	1	ketersediaan dokumen perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn Peraturan Kepala Daerah	Ada/ Tidak Ada	100% Ada		100% Ada		100% Ada		100% Ada		100% Ada				
4	Perencanaan Pembangunan Ekonomi & Sumber Daya Alam	1	% dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang ekonomi & SDA dgn kualitas baik	1	\sum dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang ekonomi & SDA dgn kualitas baik \sum dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang ekonomi & SDA yg disusun	%	100,00 (8 Dok)	874.275.000	100,00 (8 Dok)	892.771.000	100,00 (8 Dok)	920.776.000	100,00 (8 Dok)	943.167.000	100,00 (8 Dok)	979.725.000	100,00 (8 Dok)	979.725.000	Bappeda

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
5	Perencanaan Sosial Budaya	1 % dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang sosial budaya dgn kualitas baik	1 \sum dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang sosial budaya dgn kualitas baik	%		100,00 (45 Dok)	811.281.000	100,00 (45 Dok)	837.955.000	100,00 (45 Dok)	848.611.000	100,00 (45 Dok)	869.247.000	100,00 (45 Dok)	902.940.000	100,00 (45 Dok)	902.940.000	Bappeda
			\sum dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang sosial budaya yg disusun															
6	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur & Pengembangan Wilayah	1 % dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur & pengembangan wilayah dgn kualitas baik	1 \sum dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur & pengembangan wilayah dgn kualitas baik	%		100,00 (5 Dok)	737.903.000	100,00 (5 Dok)	753.514.000	100,00 (5 Dok)	770.110.000	100,00 (5 Dok)	788.837.000	100,00 (5 Dok)	819.413.000	100,00 (5 Dok)	819.413.000	Bappeda
			\sum dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur & pengembangan wilayah yg disusun															





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
7	Pengembangan Data & Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	% ketersediaan dokumen data yg aktual & valid sebagai masukan perencanaan pembangunan daerah	1 $\frac{\sum \text{dokumen dokumen data yg disusun tepat waktu thn ybs}}{\sum \text{dokumen data yg disusun thn ybs}}$	%		100,00 (1 Dok)	561.440.000	100,00 (1 Dok)	596.692.000	100,00 (1 Dok)	615.094.000	100,00 (1 Dok)	630.052.000	100,00 (1 Dok)	654.473.000	100,00 (1 Dok)	654.473.000	Bappeda

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
33 Penelitian & Pengembangan																	
1	Penelitian & Pengembangan	1 % implementasi rencana kelitbangan	1 $\frac{\sum \text{kelitbangan dlm RKPD}}{\sum \text{kelitbangan dlm RPJMD}}$	%		100,00 (2 penelitian)	439.833.000	100,00 (2 penelitian)	1.175.309.000	100,00 (2 penelitian)	1.159.139.000	100,00 (2 penelitian)	1.280.219.000	100,00 (2 penelitian)	1.329.841.000	Bappeda	
		2 % kebijakan Inovasi yg diterapkan di daerah	1 $\frac{\sum \text{inovasi yg diterapkan}}{\sum \text{inovasi yg diusulkan}}$	%		100,00 (0 kebijakan inovasi)	439.833.000	100,00 (1 kebijakan inovasi)	1.175.309.000	100,00 (1 kebijakan inovasi)	1.159.139.000	100,00 (1 kebijakan inovasi)	1.280.219.000	100,00 (1 kebijakan inovasi)	1.329.841.000	Bappeda	





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
34 Pengawasan																		
1	Pelayanan Administrasi & Sarana Prasarana Perkantoran	1 % ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	$\frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap layanan administrasi perkantoran}}{\sum \text{ASN}}$	%	100,00	100,00	1.214.550.000	100,00	1.240.245.000	100,00	1.277.398.000	100,00	1.308.462.000	100,00	1.359.235.000	Inspektorat		
		2 % sarana & prasarana aparatur yg layak fungsi	$\frac{\sum \text{sarana \& prasarana yg layak fungsi}}{\sum \text{sarana \& prasarana yg ada}}$	%	100,00	100,00	1.214.550.000	100,00	1.240.245.000	100,00	1.277.398.000	100,00	1.308.462.000	100,00	1.359.235.000			
2	Perencanaan & Pelaporan	1 % dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg sesuai pedoman yg disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{dokumen penyelenggaraan yg sesuai pedoman (Perencanaan \& Pelaporan)}}{\sum \text{dokumen yg wajib disusun}}$	%	100,00	100,00	27.700.000	100,00	28.286.000	100,00	32.189.000	100,00	32.972.000	100,00	34.249.000	Inspektorat		
		2 % laporan keuangan yg disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{laporan keuangan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{laporan keuangan yg wajib disusun tiap thn}}$	%	100,00	100,00	27.700.000	100,00	28.286.000	100,00	32.189.000	100,00	32.972.000	100,00	34.249.000			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1	% LK OPD sesuai SAP	$1 \frac{\sum \text{OPD dgn hasil Reviu LK sesuai SAP}}{\sum \text{OPD Kabupaten}}$	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Inspektorat		
		2	% OPD dgn maturitas penerapan SPIP mencapai level 3	$1 \frac{\sum \text{OPD dgn Nilai Maturitas mencapai Level 3}}{\sum \text{OPD Kabupaten}}$	%	55,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
		3	% penyelesaian tindak lanjut temuan audit	$1 \frac{\sum \text{temuan hasil pemeriksaan ditindaklanjuti}}{\sum \text{temuan hasil pemeriksaan}}$	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
		4	% penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat	$1 \frac{\sum \text{pengaduan masyarakat yg ditindaklanjuti}}{\sum \text{pengaduan masyarakat}}$	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
		5	Jumlah OPD/unit kerja dgn skor hasil evaluasi ZI minimal 75	$1 \frac{\sum \text{OPD dgn skor hasil evaluasi ZI minimal 75}}{\sum \text{OPD dgn skor hasil evaluasi ZI minimal 75}}$	OPD	1	1	2	2	4	4	4	4	4		4	
						3.170.080.000	3.237.147.000	3.341.917.000	3.423.184.000	3.555.870.000	3.555.870.000	3.555.870.000	3.555.870.000				
4	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa & Aparatur Pengawasan	1	Level Kapabilitas APIP		%	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Inspektorat		
						290.500.000	296.645.000	306.245.000	313.692.000	325.850.000	325.850.000	325.850.000	325.850.000				





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
5	Penataan & Penyempurnaan Kebijakan Sistem & Prosedur Pengawasan	1 % skor evaluasi SAKIP OPD berkategori minimal BB	1 \sum OPD dgn hasil evaluasi SAKIP berkategori BB	%	77,00	80,00	155.000.000	85,00	158.279.000	90,00	163.401.000	95,00	167.374.000	100,00	173.809.000	100,00	173.809.000	Inspektorat
		2 jumlah OPD dgn hasil audit kinerja minimal baik	1 \sum OPD dgn hasil audit kinerja minimal Baik	OPD	1	2	155.000.000	2	158.279.000	4	163.401.000	4	167.374.000	6	173.809.000	6	173.809.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
35 Diklat																		
1	Pendidikan dan Pelatihan	2 % pemenuhan kebutuhan diklat	1 $\frac{\sum \text{kebutuhan diklat yg dipenuhi}}{\sum \text{kebutuhan diklat}}$	%	4,72	12,17	19,68	24,83	32,57	37,81	37,81	2.606.062.000	2.715.896.000	2.805.075.000	2.919.353.000	2.919.353.000	BKD	
1	Pendidikan Kedinasan	1 % kelulusan peserta diklat	1 $\frac{\sum \text{peserta yg lulus diklat/bimtek}}{\sum \text{peserta diklat/bimtek}}$	%	100,00	100,00	2.469.008.000										BKD	
		2 % pegawai berpendidikan minimal D4/S1	1 $\frac{\sum \text{ASN berpendidikan D4, S1, S2 \& S3}}{\sum \text{ASN}}$	%	50,44	54,74												





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
36 Kepegawaian																		
1	Pelayanan Administrasi & Sarana Prasarana Perkantoran	1 % ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	$\frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap layanan administrasi perkantoran}}{\sum \text{ASN}}$	%	100,00	100,00	1.057.253.500	100,00	1.060.813.000	100,00	1.083.122.000	100,00	1.096.911.000	100,00	1.139.428.000	100,00	1.139.428.000	BKD
		2 % sarana & prasarana aparatur yg layak fungsi	$\frac{\sum \text{sarana \& prasarana yg layak fungsi}}{\sum \text{sarana \& prasarana yg ada}}$	%	100,00	100,00	1.057.253.500	100,00	1.060.813.000	100,00	1.083.122.000	100,00	1.096.911.000	100,00	1.139.428.000	100,00	1.139.428.000	BKD
2	Perencanaan & Pelaporan	1 % dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg sesuai pedoman yg disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{dokumen penyelenggaraan yg sesuai pedoman (Perencanaan \& Pelaporan)}}{\sum \text{dokumen yg wajib disusun}}$	%	100,00	100,00	15.000.000	100,00	15.317.000	100,00	22.854.000	100,00	23.222.000	100,00	25.911.000	100,00	25.911.000	BKD
		2 % laporan keuangan yg disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{laporan keuangan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{laporan keuangan yg wajib disusun tiap thn}}$	%	100,00	100,00	15.000.000	100,00	15.317.000	100,00	22.854.000	100,00	23.222.000	100,00	25.911.000	100,00	25.911.000	BKD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
3	Mutasi & Kepangkatan	1	% pejabat struktural yg memenuhi standar kompetensi	1	$\frac{\sum \text{pejabat struktural yg memenuhi standar kompetensi}}{\sum \text{pejabat struktural}}$	%	39,34	45,71	46,10	52,82	59,69	66,53	66,53		BKD				
		2	% pemangku jabatan struktural	1	$\frac{\sum \text{pemangku jabatan struktural}}{\sum \text{jabatan struktural}}$	%	95,19	96,29	96,97	97,66	97,94	98,21	98,21	899.212.000		913.201.000	932.374.000	964.722.000	964.722.000
		3	% pemangku jabatan fungsional	1	$\frac{\sum \text{pemangku jabatan fungsional}}{\sum \text{kebutuhan jabatan fungsional}}$	%	59,64	56,68	59,90	59,93	59,99	60,05	60,05						
4	Pengadaan & Informasi Kepegawaian	1	% pemenuhan kebutuhan pegawai	1	$\frac{\sum \text{pegawai}}{\sum \text{kebutuhan pegawai}}$	%	61,42	58,7	61,75	61,82	61,89	61,96	61,96		BKD				
		2	% pegawai dgn tingkat pendidikan minimal D4/S1	1	$\frac{\% \text{ pegawai dgn tingkat pendidikan minimal D4/S1}}{\sum \text{pegawai}}$	%	50,44	54,74	54,38	57,87	61,36	64,85	64,85	1.031.288.000		1.062.255.000	1.086.041.000	1.126.173.000	1.126.173.000
5	Penilaian Kinerja & Penghargaan	3	% aparatur yg berprestasi kerja baik	1	$\frac{\sum \text{aparatur yg berprestasi kerja baik}}{\sum \text{aparatur}}$	%	99,42	99,41	99,43	99,45	99,47	99,50	99,50		BKD				





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	Pembinaan Aparatur	1 % tingkat kehadiran pegawai	$1 \frac{\sum \text{ASN yg masuk dinas}}{\sum \text{ASN}}$			99,60	605.974.000										BKD
		2 % penerbitan SK sanksi	$1 \frac{\sum \text{sanksi yg diterbitkan}}{\sum \text{kasus yg ada}}$			100,00											
2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	1 % SK yg diterbitkan tepat waktu & benar	$1 \frac{\sum \text{SK yg diterbitkan tepat waktu \& benar}}{\sum \text{SK yg diterbitkan}}$			100,00	1.009.922.700										BKD
		2 % akurasi data pegawai	$1 \frac{\sum \text{data pegawai yg akurat}}{\sum \text{pegawai}}$			98,95											
3	Pengembangan Aparatur	1 % pemenuhan kebutuhan pegawai	$1 \frac{\sum \text{jabatan struktural, JFT, \& JFU yg terisi}}{\sum \text{jabatan struktural, JFT, \& JFU}}$			69,31	944.591.800										BKD
		2 % pejabat struktural yg diassessment yg memenuhi standar kompetensi	$1 \frac{\sum \text{peserta assesment yg memenuhi standar kompetensi}}{\sum \text{pejabat struktural yg sdh assesment}}$			85,88											

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
37 Administrasi Umum																		
1	Peningkatan Kualitas Rumusan Kebijakan, Koordinasi, & Administrasi Kesejahteraan Rakyat	1 % tokoh agama yg difasilitasi	1 \sum togam yg difasilitasi \sum togam	%	95,83	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	5.355.266.000	Bag. Kesra
		2 % lembaga keagamaan yg difasilitasi	1 \sum lembaga keagamaan yg difasilitasi \sum lembaga keagamaan	%	29,41	100,00	100,00	4.875.258.000	100,00	5.033.044.000	100,00	5.155.437.000	100,00	5.355.266.000	100,00	5.355.266.000		
2	Pemberdayaan lembaga Keagamaan & Kesejahteraan Rakyat	1 % tokoh agama yg difasilitasi	1 \sum togam yg difasilitasi \sum togam	%	60,80												4.774.251.500	Bag. Kesra
		2 % lembaga keagamaan yg difasilitasi	1 \sum lembaga keagamaan yg difasilitasi \sum lembaga keagamaan	%	95,29													
1	Peningkatan Kualitas Rumusan Kebijakan, Koordinasi & Administrasi Perekonomian	1 % kebijakan ekonomi yg dikoordinasikan	1 \sum dok. kebijakan ekonomi yg dikoordinir \sum dok. kebijakan ekonomi dibutuhkan	%	100,00	100,00		100,00	3.043.740.000	100,00	3.142.250.000	100,00	3.218.663.000	100,00	3.343.421.000	100,00	3.343.421.000	Bag. Administrasi Perekono- mian
2	Koordinasi Perumusan & Implementasi Kebijakan Ekonomi Kabupaten/ Daerah	1 jumlah kebijakan ekonomi yg dikoordinasikan	1 \sum kebijakan ekonomi yg dikoordinir	dok	10 dok	10 dok			2.980.680.000									Bag. Administrasi Perekono- mian





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
3	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	1 % sasaran sosialisasi peraturan di bidang cukai	1 $\frac{\sum \text{kecamatan yg disosialisasi thn ybs}}{\sum \text{kecamatan yg ada}}$	%	21,74	21,74	500.000.000	21,74	500.000.000	21,74	500.000.000	21,74	500.000.000	21,74	500.000.000	21,74	500.000.000	Bag. Administrasi Perekonomian
1	Peningkatan Kualitas Rumusan Kebijakan, Koordinasi & Administrasi Organisasi	1 % pengembangan kualitas pelayanan publik	1 $\frac{\sum \text{PD yg dievaluasi kinerja pelayanan publik}}{\sum \text{PD}}$	%				98,00		98,00		98,00		98,00		98,00	Bag. Organisasi	
		2 % PD dievaluasi tuisi & kelembagaan	1 $\frac{\sum \text{PD yg dievaluasi tuisi \& kelembagaan}}{\sum \text{PD}}$	%			60,00		70,00		80,00		90,00		90,00			
		3 ketepatan waktu penyusunan LKIP & PK Kabupaten	1 ketepatan waktu penyusunan LKIP & PK Kabupaten	Hari			90,00		90,00		90,00		90,00		90,00			
2	Peningkatan & Pengembangan Kualitas Pelayanan Publik	1 % OPD yg dilakukan penilaian pelayanan publik	1 $\frac{\sum \text{PD dinilai kinerja pelayanan publik}}{\sum \text{PD}}$	%		100,00	992.000.000										Bag. Organisasi	
		2 % PD yg memiliki SOP Tupoksi utama	1 $\frac{\sum \text{PD dgn SOP tupoksi utama}}{\sum \text{PD}}$	%		57,89												
		3 % capaian indikator bidang SPM	1 $\frac{\sum \text{indikator SPM yg dicapai}}{\sum \text{indikator SPM}}$			100,00												
		4 % pengembangan KBK	1 $\frac{\sum \text{PD yg dimonev KBK}}{\sum \text{PD}}$			100,00												

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab			
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
		5	% updating data anjab & ABK	1	$\frac{\sum \text{PD yg dilakukan Anjab ABK}}{\sum \text{PD}}$		100,00												
3	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1	jumlah ketepatan waktu penyusunan LKIP & PK Kabupaten	1	$\sum \text{hari penyusunan LKIP \& PK Kabupaten}$	Hari	90,00	261.913.000										Bag. Organisasi	
1	Peningkatan Kualitas Rumusan, Kebijakan, Koordinasi & Administrasi Perundang-undangan		terbentuknya produk hukum daerah yg berkualitas	1	$\sum \text{produk hukum daerah yg berkualitas}$	dok			753	1.086.569.000	753	1.197.256.000	753	1.298.509.000	753	1.318.943.000	753	1.318.943.000	Bag. Hukum
2	Penataan Peraturan Per- UU, Bantuan Hukum & Kerjasama Daerah	1	% penyelesaian sengketa hukum	1	$\frac{\sum \text{kasus hukum yg diselesaikan}}{\sum \text{kasus hukum yg ditangani}}$	%	100,00											Bag. Hukum	
		2	% produk hukum yg tepat waktu	1	$\frac{\sum \text{produk hukum diselesaikan tepat waktu}}{\sum \text{produk hukum yg diterbitkan}}$	%	100,00	1.087.359.000											
		3	% perda yg bermasalah	1	$\frac{\sum \text{perda yg bermasalah}}{\sum \text{perda yg ada}}$	%	0,00												





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	Peningkatan Kualitas Rumusan Kebijakan, Koordinasi & Administrasi Umum & Perlengkapan	1 % administrasi & sarana prasarana perkantoran yg terlayani	1 \sum ASN yg puas terhadap layanan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bag. Umum & Perlengkapan			
			\sum ASN Sekretariat Daerah															
			2 \sum sarana & prasarana perkantoran yg layak fungsi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
			\sum sarana & prasarana perkantoran yg ada															
2	% capaian koordinasi antar pemerintah daerah, & dgn pemerintah pusat/provinsi	1 \sum koordinasi antar pemerintah daerah & dgn pemerintah pusat/provinsi		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
			\sum koordinasi yg direncanakan															
3	% capaian koordinasi antar pemerintah daerah dgn masyarakat	1 \sum koordinasi tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial & kemasyarakatan dgn pemerintah		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
			\sum koordinasi yg direncanakan															
						12.658.937.000		19.894.024.000		20.537.891.000		21.037.327.000		21.852.755.000				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		4	% terpenuhinya kondisi baik sarana & prasarana Aparatur	%	97,00	97,34		97,36		97,42		97,45		97,62		97,62	
		a	% pemenuhan sarana & prasarana aparatur kendaraan roda 4 kondisi baik	1													
			\sum kend. roda 4 dlm kondisi baik	%	96,59	96,83		96,85		96,88		96,91		97,25		97,25	
			\sum seluruh kend. roda 4 yg ada														
		b	% pemenuhan sarana & prasarana aparatur kendaraan roda 2 kondisi baik	1													
			\sum kend. roda 2 dlm kondisi baik	%	97,82	97,85		97,87		97,97		97,99		98,00		98,00	
			\sum seluruh kend. roda 2 yg ada														
1	Peningkatan Kualitas Rumusan Kebijakan, Koordinasi & Administrasi Pengadaan Barang & Jasa	1	% anggaran pengadaan barang/jasa yg dikelola UKPBJ	1													Bag. Layanan Pengadaan
			\sum anggaran pengadaan barang & jasa yg dilaksanakan UKPBJ	%	0,00	20,00											
			\sum anggaran belanja menggunakan penyedia yg terdaftar pada SIRUP					957.057.000		1.369.122.000		1.413.433.000		1.447.804.000		1.503.922.000	





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		2	% pelaksanaan pengadaan secara elektronik melalui LPSE	\sum pengguna fasilitas pengadaan barang & jasa secara elektronik melalui LPSE	%	0,00	20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00		
				\sum seluruh pengadaan yg dapat difasilitasi secara elektronik melalui LPSE															
1	Peningkatan Kualitas Rumusan Kebijakan, Koordinasi & Administrasi Pembangunan & Keuangan	1	% pedoman kerja yg dihasilkan	1 \sum pedoman kerja, ASB, SSH yg dihasilkan (yang disusun)	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Bag. AP & Keuangan
				\sum pedoman kerja yg dibutuhkan				1.212.050.000			1.596.507.000		1.648.178.000		1.688.258.000		1.753.696.000		1.753.696.000
		2	% dokumen perencanaan & pelaporan yg selesai tepat waktu	2 \sum dokumen perencanaan & pelaporan yg tepat waktu	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				\sum pedoman perencanaan & pelaporan yg wajib disusun															
1	Peningkatan Kualitas Rumusan Kebijakan, Koordinasi & Administrasi Hubungan Masyarakat & Protokol	1	% kegiatan Kepala Daerah yg terdokumentasikan	\sum kegiatan Kepala Daerah yg terdokumentasikan	%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Bag. Humas & Protokol
				\sum kegiatan Kepala Daerah dlm 1 tahun				1.940.140.000		1.313.666.000		1.356.182.000		1.389.161.000		1.443.006.000		1.443.006.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	Peningkatan Kualitas Rumusan Kebijakan, Koordinasi & Administrasi Pemerintahan	1	% Laporan Pertanggung-jawaban Pemerintah Daerah yg disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{dokumen pertanggung-jawaban yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{dokumen pertanggung-jawaban yg wajib disusun tiap tahun}}$	%			100,00		100,00		100,00		100,00		Bag. Administrasi Pemerintahan	
		2	% kecamatan yg menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) berkualitas baik	$\frac{\sum \text{kecamatan yg menerapkan PATEN berkualitas baik}}{\sum \text{kecamatan}}$	%		1.844.290.000	30,43	1.903.979.000	47,82	1.950.279.000	65,21	2.025.874.000	78,26	2.025.874.000		78,26
		3	% capaian indikator bidang SPM	$\frac{\sum \text{indikator SPM yg dicapai}}{\sum \text{indikator SPM}}$	%			51,72			68,96			86,20			100,00
2	Pengembangan Implementasi Kebijakan Pemerintah	1	% peningkatan sarana & prasarana penunjang kinerja aparatur	$\frac{\sum \text{gedung yg direhab thn n + gedung yg direhab thn (N-1)}}{\sum \text{gedung yg membutuhkan rehab}}$	%	100,00	1.806.080.000									Bag. Administrasi Pemerintahan	
		2	% inventarisasi rupa bumi unsur buatan	$\frac{\sum \text{realisasi inventasirsasi penamaan unsur rupa bumi}}{\sum \text{unsur rupa bumi}}$	%	100,00											





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		3	% terfasilitasinya penetapan & penegasan batas desa/kelurahan	$\frac{\sum \text{realisasi penegasan batas desa \& kel}}{\sum \text{keseluruhan desa \& kel}}$	%	21,92												
		4	% tingkat pemahaman Perangkat Desa tentang administrasi desa	$\frac{\sum \text{peserta bintek}}{\sum \text{keseluruhan aparatur pemdes}}$	%	31,39												
1	Peningkatan Administrasi, Sarana Prasarana & Fasilitasi Pelaksanaan Kapasitas DPRD	1	% penyediaan administrasi perkantoran & pendalaman tugas DPRD	$\frac{\sum \text{penyediaan administrasi perkantoran \& pendalaman tugas DPRD yg dilaksanakan}}{\sum \text{penyediaan administrasi perkantoran \& pendalaman tugas DPRD yg direncanakan}}$	%			100,00	16.624.813.000	100,00	17.162.872.000	100,00	17.580.235.000	100,00	18.261.663.000	100,00	18.261.663.000	Sekretariat DPRD
2	Pengelolaan keuangan DPRD	1	% dokumen pengelolaan keuangan yg berkualitas	$\frac{\sum \text{dokumen yg dilaksanakan}}{\sum \text{dokumen yg direncanakan}}$	%	100,00 (39 dokumen)	194.553.950	100,00 (39 dokumen)	201.732.000	100,00 (39 dokumen)	208.262.000	100,00 (39 dokumen)	213.327.000	100,00 (39 dokumen)	221.596.000	100,00 (39 dokumen)	221.596.000	Sekretariat DPRD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
3	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Kehumasan, Fasilitasi & Rapat alat kelengkapan Dewan (AKD & Fraksi)	1	% Raperda yang dibahas	1	\sum Raperda yg dibahas	22	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Sekretariat DPRD	
					\sum Raperda yg diajukan		16 Raperda		16 Raperda		16 Raperda		16 Raperda		16 Raperda			
		2	% aspirasi yg ditindaklanjuti & penyampaian informasi kegiatan DPRD	1	\sum tindak lanjut penyelesaian permasalahan yg dihadapi masyarakat, dokumentasi/foto, berita yg diunggah di website, penyampaian informasi kepada masyarakat, kegiatan reses DPRD yg dilaksanakan	%	100,00	100,00	8.246.205.075	100,00	8.420.666.000	100,00	8.693.199.000	100,00	8.904.597.000	9.249.748.000	100,00	9.249.748.000
					\sum tindak lanjut penyelesaian permasalahan yg dihadapi masyarakat, dokumentasi/foto, berita yg diunggah di website, penyampaian informasi kepada masyarakat, kegiatan reses DPRD yg direncanakan		(237 kali)	(1.703 kali)		(1.748 kali)		(1.748 kali)		(1.748 kali)		(1.748 kali)		





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
4	Pelayanan Administrasi & Sarana Prasarana Perkantoran	1 % ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	$\frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap layanan administrasi perkantoran}}{\sum \text{ASN}}$	%	100,00	100,00	3.507.106.825											Sekretariat DPRD
		2 % sarana & prasarana aparatur yg layak fungsi	$\frac{\sum \text{sarana \& prasarana yg layak fungsi}}{\sum \text{sarana \& prasarana yg ada}}$															
5	Perencanaan & Pelaporan	1 % dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg sesuai pedoman yg disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{dokumen penyelenggaraan yg sesuai pedoman (Perencanaan \& Pelaporan)}}{\sum \text{dokumen yg wajib disusun}}$	%	100,00	100,00	3.000.000											Sekretariat DPRD
		2 % laporan keuangan yg disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{laporan keuangan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{laporan keuangan yg wajib disusun tiap thn}}$	%	100,00	100,00												
3	Peningkatan Sarana Prasarana & Fasilitas Pelaksanaan Kapasitas Pimpinan & Anggota DPRD	% sarana & prasarana & fasilitas pelaksanaan tugas yg diadakan	$\frac{\sum \text{sarana prasarana fasilitas yg dibutuhkan}}{\sum \text{sarana prasarana fasilitas yg diadakan}}$	%	100,00	100,00	12.773.270.050											Sekretariat DPRD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Kecamatan																	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran & Penyusunan Perencanaan & Pelaporan Kecamatan Maesan	1	% ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	$1 \frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap administrasi perkantoran}}{\sum \text{ASN Kec. Maesan}}$	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kec. Maesan	
		2	% penyusunan dokumen perencanaan & pelaporan yg disusun tepat waktu	$1 \frac{\sum \text{dokumen perencanaan \& pelaporan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{penyusunan dokumen perencanaan \& pelaporan}}$	%	100,00		100,00	227.565.000	100,00		100,00	240.643.000	100,00	249.970.000		249.970.000
2	Sinergitas Pemerintahan Kecamatan Maesan	1	% lembaga desa/kelurahan yg dibina (LPMD/LPMK, TKPK Kecamatan, Forum Komunikasi Sehat, Pokja Sehat, PKK & Karang Taruna)	$1 \frac{\sum \text{lembaga desa/kelurahan yg aktif}}{\sum \text{lembaga yg ada}}$	%	100,00		100,00	124.376.000	100,00		100,00	131.525.000	100,00	136.623.000	136.623.000	Kec. Maesan
		2	% tindak kriminal yg ditangani	$1 \frac{\sum \text{tindak kriminal yg ditangani}}{\sum \text{tindak kriminal di masyarakat}}$	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
3	Pelimpahan Kewenangan Kecamatan Maesan	1	% pelayanan Kecamatan Maesan yg tepat waktu sesuai SOP	$1 \frac{\sum \text{pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP}}{\text{seluruh permohonan pelayanan}}$	%	100,00		100,00	72.910.000	100,00	75.270.000	100,00	77.100.000	100,00	80.088.000	80.088.000	Kec. Maesan





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab						
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp				
4	Pemerintahan Umum Kecamatan Maesan	1 % desa yg tertib administrasi	1 \sum desa yg menyusun APBDes tepat waktu + \sum desa yg menyusun pertanggung-jawaban	%	100,00			100,00	113.857.000		100,00	117.542.000		100,00	120.400.000		100,00	125.067.000		100,00	125.067.000	Kec. Maesan
			2 x \sum desa																			
1	Pelayanan Administrasi & Sarana Prasarana Perkantoran	1 % ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	1 \sum ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00																	Kec. Maesan
		2 % sarana & prasarana aparatur yg layak fungsi	1 \sum sarana & prasarana yg layak fungsi	%	100,00				196.850.000													
			\sum sarana & prasarana yg ada																			
2	Perencanaan & Pelaporan	1 % dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg sesuai pedoman yg disusun tepat waktu	1 \sum dokumen perencanaan & pelaporan yg sesuai dgn pedoman	%	100,00																	Kec. Maesan
		2 % laporan keuangan yg disusun tepat waktu	1 \sum laporan keuangan yg disusun tepat waktu	%	100,00				26.000.000													
			\sum laporan keuangan yg ada pada																			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
3	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	1	% pengaduan/ pelaporan tindak kriminal yg ditindaklanjuti	1	$\frac{\sum \text{tindak kriminal yg di tindak lanjuti}}{\sum \text{tindak kriminal}}$	%	100,00	106.500.000											Kec. Maesan
		2	% peningkatan perijinan yg dikeluarkan tepat waktu	1	$\frac{\sum \text{selisih perijinan yg dikeluarkan thn N - thn N-1}}{\text{Thn N-1}}$	%	15,40												
4	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	% pemberdayaan lembaga desa/kelurahan (LPMD/K, PKK, Karang Taruna, BUMDes + lembaga keagamaan)	1	$\frac{\sum \text{lembaga kemasyarakatan desa/kel yg di bina (thn N - thn N-1)}}{\sum \text{lembaga kemasyarakatan desa/kel yg di bina thn N-1}}$	%	15,40	198.200.000											Kec. Maesan
		2	% desa yg menyusun laporan APBDes tepat waktu	1	$\frac{\sum \text{desa yg menyusun laporan APBDes tepat waktu}}{\sum \text{desa}}$	%	100,00												
		3	ketepatan waktu pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan	1	bulan penyelenggaraan musrenbang kecamatan	bulan	Peb												





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran & Penyusunan Perencanaan & Pelaporan Kecamatan Grujugan	1	% ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	$1 \frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap administrasi perkantoran}}{\sum \text{ASN Kec. Grujugan}}$	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kec. Grujugan		
		2	% penyusunan dokumen perencanaan & pelaporan yg disusun tepat waktu	$1 \frac{\sum \text{dokumen perencanaan \& pelaporan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{penyusunan dokumen perencanaan \& pelaporan}}$	%	100,00		100,00	217.352.000	100,00		224.387.000	100,00		229.843.000		238.752.000	238.752.000
2	Sinergitas Pemerintahan Kecamatan Grujugan	1	% lembaga desa/kelurahan yg dibina (LPMD/LPMK, TKPK Kecamatan, Forum Komunikasi Sehat, Pokja Sehat, PKK & Karang Taruna)	$1 \frac{\sum \text{lembaga desa/kelurahan yg aktif}}{\sum \text{lembaga yg ada}}$	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kec. Grujugan		
		2	% tindak kriminal yg ditangani	$1 \frac{\sum \text{tindak kriminal yg ditangani}}{\sum \text{tindak kriminal di masyarakat}}$	%	100,00		100,00	124.376.000	100,00		128.402.000	100,00		131.525.000		136.623.000	136.623.000
3	Pelimpahan Kewenangan Kecamatan Grujugan	1	% pelayanan Kecamatan Grujugan yg tepat waktu sesuai SOP	$1 \frac{\sum \text{pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP}}{\text{seluruh permohonan pelayanan}}$	%	100,00		100,00	72.910.000	100,00		100,00		100,00	80.087.000	80.087.000	Kec. Grujugan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab						
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp				
4	Pemerintahan Umum Kecamatan Grujugan	1 % desa yg tertib administrasi	1 \sum desa yg menyusun APBDes tepat waktu + \sum desa yg menyusun pertanggung-jawaban $2 \times \sum$ desa	%	100,00			100,00	113.858.000		100,00	117.543.000		100,00	120.402.000		100,00	125.069.000		100,00	125.069.000	Kec. Grujugan
1	Pelayanan Administrasi & Sarana Prasarana Perkantoran	1 % ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran 2 % sarana & prasarana aparatur yg layak fungsi	1 \sum ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran \sum total ASN 1 \sum sarana & prasarana yg layak fungsi \sum sarana & prasarana yg ada	%	100,00				186.850.000													Kec. Grujugan
2	Perencanaan & Pelaporan	1 % dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg sesuai pedoman yg disusun tepat waktu 2 % laporan keuangan yg disusun tepat waktu	1 \sum dokumen perencanaan & pelaporan yg sesuai dgn pedoman \sum dokumen perencanaan & pelaporan pada 1 \sum laporan keuangan yg disusun tepat waktu \sum laporan keuangan	%	100,00				26.000.000													Kec. Grujugan





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
3	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	1	% pengaduan/ pelaporan tindak kriminal yg ditindaklanjuti	1	$\frac{\sum \text{tindak kriminal yg di tindak lanjuti}}{\sum \text{tindak kriminal}}$	%	100,00	106.500.000									Kec. Grugujan	
		2	% peningkatan perijinan yg dikeluarkan tepat waktu	1	$\frac{\sum \text{selisih perijinan yg dikeluarkan thn N - thn N-1}}{\text{Thn N-1}}$	%	33,00											
4	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	% pemberdayaan lembaga desa/kelurahan (LPMD/K, PKK, Karang Taruna, BUMDes + lembaga keagamaan)	1	$\frac{\sum \text{lembaga kemasyarakatan desa/kel yg di bina (thn N - thn N-1)}}{\sum \text{lembaga kemasyarakatan desa/kel yg di bina thn N-1}}$	%	5,83	198.200.000									Kec. Grugujan	
		2	% desa yg menyusun laporan APBDes tepat waktu	1	$\frac{\sum \text{desa yg menyusun laporan APBDes tepat waktu}}{\sum \text{desa}}$	%	100,00											
		3	ketepatan waktu pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan	1	bulan penyelenggaraan musrenbang kecamatan	bulan	Peb											

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran & Penyusunan Perencanaan & Pelaporan Kecamatan Tamanan	1	% ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	$1 \frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap administrasi perkantoran}}{\sum \text{ASN Kec. Tamanan}}$	%	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kec. Tamanan			
		2	% penyusunan dokumen perencanaan & pelaporan yg disusun tepat waktu	$1 \frac{\sum \text{dokumen perencanaan \& pelaporan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{penyusunan dokumen perencanaan \& pelaporan}}$	%	100,00		100,00	200.146.000	100,00	206.624.000	100,00	211.648.000	100,00		219.852.000	219.852.000	
2	Sinergitas Pemerintahan Kecamatan Tamanan	1	% lembaga desa/kelurahan yg dibina (LPMD/LPMK, TKPK Kecamatan, Forum Komunikasi Sehat, Pokja Sehat, PKK & Karang Taruna)	$1 \frac{\sum \text{lembaga desa/kelurahan yg aktif}}{\sum \text{lembaga yg ada}}$	%	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kec. Tamanan			
		2	% tindak kriminal yg ditangani	$1 \frac{\sum \text{tindak kriminal yg ditangani}}{\sum \text{tindak kriminal di masyarakat}}$	%	100,00		100,00	126.265.000	100,00	130.352.000	100,00	133.521.000	100,00		138.696.000	138.696.000	
3	Pelimpahan Kewenangan Kecamatan Tamanan	1	% pelayanan Kecamatan Tamanan yg tepat waktu sesuai SOP	$1 \frac{\sum \text{pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP seluruh permohonan pelayanan}}{\text{seluruh permohonan pelayanan}}$	%	100,00		100,00	65.251.000	100,00	67.364.000	100,00	69.001.000	100,00	71.676.000	Kec. Tamanan		





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
4	Pemerintahan Umum Kecamatan Tamanan	1 % desa yg tertib administrasi	1 \sum desa yg menyusun APBDes tepat waktu + \sum desa yg menyusun pertanggung-jawaban $2 \times \sum$ desa	%	100,00			100,00	73.012.000	100,00	75.375.000	100,00	77.208.000	100,00	80.201.000	100,00	80.201.000	Kec. Tamanan
1	Pelayanan Administrasi & Sarana Prasarana Perkantoran	1 % ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran 2 % sarana & prasarana aparatur yg layak fungsi	1 \sum ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran \sum total ASN 1 \sum sarana & prasarana yg layak fungsi \sum sarana & prasarana yg ada	%	100,00				175.000.000	100,00								Kec. Tamanan
2	Perencanaan & Pelaporan	1 % dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg sesuai pedoman yg disusun tepat waktu 2 % laporan keuangan yg disusun tepat waktu	1 \sum dokumen perencanaan & pelaporan yg sesuai dgn pedoman \sum dokumen perencanaan & pelaporan pada 1 \sum laporan keuangan yg disusun tepat waktu \sum laporan keuangan	%	100,00				26.000.000	100,00								Kec. Tamanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
3	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	1	% pengaduan/ pelaporan tindak kriminal yg ditindaklanjuti	1	$\frac{\sum \text{tindak kriminal yg di tindak lanjuti}}{\sum \text{tindak kriminal}}$	%	100,00	99.000.000										Kec. Tamanan
		2	% peningkatan perijinan yg dikeluarkan tepat waktu	1	$\frac{\sum \text{selisih perijinan yg dikeluarkan thn N - thn N-1}}{\text{Thn N-1}}$	%	17,00											
4	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	% pemberdayaan lembaga desa/kelurahan (LPMD/K, PKK, Karang Taruna, BUMDes + lembaga keagamaan)	1	$\frac{\sum \text{lembaga kemasyarakatan desa/kel yg di bina (thn N - thn N-1)}}{\sum \text{lembaga kemasyarakatan desa/kel yg di bina thn N-1}}$	%	0,00	1.55.050.000										Kec. Tamanan
		2	% desa yg menyusun laporan APBDes tepat waktu	1	$\frac{\sum \text{desa yg menyusun laporan APBDes tepat waktu}}{\sum \text{desa}}$	%	100,00											
		3	ketepatan waktu pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan	1	bulan penyelenggaraan musrenbang kecamatan	bulan	Peb											





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran & Penyusunan Perencanaan & Pelaporan Kecamatan Jambesari Darus Sholah	1	% ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	$1 \frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap administrasi perkantoran}}{\sum \text{ASN Kec. Jambesari Darus Sholah}}$	%	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		Kec. Jambesari Darus Sholah		
		2	% penyusunan dokumen perencanaan & pelaporan yg disusun tepat waktu	$1 \frac{\sum \text{dokumen perencanaan \& pelaporan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{penyusunan dokumen perencanaan \& pelaporan}}$	%	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
2	Sinergitas Pemerintahan Kecamatan Jambesari Darus Sholah	1	% lembaga desa/kelurahan yg dibina (LPMD/LPMK, TKPK Kecamatan, Forum Komunikasi Sehat, Pokja Sehat, PKK & Karang Taruna)	$1 \frac{\sum \text{lembaga desa/kelurahan yg aktif}}{\sum \text{lembaga yg ada}}$	%	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		Kec. Jambesari Darus Sholah		
		2	% tindak kriminal yg ditangani	$1 \frac{\sum \text{tindak kriminal yg ditangani}}{\sum \text{tindak kriminal di masyarakat}}$	%	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
3	Pelimpahan Kewenangan Kecamatan Jambesari Darus Sholah	1	% pelayanan Kecamatan Jambesari Darus Sholah yg tepat waktu sesuai SOP	$1 \frac{\sum \text{pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP}}{\text{seluruh permohonan pelayanan}}$	%	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		Kec. Jambesari Darus Sholah		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
4	Pemerintahan Umum Kecamatan Jambesari Darus Sholah	1 % desa yg tertib administrasi	1 \sum desa yg menyusun APBDes tepat waktu + \sum desa yg menyusun pertanggung-jawaban $2 \times \sum$ desa	%	100,00			100,00	72.211.000	100,00	74.548.000	100,00	76.361.000	100,00	79.321.000	100,00	79.321.000	Kec. Jambesari Darus Sholah
1	Pelayanan Administrasi & Sarana Prasarana Perkantoran	1 % ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	1 \sum ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran \sum total ASN	%	100,00													Kec. Jambesari Darus Sholah
		2 % sarana & prasarana aparatur yg layak fungsi	1 \sum sarana & prasarana yg layak fungsi \sum sarana & prasarana yg ada	%	100,00													
2	Perencanaan & Pelaporan	1 % dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg sesuai pedoman yg disusun tepat waktu	1 \sum dokumen perencanaan & pelaporan yg sesuai dgn pedoman \sum dokumen perencanaan & pelaporan pada	%	100,00													Kec. Jambesari Darus Sholah
		2 % laporan keuangan yg disusun tepat waktu	1 \sum laporan keuangan yg disusun tepat waktu \sum laporan keuangan	%	100,00													
						176.850.000												
						26.000.000												





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	1	% pengaduan/ pelaporan tindak kriminal yg ditindaklanjuti	1	$\frac{\sum \text{tindak kriminal yg di tindak lanjuti}}{\sum \text{tindak kriminal}}$	%	100,00	99.000.000									Kec. Jambesari Darus Sholah
		2	% peningkatan perijinan yg dikeluarkan tepat waktu	1	$\frac{\sum \text{selisih perijinan yg dikeluarkan thn N - thn N-1}}{\text{Thn N-1}}$	%	25,00										
4	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	% pemberdayaan lembaga desa/kelurahan (LPMD/K, PKK, Karang Taruna, BUMDes + lembaga keagamaan)	1	$\frac{\sum \text{lembaga kemasyarakatan desa/kel yg di bina (thn N - thn N-1)}}{\sum \text{lembaga kemasyarakatan desa/kel yg di bina thn N-1}}$	%	24,00	1.533.200.000									Kec. Jambesari Darus Sholah
		2	% desa yg menyusun laporan APBDes tepat waktu	1	$\frac{\sum \text{desa yg menyusun laporan APBDes tepat waktu}}{\sum \text{desa}}$	%	100,00										
		3	ketepatan waktu pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan	1	bulan penyelenggaraan musrenbang kecamatan	bulan	Peb										

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran & Penyusunan Perencanaan & Pelaporan Kecamatan Pujer	1	% ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	$1 \frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap administrasi perkantoran}}{\sum \text{ASN Kec. Pujer}}$	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kec. Pujer	
		2	% penyusunan dokumen perencanaan & pelaporan yg disusun tepat waktu	$1 \frac{\sum \text{dokumen perencanaan \& pelaporan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{penyusunan dokumen perencanaan \& pelaporan}}$	%	100,00		100,00	217.352.000	100,00		224.387.000	229.843.000	100,00	238.752.000		238.752.000
2	Sinergitas Pemerintahan Kecamatan Pujer	1	% lembaga desa/kelurahan yg dibina (LPMD/LPMK, TKPK Kecamatan, Forum Komunikasi Sehat, Pokja Sehat, PKK & Karang Taruna)	$1 \frac{\sum \text{lembaga desa/kelurahan yg aktif}}{\sum \text{lembaga yg ada}}$	%	100,00		100,00	124.376.000	100,00		128.402.000	131.525.000	100,00	136.623.000	136.623.000	Kec. Pujer
		2	% tindak kriminal yg ditangani	$1 \frac{\sum \text{tindak kriminal yg ditangani}}{\sum \text{tindak kriminal di masyarakat}}$	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
3	Pelimpahan Kewenangan Kecamatan Pujer	1	% pelayanan Kecamatan Pujer yg tepat waktu sesuai SOP	$1 \frac{\sum \text{pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP}}{\text{seluruh permohonan pelayanan}}$	%	100,00		100,00	72.910.000	100,00		75.270.000	77.100.000	100,00	80.087.000	80.087.000	Kec. Pujer





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab						
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp				
4	Pemerintahan Umum Kecamatan Pujer	1 % desa yg tertib administrasi	1 $\frac{\sum \text{desa yg menyusun APBDes tepat waktu} + \sum \text{desa yg menyusun pertanggung-jawaban}}{2 \times \sum \text{desa}}$	%	100,00			100,00	113.858.000		100,00	117.543.000		100,00	120.402.000		100,00	125.069.000		100,00	125.069.000	Kec. Pujer
1	Pelayanan Administrasi & Sarana Prasarana Perkantoran	1 % ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	1 $\frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran}}{\sum \text{total ASN}}$	%	100,00				230.000.000													Kec. Pujer
		2 % sarana & prasarana aparatur yg layak fungsi	1 $\frac{\sum \text{sarana \& prasarana yg layak fungsi}}{\sum \text{sarana \& prasarana yg ada}}$	%	100,00																	
2	Perencanaan & Pelaporan	1 % dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg sesuai pedoman yg disusun tepat waktu	1 $\frac{\sum \text{dokumen perencanaan \& pelaporan yg sesuai dgn pedoman}}{\sum \text{dokumen perencanaan \& pelaporan}}$	%	100,00																	Kec. Pujer
		2 % laporan keuangan yg disusun tepat waktu	1 $\frac{\sum \text{laporan keuangan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{laporan keuangan yg ada pada}}$	%	100,00																	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
3	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	1	% pengaduan/ pelaporan tindak kriminal yg ditindaklanjuti	1	$\frac{\sum \text{tindak kriminal yg di tindak lanjuti}}{\sum \text{tindak kriminal}}$	%	100,00	99.000.000									Kec. Pujer	
		2	% peningkatan perijinan yg dikeluarkan tepat waktu	1	$\frac{\sum \text{selisih perijinan yg dikeluarkan thn N - thn N-1}}{\text{Thn N-1}}$	%	13,33											
4	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	% pemberdayaan lembaga desa/kelurahan (LPMD/K, PKK, Karang Taruna, BUMDes + lembaga keagamaan)	1	$\frac{\sum \text{lembaga kemasyarakatan desa/kel yg di bina (thn N - thn N-1)}}{\sum \text{lembaga kemasyarakatan desa/kel yg di bina thn N-1}}$	%	25,74	162.550.000									Kec. Pujer	
		2	% desa yg menyusun laporan APBDes tepat waktu	1	$\frac{\sum \text{desa yg menyusun laporan APBDes tepat waktu}}{\sum \text{desa}}$	%	100,00											
		3	ketepatan waktu pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan	1	bulan penyelenggaraan musrenbang kecamatan	bulan	Peb											





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran & Penyusunan Perencanaan & Pelaporan Kecamatan Tlogosari	1	% ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	$1 \frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap administrasi perkantoran}}{\sum \text{ASN Kec. Tlogosari}}$	%	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kec. Tlogosari			
		2	% penyusunan dokumen perencanaan & pelaporan yg disusun tepat waktu	$1 \frac{\sum \text{dokumen perencanaan & pelaporan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{penyusunan dokumen perencanaan & pelaporan}}$	%	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
2	Sinergitas Pemerintahan Kecamatan Tlogosari	1	% lembaga desa/kelurahan yg dibina (LPMD/LPMK, TKPK Kecamatan, Forum Komunikasi Sehat, Pokja Sehat, PKK & Karang Taruna)	$1 \frac{\sum \text{lembaga desa/kelurahan yg aktif}}{\sum \text{lembaga yg ada}}$	%	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kec. Tlogosari			
		2	% tindak kriminal yg ditangani	$1 \frac{\sum \text{tindak kriminal yg ditangani}}{\sum \text{tindak kriminal di masyarakat}}$	%	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
3	Pelimpahan Kewenangan Kecamatan Tlogosari	1	% pelayanan Kecamatan Tlogosari yg tepat waktu sesuai SOP	$1 \frac{\sum \text{pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP}}{\text{seluruh permohonan pelayanan}}$	%	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kec. Tlogosari			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab			
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
4	Pemerintahan Umum Kecamatan Tlogosari	1 % desa yg tertib administrasi	1 \sum desa yg menyusun APBDes tepat waktu + \sum desa yg menyusun pertanggung-jawaban $2 \times \sum$ desa	%	100,00			100,00	79.303.000	100,00	81.871.000	100,00	83.863.000	100,00	87.114.000	100,00	87.114.000	Kec. Tlogosari	
1	Pelayanan Administrasi & Sarana Prasarana Perkantoran	1 % ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	1 \sum ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran \sum total ASN	%	100,00				185.000.000									Kec. Tlogosari	
2		% sarana & prasarana aparatur yg layak fungsi	1 \sum sarana & prasarana yg layak fungsi \sum sarana & prasarana yg ada	%	100,00														
2	Perencanaan & Pelaporan	1 % dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg sesuai pedoman yg disusun tepat waktu	1 \sum dokumen perencanaan & pelaporan yg sesuai dgn pedoman \sum dokumen perencanaan & pelaporan	%	100,00				26.000.000										Kec. Tlogosari
2		% laporan keuangan yg disusun tepat waktu	1 \sum laporan keuangan yg disusun tepat waktu \sum laporan keuangan yg ada	%	100,00														





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
3	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	1	% pengaduan/ pelaporan tindak kriminal yg ditindaklanjuti	1	$\frac{\sum \text{tindak kriminal yg di tindak lanjuti}}{\sum \text{tindak kriminal}}$	%	100,00	99.000.000										Kec. Tlogosari
		2	% peningkatan perijinan yg dikeluarkan tepat waktu	1	$\frac{\sum \text{selisih perijinan yg dikeluarkan thn N - thn N-1}}{\text{Thn N-1}}$	%	4,16											
4	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	% pemberdayaan lembaga desa/kelurahan (LPMD/K, PKK, Karang Taruna, BUMDes + lembaga keagamaan)	1	$\frac{\sum \text{lembaga kemasyarakatan desa/kel yg di bina (thn N - thn N-1)}}{\sum \text{lembaga kemasyarakatan desa/kel yg di bina thn N-1}}$	%	3,30	1.55.050.000										Kec. Tlogosari
		2	% desa yg menyusun laporan APBDes tepat waktu	1	$\frac{\sum \text{desa yg menyusun laporan APBDes tepat waktu}}{\sum \text{desa}}$	%	100,00											
		3	ketepatan waktu pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan	1	bulan penyelenggaraan musrenbang kecamatan	bulan	Peb											

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran & Penyusunan Perencanaan & Pelaporan Kecamatan Sukosari	1	% ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	$1 \frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap administrasi perkantoran}}{\sum \text{ASN Kec. Sukosari}}$	%	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kec. Sukosari			
		2	% penyusunan dokumen perencanaan & pelaporan yg disusun tepat waktu	$1 \frac{\sum \text{dokumen perencanaan \& pelaporan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{penyusunan dokumen perencanaan \& pelaporan}}$	%	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
2	Sinergitas Pemerintahan Kecamatan Sukosari	1	% lembaga desa/kelurahan yg dibina (LPMD/LPMK, TKPK Kecamatan, Forum Komunikasi Sehat, Pokja Sehat, PKK & Karang Taruna)	$1 \frac{\sum \text{lembaga desa/kelurahan yg aktif}}{\sum \text{lembaga yg ada}}$	%	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kec. Sukosari			
		2	% tindak kriminal yg ditangani	$1 \frac{\sum \text{tindak kriminal yg ditangani}}{\sum \text{tindak kriminal di masyarakat}}$	%	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
3	Pelimpahan Kewenangan Kecamatan Sukosari	1	% pelayanan Kecamatan Sukosari yg tepat waktu sesuai SOP	$1 \frac{\sum \text{pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP seluruh permohonan pelayanan}}{\sum \text{pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP seluruh permohonan pelayanan}}$	%	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kec. Sukosari			





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
4	Pemerintahan Umum Kecamatan Sukosari	1 % desa yg tertib administrasi	1 \sum desa yg menyusun APBDes tepat waktu + \sum desa yg menyusun pertanggung-jawaban	%	100,00			100,00	46.466.000	100,00	47.970.000	100,00	49.136.000	100,00	51.041.000	100,00	51.041.000	Kec. Sukosari
			2 x \sum desa															
1	Pelayanan Administrasi & Sarana Prasarana Perkantoran	1 % ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	1 \sum ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00													Kec. Sukosari
		2 % sarana & prasarana aparatur yg layak fungsi	1 \sum sarana & prasarana yg layak fungsi	%	100,00													
			\sum sarana & prasarana yg ada															
2	Perencanaan & Pelaporan	1 % dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg sesuai pedoman yg disusun tepat waktu	1 \sum dokumen perencanaan & pelaporan yg sesuai dgn pedoman	%	100,00													Kec. Sukosari
		2 % laporan keuangan yg disusun tepat waktu	1 \sum laporan keuangan yg disusun tepat waktu	%	100,00													
			\sum laporan keuangan															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
3	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	1	% pengaduan/ pelaporan tindak kriminal yg ditindaklanjuti	1	$\frac{\sum \text{tindak kriminal yg di tindak lanjuti}}{\sum \text{tindak kriminal}}$	%	100,00	91.500.000											Kec. Sukosari
		2	% peningkatan perijinan yg dikeluarkan tepat waktu	1	$\frac{\sum \text{selisih perijinan yg dikeluarkan thn N - thn N-1}}{\text{Thn N-1}}$	%	0,00												
4	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	% pemberdayaan lembaga desa/kelurahan (LPMD/K, PKK, Karang Taruna, BUMDes + lembaga keagamaan)	1	$\frac{\sum \text{lembaga kemasyarakatan desa/kel yg di bina (thn N - thn N-1)}}{\sum \text{lembaga kemasyarakatan desa/kel yg di bina thn N-1}}$	%	6,25	110.700.000											Kec. Sukosari
		2	% desa yg menyusun laporan APBDes tepat waktu	1	$\frac{\sum \text{desa yg menyusun laporan APBDes tepat waktu}}{\sum \text{desa}}$	%	100,00												
		3	ketepatan waktu pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan	1	bulan penyelenggaraan musrenbang kecamatan	bulan	Peb												





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab			
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran & Penyusunan Perencanaan & Pelaporan Kecamatan Sumber Wringin	1	% ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	$1 \frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap administrasi perkantoran}}{\sum \text{ASN Kec. Sumber Wringin}}$	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kec. Sumber Wringin			
		2	% penyusunan dokumen perencanaan & pelaporan yg disusun tepat waktu	$1 \frac{\sum \text{dokumen perencanaan \& pelaporan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{penyusunan dokumen perencanaan \& pelaporan}}$	%	100,00		100,00	234.935.000	100,00		100,00	242.538.000	100,00			100,00	248.436.000	258.065.000
2	Sinergitas Pemerintahan Kecamatan Sumber Wringin	1	% lembaga desa/kelurahan yg dibina (LPMD/LPMK, TKPK Kecamatan, Forum Komunikasi Sehat, Pokja Sehat, PKK & Karang Taruna)	$1 \frac{\sum \text{lembaga desa/kelurahan yg aktif}}{\sum \text{lembaga yg ada}}$	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kec. Sumber Wringin			
		2	% tindak kriminal yg ditangani	$1 \frac{\sum \text{tindak kriminal yg ditangani}}{\sum \text{tindak kriminal di masyarakat}}$	%	100,00		100,00	103.039.000	100,00		100,00	106.374.000	100,00			100,00	108.961.000	113.185.000
3	Pelimpahan Kewenangan Kecamatan Sumber Wringin	1	% pelayanan Kecamatan Sumber Wringin yg tepat waktu sesuai SOP	$1 \frac{\sum \text{pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP}}{\text{seluruh permohonan pelayanan}}$	%	100,00		100,00	49.296.000	100,00		100,00	50.891.000	100,00		100,00	52.128.000	54.150.000	54.150.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
4	Pemerintahan Umum Kecamatan Sumber Wringin	1 % desa yg tertib administrasi	1 \sum desa yg menyusun APBDes tepat waktu + \sum desa yg menyusun pertanggung-jawaban 2 x \sum desa	%	100,00			100,00	67.194.000	100,00	69.368.000	100,00	71.055.000	100,00	73.809.000	100,00	73.809.000	Kec. Sumber Wringin
1	Pelayanan Administrasi & Sarana Prasarana Perkantoran	1 % ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	1 \sum ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran \sum total ASN	%	100,00				165.000.000									Kec. Sumber Wringin
		2 % sarana & prasarana aparatur yg layak fungsi	1 \sum sarana & prasarana yg layak fungsi \sum sarana & prasarana yg ada	%	100,00													
2	Perencanaan & Pelaporan	1 % dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg sesuai pedoman yg disusun tepat waktu	1 \sum dokumen perencanaan & pelaporan yg sesuai dgn pedoman \sum dokumen perencanaan & pelaporan	%	100,00				26.000.000									Kec. Sumber Wringin
		2 % laporan keuangan yg disusun tepat waktu	1 \sum laporan keuangan yg disusun tepat waktu \sum laporan keuangan yg ada pada	%	100,00													





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
3	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	1	% pengaduan/ pelaporan tindak kriminal yg ditindaklanjuti	1	$\frac{\sum \text{tindak kriminal yg di tindak lanjuti}}{\sum \text{tindak kriminal}}$	%	100,00	100.850.000									Kec. Sumber Wringin	
		2	% peningkatan perijinan yg dikeluarkan tepat waktu	1	$\frac{\sum \text{selisih perijinan yg dikeluarkan thn N - thn N-1}}{\text{Thn N-1}}$	%	50,00											
4	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	% pemberdayaan lembaga desa/kelurahan (LPMD/K, PKK, Karang Taruna, BUMDes + lembaga keagamaan)	1	$\frac{\sum \text{lembaga kemasyarakatan desa/kel yg di bina (thn N - thn N-1)}}{\sum \text{lembaga kemasyarakatan desa/kel yg di bina thn N-1}}$	%	15,63	153.200.000									Kec. Sumber Wringin	
		2	% desa yg menyusun laporan APBDes tepat waktu	1	$\frac{\sum \text{desa yg menyusun laporan APBDes tepat waktu}}{\sum \text{desa}}$	%	100,00											
		3	ketepatan waktu pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan	1	bulan penyelenggaraan musrenbang kecamatan	bulan	Peb											

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran & Penyusunan Perencanaan & Pelaporan Kecamatan Tapen	1	% ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	$1 \frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap administrasi perkantoran}}{\sum \text{ASN Kec. Tapen}}$	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kec. Tapen	
		2	% penyusunan dokumen perencanaan & pelaporan yg disusun tepat waktu	$1 \frac{\sum \text{dokumen perencanaan \& pelaporan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{penyusunan dokumen perencanaan \& pelaporan}}$	%	100,00		100,00	166.985.000	100,00	172.390.000	176.582.000	100,00	183.427.000	183.427.000		
2	Sinergitas Pemerintahan Kecamatan Tapen	1	% lembaga desa/kelurahan yg dibina (LPMD/LPMK, TKPK Kecamatan, Forum Komunikasi Sehat, Pokja Sehat, PKK & Karang Taruna)	$1 \frac{\sum \text{lembaga desa/kelurahan yg aktif}}{\sum \text{lembaga yg ada}}$	%	100,00		100,00	164.804.000	100,00	170.138.000	174.276.000	100,00	181.030.000	181.030.000	Kec. Tapen	
		2	% tindak kriminal yg ditangani	$1 \frac{\sum \text{tindak kriminal yg ditangani}}{\sum \text{tindak kriminal di masyarakat}}$	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
3	Pelimpahan Kewenangan Kecamatan Tapen	1	% pelayanan Kecamatan Tapen yg tepat waktu sesuai SOP	$1 \frac{\sum \text{pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP}}{\text{seluruh permohonan pelayanan}}$	%	100,00		100,00	38.002.000	100,00	39.232.000	100,00	40.185.000	100,00	41.743.000	41.743.000	Kec. Tapen





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab						
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp				
4	Pemerintahan Umum Kecamatan Tapen	1 % desa yg tertib administrasi	1 \sum desa yg menyusun APBDes tepat waktu + \sum desa yg menyusun pertanggung-jawaban	%	100,00			100,00	102.541.000		100,00	105.859.000		100,00	108.434.000		100,00	112.637.000		100,00	112.637.000	Kec. Tapen
			2 x \sum desa																			
1	Pelayanan Administrasi & Sarana Prasarana Perkantoran	1 % ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	1 \sum ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00				176.850.000													Kec. Tapen
		2 % sarana & prasarana aparatur yg layak fungsi	1 \sum sarana & prasarana yg layak fungsi	%	100,00																	
			\sum sarana & prasarana yg ada																			
2	Perencanaan & Pelaporan	1 % dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg sesuai pedoman yg disusun tepat waktu	1 \sum dokumen perencanaan & pelaporan yg sesuai dgn pedoman	%	100,00				26.000.000													Kec. Tapen
		2 % laporan keuangan yg disusun tepat waktu	1 \sum laporan keuangan yg disusun tepat waktu	%	100,00																	
			\sum laporan keuangan																			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
3	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	1	% pengaduan/ pelaporan tindak kriminal yg ditindaklanjuti	1	$\frac{\sum \text{tindak kriminal yg di tindak lanjuti}}{\sum \text{tindak kriminal}}$	%	100,00	99.000.000											Kec. Tapen
		2	% peningkatan perijinan yg dikeluarkan tepat waktu	1	$\frac{\sum \text{selisih perijinan yg dikeluarkan thn N - thn N-1}}{\text{Thn N-1}}$	%	28,57												
4	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	% pemberdayaan lembaga desa/kelurahan (LPMD/K, PKK, Karang Taruna, BUMDes + lembaga keagamaan)	1	$\frac{\sum \text{lembaga kemasyarakatan desa/kel yg di bina (thn N - thn N-1)}}{\sum \text{lembaga kemasyarakatan desa/kel yg di bina thn N-1}}$	%	4,14	1.53.200.000											Kec. Tapen
		2	% desa yg menyusun laporan APBDes tepat waktu	1	$\frac{\sum \text{desa yg menyusun laporan APBDes tepat waktu}}{\sum \text{desa}}$	%	100,00												
		3	ketepatan waktu pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan	1	bulan penyelenggaraan musrenbang kecamatan	bulan	Peb												





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran & Penyusunan Perencanaan & Pelaporan Kecamatan Wonosari	1	% ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	$1 \frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap administrasi perkantoran}}{\sum \text{ASN Kec. Wonosari}}$	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kec. Wonosari		
		2	% penyusunan dokumen perencanaan & pelaporan yg disusun tepat waktu	$1 \frac{\sum \text{dokumen perencanaan & pelaporan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{penyusunan dokumen perencanaan & pelaporan}}$	%	100,00		100,00	224.860.000	100,00	232.138.000	100,00	237.782.000	100,00	246.999.000		246.999.000	
2	Sinergitas Pemerintahan Kecamatan Wonosari	1	% lembaga desa/kelurahan yg dibina (LPMD/LPMK, TKPK Kecamatan, Forum Komunikasi Sehat, Pokja Sehat, PKK & Karang Taruna)	$1 \frac{\sum \text{lembaga desa/kelurahan yg aktif}}{\sum \text{lembaga yg ada}}$	%	100,00		100,00	124.676.000	100,00	128.711.000	100,00	131.841.000	100,00	136.951.000	136.951.000	Kec. Wonosari	
		2	% tindak kriminal yg ditangani	$1 \frac{\sum \text{tindak kriminal yg ditangani}}{\sum \text{tindak kriminal di masyarakat}}$	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
3	Pelimpahan Kewenangan Kecamatan Wonosari	1	% pelayanan Kecamatan Wonosari yg tepat waktu sesuai SOP	$1 \frac{\sum \text{pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP}}{\text{seluruh permohonan pelayanan}}$	%	100,00		100,00	74.709.000	100,00	77.126.000	100,00	79.001.000	100,00	82.063.000	82.063.000	Kec. Wonosari	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
4	Pemerintahan Umum Kecamatan Wonosari	1 % desa yg tertib administrasi	1 \sum desa yg menyusun APBDes tepat waktu + \sum desa yg menyusun pertanggung-jawaban	%	100,00			100,00	114.464.000	100,00	118.169.000	100,00	121.043.000	100,00	125.735.000	100,00	125.735.000	Kec. Wonosari
			2 x \sum desa															
1	Pelayanan Administrasi & Sarana Prasarana Perkantoran	1 % ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	1 \sum ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00													Kec. Wonosari
		2 % sarana & prasarana aparatur yg layak fungsi	1 \sum sarana & prasarana yg layak fungsi	%	100,00													
			\sum sarana & prasarana yg ada															
2	Perencanaan & Pelaporan	1 % dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg sesuai pedoman yg disusun tepat waktu	1 \sum dokumen perencanaan & pelaporan yg sesuai dgn pedoman	%	100,00													Kec. Wonosari
		2 % laporan keuangan yg disusun tepat waktu	1 \sum laporan keuangan yg disusun tepat waktu	%	100,00													
			\sum laporan keuangan															





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
3	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	1	% pengaduan/ pelaporan tindak kriminal yg ditindaklanjuti	1	$\frac{\sum \text{tindak kriminal yg di tindak lanjuti}}{\sum \text{tindak kriminal}}$	%	100,00	106.500.000									Kec. Wonosari	
		2	% peningkatan perijinan yg dikeluarkan tepat waktu	1	$\frac{\sum \text{selisih perijinan yg dikeluarkan thn N - thn N-1}}{\text{Thn N-1}}$	%	33,33											
4	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	% pemberdayaan lembaga desa/kelurahan (LPMD/K, PKK, Karang Taruna, BUMDes + lembaga keagamaan)	1	$\frac{\sum \text{lembaga kemasyarakatan desa/kel yg di bina (thn N - thn N-1)}}{\sum \text{lembaga kemasyarakatan desa/kel yg di bina thn N-1}}$	%	10,42	198.200.000									Kec. Wonosari	
		2	% desa yg menyusun laporan APBDes tepat waktu	1	$\frac{\sum \text{desa yg menyusun laporan APBDes tepat waktu}}{\sum \text{desa}}$	%	100,00											
		3	ketepatan waktu pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan	1	bulan penyelenggaraan musrenbang kecamatan	bulan	Peb											

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran & Penyusunan Perencanaan & Pelaporan Kecamatan Binakal	1	% ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	$1 \frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap administrasi perkantoran}}{\sum \text{ASN Kec. Binakal}}$	%			100,00		100,00		100,00		100,00				Kec. Binakal	
		2	% penyusunan dokumen perencanaan & pelaporan yg disusun tepat waktu	$1 \frac{\sum \text{dokumen perencanaan \& pelaporan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{penyusunan dokumen perencanaan \& pelaporan}}$	%			100,00	205.252.000	100,00	211.895.000		100,00	217.048.000	100,00	225.461.000			225.461.000
2	Sinergitas Pemerintahan Kecamatan Binakal	1	% lembaga desa/kelurahan yg dibina (LPMD/LPMK, TKPK Kecamatan, Forum Komunikasi Sehat, Pokja Sehat, PKK & Karang Taruna)	$1 \frac{\sum \text{lembaga desa/kelurahan yg aktif}}{\sum \text{lembaga yg ada}}$	%			100,00	108.395.000	100,00	111.903.000		100,00	114.624.000	100,00	119.067.000		119.067.000	Kec. Binakal
		2	% tindak kriminal yg ditangani	$1 \frac{\sum \text{tindak kriminal yg ditangani}}{\sum \text{tindak kriminal di masyarakat}}$	%			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
3	Pelimpahan Kewenangan Kecamatan Binakal	1	% pelayanan Kecamatan Binakal yg tepat waktu sesuai SOP	$1 \frac{\sum \text{pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP seluruh permohonan pelayanan}}{\sum \text{pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP seluruh permohonan pelayanan}}$	%			100,00	62.699.000	100,00	64.728.000		100,00	66.301.000	100,00	68.872.000		68.872.000	Kec. Binakal





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
4	Pemerintahan Umum Kecamatan Binakal	1 % desa yg tertib administrasi	1 \sum desa yg menyusun APBDes tepat waktu + \sum desa yg menyusun pertanggung-jawaban $2 \times \sum$ desa	%				100,00	88.330.000	100,00	91.188.000	100,00	93.406.000	100,00	97.026.000	100,00	97.026.000	Kec. Binakal
1	Pelayanan Administrasi & Sarana Prasarana Perkantoran	1 % ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	1 \sum ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran \sum total ASN	%	100,00	100,00			175.000.000									Kec. Binakal
		2 % sarana & prasarana aparatur yg layak fungsi	1 \sum sarana & prasarana yg layak fungsi \sum sarana & prasarana yg ada	%	100,00	100,00												
2	Perencanaan & Pelaporan	1 % dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg sesuai pedoman yg disusun tepat waktu	1 \sum dokumen perencanaan & pelaporan yg sesuai dgn pedoman \sum dokumen perencanaan & pelaporan	%	100,00	100,00			26.000.000									Kec. Binakal
		2 % laporan keuangan yg disusun tepat waktu	1 \sum laporan keuangan yg disusun tepat waktu \sum laporan keuangan	%	100,00	100,00												

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab			
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
3	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	1	% pengaduan/ pelaporan tindak kriminal yg ditindaklanjuti	1	$\frac{\sum \text{tindak kriminal yg di tindak lanjuti}}{\sum \text{tindak kriminal}}$	%	100,00	98.000.000											Kec. Binakal
		2	% peningkatan perijinan yg dikeluarkan tepat waktu	1	$\frac{\sum \text{selisih perijinan yg dikeluarkan thn N - thn N-1}}{\text{Thn N-1}}$	%	66,67												
4	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	% pemberdayaan lembaga desa/kelurahan (LPMD/K, PKK, Karang Taruna, BUMDes + lembaga keagamaan)	1	$\frac{\sum \text{lembaga kemasyarakatan desa/kel yg di bina (thn N - thn N-1)}}{\sum \text{lembaga kemasyarakatan desa/kel yg di bina thn N-1}}$	%	11,40	1.56.050.000											Kec. Binakal
		2	% desa yg menyusun laporan APBDes tepat waktu	1	$\frac{\sum \text{desa yg menyusun laporan APBDes tepat waktu}}{\sum \text{desa}}$	%	100,00												
		3	ketepatan waktu pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan	1	bulan penyelenggaraan musrenbang kecamatan	bulan	Peb												





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab			
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran & Penyusunan Perencanaan & Pelaporan Kecamatan Pakem	1	% ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	$1 \frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap administrasi perkantoran}}{\sum \text{ASN Kec. Pakem}}$	%			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kec. Pakem	
		2	% penyusunan dokumen perencanaan & pelaporan yg disusun tepat waktu	$1 \frac{\sum \text{dokumen perencanaan \& pelaporan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{penyusunan dokumen perencanaan \& pelaporan}}$	%			100,00	208.867.000	100,00	215.626.000	100,00	220.869.000	100,00	229.430.000	100,00	229.430.000		
2	Sinergitas Pemerintahan Kecamatan Pakem	1	% lembaga desa/kelurahan yg dibina (LPMD/LPMK, TKPK Kecamatan, Forum Komunikasi Sehat, Pokja Sehat, PKK & Karang Taruna)	$1 \frac{\sum \text{lembaga desa/kelurahan yg aktif}}{\sum \text{lembaga yg ada}}$	%			100,00	108.833.000	100,00	112.356.000	100,00	115.088.000	100,00	119.549.000	100,00	119.549.000		Kec. Pakem
		2	% tindak kriminal yg ditangani	$1 \frac{\sum \text{tindak kriminal yg ditangani}}{\sum \text{tindak kriminal di masyarakat}}$	%			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
3	Pelimpahan Kewenangan Kecamatan Pakem	1	% pelayanan Kecamatan Pakem yg tepat waktu sesuai SOP	$1 \frac{\sum \text{pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP seluruh permohonan pelayanan}}{\text{seluruh permohonan pelayanan}}$	%			100,00	69.474.000	100,00	71.722.000	100,00	73.466.000	100,00	76.314.000	100,00	76.314.000		Kec. Pakem

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4	Pemerintahan Umum Kecamatan Pakem	1 % desa yg tertib administrasi	1 \sum desa yg menyusun APBDes tepat waktu + \sum desa yg menyusun pertanggung-jawaban $2 \times \sum$ desa	%			100,00	77.501.000	100,00	80.009.000	100,00	81.956.000	100,00	85.132.000	100,00	85.132.000	Kec. Pakem
1	Pelayanan Administrasi & Sarana Prasarana Perkantoran	1 % ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	1 \sum ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran \sum total ASN	%	100,00	100,00		176.850.000									Kec. Pakem
		2 % sarana & prasarana aparatur yg layak fungsi	1 \sum sarana & prasarana yg layak fungsi \sum sarana & prasarana yg ada	%	100,00	100,00											
2	Perencanaan & Pelaporan	1 % dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg sesuai pedoman yg disusun tepat waktu	1 \sum dokumen perencanaan & pelaporan yg sesuai dgn pedoman \sum dokumen perencanaan & pelaporan	%	100,00	100,00		26.000.000									Kec. Pakem
		2 % laporan keuangan yg disusun tepat waktu	1 \sum laporan keuangan yg disusun tepat waktu \sum laporan keuangan	%	100,00	100,00											





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
3	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	1	% pengaduan/ pelaporan tindak kriminal yg ditindaklanjuti	1	$\frac{\sum \text{tindak kriminal yg di tindak lanjuti}}{\sum \text{tindak kriminal}}$	%	100,00	99.000.000									Kec. Pakem	
		2	% peningkatan perijinan yg dikeluarkan tepat waktu	1	$\frac{\sum \text{selisih perijinan yg dikeluarkan thn N - thn N-1}}{\text{Thn N-1}}$	%	24,14											
4	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	% pemberdayaan lembaga desa/kelurahan (LPMD/K, PKK, Karang Taruna, BUMDes + lembaga keagamaan)	1	$\frac{\sum \text{lembaga kemasyarakatan desa/kel yg di bina (thn N - thn N-1)}}{\sum \text{lembaga kemasyarakatan desa/kel yg di bina thn N-1}}$	%	20,00	1.531.200.000									Kec. Pakem	
		2	% desa yg menyusun laporan APBDes tepat waktu	1	$\frac{\sum \text{desa yg menyusun laporan APBDes tepat waktu}}{\sum \text{desa}}$	%	100,00											
		3	ketepatan waktu pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan	1	bulan penyelenggaraan musrenbang kecamatan	bulan	Peb											

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran & Penyusunan Perencanaan & Pelaporan Kecamatan Wringin	1	% ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	$1 \frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap administrasi perkantoran}}{\sum \text{ASN Kec. Wringin}}$	%			100,00		100,00		100,00		100,00			Kec. Wringin	
		2	% penyusunan dokumen perencanaan & pelaporan yg disusun tepat waktu	$1 \frac{\sum \text{dokumen perencanaan \& pelaporan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{penyusunan dokumen perencanaan \& pelaporan}}$	%			100,00	226.507.000	100,00	233.838.000		100,00	239.524.000	248.808.000	248.808.000		
2	Sinergitas Pemerintahan Kecamatan Wringin	1	% lembaga desa/kelurahan yg dibina (LPMD/LPMK, TKPK Kecamatan, Forum Komunikasi Sehat, Pokja Sehat, PKK & Karang Taruna)	$1 \frac{\sum \text{lembaga desa/kelurahan yg aktif}}{\sum \text{lembaga yg ada}}$	%			100,00	132.323.000	100,00	136.605.000		100,00	139.926.000	145.350.000	145.350.000		Kec. Wringin
		2	% tindak kriminal yg ditangani	$1 \frac{\sum \text{tindak kriminal yg ditangani}}{\sum \text{tindak kriminal di masyarakat}}$	%			100,00		100,00		100,00		100,00				
3	Pelimpahan Kewenangan Kecamatan Wringin	1	% pelayanan Kecamatan Wringin yg tepat waktu sesuai SOP	$1 \frac{\sum \text{pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP seluruh permohonan pelayanan}}{\sum \text{pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP seluruh permohonan pelayanan}}$	%			100,00	68.872.000	100,00	71.101.000		100,00	72.830.000	75.653.000	75.653.000		Kec. Wringin





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
4	Pemerintahan Umum Kecamatan Wringin	1 % desa yg tertib administrasi	1 \sum desa yg menyusun APBDes tepat waktu + \sum desa yg menyusun pertanggung-jawaban $2 \times \sum$ desa	%				100,00	111.007.000	100,00	114.600.000	100,00	117.387.000	100,00	121.937.000	100,00	121.937.000	Kec. Wringin
1	Pelayanan Administrasi & Sarana Prasarana Perkantoran	1 % ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran 2 % sarana & prasarana aparatur yg layak fungsi	1 \sum ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran \sum total ASN 1 \sum sarana & prasarana yg layak fungsi \sum sarana & prasarana yg ada	%	100,00	100,00		100,00	195.000.000	100,00	100,00							Kec. Wringin
2	Perencanaan & Pelaporan	1 % dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg sesuai pedoman yg disusun tepat waktu 2 % laporan keuangan yg disusun tepat waktu	1 \sum dokumen perencanaan & pelaporan yg sesuai dgn pedoman \sum dokumen perencanaan & pelaporan 1 \sum laporan keuangan yg disusun tepat waktu \sum laporan keuangan	%	100,00	100,00			27.850.000	100,00	100,00							Kec. Wringin

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab			
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
3	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	1	% pengaduan/ pelaporan tindak kriminal yg ditindaklanjuti	1	$\frac{\sum \text{tindak kriminal yg di tindak lanjuti}}{\sum \text{tindak kriminal}}$	%	100,00	106.500.000											Kec. Wringin
		2	% peningkatan perijinan yg dikeluarkan tepat waktu	1	$\frac{\sum \text{selisih perijinan yg dikeluarkan thn N - thn N-1}}{\text{Thn N-1}}$	%	100,00												
4	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	% pemberdayaan lembaga desa/kelurahan (LPMD/K, PKK, Karang Taruna, BUMDes + lembaga keagamaan)	1	$\frac{\sum \text{lembaga kemasyarakatan desa/kel yg di bina (thn N - thn N-1)}}{\sum \text{lembaga kemasyarakatan desa/kel yg di bina thn N-1}}$	%	1,24	198.200.000											Kec. Wringin
		2	% desa yg menyusun laporan APBDes tepat waktu	1	$\frac{\sum \text{desa yg menyusun laporan APBDes tepat waktu}}{\sum \text{desa}}$	%	100,00												
		3	ketepatan waktu pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan	1	bulan penyelenggaraan musrenbang kecamatan	bulan	Peb												





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab			
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran & Penyusunan Perencanaan & Pelaporan Kecamatan Taman Krocok	1	% ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	$1 \frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap administrasi perkantoran}}{\sum \text{ASN Kec. Taman Krocok}}$	%			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kec. Taman Krocok	
		2	% penyusunan dokumen perencanaan & pelaporan yg disusun tepat waktu	$1 \frac{\sum \text{dokumen perencanaan \& pelaporan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{penyusunan dokumen perencanaan \& pelaporan}}$	%			100,00	195.040.000	100,00	201.353.000		100,00	206.248.000	100,00	214.243.000			214.243.000
2	Sinergitas Pemerintahan Kecamatan Taman Krocok	1	% lembaga desa/kelurahan yg dibina (LPMD/LPMK, TKPK Kecamatan, Forum Komunikasi Sehat, Pokja Sehat, PKK & Karang Taruna)	$1 \frac{\sum \text{lembaga desa/kelurahan yg aktif}}{\sum \text{lembaga yg ada}}$	%			100,00	110.948.000	100,00	114.538.000		100,00	117.323.000	100,00	121.869.000		121.869.000	Kec. Taman Krocok
		2	% tindak kriminal yg ditangani	$1 \frac{\sum \text{tindak kriminal yg ditangani}}{\sum \text{tindak kriminal di masyarakat}}$	%			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
3	Pelimpahan Kewenangan Kecamatan Taman Krocok	1	% pelayanan Kecamatan Taman Krocok yg tepat waktu sesuai SOP	$1 \frac{\sum \text{pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP}}{\text{seluruh permohonan pelayanan}}$	%			100,00	70.357.000	100,00	72.634.000		100,00	74.400.000	100,00	77.283.000		77.283.000	Kec. Taman Krocok



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
3	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	1	% pengaduan/ pelaporan tindak kriminal yg ditindaklanjuti	1	$\frac{\sum \text{tindak kriminal yg di tindak lanjuti}}{\sum \text{tindak kriminal}}$	%	100,00	99.000.000									Kec. Taman Krocok	
		2	% peningkatan perijinan yg dikeluarkan tepat waktu	1	$\frac{\sum \text{selisih perijinan yg dikeluarkan thn N - thn N-1}}{\text{Thn N-1}}$	%	25,00											
4	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	% pemberdayaan lembaga desa/kelurahan (LPMD/K, PKK, Karang Taruna, BUMDes + lembaga keagamaan)	1	$\frac{\sum \text{lembaga kemasyarakatan desa/kel yg di bina (thn N - thn N-1)}}{\sum \text{lembaga kemasyarakatan desa/kel yg di bina thn N-1}}$	%	20,00	1.55.050.000									Kec. Taman Krocok	
		2	% desa yg menyusun laporan APBDes tepat waktu	1	$\frac{\sum \text{desa yg menyusun laporan APBDes tepat waktu}}{\sum \text{desa}}$	%	100,00											
		3	ketepatan waktu pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan	1	bulan penyelenggaraan musrenbang kecamatan	bulan	Peb											

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran & Penyusunan Perencanaan & Pelaporan Kecamatan Klabang	1	% ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	$1 \frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap administrasi perkantoran}}{\sum \text{ASN Kec. Klabang}}$	%			100,00		100,00		100,00		100,00		Kec. Klabang		
		2	% penyusunan dokumen perencanaan & pelaporan yg disusun tepat waktu	$1 \frac{\sum \text{dokumen perencanaan \& pelaporan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{penyusunan dokumen perencanaan \& pelaporan}}$	%			100,00	243.902.000	100,00	251.795.000		100,00	257.917.000	267.913.000		267.913.000	
2	Sinergitas Pemerintahan Kecamatan Klabang	1	% lembaga desa/kelurahan yg dibina (LPMD/LPMK, TKPK Kecamatan, Forum Komunikasi Sehat, Pokja Sehat, PKK & Karang Taruna)	$1 \frac{\sum \text{lembaga desa/kelurahan yg aktif}}{\sum \text{lembaga yg ada}}$	%			100,00	134.588.000	100,00	138.945.000		100,00	142.303.000	147.819.000	147.819.000	Kec. Klabang	
		2	% tindak kriminal yg ditangani	$1 \frac{\sum \text{tindak kriminal yg ditangani}}{\sum \text{tindak kriminal di masyarakat}}$	%			100,00		100,00		100,00		100,00				
3	Pelimpahan Kewenangan Kecamatan Klabang	1	% pelayanan Kecamatan Klabang yg tepat waktu sesuai SOP	$1 \frac{\sum \text{pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP seluruh permohonan pelayanan}}{\sum \text{pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP}}$	%			100,00	62.699.000	100,00	64.728.000		100,00	66.301.000	68.871.000	68.871.000	Kec. Klabang	





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
4	Pemerintahan Umum Kecamatan Klabang	1 % desa yg tertib administrasi	1 \sum desa yg menyusun APBDes tepat waktu + \sum desa yg menyusun pertanggung-jawaban $\frac{\sum \text{desa}}{2 \times \sum \text{desa}}$	%			100,00	113.858.000	100,00	117.543.000	100,00	120.423.000	100,00	125.092.000	100,00	125.092.000	Kec. Klabang	
1	Pelayanan Administrasi & Sarana Prasarana Perkantoran	1 % ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	1 \sum ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran $\frac{\sum \text{ASN}}{\sum \text{total ASN}}$	%	100,00	100,00		186.850.000									Kec. Klabang	
		2 % sarana & prasarana aparatur yg layak fungsi	1 \sum sarana & prasarana yg layak fungsi $\frac{\sum \text{sarana \& prasarana yg ada}}{\sum \text{sarana \& prasarana yg ada}}$	%	100,00	100,00												
2	Perencanaan & Pelaporan	1 % dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg sesuai pedoman yg disusun tepat waktu	1 \sum dokumen perencanaan & pelaporan yg sesuai dgn pedoman $\frac{\sum \text{dokumen perencanaan \& pelaporan}}{\sum \text{dokumen perencanaan \& pelaporan}}$	%	100,00	100,00		26.000.000									Kec. Klabang	
		2 % laporan keuangan yg disusun tepat waktu	1 \sum laporan keuangan yg disusun tepat waktu $\frac{\sum \text{laporan keuangan}}{\sum \text{laporan keuangan}}$	%	100,00	100,00												

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab			
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
3	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	1	% pengaduan/ pelaporan tindak kriminal yg ditindaklanjuti	1	$\frac{\sum \text{tindak kriminal yg di tindak lanjuti}}{\sum \text{tindak kriminal}}$	%	100,00	106.500.000											Kec. Klabang
		2	% peningkatan perijinan yg dikeluarkan tepat waktu	1	$\frac{\sum \text{selisih perijinan yg dikeluarkan thn N - thn N-1}}{\text{Thn N-1}}$	%	25,00												
4	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	% pemberdayaan lembaga desa/kelurahan (LPMD/K, PKK, Karang Taruna, BUMDes + lembaga keagamaan)	1	$\frac{\sum \text{lembaga kemasyarakatan desa/kel yg di bina (thn N - thn N-1)}}{\sum \text{lembaga kemasyarakatan desa/kel yg di bina thn N-1}}$	%	4,43	198.200.000											Kec. Klabang
		2	% desa yg menyusun laporan APBDes tepat waktu	1	$\frac{\sum \text{desa yg menyusun laporan APBDes tepat waktu}}{\sum \text{desa}}$	%	100,00												
		3	ketepatan waktu pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan	1	bulan penyelenggaraan musrenbang kecamatan	bulan	Peb												





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran & Penyusunan Perencanaan & Pelaporan Kecamatan Botolinggo	1	% ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	$1 \frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap administrasi perkantoran}}{\sum \text{ASN Kec. Botolinggo}}$	%			100,00		100,00		100,00		100,00		Kec. Botolinggo		
		2	% penyusunan dokumen perencanaan & pelaporan yg disusun tepat waktu	$1 \frac{\sum \text{dokumen perencanaan \& pelaporan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{penyusunan dokumen perencanaan \& pelaporan}}$	%			100,00	241.821.000	100,00	249.647.000	100,00	255.717.000	100,00	265.629.000		265.629.000	
2	Sinergitas Pemerintahan Kecamatan Botolinggo	1	% lembaga desa/kelurahan yg dibina (LPMD/LPMK, TKPK Kecamatan, Forum Komunikasi Sehat, Pokja Sehat, PKK & Karang Taruna)	$1 \frac{\sum \text{lembaga desa/kelurahan yg aktif}}{\sum \text{lembaga yg ada}}$	%			100,00		100,00		100,00		100,00		Kec. Botolinggo		
		2	% tindak kriminal yg ditangani	$1 \frac{\sum \text{tindak kriminal yg ditangani}}{\sum \text{tindak kriminal di masyarakat}}$	%			100,00	111.645.000	100,00	115.258.000	100,00	118.060.000	100,00	122.636.000		122.636.000	
3	Pelimpahan Kewenangan Kecamatan Botolinggo	1	% pelayanan Kecamatan Botolinggo yg tepat waktu sesuai SOP	$1 \frac{\sum \text{pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP}}{\text{seluruh permohonan pelayanan}}$	%			100,00	40.274.000	100,00	41.577.000	100,00	42.587.000	100,00	44.237.000	44.237.000	Kec. Botolinggo	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
4	Pemerintahan Umum Kecamatan Botolinggo	1 % desa yg tertib administrasi	1 \sum desa yg menyusun APBDes tepat waktu + \sum desa yg menyusun pertanggung-jawaban $2 \times \sum$ desa	%			100,00	63.277.000	100,00	65.326.000	100,00	66.916.000	100,00	69.510.000	100,00	69.510.000	Kec. Botolinggo	
1	Pelayanan Administrasi & Sarana Prasarana Perkantoran	1 % ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	1 \sum ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran \sum total ASN	%	100,00	100,00		213.300.000									Kec. Botolinggo	
		2 % sarana & prasarana aparatur yg layak fungsi	1 \sum sarana & prasarana yg layak fungsi \sum sarana & prasarana yg ada	%	100,00	100,00												
2	Perencanaan & Pelaporan	1 % dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg sesuai pedoman yg disusun tepat waktu	1 \sum dokumen perencanaan & pelaporan yg sesuai dgn pedoman \sum dokumen perencanaan & pelaporan	%	100,00	100,00		26.750.000									Kec. Botolinggo	
		2 % laporan keuangan yg disusun tepat waktu	1 \sum laporan keuangan yg disusun tepat waktu \sum laporan keuangan	%	100,00	100,00												





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
3	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	1	% pengaduan/ pelaporan tindak kriminal yg ditindaklanjuti	1	$\frac{\sum \text{tindak kriminal yg di tindak lanjuti}}{\sum \text{tindak kriminal}}$	%	100,00	57.500.000										Kec. Botolinggo
		2	% peningkatan perijinan yg dikeluarkan tepat waktu	1	$\frac{\sum \text{selisih perijinan yg dikeluarkan thn N - thn N-1}}{\text{Thn N-1}}$	%	25,00											
4	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	% pemberdayaan lembaga desa/kelurahan (LPMD/K, PKK, Karang Taruna, BUMDes + lembaga keagamaan)	1	$\frac{\sum \text{lembaga kemasyarakatan desa/kel yg di bina (thn N - thn N-1)}}{\sum \text{lembaga kemasyarakatan desa/kel yg di bina thn N-1}}$	%	3,59	1.57.500.000										Kec. Botolinggo
		2	% desa yg menyusun laporan APBDes tepat waktu	1	$\frac{\sum \text{desa yg menyusun laporan APBDes tepat waktu}}{\sum \text{desa}}$	%	100,00											
		3	ketepatan waktu pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan	1	bulan penyelenggaraan musrenbang kecamatan	bulan	Peb											

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab			
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran & Penyusunan Perencanaan & Pelaporan Kecamatan Ijen	1	% ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	$1 \frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap administrasi perkantoran}}{\sum \text{ASN Kec. Ijen}}$	%			100,00		100,00		100,00		100,00				Kec. Ijen	
		2	% penyusunan dokumen perencanaan & pelaporan yg disusun tepat waktu	$1 \frac{\sum \text{dokumen perencanaan \& pelaporan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{penyusunan dokumen perencanaan \& pelaporan}}$	%			100,00	214.787.000	100,00	221.739.000	100,00	227.130.000	100,00	235.934.000	235.934.000			
2	Sinergitas Pemerintahan Kecamatan Ijen	1	% lembaga desa/kelurahan yg dibina (LPMD/LPMK, TKPK Kecamatan, Forum Komunikasi Sehat, Pokja Sehat, PKK & Karang Taruna)	$1 \frac{\sum \text{lembaga desa/kelurahan yg aktif}}{\sum \text{lembaga yg ada}}$	%			100,00	111.599.000	100,00	115.210.000	100,00	118.011.000	100,00	122.585.000	122.585.000			Kec. Ijen
		2	% tindak kriminal yg ditangani	$1 \frac{\sum \text{tindak kriminal yg ditangani}}{\sum \text{tindak kriminal di masyarakat}}$	%			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
3	Pelimpahan Kewenangan Kecamatan Ijen	1	% pelayanan Kecamatan Ijen yg tepat waktu sesuai SOP	$1 \frac{\sum \text{pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP}}{\text{seluruh permohonan pelayanan}}$	%			100,00	60.133.000	100,00	62.078.000	100,00	63.588.000	100,00	66.052.000	66.052.000			Kec. Ijen





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
4	Pemerintahan Umum Kecamatan Ijen	1 % desa yg tertib administrasi	1 \sum desa yg menyusun APBDes tepat waktu + \sum desa yg menyusun pertanggung-jawaban $\frac{\sum \text{desa}}{2 \times \sum \text{desa}}$	%			100,00	101.083.000	100,00	104.356.000	100,00	106.894.000	100,00	111.038.000	100,00	111.038.000	Kec. Ijen	
1	Pelayanan Administrasi & Sarana Prasarana Perkantoran	1 % ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	1 \sum ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran $\frac{\sum \text{ASN}}{\sum \text{total ASN}}$	%	100,00	100,00		208.073.000									Kec. Ijen	
		2 % sarana & prasarana aparatur yg layak fungsi	1 \sum sarana & prasarana yg layak fungsi $\frac{\sum \text{sarana \& prasarana yg ada}}{\sum \text{sarana \& prasarana yg ada}}$	%	100,00	100,00												
2	Perencanaan & Pelaporan	1 % dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg sesuai pedoman yg disusun tepat waktu	1 \sum dokumen perencanaan & pelaporan yg sesuai dgn pedoman $\frac{\sum \text{dokumen perencanaan \& pelaporan}}{\sum \text{dokumen perencanaan \& pelaporan}}$	%	100,00	100,00		26.000.000									Kec. Ijen	
		2 % laporan keuangan yg disusun tepat waktu	1 \sum laporan keuangan yg disusun tepat waktu $\frac{\sum \text{laporan keuangan}}{\sum \text{laporan keuangan}}$	%	100,00	100,00												

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab					
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp			
3	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	1	% pengaduan/ pelaporan tindak kriminal yg ditindaklanjuti	1	$\frac{\sum \text{tindak kriminal yg di tindak lanjuti}}{\sum \text{tindak kriminal}}$	%	100,00	72.326.000													Kec. Ijen
		2	% peningkatan perijinan yg dikeluarkan tepat waktu	1	$\frac{\sum \text{selisih perijinan yg dikeluarkan thn N - thn N-1}}{\text{Thn N-1}}$	%	0,00														
4	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	% pemberdayaan lembaga desa/kelurahan (LPMD/K, PKK, Karang Taruna, BUMDes + lembaga keagamaan)	1	$\frac{\sum \text{lembaga kemasyarakatan desa/kel yg di bina (thn N - thn N-1)}}{\sum \text{lembaga kemasyarakatan desa/kel yg di bina thn N-1}}$	%	21,00	138.651.000													Kec. Ijen
		2	% desa yg menyusun laporan APBDes tepat waktu	1	$\frac{\sum \text{desa yg menyusun laporan APBDes tepat waktu}}{\sum \text{desa}}$	%	100,00														
		3	ketepatan waktu pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan	1	bulan penyelenggaraan musrenbang kecamatan	bulan	Peb														





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran & Penyusunan Perencanaan & Pelaporan Kecamatan Prajejan	1	% ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	$1 \frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap administrasi perkantoran}}{\sum \text{ASN Kec. Prajejan}}$	%			100,00		100,00		100,00		100,00			Kec. Prajejan	
		2	% penyusunan dokumen perencanaan & pelaporan yg disusun tepat waktu	$1 \frac{\sum \text{dokumen perencanaan \& pelaporan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{penyusunan dokumen perencanaan \& pelaporan}}$	%			100,00	212.144.000	100,00	219.011.000		100,00	224.337.000	100,00	233.032.000		233.032.000
2	Sinergitas Pemerintahan Kecamatan Prajejan	1	% lembaga desa/kelurahan yg dibina (LPMD/LPMK, TKPK Kecamatan, Forum Komunikasi Sehat, Pokja Sehat, PKK & Karang Taruna)	$1 \frac{\sum \text{lembaga desa/kelurahan yg aktif}}{\sum \text{lembaga yg ada}}$	%			100,00	120.240.000	100,00	124.131.000		100,00	127.150.000	100,00	132.079.000	132.079.000	Kec. Prajejan
		2	% tindak kriminal yg ditangani	$1 \frac{\sum \text{tindak kriminal yg ditangani}}{\sum \text{tindak kriminal di masyarakat}}$	%			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
3	Pelimpahan Kewenangan Kecamatan Prajejan	1	% pelayanan Kecamatan Prajejan yg tepat waktu sesuai SOP	$1 \frac{\sum \text{pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP}}{\text{seluruh permohonan pelayanan}}$	%			100,00	58.969.000	100,00	60.878.000		100,00	62.358.000	100,00	64.775.000	64.775.000	Kec. Prajejan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
4	Pemerintahan Umum Kecamatan Prajejan	1 % desa yg tertib administrasi	1 \sum desa yg menyusun APBDes tepat waktu + \sum desa yg menyusun pertanggung-jawaban $2 \times \sum$ desa	%			100,00	98.800.000	100,00	101.997.000	100,00	104.476.000	100,00	108.526.000	100,00	108.526.000	Kec. Prajejan	
1	Pelayanan Administrasi & Sarana Prasarana Perkantoran	1 % ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	1 \sum ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran \sum total ASN	%	100,00	100,00		166.850.000									Kec. Prajejan	
		2 % sarana & prasarana aparatur yg layak fungsi	1 \sum sarana & prasarana yg layak fungsi \sum sarana & prasarana yg ada	%	100,00	100,00												
2	Perencanaan & Pelaporan	1 % dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg sesuai pedoman yg disusun tepat waktu	1 \sum dokumen perencanaan & pelaporan yg sesuai dgn pedoman \sum dokumen perencanaan & pelaporan	%	100,00	100,00		26.000.000									Kec. Prajejan	
		2 % laporan keuangan yg disusun tepat waktu	1 \sum laporan keuangan yg disusun tepat waktu \sum laporan keuangan	%	100,00	100,00												





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
3	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	1	% pengaduan/ pelaporan tindak kriminal yg ditindaklanjuti	1	$\frac{\sum \text{tindak kriminal yg di tindak lanjuti}}{\sum \text{tindak kriminal}}$	%	100,00	99.000.000										Kec. Prajekan
		2	% peningkatan perijinan yg dikeluarkan tepat waktu	1	$\frac{\sum \text{selisih perijinan yg dikeluarkan thn N - thn N-1}}{\text{Thn N-1}}$	%	25,00											
4	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	% pemberdayaan lembaga desa/kelurahan (LPMD/K, PKK, Karang Taruna, BUMDes + lembaga keagamaan)	1	$\frac{\sum \text{lembaga kemasyarakatan desa/kel yg di bina (thn N - thn N-1)}}{\sum \text{lembaga kemasyarakatan desa/kel yg di bina thn N-1}}$	%	5,53	1.53.200.000										Kec. Prajekan
		2	% desa yg menyusun laporan APBDes tepat waktu	1	$\frac{\sum \text{desa yg menyusun laporan APBDes tepat waktu}}{\sum \text{desa}}$	%	100,00											
		3	ketepatan waktu pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan	1	bulan penyelenggaraan musrenbang kecamatan	bulan	Peb											

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran & Penyusunan Perencanaan & Pelaporan Kecamatan Cermee	1	% ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	$1 \frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap administrasi perkantoran}}{\sum \text{ASN Kec. Cermee}}$	%			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kec. Cermee	
		2	% penyusunan dokumen perencanaan & pelaporan yg disusun tepat waktu	$1 \frac{\sum \text{dokumen perencanaan \& pelaporan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{penyusunan dokumen perencanaan \& pelaporan}}$	%			100,00	261.042.000	100,00	269.493.000	100,00	276.047.000	100,00	286.746.000	100,00	286.746.000		
2	Sinergitas Pemerintahan Kecamatan Cermee	1	% lembaga desa/kelurahan yg dibina (LPMD/LPMK, TKPK Kecamatan, Forum Komunikasi Sehat, Pokja Sehat, PKK & Karang Taruna)	$1 \frac{\sum \text{lembaga desa/kelurahan yg aktif}}{\sum \text{lembaga yg ada}}$	%			100,00	134.657.000	100,00	139.015.000	100,00	142.395.000	100,00	147.914.000	100,00	147.914.000		Kec. Cermee
		2	% tindak kriminal yg ditangani	$1 \frac{\sum \text{tindak kriminal yg ditangani}}{\sum \text{tindak kriminal di masyarakat}}$	%			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
3	Pelimpahan Kewenangan Kecamatan Cermee	1	% pelayanan Kecamatan Cermee yg tepat waktu sesuai SOP	$1 \frac{\sum \text{pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP seluruh permohonan pelayanan}}{\sum \text{pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP seluruh permohonan pelayanan}}$	%			100,00	65.364.000	100,00	67.480.000	100,00	69.121.000	100,00	71.801.000	100,00	71.801.000		Kec. Cermee





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
4	Pemerintahan Umum Kecamatan Cermee	1 % desa yg tertib administrasi	1 $\frac{\sum \text{desa yg menyusun APBDes tepat waktu} + \sum \text{desa yg menyusun pertanggung-jawaban}}{2 \times \sum \text{desa}}$	%			100,00	87.857.000	100,00	90.698.000	100,00	92.903.000	100,00	96.504.000	100,00	96.504.000	Kec. Cermee	
1	Pelayanan Administrasi & Sarana Prasarana Perkantoran	1 % ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	1 $\frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran}}{\sum \text{total ASN}}$	%	100,00	100,00		227.193.500									Kec. Cermee	
		2 % sarana & prasarana aparatur yg layak fungsi	1 $\frac{\sum \text{sarana \& prasarana yg layak fungsi}}{\sum \text{sarana \& prasarana yg ada}}$	%	100,00	100,00												
2	Perencanaan & Pelaporan	1 % dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg sesuai pedoman yg disusun tepat waktu	1 $\frac{\sum \text{dokumen perencanaan \& pelaporan yg sesuai dgn pedoman}}{\sum \text{dokumen perencanaan \& pelaporan}}$	%	100,00	100,00		26.000.000									Kec. Cermee	
		2 % laporan keuangan yg disusun tepat waktu	1 $\frac{\sum \text{laporan keuangan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{laporan keuangan}}$	%	100,00	100,00												

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
3	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	1	% pengaduan/ pelaporan tindak kriminal yg ditindaklanjuti	1	$\frac{\sum \text{tindak kriminal yg di tindak lanjuti}}{\sum \text{tindak kriminal}}$	%	100,00	106.500.000									Kec. Cermee	
		2	% peningkatan perijinan yg dikeluarkan tepat waktu	1	$\frac{\sum \text{selisih perijinan yg dikeluarkan thn N - thn N-1}}{\text{Thn N-1}}$	%	25,00											
4	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	% pemberdayaan lembaga desa/kelurahan (LPMD/K, PKK, Karang Taruna, BUMDes + lembaga keagamaan)	1	$\frac{\sum \text{lembaga kemasyarakatan desa/kel yg di bina (thn N - thn N-1)}}{\sum \text{lembaga kemasyarakatan desa/kel yg di bina thn N-1}}$	%	4,20	177.856.500									Kec. Cermee	
		2	% desa yg menyusun laporan APBDes tepat waktu	1	$\frac{\sum \text{desa yg menyusun laporan APBDes tepat waktu}}{\sum \text{desa}}$	%	100,00											
		3	ketepatan waktu pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan	1	bulan penyelenggaraan musrenbang kecamatan	bulan	Peb											





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran & Penyusunan Perencanaan & Pelaporan Kecamatan Tenggarang	1	% ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	$1 \frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap administrasi perkantoran}}{\sum \text{ASN Kec. Tenggarang}}$	%	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kec. Tenggarang			
		2	% penyusunan dokumen perencanaan & pelaporan yg disusun tepat waktu	$1 \frac{\sum \text{dokumen perencanaan \& pelaporan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{penyusunan dokumen perencanaan \& pelaporan}}$	%	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
2	Sinergitas Pemerintahan Kecamatan Tenggarang	1	% lembaga desa/kelurahan yg dibina (LPMD/LPMK, TKPK Kecamatan, Forum Komunikasi Sehat, Pokja Sehat, PKK & Karang Taruna)	$1 \frac{\sum \text{lembaga desa/kelurahan yg aktif}}{\sum \text{lembaga yg ada}}$	%	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kec. Tenggarang			
		2	% tindak kriminal yg ditangani	$1 \frac{\sum \text{tindak kriminal yg ditangani}}{\sum \text{tindak kriminal di masyarakat}}$	%	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
3	Pelimpahan Kewenangan Kecamatan Tenggarang	1	% pelayanan Kecamatan Tenggarang yg tepat waktu sesuai SOP	$1 \frac{\sum \text{pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP}}{\text{seluruh permohonan pelayanan}}$	%	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kec. Tenggarang			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
4	Pemerintahan Umum Kecamatan Tenggarang	1 % desa yg tertib administrasi	1 \sum desa yg menyusun APBDes tepat waktu + \sum desa yg menyusun pertanggung-jawaban $2 \times \sum$ desa	%	100,00			100,00	284.902.000	100,00	294.123.000	100,00	301.274.000	100,00	312.951.000	100,00	312.951.000	Kec. Tenggarang
5	Kelurahan Kecamatan Tenggarang	1 % pelayanan kelurahan tepat waktu	\sum kegiatan yg berhasil dilaksanakan tepat waktu \sum total pelaksanaan kegiatan kelurahan	%	100,00			100,00	929.224.000	100,00	959.298.000	100,00	982.627.000	100,00	1.020.714.000	100,00	1.020.714.000	Kec. Tenggarang
1	Pelayanan Administrasi & Sarana Prasarana Perkantoran	1 % ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran 2 % sarana & prasarana aparatur yg layak fungsi	1 \sum ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran \sum total ASN 1 \sum sarana & prasarana yg layak fungsi \sum sarana & prasarana yg ada	%	100,00			100,00	196.850.000									Kec. Tenggarang
2	Perencanaan & Pelaporan	1 % dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg sesuai pedoman yg disusun tepat waktu	1 \sum dokumen perencanaan & pelaporan yg sesuai dgn pedoman \sum dokumen perencanaan & pelaporan	%	100,00				26.000.000									Kec. Tenggarang





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		2	% laporan keuangan yg disusun tepat waktu	1 $\frac{\sum \text{laporan keuangan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{laporan keuangan}}$	%	100,00												
3	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	1	% pengaduan/ pelaporan tindak kriminal yg ditindaklanjuti	1 $\frac{\sum \text{tindak kriminal yg di tindak lanjuti}}{\sum \text{tindak kriminal}}$	%	100,00	1.016.473.000										Kec. Tenggarang	
		2	% peningkatan perijinan yg dikeluarkan tepat waktu	1 $\frac{\sum \text{selisih perijinan yg dikeluarkan thn N - thn N-1}}{\text{Thn N-1}}$	%	50,00												
4	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	% pemberdayaan lembaga desa/kelurahan (LPMD/K, PKK, Karang Taruna, BUMDes + lembaga keagamaan)	1 $\frac{\sum \text{lembaga kemasyarakatan desa/kel yg di bina (thn N - thn N-1)}}{\sum \text{lembaga kemasyarakatan desa/kel yg di bina thn N-1}}$	%	4,23	198.200.000										Kec. Tenggarang	
		2	% desa yg menyusun laporan APBDes tepat waktu	1 $\frac{\sum \text{desa yg menyusun laporan APBDes tepat waktu}}{\sum \text{desa}}$	%	100,00												
		3	ketepatan waktu pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan	1 bulan penyelenggaraan musrenbang kecamatan	bulan	Peb												

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran & Penyusunan Perencanaan & Pelaporan Kecamatan Bondowoso	1	% ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	$1 \frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap administrasi perkantoran}}{\sum \text{ASN Kec. Bondowoso}}$	%			100,00		100,00		100,00		100,00		Kec. Bondowoso	
		2	% penyusunan dokumen perencanaan & pelaporan yg disusun tepat waktu	$1 \frac{\sum \text{dokumen perencanaan \& pelaporan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{penyusunan dokumen perencanaan \& pelaporan}}$	%			100,00	210.103.000	100,00	216.903.000	100,00	222.177.000	100,00	230.789.000		230.789.000
2	Sinergitas Pemerintahan Kecamatan Bondowoso	1	% lembaga desa/kelurahan yg dibina (LPMD/LPMK, TKPK Kecamatan, Forum Komunikasi Sehat, Pokja Sehat, PKK & Karang Taruna)	$1 \frac{\sum \text{lembaga desa/kelurahan yg aktif}}{\sum \text{lembaga yg ada}}$	%			100,00	139.236.000	100,00	143.742.000	100,00	147.238.000	100,00	152.945.000	152.945.000	Kec. Bondowoso
		2	% tindak kriminal yg ditangani	$1 \frac{\sum \text{tindak kriminal yg ditangani}}{\sum \text{tindak kriminal di masyarakat}}$	%			100,00		100,00		100,00		100,00			
3	Pelimpahan Kewenangan Kecamatan Bondowoso	1	% pelayanan Kecamatan Bondowoso yg tepat waktu sesuai SOP	$1 \frac{\sum \text{pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP}}{\text{seluruh permohonan pelayanan}}$	%			100,00	47.867.000	100,00	49.416.000	100,00	50.618.000	100,00	52.580.000	52.580.000	Kec. Bondowoso



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab						
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp				
		2	% laporan keuangan yg disusun tepat waktu	1 $\frac{\sum \text{laporan keuangan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{laporan keuangan}}$	%	100,00	100,00															
3	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	1	% pengaduan/ pelaporan tindak kriminal yg ditindaklanjuti	1 $\frac{\sum \text{tindak kriminal yg di tindak lanjuti}}{\sum \text{tindak kriminal}}$	%		100,00															Kec. Bondowoso
		2	% peningkatan perijinan yg dikeluarkan tepat waktu	1 $\frac{\sum \text{selisih perijinan yg dikeluarkan thn N - thn N-1}}{\text{thn N-1}}$	%		6,67															
4	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	% pemberdayaan lembaga desa/kelurahan (LPMD/K, PKK, Karang Taruna, BUMDes + lembaga keagamaan)	1 $\frac{\sum \text{lembaga kemasyarakatan desa/kel yg di bina (thn N - thn N-1)}}{\sum \text{lembaga kemasyarakatan desa/kel yg di bina thn N-1}}$	%		0,59															Kec. Bondowoso
		2	% desa yg menyusun laporan APBDes tepat waktu	1 $\frac{\sum \text{desa yg menyusun laporan APBDes tepat waktu}}{\sum \text{desa}}$	%		100,00															
		3	ketepatan waktu pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan	1 bulan penyelenggaraan musrenbang kecamatan	bulan																	





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab			
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran & Penyusunan Perencanaan & Pelaporan Kecamatan Curahdami	1	% ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	$1 \frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap administrasi perkantoran}}{\sum \text{ASN Kec. Curahdami}}$	%			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kec. Curahdami	
		2	% penyusunan dokumen perencanaan & pelaporan yg disusun tepat waktu	$1 \frac{\sum \text{dokumen perencanaan \& pelaporan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{penyusunan dokumen perencanaan \& pelaporan}}$	%			100,00	211.512.000	100,00	218.357.000	100,00	223.667.000	100,00	232.336.000	100,00	232.336.000		
2	Sinergitas Pemerintahan Kecamatan Curahdami	1	% lembaga desa/kelurahan yg dibina (LPMD/LPMK, TKPK Kecamatan, Forum Komunikasi Sehat, Pokja Sehat, PKK & Karang Taruna)	$1 \frac{\sum \text{lembaga desa/kelurahan yg aktif}}{\sum \text{lembaga yg ada}}$	%			100,00	132.199.000	100,00	136.477.000	100,00	139.795.000	100,00	145.214.000	100,00	145.214.000		Kec. Curahdami
		2	% tindak kriminal yg ditangani	$1 \frac{\sum \text{tindak kriminal yg ditangani}}{\sum \text{tindak kriminal di masyarakat}}$	%			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
3	Pelimpahan Kewenangan Kecamatan Curahdami	1	% pelayanan Kecamatan Curahdami yg tepat waktu sesuai SOP	$1 \frac{\sum \text{pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP}}{\text{seluruh permohonan pelayanan}}$	%			100,00	71.722.000	100,00	74.043.000	100,00	75.845.000	100,00	78.785.000	100,00	78.785.000		Kec. Curahdami

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
4	Pemerintahan Umum Kecamatan Curahdami	1 % desa yg tertib administrasi	1 \sum desa yg menyusun APBDes tepat waktu + \sum desa yg menyusun pertanggung- jawaban $2 \times \sum$ desa	%			100,00	123.276.000	100,00	127.266.000	100,00	130.361.000	100,00	135.414.000	100,00	135.414.000	Kec. Curahdami	
5	Kelurahan Kecamatan Curahdami	1 % pelayanan kelurahan tepat waktu	\sum kegiatan yg berhasil dilaksanakan tepat waktu \sum total pelaksanaan kegiatan kelurahan	%		100,00	898.590.000	100,00	927.672.000	100,00	950.231.000	100,00	987.062.000	100,00	987.062.000	Kec. Curahdami		
1	Pelayanan Administrasi & Sarana Prasarana Perkantoran	1 % ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran 2 % sarana & prasarana aparatur yg layak fungsi	1 \sum ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran \sum total ASN 1 \sum sarana & prasarana yg layak fungsi \sum sarana & prasarana yg ada	%	100,00	100,00		196.850.000									Kec. Curahdami	
2	Perencanaan & Pelaporan	1 % dokumen penyelengga- raan pemerintahan yg sesuai pedoman yg disusun tepat waktu	1 \sum dokumen perencanaan & pelaporan yg sesuai dgn pedoman \sum dokumen perencanaan & pelaporan	%	100,00	100,00		26.000.000									Kec. Curahdami	





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		2	% laporan keuangan yg disusun tepat waktu	1 $\frac{\sum \text{laporan keuangan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{laporan keuangan}}$	%	100,00	100,00											
3	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	1	% pengaduan/ pelaporan tindak kriminal yg ditindaklanjuti	1 $\frac{\sum \text{tindak kriminal yg di tindak lanjuti}}{\sum \text{tindak kriminal}}$	%		100,00											Kec. Curahdami
		2	% peningkatan perijinan yg dikeluarkan tepat waktu	1 $\frac{\sum \text{selisih perijinan yg dikeluarkan thn N - thn N-1}}{\text{thn N-1}}$	%		32,46											
4	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	% pemberdayaan lembaga desa/kelurahan (LPMD/K, PKK, Karang Taruna, BUMDes + lembaga keagamaan)	1 $\frac{\sum \text{lembaga kemasyarakatan desa/kel yg di bina (thn N - thn N-1)}}{\sum \text{lembaga kemasyarakatan desa/kel yg di bina thn N-1}}$	%		8,64											Kec. Curahdami
		2	% desa yg menyusun laporan APBDes tepat waktu	1 $\frac{\sum \text{desa yg menyusun laporan APBDes tepat waktu}}{\sum \text{desa}}$	%		100,00											
		3	ketepatan waktu pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan	1 bulan penyelenggaraan musrenbang kecamatan	bulan		Peb											
								986.473.000										
									198.200.000									

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran & Penyusunan Perencanaan & Pelaporan Kecamatan Tegalampel	1	% ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	$1 \frac{\sum \text{ASN yg puas terhadap administrasi perkantoran}}{\sum \text{ASN Kec. Tegalampel}}$	%			100,00	214.000.000	100,00	220.226.000	100,00	225.401.000	100,00	234.090.000	Kec. Tegalampel	
		2	% penyusunan dokumen perencanaan & pelaporan yg disusun tepat waktu	$1 \frac{\sum \text{dokumen perencanaan \& pelaporan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{penyusunan dokumen perencanaan \& pelaporan}}$	%			100,00		100,00		100,00		100,00			234.090.000
2	Sinergitas Pemerintahan Kecamatan Tegalampel	1	% lembaga desa/kelurahan yg dibina (LPMD/LPMK, TKPK Kecamatan, Forum Komunikasi Sehat, Pokja Sehat, PKK & Karang Taruna)	$1 \frac{\sum \text{lembaga desa/kelurahan yg aktif}}{\sum \text{lembaga yg ada}}$	%			100,00	110.815.000	100,00	113.703.000	100,00	116.289.000	100,00	120.750.000	Kec. Tegalampel	
		2	% tindak kriminal yg ditangani	$1 \frac{\sum \text{tindak kriminal yg ditangani}}{\sum \text{tindak kriminal di masyarakat}}$	%			100,00		100,00		100,00		100,00			
3	Pelimpahan Kewenangan Kecamatan Tegalampel	1	% pelayanan Kecamatan Tegalampel yg tepat waktu sesuai SOP	$1 \frac{\sum \text{pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP}}{\text{seluruh permohonan pelayanan}}$	%			100,00	59.349.000	100,00	60.570.000	100,00	61.863.000	100,00	64.215.000	Kec. Tegalampel	





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
4	Pemerintahan Umum Kecamatan Tegalampel	1 % desa yg tertib administrasi	1 \sum desa yg menyusun APBDes tepat waktu + \sum desa yg menyusun pertanggung-jawaban $\frac{\sum \text{desa}}{2 \times \sum \text{desa}}$	%				100,00	111.146.000	100,00	116.842.000	100,00	120.221.000	100,00	125.021.000	100,00	125.021.000	Kec. Tegalampel
5	Kelurahan Kecamatan Tegalampel	1 % pelayanan kelurahan tepat waktu	1 \sum kegiatan yg berhasil dilaksanakan tepat waktu $\frac{\sum \text{total pelaksanaan kegiatan kelurahan}}{\sum \text{total pelaksanaan kegiatan kelurahan}}$	%			100,00	898.590.000	100,00	927.672.000	100,00	950.231.000	100,00	987.062.000	100,00	987.062.000	987.062.000	Kec. Tegalampel
1	Pelayanan Administrasi & Sarana Prasarana Perkantoran	1 % ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran 2 % sarana & prasarana aparatur yg layak fungsi	1 \sum ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran $\frac{\sum \text{total ASN}}{\sum \text{total ASN}}$ 1 \sum sarana & prasarana yg layak fungsi $\frac{\sum \text{sarana \& prasarana yg ada}}{\sum \text{sarana \& prasarana yg ada}}$	%	100,00	100,00		175.000.000										Kec. Tegalampel
2	Perencanaan & Pelaporan	1 % dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg sesuai pedoman yg disusun tepat waktu	1 \sum dokumen perencanaan & pelaporan yg sesuai dgn pedoman $\frac{\sum \text{dokumen perencanaan \& pelaporan}}{\sum \text{dokumen perencanaan \& pelaporan}}$	%	100,00	100,00		23.500.000										Kec. Tegalampel

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Satuan	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		2	% laporan keuangan yg disusun tepat waktu	1 $\frac{\sum \text{laporan keuangan yg disusun tepat waktu}}{\sum \text{laporan keuangan}}$	%	100,00	100,00											
3	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	1	% pengaduan/ pelaporan tindak kriminal yg ditindaklanjuti	1 $\frac{\sum \text{tindak kriminal yg di tindak lanjuti}}{\sum \text{tindak kriminal}}$	%		100,00											Kec. Tegalampel
		2	% peningkatan perijinan yg dikeluarkan tepat waktu	1 $\frac{\sum \text{selisih perijinan yg dikeluarkan thn N - thn N-1}}{\text{thn N-1}}$	%		57,14											
4	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	% pemberdayaan lembaga desa/kelurahan (LPMD/K, PKK, Karang Taruna, BUMDes + lembaga keagamaan)	1 $\frac{\sum \text{lembaga kemasyarakatan desa/kel yg di bina (thn N - thn N-1)}}{\sum \text{lembaga kemasyarakatan desa/kel yg di bina thn N-1}}$	%		4,41											Kec. Tegalampel
		2	% desa yg menyusun laporan APBDes tepat waktu	1 $\frac{\sum \text{desa yg menyusun laporan APBDes tepat waktu}}{\sum \text{desa}}$	%		100,00											
		3	ketepatan waktu pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan	1 bulan penyelenggaraan musrenbang kecamatan	bulan		Peb											
								1.005.823.000										
									1.607.000.000									



EVALUASI RANWAL

EVALUASI RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018-2023





STASIUN KERETA API
BONDOWOSO

STASIUN BONDOWOSO +253M

MUSEUM KERETA API
BONDOWOSO
JALAN KEMERDEKAAN NO. 10
KOTA BONDOWOSO
JAWA TIMUR

MUSEUM KERETA API BONDOWOSO



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah, khususnya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah, serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

8.1 Indikator Kinerja Utama

Target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, disajikan dalam Tabel 8.1.

8.2 Indikator Kinerja Kunci

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan sebagaimana Tabel 8.2.

8.2 Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan capaian kinerja urusan Pemerintahan yang meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu : aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Penetapan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja utama. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja urusan pemerintahan dapat dilihat pada tabel 8.3.

Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bondowoso

No.	Indikator	Kondisi Awal RPJMD 2017	Target Capaian 2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir RPJMD
1	Persentase pertumbuhan PDRB kategori pertanian (ADHB)	4,52%	6,69%	7,11%	7,09%	7,08%	7,06%	7,06%
2	Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan (ADHB)	10,75%	8,97%	7,64%	7,63%	7,61%	7,59%	7,59%
3	Persentase pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan (ADHB)	10,39%	9,83%	9,66%	9,65%	9,64%	9,62%	9,62%
4	Persentase kontribusi kategori pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	1,13%	1,16%	1,18%	1,20%	1,22%	1,24%	1,24%
5	Persentase pertumbuhan investasi daerah	2,00%	4,00%	6,00%	8,00%	10,00%	12,00%	12,00%
6	Persentase usaha mikro yang mengalami peningkatan skala usaha	1,89%	1,89%	2,02%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%
7	Persentase infrastruktur pekerjaan umum yang memadai	58,32%	63,02%	66,71%	70,37%	74,05%	77,43%	77,43%
8	Indek Kualitas Air	50,00	51,82	53,33	53,33	54,61	55,71	55,71
9	Indek Kualitas Udara	83,48	83,59	83,70	83,84	83,88	84,02	84,02
10	Indek Kualitas Tutupan Lahan	64,90	64,92	64,93	64,93	64,93	64,94	64,94
11	Persentase lingkungan permukiman kumuh	2,63%	1,59%	1,17%	0,75%	0,33%	0,00	0,00
12	Laju pertumbuhan penduduk	0,60	0,60	0,59	0,59	0,58	0,58	0,58
13	Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,09	1,99	1,91	1,86	1,86	1,86	1,86
14	Indek Desa Membangun (IDM)	0,6565	0,6565	0,6650	0,6650	0,6750	0,6750	0,6750
15	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,03*	78,50*	79,00	79,50	80,00	80,50	80,50
16	Nilai SAKIP	BB	A	A	A	A	A	A
17	Nilai Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	Nilai EKPPD	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22
19	Persentase potensi konflik SARA yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	Persentase ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana	73,63%	78,53%	83,86%	89,19%	94,52%	100%	100%
21	Indek Pendidikan	54,44	54,71	54,86	55,00	55,15	55,30	55,30





No.	Indikator	Kondisi Awal RPJMD 2017	Target Capaian 2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir RPJMD
22	Indek Kesehatan	70,83	71,66	72,11	72,43	72,81	73,33	73,33
23	Status Kabupaten Layak Pemuda	N/A	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya
24	Persentase atlet berprestasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	Indek Pembangunan Gender (IPG)	89,63	89,63	89,65	89,67	89,69	89,72	89,72
26	Status Kabupaten Layak Anak	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya

Catatan : “ * “ terdapat perubahan formula perhitungan

Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Bondowoso

No.	Indikator	Kondisi Awal RPJMD 2017	Target Capaian 2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir RPJMD
1	Persentase Pertumbuhan PDRB							
	ADHK	5,03%	5,04%	5,05%	5,06%	5,07%	5,08%	5,08%
	ADHB	8,15%	8,19%	8,20%	8,21%	8,22%	8,23%	8,23%
2	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,27	66,59	67,08	67,12	67,52	67,53	67,53
3	Persentase Tingkat Kemiskinan	14,54%	13,96%	13,66%	13,36%	13,06%	12,76%	12,76%
4	Indek Reformasi Birokrasi (IRB)	80,09*	76,00*	77,50	77,50	78,00	78,50	78,50
5	Persentase Potensi Konflik Sosial Yang Ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	64,75	65,72	66,18	66,58	67,00	67,46	67,46

Catatan : “ * “ terdapat perubahan formula perhitungan



Tabel 8.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Bondowoso

No.	Indikator	Kondisi Awal RPJMD 2017	Target Capaian 2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir RPJMD
I Aspek Kesejahteraan Masyarakat								
1	Persentase pertumbuhan PDRB kategori pertanian (ADHB)	4,52%	6,69%	7,11%	7,09%	7,08%	7,06%	7,06%
2	Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan (ADHB)	10,75%	8,97%	7,64%	7,63%	7,61%	7,59%	7,59%
3	Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan (ADHB)	10,39%	9,83%	9,66%	9,65%	9,64%	9,62%	9,62%
4	Persentase kontribusi kategori pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	1,13%	1,16%	1,18%	1,20%	1,22%	1,24%	1,24%
5	Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,09	1,99	1,91	1,86	1,86	1,86	1,86
6	Indek Desa Membangun (IDM)	0,6565	0,6565	0,6650	0,6650	0,6750	0,6750	0,6750
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,03*	78,50*	79,00	79,50	80,00	80,50	80,50
8	Nilai SAKIP	BB	A	A	A	A	A	A
9	Nilai Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Nilai EKPPD	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22
11	Indek Pendidikan	54,44	54,71	54,86	55,00	55,15	55,30	55,30
12	Indek Kesehatan	70,83	71,66	72,11	72,43	72,81	73,33	73,33
II Aspek Pelayanan Umum								
1	Persentase pertumbuhan investasi daerah	2,00%	4,00%	6,00%	8,00%	10,00%	12,00%	12,00%
2	Persentase usaha mikro yang mengalami peningkatan skala usaha	1,89%	1,89%	2,02%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%
3	Persentase infrastruktur pekerjaan umum yang memadai	58,32%	63,02%	66,71%	70,37%	74,05%	77,43%	77,43%
4	Indek Kualitas Air	50,00	51,82	53,33	53,33	54,61	55,71	55,71
5	Indek Kualitas Udara	83,48	83,59	83,70	83,84	83,88	84,02	84,02
6	Indek Kualitas Tutupan Lahan	64,90	64,92	64,93	64,93	64,93	64,94	64,94
7	Persentase lingkungan permukiman kumuh	2,63%	1,59%	1,17%	0,75%	0,33%	0,00	0,00



No.	Indikator	Kondisi Awal RPJMD 2017	Target Capaian 2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir RPJMD
8	Laju pertumbuhan penduduk	0,60	0,60	0,59	0,59	0,58	0,58	0,58
9	Persentase ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana	73,63%	78,53%	83,86%	89,19%	94,52%	100%	100%
10	Status Kabupaten Layak Pemuda	N/A	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya
11	Persentase atlet berprestasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Indek Pembangunan Gender (IPG)	89,63	89,63	89,65	89,67	89,69	89,72	89,72
13	Status Kabupaten Layak Anak	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya
III Aspek Daya Saing								
1	Persentase potensi konflik SARA yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Catatan : “ * “ terdapat perubahan formula perhitungan



MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RANCANGAN RPJMD KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018-2023



PLENO



DISKUSI KELOMPOK
SOSIAL & BUDAYA



DISKUSI KELOMPOK
INFRASTRUKTUR &
PRASARANA WILAYAH



DISKUSI KELOMPOK
EKONOMI



PENGUNJUNG WISATAWAN
DILARANG TURUN KE KAWAH
BERBAHAYA
VISITORS ARE PROHIBITED
GOING DOWN IN CRATER
DANGEROUS



BAB IX PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 memuat perencanaan pembangunan berdasarkan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bondowoso. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bondowoso sehingga arah pembangunan dan target-target kinerja yang telah ditetapkan harus dipahami dan menjadi ukuran bagi setiap pembangunan yang akan dilakukan.

9.1 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan tahapan pembangunan pada tahun 2024, maka ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut :

1. Pada saat RPJMD Tahun 2023-2028 belum ditetapkan maka penyusunan RKPD dan RAPBD tahun 2024 tetap berpedoman pada RPJMD Tahun 2018-2023 dengan prioritas pencapaian indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan hingga akhir periode RPJMD dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025.
2. Penyusunan RKPD dan RAPBD tahun 2024 juga memperhatikan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah masa bakti Tahun 2023-2028.



9.2 Kaidah Pelaksanaan

Dengan tersusunnya dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 ini maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso, dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), RAPBD, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah dan merupakan tolok ukur kinerja Kepala Daerah.
2. Renstra Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahunan yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

3. Perangkat Daerah wajib melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai tugas dan fungsinya.
4. Terhadap perangkat daerah yang baru dibentuk setelah RPJMD ini ditetapkan, sebelum penetapan Perubahan RPJMD melalui peraturan daerah, pelaksanaan program, kegiatan dan target indikator kinerjanya tetap mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023.

BUPATI BONDOWOSO



SALWA ARIFIN



PEMBAHASAN



RANCANGAN

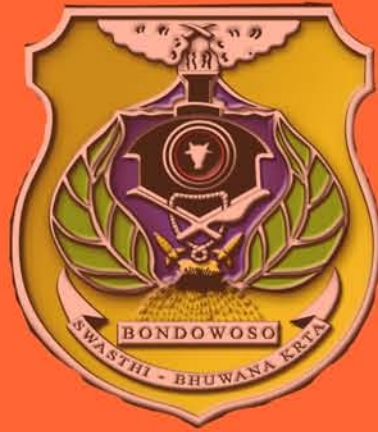


AKHIR



**RPJMD KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN 2018-2023**





*Terwujudnya Bondowoso
Mandiri Ekonomi, Lestari,
Sejahtera, Adil & Terdepan
Dalam Bingkai Iman & Takwa*

